

KAJIAN ANALISIS BELANJA DAN PENDAPATAN PUBLIK

(PUBLIC EXPENDITURE AND REVENUE ANALYSIS/PERA)

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2025

KAJIAN ANALISIS BELANJA DAN PENDAPATAN PUBLIK

*(PUBLIC EXPENDITURE AND REVENUE
ANALYSIS/PERA)*

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
LPEM FEB UI

Maret 2025

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	7
Daftar Singkatan	8
1. Tentang Kajian PERA.....	10
2. Potret Sosial dan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur: Antara Tantangan dan Peluang ...	12
2.1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
2.2. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur	13
2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	16
2.4. Kondisi Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	19
2.5. Peluang dan Tantangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	21
3. Menakar Kualitas Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur	23
3.1. Keselarasan dengan Tujuan Nasional dan Kebijakan Fiskal	23
3.2. Partisipasi Inklusif dan Integrasi GEDSI	25
3.3. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti dan Akuntabel	30
3.4. Koordinasi dan Kapasitas Institusi untuk Public Finance Management (PFM) yang Efektif..	31
4. Analisis Pendapatan dan Belanja.....	33
4.1. Menggali Kapasitas dan Potensi Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	33
4.2. Telaah Struktur Belanja dan Pembiayaan Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur	42
4.3. Analisis Pembiayaan Daerah	49
5. Telaah Kualitas Belanja di Provinsi Nusa Tenggara Timur	51
5.1. Pendidikan	51
5.2. Kesehatan	69
5.3. Infrastruktur.....	92
5.4. Perlindungan Sosial.....	110
5.5. Pariwisata.....	126
6. Kesimpulan dan Rekomendasi	132
6.1. Kesimpulan	132
6.2. Rekomendasi	135
6.3. Rekomendasi bagi Mitra Pembangunan	139
Daftar Pustaka	141
Lampiran	142

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Metode Kajian.....	11
Gambar 2.1	Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur	12
Gambar 2.2	Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi di Indonesia Tahun 2023	13
Gambar 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi di Indonesia Tahun 2023	14
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2023	14
Gambar 2.5	PDRB ADH Konstan Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2023	14
Gambar 2.6	Kontribusi 5 Sektor terbesar terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 –2023	15
Gambar 2.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2023	15
Gambar 2.8	<i>Dependency Ratio</i> Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2023	17
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.....	17
Gambar 2.10	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	18
Gambar 2.11	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (formal/informal)	18
Gambar 2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2023..	18
Gambar 2.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2023.....	19
Gambar 2.14	Rasio Gini seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2023.....	20
Gambar 2.15	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2023	20
Gambar 4.1	Realisasi Pendapatan Nusa Tenggara Timur (2018-2023)	33
Gambar 4.2	Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Timur	33
Gambar 4.3	Sumber Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	34
Gambar 4.4	Sumber Pendapatan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur.....	34
Gambar 4.5	Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur	35
Gambar 4.6	Komposisi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur	35
Gambar 4.7	Komposisi PAD Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur	35
Gambar 4.8	Rasio PAD Terhadap PDRB	36
Gambar 4.9	Nilai PAD dan Rasio PAD terhadap PDRB Tahun 2023.....	36
Gambar 4.10	Rasio Kemandirian Daerah Nusa Tenggara Timur	36
Gambar 4.11	PDRB Per Kapita dan PAD Provinsi di Indonesia	37
Gambar 4.12	PAD dan Prediksi PAD Menggunakan Metode <i>Fixed Effect</i>	37
Gambar 4.13	Realisasi Penerimaan Pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur	38
Gambar 4.14	Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	38
Gambar 4.15	Proporsi Penerimaan Pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	39
Gambar 4.16	Proporsi Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur	39
Gambar 4.17	<i>Tax Buoyancy</i> Nusa Tenggara Timur	40
Gambar 4.18	<i>Tax Ratio</i> Nusa Tenggara Timur	40
Gambar 4.19	Nilai dan Komposisi Pendapatan Transfer Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	41

Gambar 4.20	Nilai dan Komposisi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur	41
Gambar 4.21	Realisasi Belanja (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar) 2014-2023	42
Gambar 4.22	Belanja Nusa Tenggara Timur Per Kapita (Juta Rupiah) 2014-2023	43
Gambar 4.23	Realisasi Belanja Daerah (Konsolidasi) Berdasarkan Jenis (Rp Miliar).....	43
Gambar 4.24	Rasio Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur terhadap PDRB (%) 2014-2023.....	44
Gambar 4.25	Rasio Pertumbuhan Belanja (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur dan Pertumbuhan PDRB 2016-2023	44
Gambar 4.26	Belanja Riil Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar), Tahun 2014 – 2023 (tahun dasar).....	45
Gambar 4.27	Rasio PAD terhadap Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Perlindungan Sosial, 2023	45
Gambar 4.28	Belanja Daerah (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Fungsi, 2014-2023 (Rp triliun).....	46
Gambar 4.29	Belanja Masing-masing Kota dan Kabupaten Berdasarkan Fungsi (Rp Miliar), 2023.	47
Gambar 4.30	Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja masing-masing Kota dan Kabupaten (%), 2023	47
Gambar 4.31	Belanja per Kapita per Fungsi Provinsi di Indonesia, 2023	49
Gambar 4.32	Realisasi Penerimaan Pembiayaan (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar), 2014-2023	49
Gambar 4.33	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar), 2014-2023	50
Gambar 5.1	APM Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2023	52
Gambar 5.2	APM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan Provinsi Lain dan Nasional	53
Gambar 5.3	Rasio Murid-Guru Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023	53
Gambar 5.4	Rasio Murid-Guru Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan Pembandingnya	54
Gambar 5.5	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023	54
Gambar 5.6	Rasio Murid-Guru 2021-2023	56
Gambar 5.7	Ruang Kelas Kondisi Baik, 2021-2023	57
Gambar 5.8	Pengeluaran Pendidikan <i>Out of Pocket</i> Per Kapita 8 Provinsi SKALA Tahun 2023	58
Gambar 5.9	Pengeluaran Pendidikan <i>Out of Pocket</i> Per Kapita Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	58
Gambar 5.10	Disagregasi Pengeluaran Pendidikan <i>Out of Pocket</i> Per Kapita Berdasarkan Kuintil Pendapatan NTT Tahun 2023.....	59
Gambar 5.11	Proporsi Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah pada Provinsi SKALA dan Nasional Tahun 2021	59
Gambar 5.12	Belanja Pendidikan NTT	60
Gambar 5.13	Jenis Belanja Pendidikan NTT, 2023	61
Gambar 5.14	Jenis Belanja Pendidikan NTT, 2023	62
Gambar 5.15	Belanja Program Tiap Jenjang Pendidikan di NTT, 2021-2023	63
Gambar 5.16	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Disabilitas NTT, 2023.....	68
Gambar 5.17	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas (tahun) Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023.....	68
Gambar 5.18	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023.....	70
Gambar 5.19	Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota, NTT, dan Nasional tahun 2021-2023.....	72

Gambar 5.20	Angka Kematian Ibu (LF SP2020)	73
Gambar 5.21	Angka Kematian Bayi Berdasarkan Provinsi (AKB) (LF SP2020)	74
Gambar 5.22	Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan Kabupaten/Kota (LF SP2020)	74
Gambar 5.23	Perbandingan Angka Morbiditas Kabupaten/Kota tahun 2019 dan 2023 (%)	75
Gambar 5.24	Jumlah Puskesmas dan Jumlah Rumah Sakit (RS) di NTT 2018-2023	76
Gambar 5.25	Pola Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota	77
Gambar 5.26	Jumlah Dokter di Provinsi NTT tahun 2021-2023	78
Gambar 5.27	Distribusi Proporsi Tenaga Dokter Berdasarkan Provinsi dan Capaian Rasio Tenaga Dokter Tahun 2023	78
Gambar 5.28	Jumlah Penduduk Disabilitas dan Non Disabilitas Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota	79
Gambar 5.29	Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah	80
Gambar 5.30	Pemanfaatan Layanan Rawat Jalan terhadap Total Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota	81
Gambar 5.31	Pemanfaatan Layanan Rawat Inap terhadap Total Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota	82
Gambar 5.32	Pengeluaran OOP untuk Perawatan Kesehatan di Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota	83
Gambar 5.33	OOP untuk Perawatan Kesehatan Per Kapita Per Bulan di Provinsi NTT	83
Gambar 5.34	Pola Pemanfaatan Layanan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota	84
Gambar 5.35	Belanja Kesehatan Nusa Tenggara Timur	85
Gambar 5.36	Jenis Belanja Kesehatan Nusa Tenggara Timur, 2023	85
Gambar 5.37	Belanja Kesehatan Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Program	86
Gambar 5.38	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan ALH yang Terakhir adalah Tenaga Kesehatan Terlatih Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Penyandang Disabilitas NTT, 2023	91
Gambar 5.39	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan ALH yang Terakhir adalah Tenaga Kesehatan Terlatih Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023	92
Gambar 5.40	Kondisi RT dengan Sumber Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Akses Listrik NTT, 2014 - 2023	94
Gambar 5.41	Sumber Air Minum Rumah Tangga NTT, 2023	95
Gambar 5.42	Kondisi Jalan NTT, 2014 - 2023	96
Gambar 5.43	Persentase Desa yang Memiliki Irigasi NTT, 2021	97
Gambar 5.44	Pengeluaran Biaya Transportasi NTT, 2023 (Rp Kapita Per Bulan)	99
Gambar 5.45	Analisis <i>Mapping</i> Layanan Infrastruktur NTT, 2023	99
Gambar 5.46	Belanja Infrastruktur NTT, 2014 - 2023	100
Gambar 5.47	Proporsi Belanja Infrastruktur Tingkat Provinsi NTT, 2023	101
Gambar 5.48	Proporsi Belanja Infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota NTT, 2023	102
Gambar 5.49	Proporsi Belanja Infrastruktur Berdasarkan Program Tingkat Provinsi NTT, 2023 ..	103
Gambar 5.50	Proporsi Belanja Infrastruktur Berdasarkan Program Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi NTT, 2023	104

Gambar 5.51	Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sumber Air Memadai Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Disabilitas NTT, 2023	109
Gambar 5.52	Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sumber Air Memadai Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023	109
Gambar 5.53	Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Disabilitas NTT, 2023	110
Gambar 5.54	Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023	110
Gambar 5.55	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tingkat Provinsi NTT, 2014 – 2023	112
Gambar 5.56	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota NTT, 2023	112
Gambar 5.57	Rasio Gini seluruh Provinsi di Indonesia, 2023	113
Gambar 5.58	Indeks Ketimpangan Gender NTT, 2018 - 2023	114
Gambar 5.59	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah NTT, 2023	114
Gambar 5.60	Rata-rata Nominal Bantuan Sosial Tunai Reguler NTT, 2023 (dalam Ribu Rupiah)..	115
Gambar 5.61	Rata-rata Nominal Bantuan Sosial Tunai Non-Reguler NTT, 2023 (dalam Ribu Rupiah)	115
Gambar 5.62	Analisis Mapping Layanan Perlindungan Sosial NTT, 2023.....	117
Gambar 5.63	Belanja Perlindungan Sosial NTT, 2014 - 2023	118
Gambar 5.64	Proporsi Belanja Perlindungan Sosial Tingkat Provinsi NTT, 2023	119
Gambar 5.65	Proporsi Belanja Infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota NTT, 2023.....	120
Gambar 5.66	Proporsi Belanja Perlindungan Sosial Berdasarkan Program Provinsi NTT, 2023	121
Gambar 5.67	Rata-rata Persentase Pengeluaran Makanan Terhadap Total Pengeluaran Per Rumah Tangga NTT, 2023.....	126
Gambar 5.68	Rata-rata Persentase Pengeluaran Makanan Terhadap Total Pengeluaran Per Rumah Tangga Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023.....	126
Gambar 5.69	Jumlah Tamu Hotel Mancanegara dan Domestik di NTT, 2023 (Jiwa)	129
Gambar 5.70	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Hotel Bintang NTT, 2023 (Hari)	129
Gambar 5.71	Belanja Program Pariwisata NTT, 2014 - 2023	130
Gambar 5.72	Proporsi Belanja Program Pariwisata Tingkat Provinsi NTT, 2023	130
Gambar 5.73	Proporsi Belanja Program Pariwisata Tingkat Kabupaten/Kota NTT, 2023	131

Daftar Tabel

Tabel 2.1.	Kondisi Demografi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023	16
Tabel 3.1	Capaian Indikator Makroekonomi	24
Tabel 5.1	Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Pendidikan.....	64
Tabel 5.2	Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Pendidikan.....	65
Tabel 5.3	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Non pegawai terhadap Output Pendidikan.....	67
Tabel 5.4	Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Kesehatan.....	87
Tabel 5.5	Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Kesehatan	89
Tabel 5.6	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Output Kesehatan.....	90
Tabel 5.7	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Outcome Kesehatan	91
Tabel 5.8	Analisis Disparitas Infrastruktur NTT, 2023	97
Tabel 5.9	Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Infrastruktur	105
Tabel 5.10	Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Infrastruktur	106
Tabel 5.11	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Output Infrastruktur..	108
Tabel 5.12	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap <i>Outcome</i> Infrastruktur	108
Tabel 5.13	Analisis Disparitas Perlindungan Sosial NTT, 2023	116
Tabel 5.14	Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Perlindungan Sosial .	122
Tabel 5.15	Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Perlindungan Sosial	123
Tabel 5.16	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Output Perlindungan Sosial	125
Tabel 5.17	Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Outcome Perlindungan Sosial	125
Tabel 5.18	Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota di NTT, 2023	128

Daftar Singkatan

3T	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
AHH	Angka Harapan Hidup
AKB	Angka Kematian Bayi
AKI	Angka Kematian Ibu
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APM	Angka Partisipasi Murni
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bimtek	Bimbingan Teknis
BLK	Balai Latihan Kerja
BLU	Badan Layanan Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
COVID-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
CRS	<i>Constant Returns to Scale</i>
CSO	<i>Civil Society Organization</i>
DEA	<i>Data Envelopment Analysis</i>
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
FGD	<i>Focus Group Discussions</i>
FKP	Forum Konsultasi Publik
GEDSI	<i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion</i>
GERBOS EMAS	Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
GO TAAT	Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting
HGHS	<i>High Growth High Spending</i>
HKPD	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
HLS	Harapan Lama Sekolah
IKG	Indeks Ketimpangan Gender
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KFR	Kajian Fiskal Regional
LLPDYS	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
LPEM FEB UI	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTP	Nilai Tukar Petani
NTT	Nusa Tenggara Timur
OOP	<i>Out of Pocket</i>
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PDRB ADHK	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
PERA	<i>Public Expenditure and Revenue Analysis</i>
PFM	<i>Public Finance Management</i>
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PLTA	Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PUG	Pengarusutamaan Gender
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Q	Kuintil
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	Rata-Rata Lama Sekolah
RO	Rincian Output
RPD	Rencana Pembangunan Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RS	Rumah Sakit
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Air
SDI	Satu Data Indonesia
SDM	Sumber Daya Manusia
SIGA	Data Sistem Gender dan Anak
SIPD	Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SKALA	Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SPAM	Sistem Pengelolaan Air Minum
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	Standar Pelayanan Minimum
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TB	<i>Tuberculosis</i>
TPPS	Tim Percepatan Penurunan Stunting
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
UHC	<i>Universal Health Coverage</i>
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
UKM	Upaya Kesehatan Masyarakat
UKP	Upaya Kesehatan Perorangan
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNDP	United Nations Development Programme
UU	Undang-Undang
WPP	Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan

1. Tentang Kajian PERA

Pengelolaan keuangan publik daerah di Indonesia berlandaskan kepada ketentuan-ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang memiliki empat pilar utama, yaitu: (a) mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal, (b) penguatan *local taxing power*, (c) peningkatan kualitas belanja daerah, (d) harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. UU HKPD disusun berdasarkan catatan-catatan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui upaya peningkatan kemandirian fiskal/*local taxing power* dan perbaikan kualitas belanja/*spending better* yang juga mencakup belanja wajib/*mandatory spending*.

Di tengah urgensi pelaksanaan UU HKPD dan semakin kompleksnya tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, kebutuhan akan pengelolaan keuangan publik yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi semakin mendesak, dibutuhkan kajian komprehensif yang dapat memberikan gambaran bagaimana pengelolaan keuangan suatu daerah dilakukan. Kajian Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (*Public Expenditure and Revenue Analysis* - PERA) hadir sebagai respons atas kebutuhan ini, melalui pendekatan analitis yang bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menganalisis pola pengeluaran dan pendapatan daerah secara mendetail, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area di mana pengeluaran dapat ditingkatkan atau dioptimalkan untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Analisis ini juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana dana publik digunakan. Hal ini mendorong akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Selain itu, data dan wawasan dari kajian PERA dapat berguna untuk perencanaan anggaran yang lebih baik. Pemerintah daerah dapat merancang anggaran yang realistis dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga memastikan alokasi sumber daya yang tepat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kajian PERA juga bermanfaat untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan atau inefisiensi dalam pengeluaran dan penerimaan daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai keuangan daerah, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang meningkatkan kinerja fiskal, mengelola anggaran dengan lebih efektif, dan menjaga keseimbangan fiskal yang sehat.

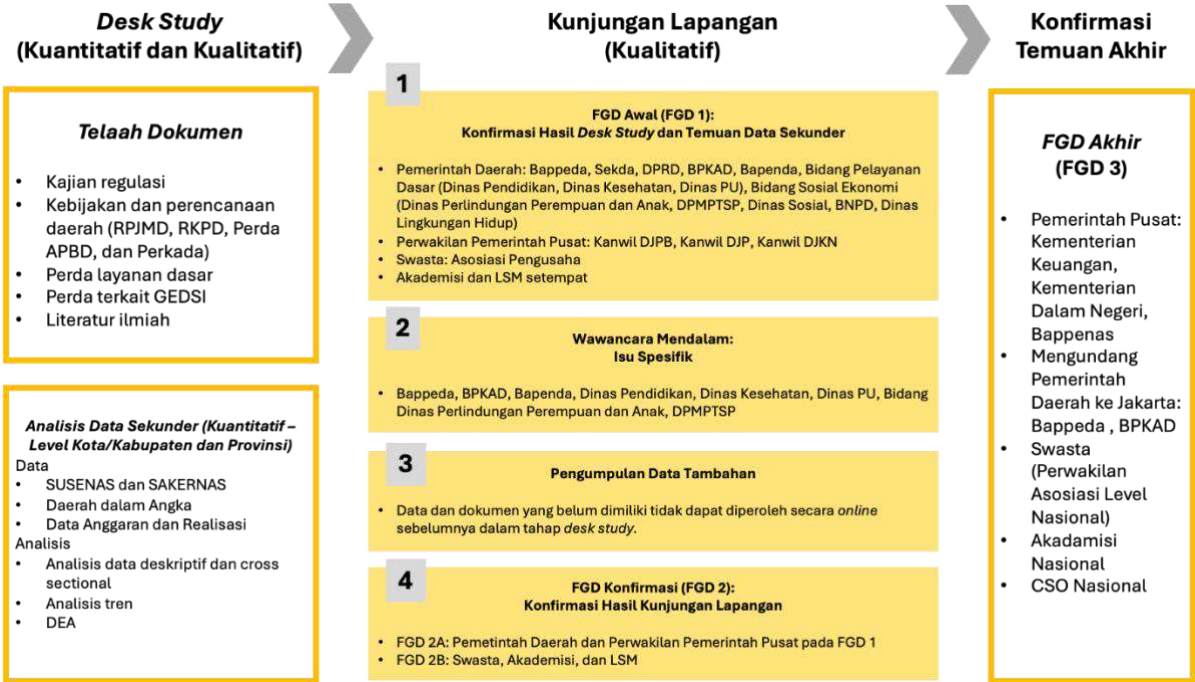
Dengan demikian, hasil dari analisis PERA ini dapat menjadi dasar untuk melakukan reformasi kebijakan di tingkat daerah. Dalam hal peningkatan sistem perpajakan lokal maupun efisiensi pengeluaran, kajian ini memberikan bukti empiris untuk mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan bagi pembangunan yang lebih baik. Melalui PERA, pemerintah daerah juga dapat memantau dan mengevaluasi program-program yang sedang berjalan, melakukan evaluasi kinerja program secara objektif dan penyesuaian strategi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

LPEM FEB UI berkolaborasi dengan SKALA melakukan kajian PERA pada delapan provinsi area kerja SKALA, yaitu Aceh, NTB, NTT, Gorontalo, Maluku, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Laporan ini merupakan kajian yang secara spesifik memberikan analisis PERA mengenai kondisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kajian ini memiliki tujuan spesifik untuk mendukung perencanaan anggaran yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran, serta mendorong reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat daerah.

Kajian PERA menggunakan pendekatan penelitian, baik kuantitatif, kualitatif, maupun campuran (*mix method*), sesuai dengan kebutuhan. Metode kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dokumen kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah, serta menganalisis implementasi *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Teknik *regulatory mapping* diterapkan dalam penelaahan dokumen ini untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai alur proses perencanaan dan penganggaran. Teknik ini membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses penganggaran serta memberikan pandangan holistik tentang bagaimana kebijakan anggaran diterapkan. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh dari narasumber melalui *Focus Group Discussions* (FGD) dan wawancara mendalam. FGD dan wawancara mendalam melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi.

Pendekatan kuantitatif melengkapi analisis kualitatif dengan menyediakan data empiris yang dapat diukur, untuk menganalisis tren pengeluaran dan pendapatan publik, serta mengidentifikasi pola-pola statistik yang relevan. Kombinasi dari data kualitatif dan kuantitatif memberikan pandangan yang lebih lengkap dan mendalam tentang isu-isu yang dikaji.

Adapun tahapan dan metode penyusunan kajian ini ditunjukkan pada Gambar 1.1.



1Gambar 1.1 Metode Kajian

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

2. Potret Sosial dan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur: Antara Tantangan dan Peluang

Bab ini akan membahas potret sosial dan ekonomi dan melakukan identifikasi tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.1. Profil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan ibukota adalah Kota Kupang memiliki 5 pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata, serta 609 pulau lainnya. Di antara lima pulau besar tersebut, Pulau Timor menjadi pulau terluas dengan luas mencapai 14.088,60 km². Secara umum, luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 46.446,64 km². Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan secara langsung dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudera Hindia dan Negara Australia di sebelah selatan, Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat dan Negara *Republik Demokratik Timor Leste* (RSTL) di sebelah timur. Perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste berbatasan secara langsung dengan tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Secara administratif, Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, 315 kecamatan, 305 kelurahan dan 3.137 desa dengan Kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan terluas dan Kota Kupang menjadi wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di daerah lereng atau lahan dengan kemiringan <40% serta terdapat daerah dengan kemiringan lahan >40% yang tidak dapat dikelola dan berpotensi mengalami erosi tinggi yang disebabkan oleh degradasi sumber daya lahan. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tergolong daerah yang kering dimana hanya terdapat 4 bulan dalam satu tahun yang menjadikan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif basah yaitu bulan Desember – Maret.



Gambar 2.1 Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.2. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk daerah dengan kategori *Low growth Low spending (LGLS)* atau provinsi yang memiliki belanja daerah yang rendah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah (KEM PPKF, 2025). Provinsi dalam kategori direkomendasikan untuk melakukan peningkatan kapasitas fiskal yang akan mendorong belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya belanja daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengakibatkan rendahnya indeks pelayanan publik. Adapun provinsi lain yang juga termasuk dalam kategori ini adalah Provinsi Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,42, sedikit berada di bawah Skor Nasional dengan skor 3,44 dan di bawah Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu. Indeks ini digunakan untuk menggambarkan daya saing daerah untuk menarik investasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Jika dibandingkan dengan kondisi nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kondisi yang baik pada pilar pasar produk (pilar 7 dengan skor 4,92), pilar sistem keuangan (pilar 9 dengan skor 3,03) dan pilar kapabilitas inovasi (pilar 12 dengan skor 3,39). Di samping itu, juga terdapat skor yang lebih rendah dibandingkan skor nasional pada pilar institusi (pilar 1 dengan skor 4,11), pilar adopsi TIK (pilar 3 dengan skor 3,00) dan pilar dinamisme bisnis (pilar 11 dengan skor 2,64). **Gambar 2.2** menunjukkan peta sebaran skor Indeks Daya Saing Daerah seluruh provinsi di Indonesia.



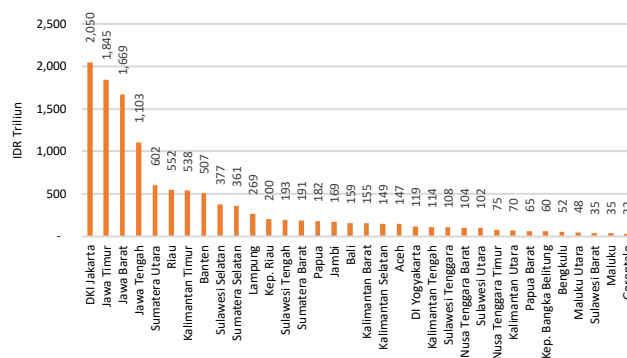
Gambar 2.2 Peta Sebaran Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi di Indonesia Tahun 2023

Sumber: BRIN (2024)

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai PDRB ADHK tahun 2023 sebesar Rp75,25 triliun berada di bawah Provinsi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. Jika dibandingkan dengan kondisi provinsi sekitar seperti Maluku dan Maluku Utara, nilai PDRB ADHK Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih baik (Gambar 2.3).

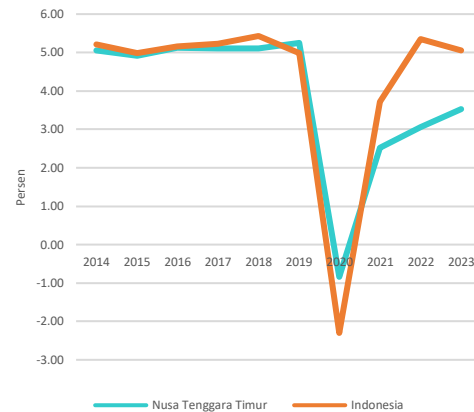
Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 3,52% meningkat 0,47 persen poin dibandingkan tahun 2022. Secara tren tahunan, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan cepat di tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021-2023 masih lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir yaitu 3,88%, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi (tahun 2014 -2019) sebesar 5,09% dan lebih tinggi rata-rata pertumbuhan setelah pandemi (tahun 2021 – 2023) sebesar 3,03% (Gambar 2.4). Hal ini

menunjukkan bahwa provinsi ini masih mengalami tantangan besar untuk kembali ke tingkat pertumbuhan optimalnya sebagai periode sebelum Covid-19.



Gambar 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi di Indonesia Tahun 2023

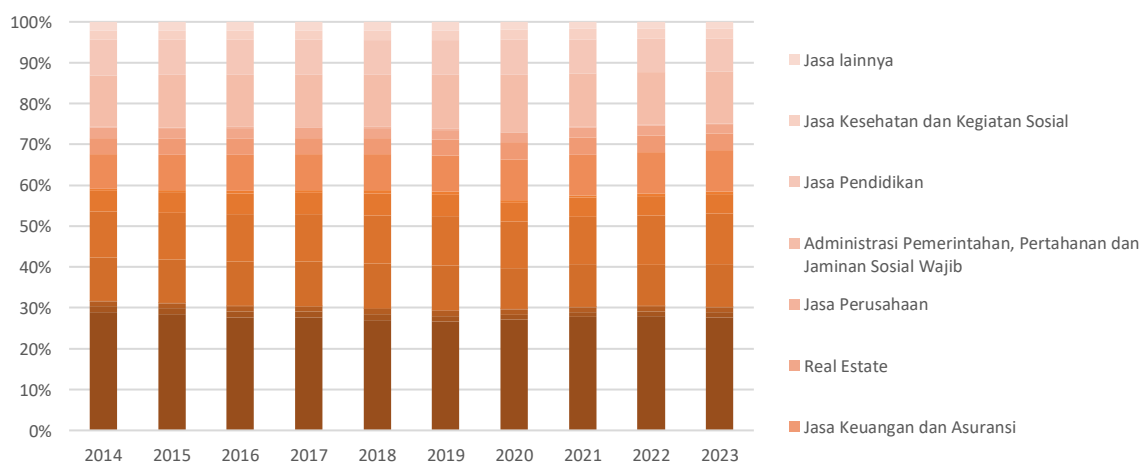
Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2023

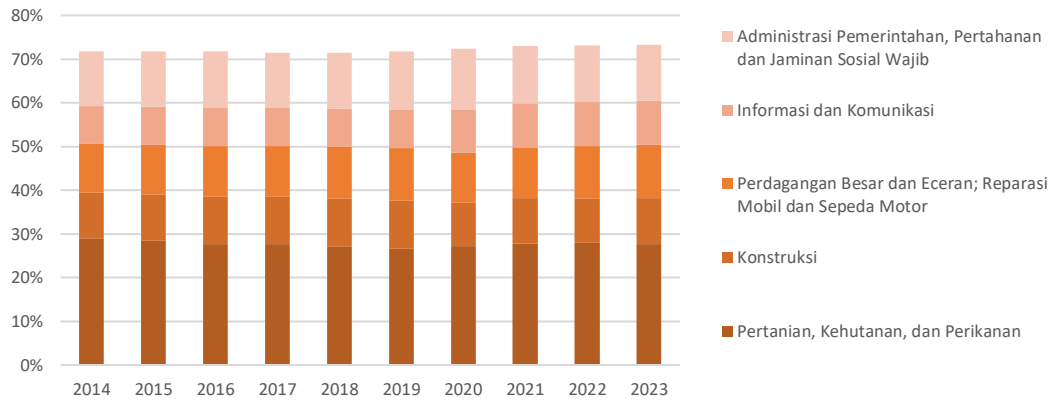
Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur ditopang oleh kontribusi besar dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang secara konsisten menjadi kontributor utama terhadap PDRB ADHK dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2023, sektor ini berkontribusi sebesar 27,7% terhadap PDRB ADHK Provinsi Nusa Tenggara Timur (Gambar 2.5), diikuti oleh sektor konstruksi. Secara lebih rinci, rata-rata 72% PDRB ADHK NTT berasal dari lima sektor utama (Gambar 2.6), yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor administrasi pemerintahan. Meskipun sektor pertanian secara konsisten menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB ADHK Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,15%.



Gambar 2.5 PDRB ADH Konstan Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2023

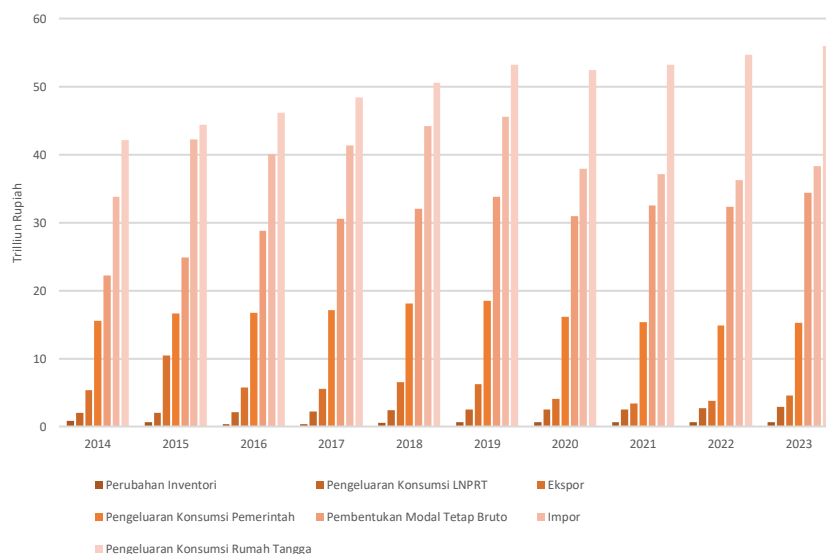
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 2.6 Kontribusi 5 Sektor terbesar terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 –2023

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, nilai PDRB ADHK Pengeluaran Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 didominasi oleh konsumsi rumah tangga sebesar 74,3% atau Rp55,9 triliun dari total PDRB (Gambar 2.7). Ketergantungan yang tinggi pada komponen tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengeluaran lainnya yang mendominasi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Meskipun perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, namun pertumbuhan yang tinggi terjadi pada ekspor dengan pertumbuhan sebesar 23,39% pada tahun 2023. Komoditas terbesar yang berhasil di ekspor oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 terdiri dari olahan dari tepung sebesar US\$6.456,80, perabotan, penerangan rumah sebesar US\$6.007,97 dan susu, mentega telur sebesar US\$4.999,26. Pertumbuhan ekspor yang pesat tersebut mengindikasikan adanya peningkatan daya saing produk lokal di pasar luar daerah maupun internasional yang dapat menjadi peluang bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur kedepannya.



Gambar 2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

2.3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

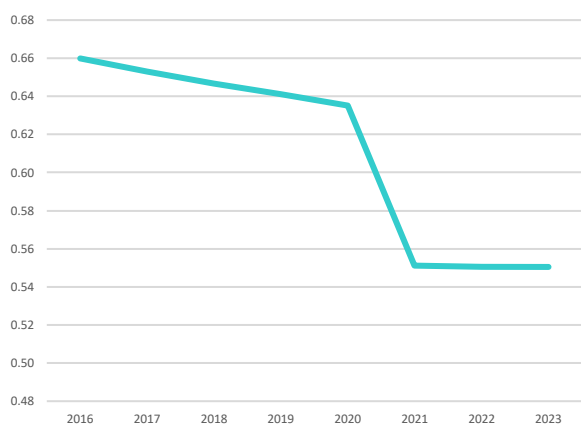
Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar tidak merata di setiap kabupaten/kota. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 5.569.068 jiwa yang tersebar tidak merata dengan sebaran penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan mencapai 8,52% dan Kota Kupang mencapai 8,38% dari total penduduk sedangkan sebaran penduduk di Kabupaten Sumba Tengah hanya sebesar 1,63% dan Kabupaten Sabu Raijua sebesar 1,68% dari total penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kota Kupang sebagai pusat ekonomi menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2023 mencapai 2.929 jiwa/km² sedangkan Kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sebesar 37 jiwa/km². Perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang signifikan antara Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur mencerminkan adanya disparitas dalam distribusi populasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Perbandingan *sex ratio* di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 100. Kondisi demografi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 ditunjukkan oleh Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kondisi Demografi Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
Sumba Barat	152	2,74%	201	1,81	105
Sumba Timur	255	4,59%	37	1,56	105
Kupang	377	6,77%	73	1,03	103
Timor Tengah Selatan	475	8,52%	121	1,51	99
Timor Tengah Utara	271	4,87%	103	1,58	101
Belu	231	4,15%	205	2,13	100
Alor	222	3,98%	76	1,64	98
Lembata	141	2,54%	111	1,44	94
Flores Timur	288	5,18%	165	1,48	97
Sikka	335	6,02%	201	1,49	95
Ende	279	5,00%	134	1,04	96
Ngada	172	3,08%	99	1,41	97
Manggarai	329	5,90%	245	1,82	100
Rote Ndao	151	2,70%	117	1,68	101
Manggarai Barat	271	4,86%	87	2,03	101
Sumba Tengah	91	1,63%	51	2,10	105
Sumba Barat Daya	322	5,78%	233	2,17	105
Nagekeo	166	2,98%	119	1,42	98
Manggarai Timur	291	5,22%	122	1,97	102
Sabu Raijua	93	1,68%	202	1,61	104
Malaka	191	3,43%	172	1,39	98
Kota Kupang	467	8,38%	2929	1,93	101
Provinsi Nusa Tenggara Timur	5569	100%	120	1,64	100

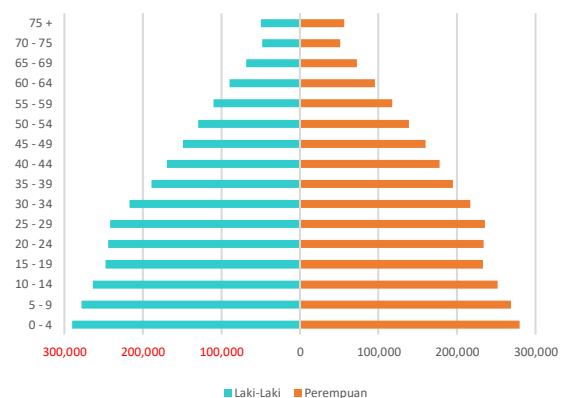
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami tren penurunan rasio ketergantungan atau *dependency ratio* dengan rasio ketergantungan pada tahun 2023 sebesar 55,06 (Gambar 2.8). Angka ini turun 0,02% dari tahun 2022. Tren penurunan rasio ketergantungan menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) dibandingkan penduduk usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) yang juga menggambarkan potensi bonus demografi. Kondisi ini juga tergambar dalam piramida penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 (Gambar 2.9). Adanya bonus demografi dapat menjadi peluang bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memaksimalkan sumber daya yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja yang juga disertai oleh kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan investasi di sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.



Gambar 2.8 Dependency Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2023

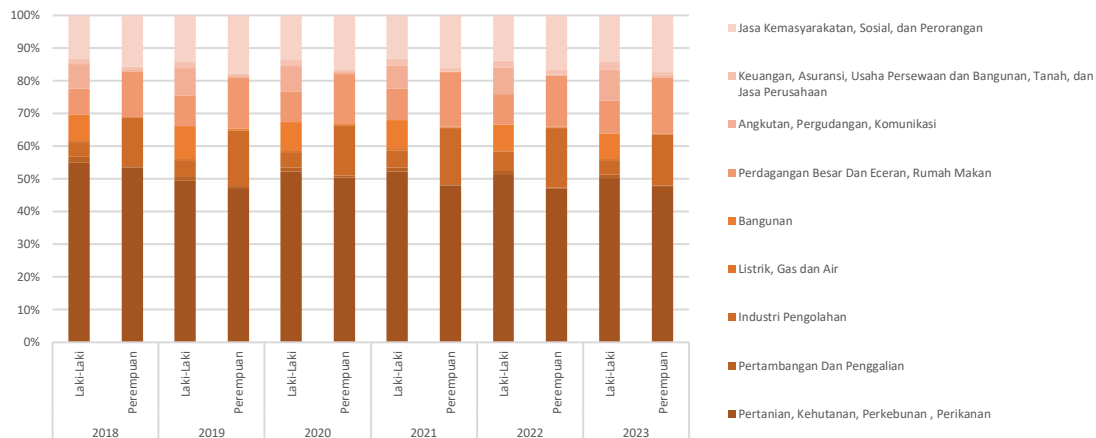
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 2.9 Piramida Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

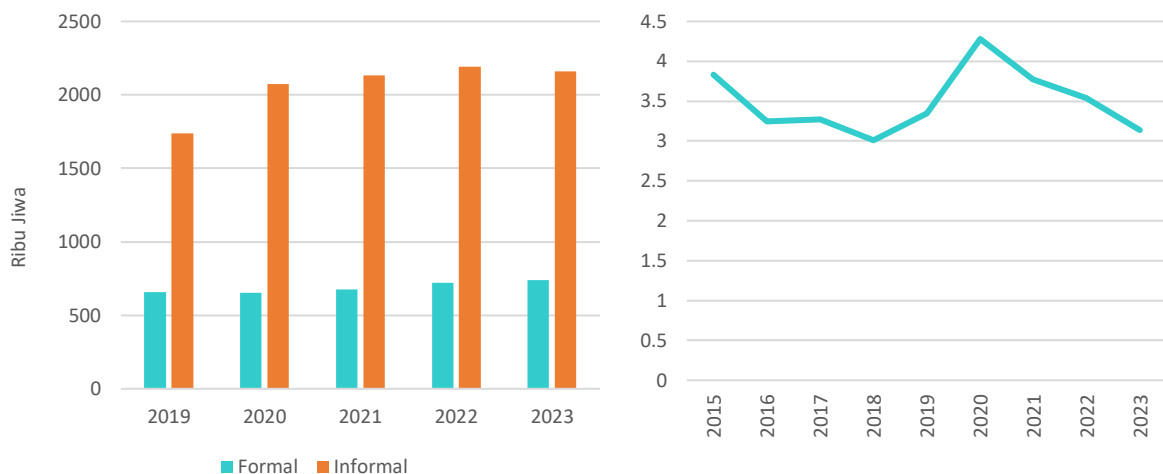
Pada aspek ketenagakerjaan, sejalan dengan sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB ADHK Provinsi Nusa Tenggara Timur, mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja pada sektor ini tahun 2023 mencapai 1,42 juta jiwa, disusul oleh masyarakat yang bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 452 ribu jiwa dan sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 384 ribu jiwa. Disamping itu, meskipun sektor listrik, gas dan air bukan menjadi sebagai penyerap terbanyak tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 58,1%, dari 8,6 ribu jiwa pada tahun 2022 menjadi 13,7 ribu jiwa pada tahun 2023.



Gambar 2.10 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Mayoritas penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur juga bekerja dengan status pekerjaan informal yang terdiri dari pekerja keluarga, berusaha sendiri dan berusaha dengan buruh tidak tetap sebesar 74,5% atau sebanyak 2,1 juta penduduk dari total penduduk yang bekerja (Gambar 2.11). Penduduk yang bekerja sebagai pekerja informal terbanyak berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang dan Manggarai Timur sedangkan penduduk yang bekerja secara formal terbanyak berada di Kota Kupang, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Kupang. Tingginya proporsi pekerja informal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencerminkan struktur ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil, yang umumnya memiliki produktivitas rendah, pendapatan yang tidak stabil, serta minim perlindungan tenaga kerja.



Gambar 2.11 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (formal/informal)

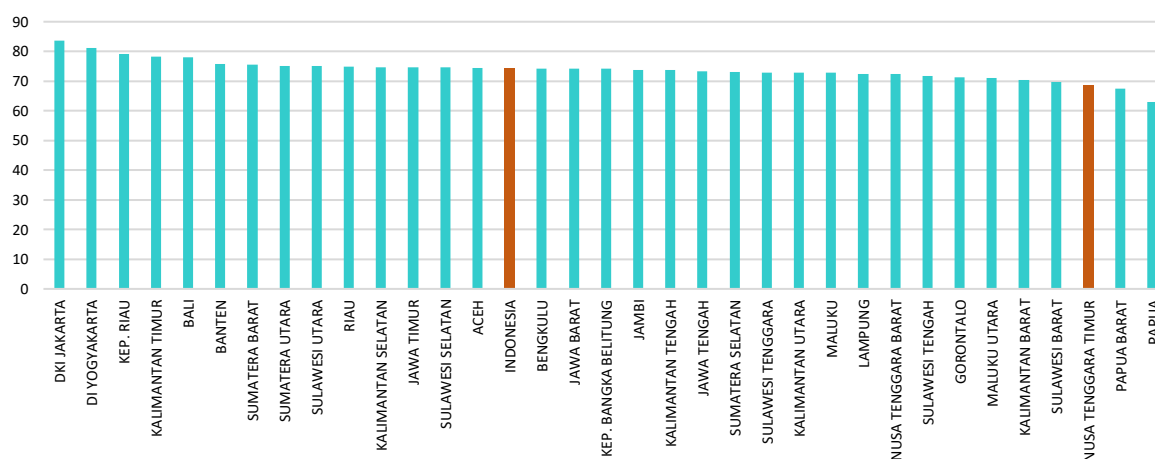
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Gambar 2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

2.4. Kondisi Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

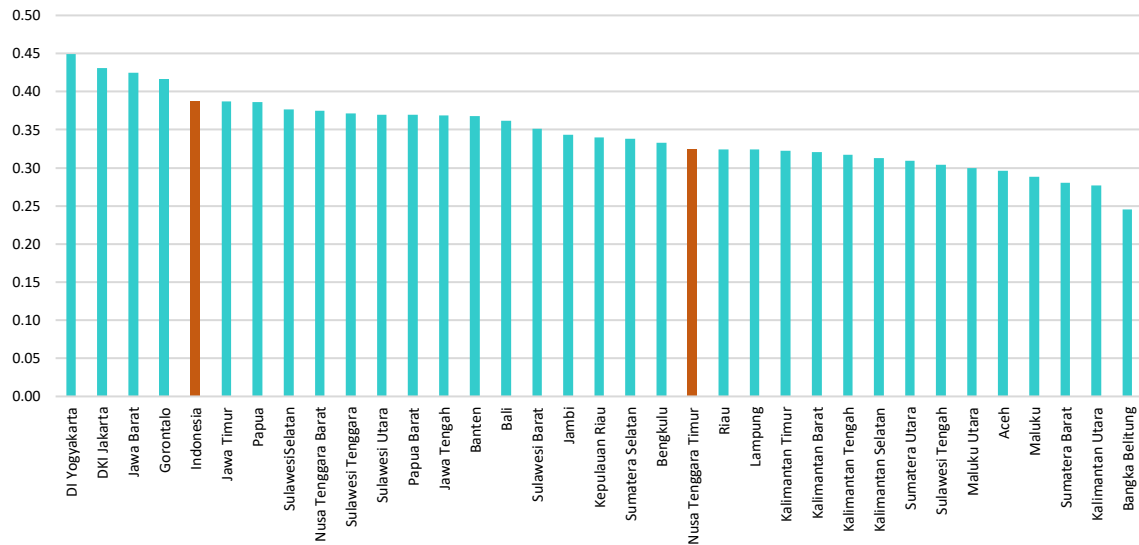
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sebesar 68,40 tumbuh 1,14% dibandingkan tahun 2022 dan di bawah Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan Maluku Utara sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.13**. Secara umum, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan nilai IPM ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi pada elemen penyusun IPM seperti aspek pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi nasional, IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur masih relatif lebih rendah dan berada di kelompok IPM sedang dibandingkan dengan provinsi lainnya. Kondisi ini juga menggambarkan adanya kesenjangan pembangunan antar provinsi di Indonesia dan menjadi tantangan yang harus diperbaiki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk setara dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kesenjangan ini juga terjadi pada tingkat kabupaten/kota dengan Kota Kupang menjadi daerah dengan nilai IPM tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 82,77 sedangkan Kabupaten Sabu Raijua menjadi daerah dengan IPM terendah sebesar 61,37. Tantangan perbaikan pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota juga menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ini baik pada tingkat kabupaten/kota hingga provinsi di Indonesia, khususnya aspek pendidikan dan kesehatan.



Gambar 2.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

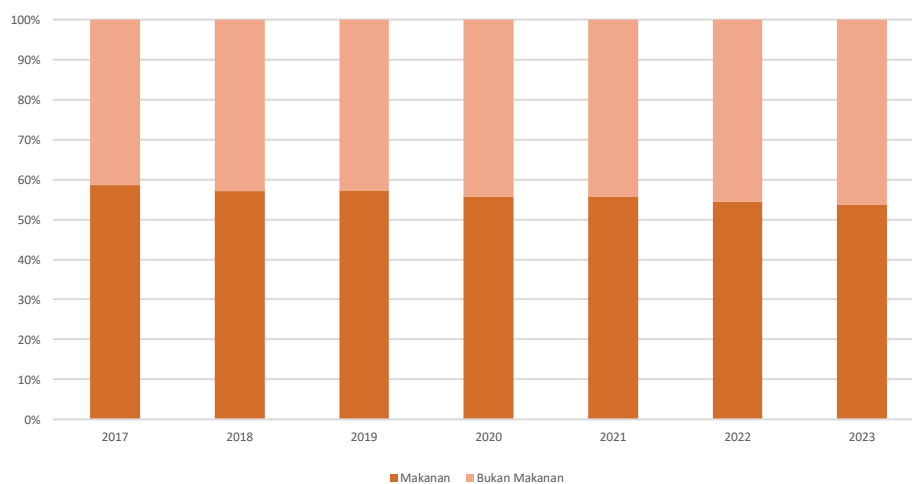
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rasio gini sebesar 0,33. Rasio gini menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Angka rasio gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan rasio gini nasional sebesar 0,39 yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di NTT relatif lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nasional seperti pada **Gambar 2.14**. Hal ini juga menunjukkan distribusi kesempatan untuk mendapatkan pendapatan di tingkat individu atau rumah tangga relatif timpang, antara kelompok pendapatan tinggi dan pendapatan rendah. Meskipun angka rasio gini Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih kecil dibandingkan nasional, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.



Gambar 2.14 Rasio Gini seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Selain itu, jika dibagi pengeluaran masyarakat berdasarkan pengeluaran makanan dan non makanan, secara konsisten, **rata-rata pengeluaran makanan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan pengeluaran non makanan** per kapita per bulan. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat untuk makanan sebesar Rp 516.672 sedangkan pengeluaran non makanan sebesar Rp444.700 pada Gambar 2.15. Pengeluaran kelompok makanan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur terbesar digunakan untuk mengonsumsi padi-padian, makanan dan minuman jadi, rokok dan sayur-sayuran, sedangkan pengeluaran non makanan digunakan masyarakat untuk pembelian perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa serta pembayaran pajak, pungutan dan asuransi.



Gambar 2.15 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (ribu rupiah) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

2.5. Peluang dan Tantangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

2.5.1. Potensi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peluang pengembangan wilayah yang mengacu pada pola penggunaan ruang (RPD Provinsi NTT, 2024 – 2026). Adapun potensi pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

1. **Pola ruang dan aspek pertahanan**

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki hutan lindung seluas 670.487,57 hektare yang berperan dalam mengatur tata air serta mencegah bencana seperti banjir, erosi, dan intrusi air laut. Selain itu, provinsi ini juga memiliki kawasan hutan produksi yang berfungsi untuk menghasilkan hasil hutan yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, serta ekosistem Mangrove yang tersebar di berbagai kabupaten.

2. **Potensi Sektor Pariwisata**

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan lapangan usaha dan perekonomian masyarakat sekitar destinasi wisata. Untuk mendukung hal ini, beberapa strategi diterapkan, seperti memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait, mendorong pemulihan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, serta meningkatkan promosi digital guna menarik lebih banyak wisatawan. Selain itu, upaya lain yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas destinasi wisata melalui strategi 5A (Atraksi, Akomodasi, Aksesibilitas, Aktivitas, dan Amenitas) dan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.

3. **Potensi Sektor Perikanan dan Kelautan**

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki garis pantai yang panjang memiliki potensi dalam sektor perikanan namun dalam praktiknya, potensi yang besar di sektor ini belum didukung oleh fasilitas pendukung seperti penggunaan media dan pola tangkap tradisional. Selain itu, pengelolaan potensi yang besar ini belum dioptimalkan dari sisi pengelolaan hasil tangkapan seperti keterbatasan pabrik dan pelabuhan yang mendukung. Apabila potensi sektor perikanan dan kelautan dapat dikelola dengan baik, sektor ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong pertumbuhan industri perikanan, serta memperkuat ekspor hasil laut.

2.5.2. Tantangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam mengembangkan ekonominya, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Pengelompokan tantangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelompokkan menjadi beberapa aspek (KFR Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2023), yaitu:

1. **Tantangan di bidang ekonomi**

Dalam upaya pengembangan ekonomi daerah, tantangan di bidang ekonomi yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi berbagai aspek seperti pariwisata, infrastruktur, sumber daya energi, bidang pertanian dan peternakan, pengembangan masyarakat desa dan kawasan perbatasan. Di bidang pariwisata dan infrastruktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan pengembangan destinasi pariwisata yang belum optimal, dukungan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta minimnya petunjuk arah menuju dan di area

destinasi wisata. Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dihadapi pada tantangan aksesibilitas jaringan PLN atau rasio elektrifikasi yang rendah terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dominasi sektor pertanian yang masih di jalankan secara tradisional, dikerjakan secara individu dan penyediaan sarana produksi pertanian dan peternakan berdampak pada belum optimalnya produksi yang dihasilkan serta tantangan dalam upaya menggali potensi daerah yang menjadikan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

2. Tantangan kependudukan

Dibidang sosial kependudukan, tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain belum updatenya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berdampak ketepatan dalam pemberian bantuan di program pengentasan kemiskinan, permasalahan malnutrisi pada anak dan permasalahan kesehatan ibu, serta rendahnya rata-rata lama sekolah dibandingkan rata-rata nasional.

3. Tantangan geografi wilayah

Lokasi yang berbatasan secara langsung dengan Samudera Hindia dan Benua Australia berdampak pada kondisi perubahan iklim dan pemicu bencana hidrometeorologi atau kekeringan yang terjadi merata di seluruh wilayah. Efek perubahan iklim ini berdampak pada musim tanam petani, kualitas tanaman, ancaman gagal panen hingga mengganggu stabilitas pasar.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki potensi pengembangan wilayah yang mencakup aspek lingkungan, pariwisata, serta perikanan dan kelautan. Kawasan hutan lindung dan produksi berperan dalam konservasi dan penyediaan bahan baku industri, sementara sektor pariwisata memiliki peluang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui strategi promosi dan penyediaan infrastruktur pendukung. Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki potensi di sektor perikanan dan kelautan yang masih perlu dikembangkan lebih optimal. Disamping itu, tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi aspek sosial, ekonomi dan geografi wilayah. Tantangan dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung, kesejahteraan masyarakat serta lokasi wilayah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Dengan perencanaan strategis dan tepat sasaran serta dengan adanya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Menakar Kualitas Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.1. Keselarasan dengan Tujuan Nasional dan Kebijakan Fiskal

3.1.1. Kesesuaian RPD Nusa Tenggara Timur 2024-2026 dan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026 disusun sebagai dokumen perencanaan transisi yang menjembatani masa berakhirnya RPJMD 2018–2023 dan menyongsong akhir pelaksanaan RPJPD NTT 2005–2025. Penyusunan RPD ini bertujuan menjaga kesinambungan arah kebijakan pembangunan daerah serta mendukung pencapaian sasaran pokok tahap akhir RPJPD. Dokumen ini juga diselaraskan dengan RPJMN 2020–2024, yang menargetkan terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

RPD NTT 2024–2026 menggarisbawahi prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, penguatan SDM, serta ketahanan pangan dan energi. Selain itu, pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata berkelanjutan, dan adaptasi perubahan iklim juga menjadi perhatian utama. Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN, antara lain penguatan SDM, transformasi ekonomi yang inklusif, dan pembangunan berkelanjutan berbasis wilayah serta potensi lokal.

Strategi pembangunan daerah dirancang untuk menjawab isu-isu strategis seperti tingginya angka kemiskinan dan stunting, rendahnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan, serta tantangan konektivitas antarwilayah. RPD NTT juga mendukung pencapaian indikator makro nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu, kolaborasi erat dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta lembaga internasional menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Dengan mengedepankan prinsip inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, RPD NTT 2024–2026 diharapkan mampu menjadi instrumen yang menjembatani arah pembangunan nasional dan kebutuhan riil masyarakat lokal. Selain untuk memperkuat sinergi pusat-daerah, RPD ini juga dirancang untuk mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat provinsi secara nyata dan terukur.

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Makroekonomi Nusa Tenggara Timur

Indikator makro pembangunan merupakan gabungan dari berbagai aspek ekonomi dan sosial yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kinerja pembangunan suatu daerah. Indikator ini meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan target capaian indikator makro dalam RPD 2024–2026 dengan tren yang meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makroekonomi

No	Indikator Makroekonomi	Target (2024)	Capaian (2024)
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,55% - 5,35%	3,03%
2	Indeks Gini	0,336 - 0,338	0,316
3	Tingkat Kemiskinan	20% - 19,63%	19,02%
4	Pengangguran (TPT)	2,66% - 3,37%	3,02%
5	IPM	66,58-66,73	69,14

Sumber: RPD Provinsi NTT 2024-2026 dan BPS NTT, 2025.

Dari lima indikator makroekonomi yang ditargetkan Pemerintah Provinsi NTT untuk akhir periode RPJMD, sebanyak empat indikator telah mencapai target yang sudah ditentukan.

1. **Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2024 tercatat sebesar 3,03%**, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 4,55%–5,35%. RPD NTT 2024-2026 mencatat bahwa tantangan struktural seperti ketergantungan fiskal yang tinggi, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah, serta rendahnya pola investasi menjadi hambatan utama bagi percepatan pertumbuhan. Untuk itu, optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata tetap menjadi strategi kunci guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.
2. **Indeks Gini tahun 2024 sebesar 0,316**, atau lebih baik dibandingkan dengan target 0,336–0,338. Penurunan ketimpangan ini menunjukkan hasil dari upaya pemerataan pembangunan dan inklusi sosial.
3. **Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 berada di angka 19,02%**, berada dalam kisaran target (20%–19,63%). Capaian ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam penurunan kemiskinan. Namun menurut pemerintah daerah, akselerasi penurunan kemiskinan masih perlu dipacu melalui validasi data yang lebih baik, program padat karya, serta peningkatan akses terhadap jaminan sosial dan layanan kesehatan.
4. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,02%**, berada dalam kisaran target yaitu 2,66%–3,37%. Di sisi lain, RPD NTT 2024-2026 mencatat bahwa penciptaan lapangan kerja masih belum optimal, terutama dalam sektor formal dan padat karya. Tingkat keterampilan tenaga kerja yang masih rendah dan terbatasnya akses terhadap pelatihan vokasional menjadi kendala utama.
5. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 69,14**, melampaui target 66,58–66,73. Capaian ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Secara khusus, IPM antarwilayah di NTT masih cukup lebar, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar

Secara keseluruhan, capaian indikator makro pembangunan NTT tahun 2024 menunjukkan adanya kemajuan di berbagai bidang, terutama dalam penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. Namun demikian, tantangan struktural seperti perlambatan ekonomi dan ketimpangan sosial tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi NTT perlu terus memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan, mempercepat diversifikasi ekonomi, dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan agar dapat dinikmati secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.2. Partisipasi Inklusif dan Integrasi GEDSI

3.2.1. Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Partisipatif dan Transparan

Pendekatan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam perencanaan pembangunan diharapkan menjadi prinsip utama dalam setiap program, guna memastikan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. Namun, proses pengarusutamaan GEDSI menghadapi tantangan yang kompleks, mengingat keberadaannya berhadapan dengan konstruksi budaya yang telah mengakar dalam masyarakat. Untuk mempercepat integrasi GEDSI dalam kebijakan, diperlukan payung hukum yang kuat serta panduan implementasi yang jelas. Kedua aspek ini berperan penting dalam memberikan arah kebijakan yang lebih sistematis dan memperkuat komitmen setiap pemangku kepentingan dalam menerapkan prinsip inklusivitas.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah berupaya menunjukkan komitmennya dalam mengarusutamakan gender, sebagaimana tercermin dalam berbagai kebijakan yang mendukung perencanaan dan implementasi program berbasis GEDSI di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini menandai upaya nyata dalam menciptakan pembangunan yang lebih setara, dengan memastikan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial terpinggirkan, mendapatkan akses yang lebih adil terhadap berbagai layanan dan kesempatan pembangunan.

Berikut adalah beberapa Kebijakan dan Program Pemerintah terkait GEDSI dalam rangka pembangunan daerah di Provinsi NTT:

- a. **Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas:** Peraturan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- b. **Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah:** Peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh aspek pembangunan daerah, guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.
- c. **Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak:** Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban anak, serta tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Tujuannya adalah menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
- d. **Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:** Peraturan ini menekankan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di NTT. Penyusunan peraturan ini melibatkan partisipasi aktif dari penyandang disabilitas untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- e. **Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN):** Peraturan ini menekankan perlunya diselenggarakan Musrenbang yang inklusif secara aktif melibatkan kelompok rentan disertai dengan acuan

penyelenggaraan kegiatan sebagai bagian dari proses perencanaan yang inklusif dalam menyusun dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- f. **Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD):** yang akan diimplementasikan pada periode 2024-2026. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial dalam dokumen kebijakan utama.
- g. **Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2025:** sebagai acuan penyusunan Rencana strategi dan Rencana kerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Provinsi NTT (DP3A) serta organisasi non pemerintah lainnya.
- h. **Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak** berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 dan diperbarui melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dari berbagai kebijakan di atas, Pemerintah Provinsi NTT telah menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) ke dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Apabila ditinjau secara lebih mendalam terkait **implementasi GEDSI dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah**, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan transparan, khususnya terkait Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah, Pemerintah Provinsi NTT mewajibkan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang berbasis gender dan secara khusus melakukan analisis gender dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain dan secara partisipatif dan transparan, proses pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT juga memiliki inisiatif untuk menyelenggarakan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) sebagai ruang partisipatif bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, guna memastikan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Inisiasi ini telah dikukuhkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) yang bertujuan untuk mengintegrasikan isu-isu kelompok rentan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, membuka ruang dialog dan partisipasi bagi kelompok rentan agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif, serta mendorong kabupaten/kota untuk mengadopsi forum perencanaan inklusif serupa.

Di tingkat desa, terdapat inisiatif untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang perencanaan dan penganggaran yang inklusif. Misalnya, enam desa di Kabupaten Kupang telah

mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran desa yang inklusif, dengan tujuan memastikan keterlibatan masyarakat umum, termasuk kelompok marginal, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan.

Pemerintah NTT juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), mitra pembangunan, bahkan akademisi untuk memperkuat perspektif GEDSI dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, Universitas Nusa Cendana (UDN) Kupang secara aktif meningkatkan perspektif GEDSI dan jurnalisme advokasi untuk mendorong partisipasi dan representasi kelompok rentan dalam proses perencanaan hingga penganggaran pembangunan daerah.

Meskipun sudah terdapat upaya yang dilakukan pemerintah provinsi, namun dalam praktiknya masih banyak menemui kendala di lapangan, terutama dalam melibatkan secara langsung kelompok rentan dan masalah pendataan yang belum optimal.

3.2.2. Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran GEDSI

Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran berbasis GEDSI, di antaranya adalah melibatkan berbagai komunitas/lembaga masyarakat aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Berikut adalah partisipasi komunitas/lembaga masyarakat yang terlibat aktif dalam pengintegrasian GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi NTT antara lain:

1. **LSM Mentari NTT:** LSM Mentari NTT bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam mengintegrasikan isu GEDSI ke dalam kebijakan energi terbarukan. Salah satu inisiatifnya adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sumba, di mana perempuan diberikan pelatihan untuk memanfaatkan PLTS dalam aktivitas domestik seperti menenun, memasak, dan bertani. LSM ini juga turut mengawal proses yang saat ini tengah berjalan, yaitu pengintegrasian GEDSI dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) 2025-2039 di mana akan diatur pula mengenai transisi energi berkeadilan pada kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
2. **Yayasan CIS Timor:** Yayasan CIS Timor berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan LSM Mentari dalam merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengintegrasikan perspektif GEDSI. Yayasan ini juga terlibat dalam program-program yang mendukung akses energi bagi kelompok rentan di NTT.
3. **LSM Peka Dispa NTT:** LSM Peduli Kaum Disabilitas, Perempuan, dan Anak (Peka Dispa) memiliki fokus pada pendampingan serta pemberdayaan kaum disabilitas, perempuan, dan anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan. LSM Peka Dispa berupaya melindungi serta memperjuangkan hak-hak kelompok marginal tersebut melalui berbagai program pemberdayaan.
4. **Bengkel APPeK NTT:** Bengkel Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung (APPeK) adalah organisasi yang melakukan fasilitasi dan implementasi langsung dalam rangka pemberdayaan masyarakat rentan, perempuan, dan anak pada komunitas desa-kelurahan. Organisasi ini juga terlibat dalam kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk percepatan aksi GEDSI di NTT.

5. **Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN):** GARAMIN bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) untuk memastikan inklusi disabilitas dalam perencanaan pembangunan di NTT.

Selain lembaga/organisasi/institusi di atas, masih terdapat banyak organisasi lain yang aktif sebagai mitra pembangunan inklusi GEDSI di NTT, antara lain: RRI Kupang, Yayasan Tanpa Batas, Yayasan Ume Daya Nusantara, Yayasan Rumah Perempuan, Persani NTT, Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat, Yayasan Citamadani, PKBI NTT, Yayasan Sheep Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Yayasan Ipas Indonesia, Jaringan Perempuan Usaha Kreatif (Jarpuk Ina Po'a), Perkumpulan Peka-PM, dan Yayasan Sanggar Suara Perempuan.

3.2.3. Praktik Pengarusutamaan Gender dalam Penganggaran di Daerah

Dalam praktik pengarusutamaan gender dalam penganggaran di daerah, Pemerintah Provinsi NTT telah mengadopsi pendekatan penganggaran responsif gender (*gender budgeting*) dalam dokumen perencanaan daerah, sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan perspektif GEDSI ke dalam kebijakan pembangunan. Beberapa dokumen perencanaan yang telah mengakomodasi pendekatan ini antara lain:

RPJPD 2005 – 2025

Pembangunan yang responsif gender telah menjadi salah satu target kinerja rencana pembangunan dalam RPJPD ini yang kemudian dijabarkan dalam Sasaran 1.9 (Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial) dan Strategi yang lebih terperinci mengenai Perluasan akses bagi kelompok perempuan dan disabilitas, Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan dan disabilitas, Pemantapan perlindungan terhadap anak.

RPD 2024-2026

- Isu Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) belum optimal masih menjadi salah satu pokok masalah yang disebabkan oleh Rendahnya Pemahaman terkait Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI). Dalam dokumen RPD, Pemerintah NTT mengakui bahwa beberapa akar masalah dari isu tersebut adalah:
 - Belum optimalnya pengarusutamaan GEDSI di level kebijakan dan regulasi
 - Belum optimalnya pemenuhan hak anak, disabilitas dan Inklusi sosial lainnya
 - Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan
- Beberapa permasalahan lain yang tercantum dalam dokumen RPD terkait GEDSI adalah:
 - Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
 - Rendahnya Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
 - Rendahnya Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender
 - Terbatasnya Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - Minimnya pendampingan *Champion Gender* dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting
 - Terbatasnya data gender dan anak
 - Rendahnya Cakupan Desa Layak Anak

- Rendahnya cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar

Namun demikian, jika dilihat dari sisi implementasinya, praktik pengarusutamaan gender dalam penganggaran di NTT masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi implementasi kebijakan maupun alokasi sumber daya. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang mendukung, penerapan kebijakan ini masih belum optimal di tingkat perangkat daerah. Salah satu upaya konkret yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk menanggapi kondisi tersebut adalah dilaksanakannya monitoring Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT pada tahun 2023 terhadap 39 perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan integrasi gender dalam kebijakan dan program pembangunan melalui sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG), advokasi kepada pengambil kebijakan, pengembangan kelembagaan, serta bimbingan teknis bagi pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, diketahui berbagai hambatan masih dihadapi dalam penerapannya.

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan GEDSI di NTT adalah keterbatasan anggaran. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana untuk program kesetaraan gender dan inklusi sosial, jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. Dalam APBD NTT, alokasi anggaran responsif gender mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, pagu anggaran DP3A NTT mencapai Rp11 miliar, namun lebih dari separuhnya (Rp6 miliar) dialokasikan untuk gaji ASN dan tenaga kontrak. Sisa anggaran yang tersedia, sekitar Rp4 miliar, harus dibagi ke empat bidang utama, dengan sebagian besar disalurkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak. Anggaran untuk program perlindungan anak dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik juga terbatas, hanya sekitar Rp100 juta, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor ini hanya mencapai Rp90 juta pada tahun yang sama. Dengan keterbatasan dana tersebut, pemerintah harus melakukan skala prioritas dalam penyusunan program, yang sering kali menyebabkan beberapa isu GEDSI kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Selain keterbatasan anggaran, keterlibatan yang masih terbatas dari perangkat daerah dan instansi lain dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menjadi tantangan. Beberapa perangkat daerah masih terbatas dalam mengambil peran dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, DP3A NTT lebih banyak membangun kerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk mengisi kesenjangan dalam layanan dan advokasi. Beberapa NGO yang aktif di bidang GEDSI di NTT antara lain Yayasan CIS Timor, Bengkel APPEK NTT, LSM Peka Dispa, dan Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN), yang berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat terhadap isu-isu kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Sementara apabila ditinjau secara lebih umum, beberapa tantangan lain di luar praktik penganggaran daerah yang masih berkaitan dengan GEDSI di NTT yang masih menjadi isu pembangunan, antara lain:

- **Faktor sosial budaya juga menjadi tantangan besar dalam implementasi GEDSI:** Praktik-praktik tradisional seperti *kawin tangkap*, yang masih terjadi di beberapa daerah di NTT, menjadi bukti bahwa norma sosial yang diskriminatif terhadap perempuan masih kuat mengakar di masyarakat. Pemerintah dan berbagai organisasi telah berupaya melakukan kajian dan edukasi terhadap praktik ini, tetapi perubahan budaya membutuhkan waktu dan strategi yang berkelanjutan. Masalah lainnya adalah akses terbatas terhadap layanan bagi

kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan dan penyandang disabilitas. Infrastruktur yang kurang memadai serta minimnya fasilitas layanan bagi kelompok marginal menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi semua warga.

- **Krisis Air dan Sanitasi:** NTT sering mengalami krisis air bersih dan sanitasi yang buruk, terutama saat terjadi bencana alam seperti Badai Seroja pada tahun 2021. Kondisi ini berdampak signifikan pada perempuan dan penyandang disabilitas, yang seringkali tidak dilibatkan dalam penanganan masalah air, sanitasi, dan kebersihan (WASH). Akibatnya, akses mereka terhadap fasilitas sanitasi yang layak menjadi terbatas, meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan.
- **Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana:** Penyandang disabilitas di NTT menghadapi risiko tinggi terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Namun, keterlibatan mereka dalam penyusunan kebijakan penanggulangan bencana masih terbatas. Inisiatif untuk menyusun Daftar Tilik GEDSI telah dilakukan untuk memastikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas diperhatikan dalam perencanaan penanggulangan bencana.
- **Akses terhadap Layanan Kesehatan:** Sistem jaminan kesehatan di NTT belum mampu menjangkau semua perempuan hamil, terutama karena hambatan kultural dan kurangnya pencatatan kependudukan. Hal ini berdampak pada akses mereka terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan ibu dan anak.

3.3. Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti dan Akuntabel

Pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based*) dan akuntabel merupakan landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data dan informasi yang valid, relevan, dan terkini, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kebijakan berbasis bukti juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memungkinkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil kepada publik. Menurut Davies et al. (2000), *evidence-based policy* memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih objektif dengan memanfaatkan data dan penelitian ilmiah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi secara efektif. Selain itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD, 2020) menegaskan bahwa penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan didasarkan pada kebutuhan nyata dan data yang dapat diverifikasi.

Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Permasalahan yang ada di NTT banyak menarik perhatian baik dari lembaga donor maupun pemerintah pusat untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan melalui studi yang kemudian nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh : i) lembaga penelitian SMERU aktif melakukan berbagai studi mengenai Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya keuangan mikro di NTT (2004), keluar dari kemiskinan di NTT (2006), dan tentang iklim usaha NTT (2006); ii) NTT merupakan salah satu provinsi dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi di Indonesia (Survei Kesehatan Indonesia, 2023). Dalam hal mengatasi *stunting*, pemerintah daerah NTT menggunakan data kesehatan dan gizi dari berbagai survei nasional (seperti Riset Kesehatan Dasar) serta sistem pencatatan elektronik Puskesmas. Berdasarkan bukti ilmiah, intervensi yang dilakukan meliputi

pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, peningkatan akses air bersih, serta edukasi bagi ibu hamil dan menyusui; iii) Dalam hal perubahan iklim, NTT juga sudah memiliki langkah konkret pengambilan kebijakan yang berbasis bukti, dengan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA), aplikasi yang diinisiasi oleh Bappenas dan berfungsi sebagai *platform* untuk mencatat pelaksanaan rendah karbon (PRK) dan ketahanan iklim (PBI) dengan cara yang transparan, akurat, komprehensif, konsisten, dan terintegrasi, data mengenai iklim dapat diakses secara rinci oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mencakup seluruh aksi terkait pelatihan, pendampingan, dan pelaporan aksi-aksi mitigasi yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait, seperti sektor kehutanan, cipta karya, pertanian, perhubungan, dan energi.

Meskipun pemerintah daerah NTT sangat mendukung dalam menghasilkan keputusan berbasis bukti, namun dalam praktiknya masih mengalami beberapa kendala, antara lain: i) Keterbatasan Data yang Akurat dan terkini: NTT masih menghadapi kendala dalam pengumpulan dan pemanfaatan data secara *real-time*. Dalam tata kelola data, NTT saat ini masih dalam proses rencana dalam untuk memperkuat tata kelola satu data terpadu. Kegiatan ini juga didukung oleh SKALA untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pemerintah daerah dalam era digitalisasi, adapun rangkaian kegiatan satu data NTT antara lain penyusunan Standar Data dan metadata, rancangan SOP dan Juknis Satu Data, Penyusunan regulasi Peraturan Gubernur (sesuai dengan Permendagri terbaru) tentang Forum Satu Data dan Rencana Aksi Satu Data, Pelatihan operator Satu Data berlisensi dan *Dashboard* Satu Data.; ii) Kurangnya Kapasitas SDM: Pengambilan kebijakan berbasis bukti memerlukan keterampilan dalam analisis data, yang masih perlu ditingkatkan di tingkat pemerintahan daerah; iii) Koordinasi antar lembaga: Sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta masih perlu diperkuat untuk mendukung kebijakan berbasis bukti yang lebih efektif.

3.4. Koordinasi dan Kapasitas Institusi untuk Public Finance Management (PFM) yang Efektif

Sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2001, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan, termasuk yang berdampak signifikan terhadap public finance management/pengelolaan keuangan publik di tingkat sub nasional. Perubahan kebijakan tersebut meliputi perubahan pembagian fungsi antara tingkat pemerintahan, struktur penganggaran (yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan), pengaturan program dan kegiatan, regulasi jenis-jenis pendapatan yang dapat dipungut oleh daerah (PAD), regulasi tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), pengukuran dan pelaporan kinerja, akuntansi dan pelaporan, serta kebijakan terkait formula dan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat. Perubahan-perubahan ini secara keseluruhan memberikan dampak besar terhadap pengukuran dan keberlanjutan kinerja pemerintah daerah di antara tahun-tahun fiskal (Kompak, 2021).

Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur, PFM di NTT menghadapi sejumlah tantangan utama: i) Keterbatasan Kapasitas Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah dibandingkan dengan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sumber pendapatan utama berasal dari pajak daerah, retribusi, dan sektor pariwisata yang masih berkembang; ii) Keterlambatan dalam Realisasi Anggaran, Proses perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron sering menyebabkan serapan anggaran yang rendah. Dalam proses penganggaran, kendala utama yang sering dihadapi meliputi keterlambatan dalam penerimaan alokasi anggaran serta lamanya proses pengusulan revisi anggaran dibandingkan waktu yang telah

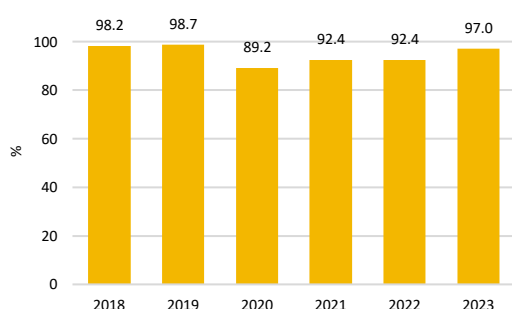
direncanakan. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan. Dalam pengadaan barang dan jasa, selain dampak keterlambatan yang menyebabkan penundaan proses lelang, terdapat pula kendala spesifik yang dihadapi oleh satuan kerja. Misalnya, di Kementerian Pertanian, pengadaan tidak dapat dilaksanakan karena izin impor benih yang tidak diberikan oleh kementerian terkait. Demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan, keterlambatan anggaran berakibat pada pekerjaan fisik yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Selain itu, satuan kerja tidak memiliki fleksibilitas dalam mempercepat belanja karena harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh kementerian masing-masing (KFR, 2023). Faktor sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pelaksanaan anggaran di tingkat satuan kerja. Mutasi pegawai sering kali menghambat pelaksanaan kegiatan karena kekurangan tenaga kerja. Selain itu, pergantian pejabat perbendaharaan juga menjadi tantangan klasik, di mana keterlambatan dalam penetapan pejabat pengganti menyebabkan proses pencairan dana tertunda; iii) Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Laporan BPK tahun 2023, NTT mendapatkan catatan mengenai tiga hal yaitu pelaksanaan belanja modal tidak sesuai ketentuan, penatausahaan Dana BOS belum tertib, dan Penatausahaan Aset tetap belum memadai.

Sejauh ini, usaha dari pemerintah daerah NTT untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah adalah: i) Peningkatan Efisiensi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi untuk meningkatkan PAD dan optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan baru bagi daerah; ii) Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). KKPD merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah. KKPD juga Upaya dalam menciptakan tata Kelola keuangan yang baik dan transparan disektor pemerintahan; iii) Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui pelatihan bagi pejabat perbendaharaan dan pengelola anggaran agar lebih memahami regulasi dan kebijakan fiskal terkini, dan penempatan tenaga ahli dalam perencanaan dan pengawasan anggaran di tingkat kabupaten/kota.

4. Analisis Pendapatan dan Belanja

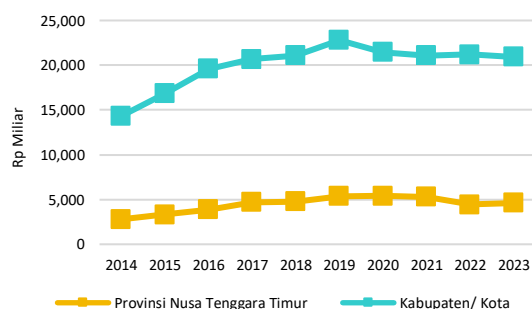
4.1. Menggali Kapasitas dan Potensi Pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Realisasi pendapatan Nusa Tenggara Timur pada periode 2018–2023 rata-rata tercatat di bawah 100%, yaitu sebesar 94,6% dari anggaran (Gambar 4.1). Secara tahunan, realisasi pendapatan daerah ini tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, dengan level terendah terjadi pada 2020 sebesar 89,2% akibat dampak pandemi Covid-19. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama, realisasi pendapatan negara juga hanya mencapai 96,1% dari target APBN. Tidak tercapainya target pendapatan ini terutama disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang konsisten berada di bawah 100%, serta Pendapatan Transfer yang juga tidak memenuhi target. Kedua faktor ini menjadi penyebab utama rendahnya realisasi pendapatan di Nusa Tenggara Timur selama periode tersebut. Dari sisi pertumbuhan, **pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4% per tahun, sedangkan pendapatan daerah kabupaten/kota mencatat pertumbuhan rata-rata 4,6% per tahun dalam periode 2014–2023 (Gambar 4.2)**. Jika dibandingkan antara periode sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, pertumbuhan pendapatan cenderung lebih tinggi sebelum pandemi. Antara 2015–2019, pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tumbuh rata-rata 14,2% per tahun, namun setelah pandemi, yakni dalam periode 2020–2023, pertumbuhannya mengalami kontraksi dengan rata-rata -3,2% per tahun. Tren serupa juga terlihat di tingkat kabupaten/kota, di mana pertumbuhan pendapatan sebelum pandemi mencapai rata-rata 9,9% per tahun, tetapi mengalami kontraksi menjadi -2,1% per tahun setelah pandemi.



Gambar 4.1 Realisasi Pendapatan Nusa Tenggara Timur (2018-2023)

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

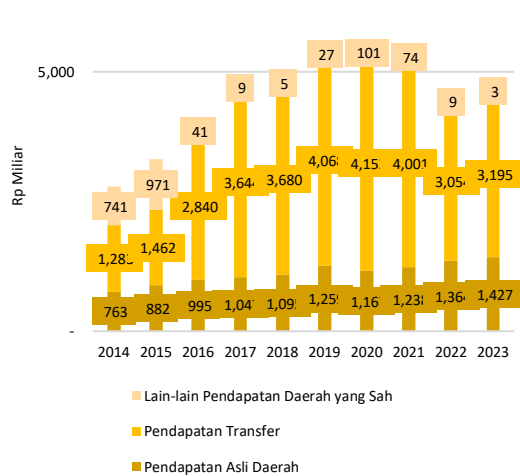


Gambar 4.2 Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Timur

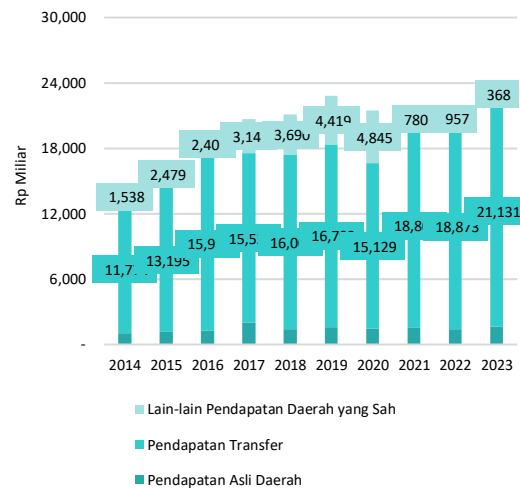
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh Pendapatan Transfer sepanjang 2014–2023 (Gambar 4.3), dengan proporsi berkisar antara 44,1% hingga 77,0%. Kenaikan tajam dalam proporsi Pendapatan Transfer terjadi pada 2016, ketika naik dari 44,1% pada 2015 menjadi 73,3% pada 2016. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah cenderung stabil di kisaran 20%–30% dalam periode tersebut. Peningkatan yang cukup mencolok terjadi pada 2022, ketika kontribusi PAD naik menjadi 30,8% dari 23,3% pada tahun sebelumnya, yang dapat mencerminkan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi. **Di tingkat kabupaten/kota, Pendapatan Transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan sepanjang 2014–2023 (Gambar 4.4).** Selama periode ini, proporsinya secara konsisten berada di atas 70% dan bahkan mencapai 89,0% pada 2023. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih

terbatas, terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi lokal belum cukup berkembang untuk menghasilkan penerimaan yang lebih besar dari pajak daerah dan retribusi.



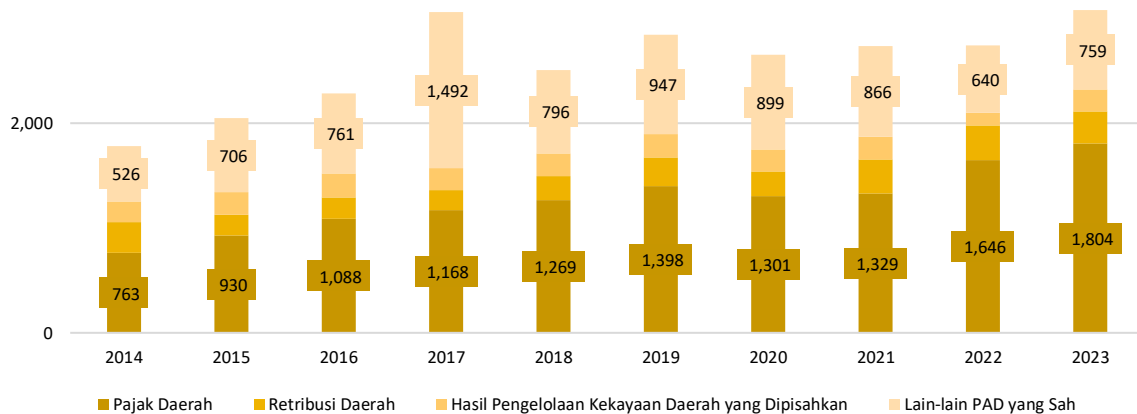
Gambar 4.3 Sumber Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: DJPK, 2024 (diolah oleh LPEM FEB UI)



Gambar 4.4 Sumber Pendapatan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur
Sumber: DJPK, 2024 (diolah oleh LPEM FEB UI)

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

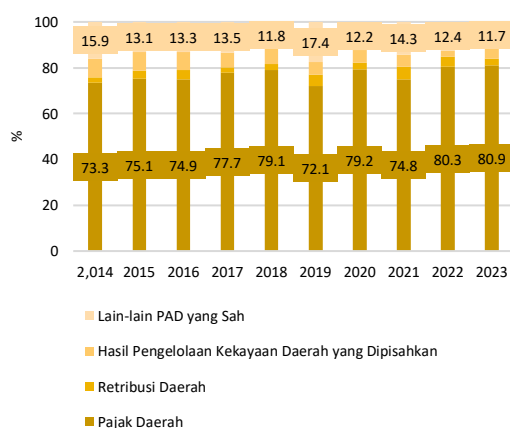
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Nusa Tenggara Timur didominasi oleh dua komponen utama, yaitu Pajak Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADYS). Pada tahun 2023, kontribusi Pajak Daerah terhadap total PAD tercatat sebesar 58,6%, sementara LLPADYS berkontribusi sebesar 24,7% terhadap total PAD. Pajak Daerah menjadi sumber pendapatan terbesar, mengindikasikan adanya potensi untuk meningkatkan penerimaan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, dominasi LLPADYS menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat. LLPADYS meliputi (i) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Pengelolaan yang lebih efektif terhadap kedua sumber pendapatan ini, termasuk dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam, diharapkan dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal Nusa Tenggara Timur secara menyeluruh. Gambar 4.5 menunjukkan secara rinci PAD Nusa Tenggara Timur.



Gambar 4.5 Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur

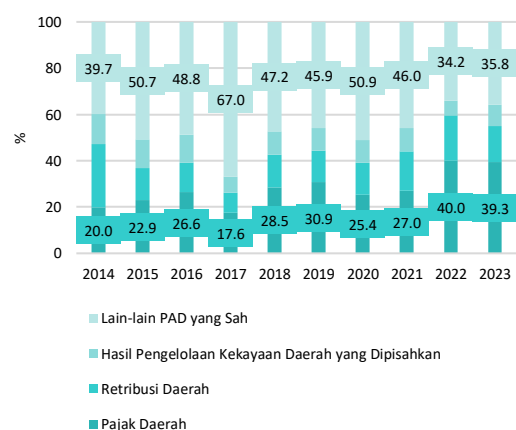
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Melihat lebih rinci, **terdapat tren yang berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota dalam komposisi PAD di Nusa Tenggara Timur**. Jika memisahkan PAD antara provinsi dan kabupaten/kota, komposisi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur didominasi oleh Pajak Daerah, yang secara konsisten memberikan kontribusi terbesar setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 76,8% antara tahun 2014 hingga 2023 (Gambar 4.6). Lain-lain PAD yang Sah menyumbang rata-rata 13,6% dalam periode yang sama. Sebaliknya, di tingkat Kabupaten/Kota, komposisi PAD lebih didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah, dengan kontribusi rata-rata sebesar 46,6% (Gambar 4.7). Kontribusi Pajak Daerah di tingkat kabupaten/kota tercatat rata-rata sebesar 27,8%. Perbedaan tren ini dapat dijelaskan oleh karakteristik pengelolaan dan kapasitas fiskal antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 4.6 Komposisi PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

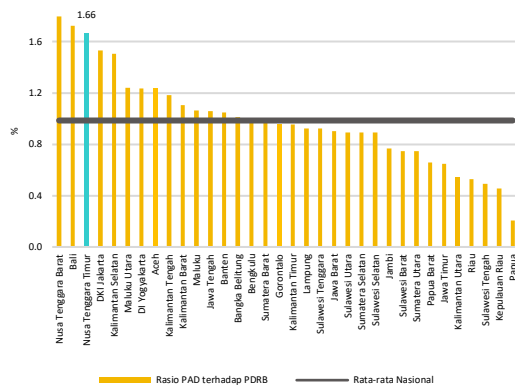


Gambar 4.7 Komposisi PAD Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

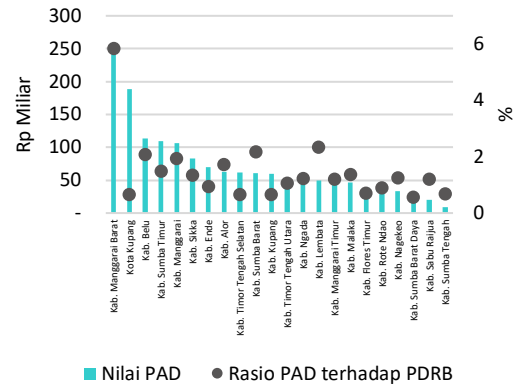
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Rasio PAD terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 berada di posisi 1,66%, urutan 3 dari seluruh provinsi di Indonesia, di atas rata-rata nasional sebesar 0,98% (Gambar 4.8). Di tingkat kabupaten/kota, Kota Manggarai Barat mencatatkan nilai PAD tertinggi dengan rasio PAD terhadap PDRB sebesar 5,85%. Sebaliknya, Kabupaten Sumba Tengah mencatatkan nilai PAD terendah dengan rasio PAD terhadap PDRB sebesar 0,68%. Kabupaten Sumba Barat Daya mencatatkan rasio PAD terhadap PDRB terendah di Nusa Tenggara Timur, yaitu 0,56%. Perbedaan rasio ini mencerminkan

adanya perbedaan dalam tingkat kemandirian fiskal antara daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur ekonomi, potensi sumber daya alam, serta pengelolaan dan pemanfaatan potensi pendapatan daerah yang berbeda di masing-masing kabupaten dan kota (Gambar 4.9).

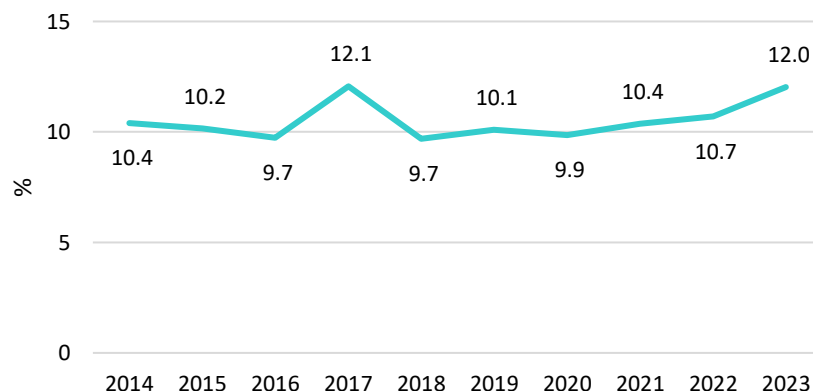


Gambar 4.8 Rasio PAD Terhadap PDRB
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 4.9 Nilai PAD dan Rasio PAD terhadap PDRB Tahun 2023
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Tren kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan. Dua rasio tersebut memiliki sifat berlawanan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya, semakin tinggi rasio Pendapatan Transfer terhadap total pendapatan maka semakin rendah kemandirian daerah. Di Nusa Tenggara Timur, rasio PAD terhadap total pendapatan cenderung stabil di kisaran 10%, dengan pengecualian pada tahun 2017 dan 2023 yang menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014, rasio ini tercatat sebesar 10,4%. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah, perbaikan dalam pengelolaan sumber daya, serta pembangunan infrastruktur, rasio PAD terhadap total pendapatan meningkat menjadi 12,0% pada tahun 2023 (Gambar 4.10).

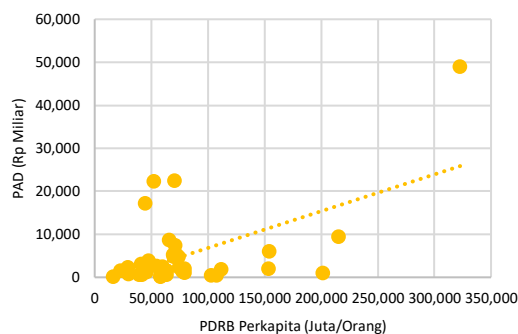


Gambar 4.10 Rasio Kemandirian Daerah Nusa Tenggara Timur
Sumber: LPEM FEB UI (2024)

Jika melihat hubungan antara PDRB per kapita dan PAD untuk seluruh provinsi di Indonesia, terdapat korelasi yang menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas ekonomi yang lebih besar cenderung memiliki PAD yang lebih tinggi. Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di atas garis tren, dengan PDRB per kapita sebesar Rp23,1 miliar per orang dan PAD yang mencapai Rp1.427 miliar

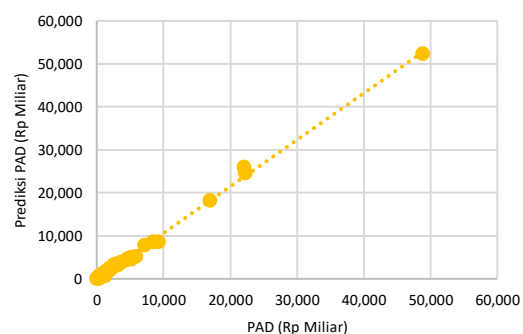
(Gambar 4.11). Posisi di atas tren ini mengindikasikan bahwa dengan tingkat PDRB per kapita yang dimiliki, Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif sudah mampu menghasilkan PAD pada level di atas daerah lain dengan kapasitas ekonomi serupa. Faktor-faktor seperti struktur ekonomi, efektivitas pemungutan pajak, serta ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu dapat menjadi penyebab di balik kondisi ini.

Untuk menganalisis kapasitas PAD provinsi, kajian ini menggunakan model *fixed effect* dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti PDRB per kapita, LJP, kepadatan penduduk, tingkat urbanisasi, dan dampak pandemi COVID-19 menggunakan variabel *dummy* waktu COVID-19. Model ini memprediksi PAD dan hasil estimasi ditunjukkan oleh garis *predicted line* (Gambar 4.12). Realisasi PAD provinsi secara umum konsisten dengan prediksi model, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat merepresentasikan kapasitas PAD daerah. Spesifik untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi ini menunjukkan realisasi PAD sebesar Rp1.427 miliar, yang lebih rendah dibandingkan dengan prediksi model sebesar Rp1.476 miliar. Perbedaan ini dapat mencerminkan kinerja yang belum optimal untuk menangkap potensi fiskal dari basis ekonomi yang dimilikinya sebagaimana daerah lain yang mempunyai karakter sama.



Gambar 4.11 PDRB Per Kapita dan PAD Provinsi di Indonesia

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



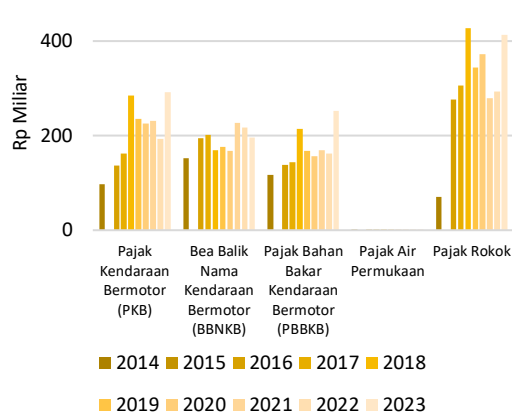
Gambar 4.12 PAD dan Prediksi PAD Menggunakan Metode *Fixed Effect*

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Struktur penerimaan pajak di tingkat provinsi di Nusa Tenggara Timur didominasi oleh Pajak Rokok, sementara penerimaan pajak lain cenderung memberikan kontribusi yang mirip, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Gambar 4.13). Secara keseluruhan, seluruh komponen pajak ini menunjukkan tren pertumbuhan dari waktu ke waktu, kecuali BBNKB yang cenderung stabil. Sementara itu, kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap total penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap relatif kecil, yang dapat mencerminkan terbatasnya pemanfaatan sumber daya air sebagai objek pajak atau efektivitas pemungutan pajak yang masih perlu ditingkatkan.

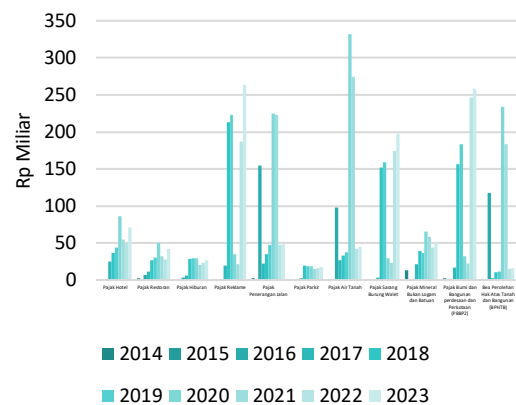
Di tingkat kabupaten/kota, pola penerimaan pajak menunjukkan dinamika yang berbeda. Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencatat lonjakan signifikan pada tahun 2020 (Gambar 4.14). Setelah itu, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), serta BPHTB mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022. Peningkatan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan BPHTB pada tahun 2020 dapat mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi yang masih berlangsung meskipun

terdapat tekanan akibat pandemi. Kenaikan penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, misalnya, dapat dikaitkan dengan meningkatnya konsumsi listrik di sektor rumah tangga dan industri, sementara lonjakan BPHTB dapat mengindikasikan tingginya transaksi properti pada tahun tersebut. Sementara itu, lonjakan penerimaan dari Pajak Reklame, PBBP2, serta BPHTB pada tahun 2022 dapat mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih luas pasca pandemi. Peningkatan aktivitas bisnis dan investasi, termasuk ekspansi sektor properti dan infrastruktur, berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan dari pajak-pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong permintaan terhadap lahan, properti, dan aktivitas periklanan, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak daerah.



Gambar 4.13 Realisasi Penerimaan Pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

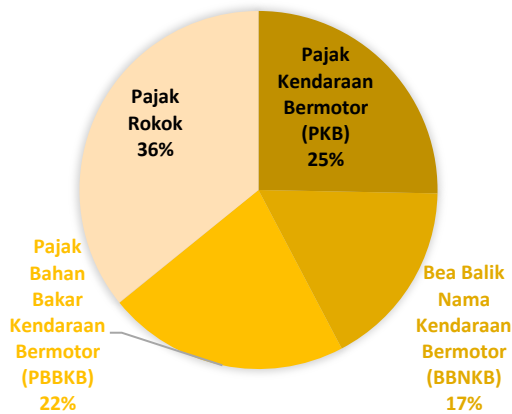
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 4.14 Realisasi Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

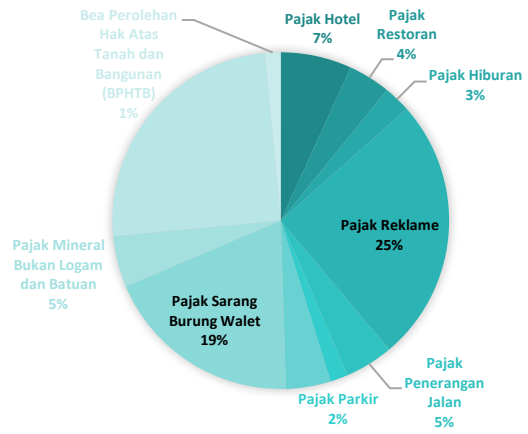
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Penerimaan pajak antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 di dominasi pajak-pajak utama di masing-masing tingkat pemerintahan. Gambar 4.15 dan Gambar 4.16 menunjukkan proporsi masing-masing sumber penerimaan pajak di kedua tingkat pemerintahan. Di tingkat provinsi, penerimaan pajak didominasi oleh Pajak Rokok, diikuti oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dengan masing-masing menyumbang 36%, 25%, dan 22% dari total penerimaan pajak di provinsi. Sementara itu, Pajak Air Permukaan tercatat tidak memberikan kontribusi yang signifikan, menunjukkan terbatasnya pemanfaatan sumber daya air sebagai objek pajak atau belum optimalnya mekanisme pemungutannya. Sebaliknya, di tingkat kabupaten/kota, struktur penerimaan pajak memiliki pola yang berbeda. Pajak Reklame dan PBBP2 menjadi sumber utama dengan kontribusi masing-masing sebesar 25%, diikuti oleh Pajak Burung Walet sebesar 19%. Sementara itu, pajak lainnya seperti Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bunga Logam dan Batuan memiliki kontribusi yang relatif kecil, masing-masing di bawah 7%. Perbedaan ini mencerminkan karakteristik ekonomi dan aktivitas di masing-masing wilayah, di mana penerimaan pajak provinsi lebih bergantung pada sektor transportasi dan konsumsi barang yang dikenakan cukai, sementara penerimaan di kabupaten/kota lebih dipengaruhi oleh dinamika sektor properti, jasa atas barang tertentu, dan perdagangan lokal.



Gambar 4.15 Proporsi Penerimaan Pajak di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 4.16 Proporsi Penerimaan Pajak Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Perubahan Rezim Pajak Daerah dalam UU HKPD¹

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membawa perubahan dalam sistem perpajakan daerah, salah satunya melalui kebijakan opsen. Dengan mekanisme ini, daerah memperoleh sumber penerimaan baru tanpa menambah beban bagi wajib pajak.

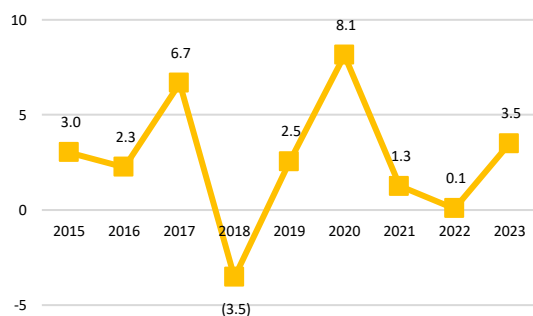
Lebih lanjut, kebijakan opsen berpengaruh pada distribusi pajak yang sebelumnya sepenuhnya menjadi bagian dari provinsi. Dalam kasus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), mekanisme opsen mengubah skema bagi hasil menjadi proporsi langsung. Di sisi lain, untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), pengenalan opsen menandai perubahan signifikan dalam struktur penerimaan daerah. Sebelum adanya kebijakan ini, Pajak MBLB hanya menjadi sumber penerimaan bagi kabupaten/kota tanpa kontribusi langsung ke provinsi. Dengan adanya opsen, penerimaan dari Pajak MBLB kini terdistribusi ke tingkat provinsi

Penerapan tarif opsen sebagaimana diatur dalam UU HKPD juga memberikan dampak terhadap dinamika keuangan daerah. Dengan tarif sebesar 66% dari pajak terutang untuk PKB dan BBNKB serta 25% untuk Pajak MBLB, daerah memiliki potensi peningkatan penerimaan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Selain itu, sistem pemungutan dilakukan secara bersamaan dengan pajak dasarnya.

¹ Sumber: [https://pajak.go.id/id/artikel/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad#:~:text=Opsen%20adalah%20bagian%20dari%20piggyback,Logam%20dan%20Batuan%20\(MBLB\).](https://pajak.go.id/id/artikel/pemberlakuan-opsen-menakar-prospek-piggyback-tax-untuk-mengerek-pad#:~:text=Opsen%20adalah%20bagian%20dari%20piggyback,Logam%20dan%20Batuan%20(MBLB).)

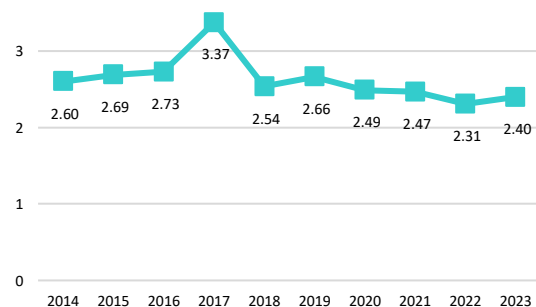
Dalam menganalisis kinerja penerimaan pajak daerah, terdapat dua indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas sistem perpajakan, yaitu *tax buoyancy* dan *tax ratio*. *Tax buoyancy* mengukur sejauh mana penerimaan pajak daerah responsif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator ini dihitung dengan membandingkan persentase perubahan PAD dengan persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin tinggi *tax buoyancy*, semakin besar peningkatan penerimaan pajak seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, *tax ratio* menggambarkan proporsi penerimaan pajak terhadap PDRB, mencerminkan sejauh mana PAD berkontribusi terhadap ekonomi daerah.

Berdasarkan analisis *tax buoyancy*, dengan pengecualian tahun 2018 dan 2022, Nusa Tenggara Timur mencatat nilai *tax buoyancy* di atas 1 (Gambar 4.17). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB mencerminkan efektivitas dalam mobilisasi penerimaan daerah. Konsistensi *tax buoyancy* di atas 1 mengindikasikan bahwa sistem perpajakan daerah masih mampu mengoptimalkan penerimaan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, *tax ratio* di Nusa Tenggara Timur mengalami tren meningkat pada periode 2014–2017, dari 2,60 menjadi 3,37, sebelum kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,40 pada 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah, seperti efektivitas administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak yang berkontribusi terhadap tren penurunan *tax ratio* tersebut.



Gambar 4.17 Tax Buoyancy Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



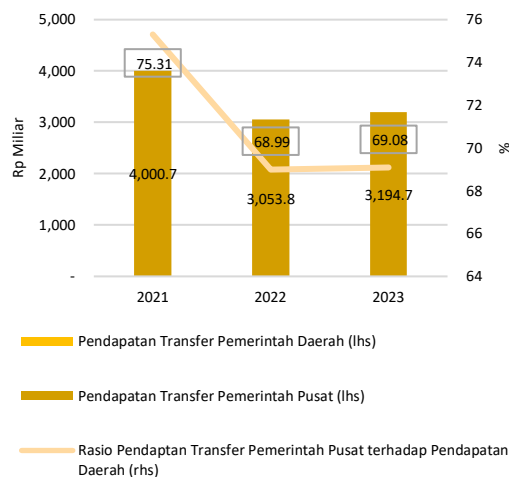
Gambar 4.18 Tax Ratio Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

4.1.2. Pendapatan Transfer

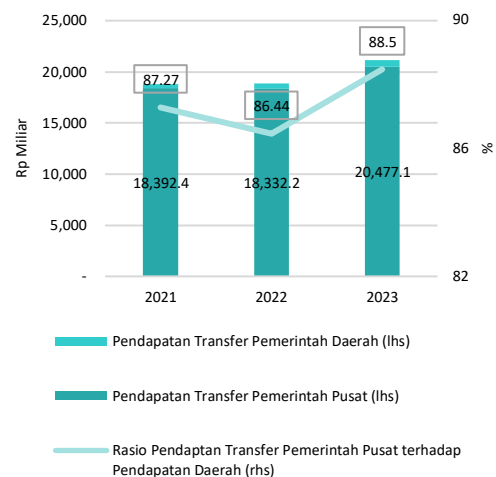
Pendapatan transfer untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan antara tahun 2021 dan 2022 sebelum cenderung stabil pada 2023, dengan mayoritas penerimaan masih berasal dari transfer pemerintah pusat (Gambar 4.19). Penurunan ini mencerminkan upaya mengurangi ketergantungan terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan dan operasional daerah. Meskipun tetap menjadi sumber pendapatan utama, proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah terus berkurang. Di sisi lain, pola yang sedikit berbeda terlihat pada pendapatan transfer untuk Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur. Transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi sumber dominan, tetapi proporsinya sempat menurun pada 2022 menjadi 86,4% sebelum kembali meningkat menjadi 88,5% pada 2023 (Gambar 4.20). Kontribusi transfer antar pemerintah daerah tetap terbatas dan belum berperan signifikan dalam struktur pendapatan kabupaten/kota. Kenaikan kembali proporsi transfer pemerintah pusat menunjukkan

meningkatnya ketergantungan fiskal daerah terhadap pendanaan dari pusat, yang dapat mengindikasikan terbatasnya kapasitas fiskal daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara mandiri.



Gambar 4.19 Nilai dan Komposisi Pendapatan Transfer Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 4.20 Nilai dan Komposisi Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur

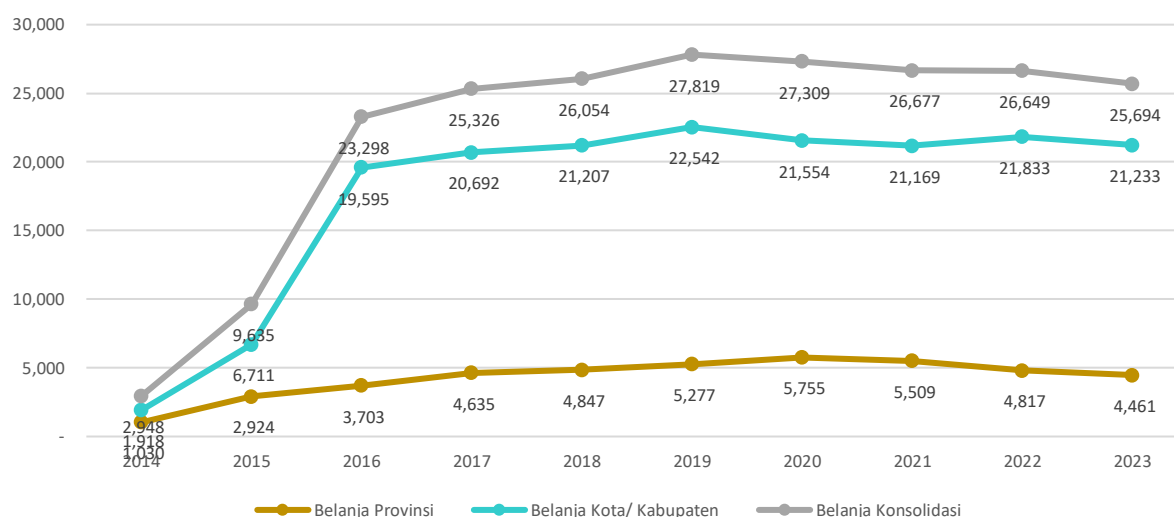
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Penerapan UU HKPD memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah Nusa Tenggara Timur melalui optimalisasi penerimaan dari pajak-pajak lokal. Peningkatan penerimaan pajak ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pembiayaan pengembangan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya akan mendukung perekonomian lokal. Namun, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi UU HKPD adalah kapasitas administrasi yang terbatas, terutama dalam hal kesiapan SDM dan sistem yang diperlukan untuk memungut serta mengelola pajak secara efektif. Tanpa adanya peningkatan kapasitas administratif, implementasi UU HKPD dapat terhambat dan tidak memberikan hasil yang optimal.

Selain itu, UU HKPD membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian fiskal Nusa Tenggara Timur, dengan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat sehingga memberikan lebih banyak ruang bagi daerah untuk menentukan kebijakan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, memperkuat kemandirian anggaran daerah. Namun, salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah ketimpangan fiskal antara kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Jika pengelolaan pajak antar daerah tidak merata, bisa terjadi ketidakseimbangan dalam kemampuan fiskal antar wilayah, di mana kabupaten/kota yang lebih maju akan memperoleh lebih banyak pendapatan sementara daerah lainnya tertinggal. Penerapan opsi pajak yang lebih tinggi di Nusa Tenggara Timur juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Beban pajak yang lebih tinggi dapat memperlambat perkembangan kelompok usaha ini, karena mereka sangat bergantung pada biaya operasional yang rendah untuk tetap bertahan dan berkembang.

4.2. Telaah Struktur Belanja dan Pembiayaan Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Realisasi belanja daerah² di Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami kenaikan selama periode 2014 hingga mencapai puncaknya di tahun 2019-2020, tetapi setelah itu terlihat menurun perlahan hingga tahun 2023 (Gambar 4.21). Tren tersebut terutama didorong oleh pola belanja kabupaten/kota yang memiliki porsi terbesar dalam belanja konsolidasi. Kenaikan belanja pada periode awal hingga puncaknya mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang tinggi, baik dalam infrastruktur maupun pelayanan publik. Namun, penurunan pada periode terakhir (2021-2023) kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, dampak pandemi COVID-19, serta adanya efisiensi belanja yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah. Berbeda dengan kabupaten/kota, realisasi belanja provinsi dari tahun ke tahun relatif stabil dengan sedikit kenaikan sampai tahun 2020 sebelum akhirnya menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja provinsi lebih stabil karena umumnya belanja tersebut terkait dengan belanja rutin administrasi dan pelayanan dasar yang tidak banyak mengalami perubahan.



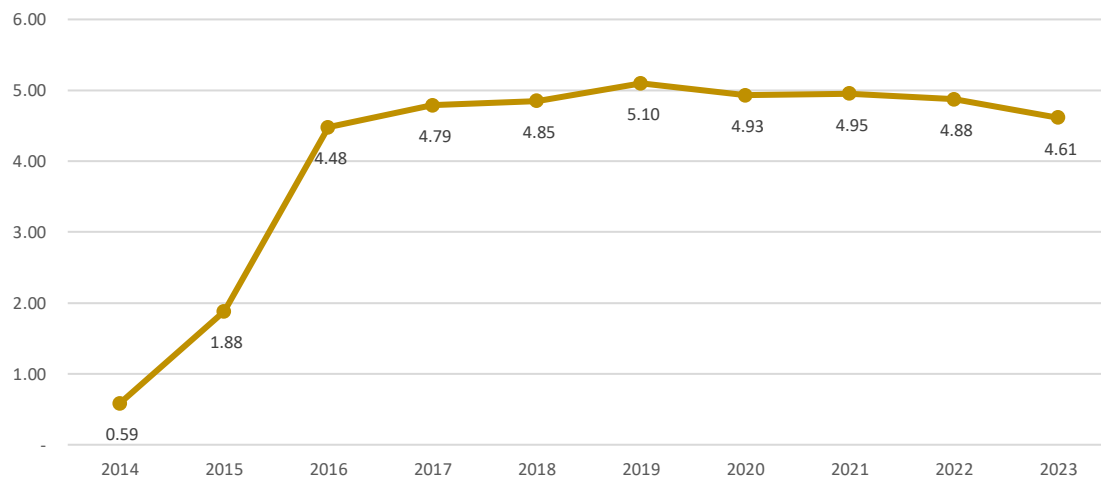
Gambar 4.21 Realisasi Belanja (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar) 2014-2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Belanja per kapita di Nusa Tenggara Timur meningkat cukup pesat dari tahun 2014 hingga 2019 (Gambar 4.22), lalu cenderung menurun secara perlahan hingga 2023. Peningkatan tajam dalam lima tahun pertama dapat dikaitkan dengan kenaikan total belanja daerah yang tidak diiringi pertumbuhan jumlah penduduk yang sebanding, sehingga nilai belanja per individu meningkat. Hal ini menunjukkan adanya ruang fiskal yang lebih luas pada periode tersebut untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah. Penurunan yang terjadi setelah 2019 kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi fiskal yang lebih terbatas, termasuk dampak pandemi yang mengubah alokasi anggaran di banyak daerah. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tetap berjalan juga dapat menyebabkan nilai belanja per kapita

² Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, yang mencakup pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, barang dan jasa, bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial; belanja modal, yang digunakan untuk investasi aset jangka panjang seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, serta Aset lainnya; belanja tidak terduga, yang disiapkan untuk keadaan darurat; serta belanja transfer, yang meliputi belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada entitas lain. Struktur ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran untuk operasional, investasi, dan distribusi keuangan guna mendukung pembangunan serta pelayanan publik.

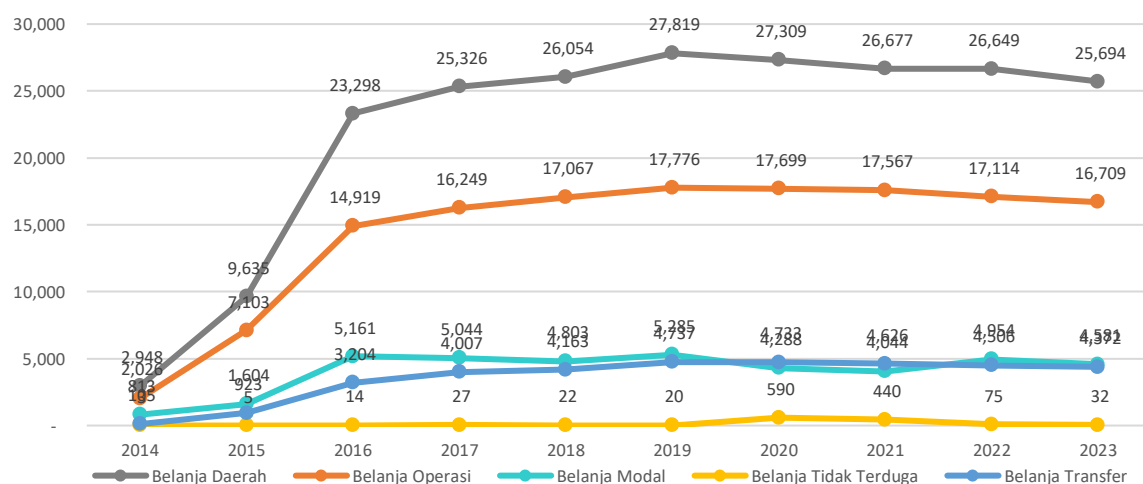
menurun apabila total belanja daerah tidak meningkat secara proporsional. Pola ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja secara total belum tentu berdampak langsung terhadap peningkatan belanja per orang, tergantung pada dinamika jumlah penduduk dan perubahan kebijakan anggaran.



Gambar 4.22 Belanja Nusa Tenggara Timur Per Kapita (Juta Rupiah) 2014-2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Struktur belanja daerah di Nusa Tenggara Timur selama periode 2014–2023 (Gambar 4.23) didominasi oleh belanja operasional, dengan porsi yang jauh lebih besar dibandingkan jenis belanja lainnya. Kenaikan belanja operasional yang terlihat terutama hingga tahun 2019 mencerminkan prioritas anggaran yang diarahkan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, termasuk gaji pegawai dan layanan dasar. Di sisi lain, belanja modal terlihat cukup fluktuatif dan tidak menunjukkan tren kenaikan yang konsisten, yang bisa jadi berkaitan dengan keterbatasan fiskal atau bergesernya fokus ke belanja rutin. Belanja transfer mengalami peningkatan pada pertengahan periode, namun tetap berada di level yang jauh lebih kecil, sedangkan belanja tidak terduga hanya muncul pada tahun-tahun tertentu, kemungkinan besar berkaitan dengan kebutuhan darurat seperti pandemi. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk menjaga jalannya fungsi pemerintahan, sementara porsi untuk investasi jangka panjang melalui belanja modal cenderung masih terbatas.

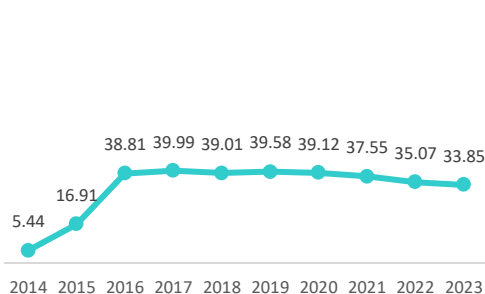


Gambar 4.23 Realisasi Belanja Daerah (Konsolidasi) Berdasarkan Jenis (Rp Miliar)

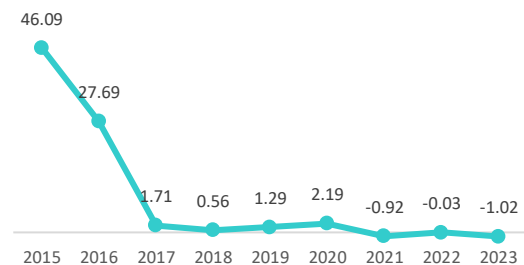
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Rasio belanja daerah terhadap PDRB (Gambar 4.24) di Nusa Tenggara Timur menunjukkan peningkatan yang cukup besar dari tahun 2014 hingga 2016, lalu cenderung stabil di kisaran 39 persen sebelum menurun secara bertahap setelah 2019. Kenaikan pada awal periode menunjukkan bahwa peran belanja daerah dalam struktur ekonomi cukup besar. Setelah mencapai titik tertinggi, rasio ini mulai menurun, yang bisa mengindikasikan bahwa pertumbuhan PDRB mulai melampaui pertumbuhan belanja daerah, atau terjadi perlambatan belanja di tingkat pemerintah daerah.

Sementara itu, rasio pertumbuhan belanja terhadap pertumbuhan PDRB (Gambar 4.25) memperlihatkan penurunan tajam dari tahun 2015 ke 2017, lalu bergerak fluktuatif dalam kisaran yang sangat kecil, bahkan negatif pada beberapa tahun terakhir. Penurunan tajam pada awal periode menunjukkan bahwa setelah ekspansi belanja di tahun-tahun sebelumnya, belanja tidak lagi tumbuh secepat PDRB. Nilai yang mendekati nol atau negatif pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa kontribusi belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi mulai menurun, atau pertumbuhan belanja mengalami perlambatan yang cukup kuat.



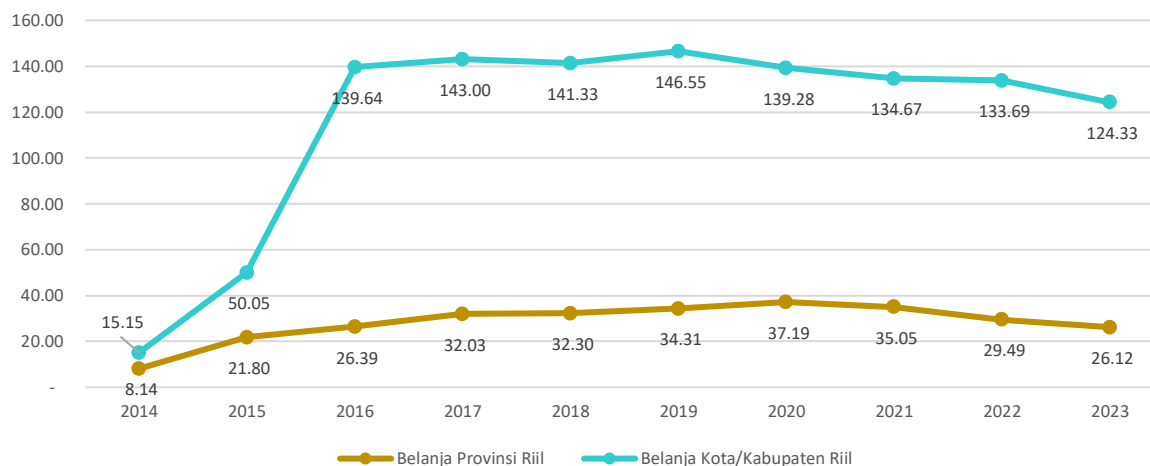
Gambar 4.24 Rasio Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur terhadap PDRB (%) 2014-2023
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 4.25 Rasio Pertumbuhan Belanja (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur dan Pertumbuhan PDRB 2016-2023
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

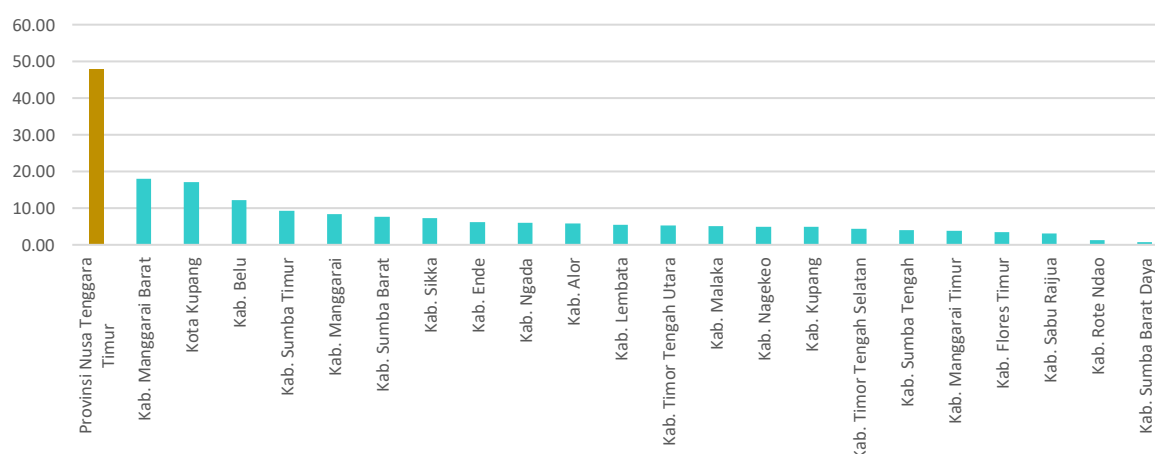
Belanja daerah riil³ di Nusa Tenggara Timur (Gambar 4.26), baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota, menunjukkan peningkatan hingga sekitar tahun 2019, kemudian cenderung menurun hingga 2023. Kenaikan yang terjadi pada awal periode mencerminkan pertumbuhan nilai belanja setelah disesuaikan dengan inflasi, terutama pada kabupaten/kota yang mencatat lonjakan besar antara 2015 dan 2016. Setelah periode tersebut, belanja riil kabupaten/kota mulai mengalami penurunan secara bertahap, yang dapat disebabkan oleh terbatasnya ruang fiskal serta pertumbuhan anggaran nominal yang tidak cukup mengimbangi inflasi. Belanja riil pemerintah provinsi mengikuti pola serupa, meskipun nilainya lebih rendah dibanding kabupaten/kota. Setelah mengalami peningkatan secara perlahan dari 2014 hingga 2020, nilai belanja riil provinsi terlihat menurun dalam tiga tahun terakhir. Penurunan ini dapat menunjukkan bahwa daya beli anggaran pemerintah daerah melemah, baik karena tekanan inflasi maupun karena pertumbuhan anggaran yang melambat. Kondisi ini juga bisa dikaitkan dengan perubahan arah kebijakan anggaran pasca-pandemi yang berdampak pada belanja pemerintah daerah.

³ Belanja daerah riil adalah nilai pengeluaran pemerintah daerah yang telah disesuaikan dengan perubahan harga atau inflasi, sehingga mencerminkan daya beli sebenarnya. Perhitungan ini dilakukan dengan membagi belanja daerah nominal dengan deflator PDB atau PDRB, untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga.



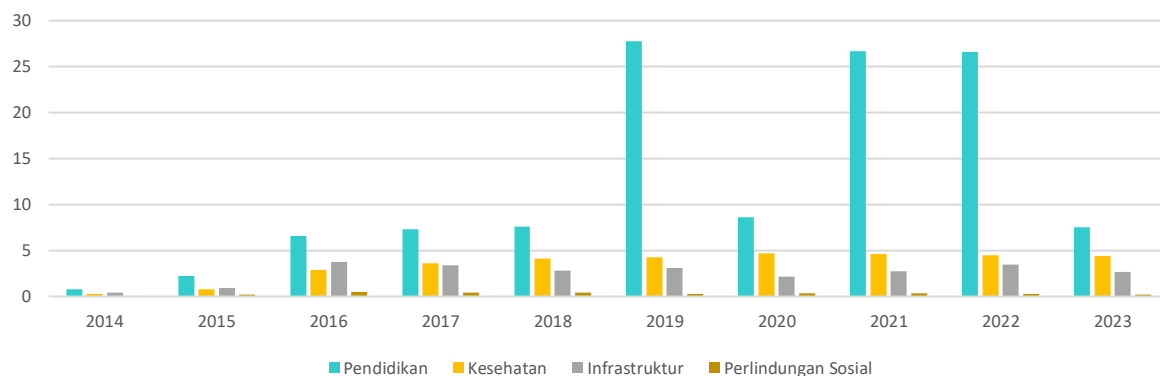
Gambar 4.26 Belanja Riil Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar), Tahun 2014 – 2023 (tahun dasar)
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Rasio PAD terhadap belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial di Nusa Tenggara Timur menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antar daerah (Gambar 4.27). Pemerintah Provinsi NTT mencatat rasio tertinggi dibanding seluruh kabupaten/kota lainnya, yang mencerminkan kapasitas fiskal yang relatif lebih besar dalam membiayai layanan dasar menggunakan pendapatan asli daerah. Kabupaten Manggarai Barat dan Kota Kupang menyusul di posisi berikutnya, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik dibandingkan daerah lain di provinsi ini. Sebaliknya, sebagian besar kabupaten di NTT memiliki rasio PAD yang rendah terhadap belanja layanan dasar, termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya, Rote Ndao, dan Sabu Raijua. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pendanaan sektor prioritas masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat maupun provinsi. Rendahnya rasio tersebut bisa dipengaruhi oleh potensi ekonomi lokal yang belum tergarap optimal atau kapasitas pemungutan PAD yang masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya dorongan peningkatan PAD, terutama di kabupaten dengan rasio rendah, agar pembiayaan layanan dasar dapat lebih stabil dan tidak sepenuhnya bertumpu pada dana eksternal.



Gambar 4.27 Rasio PAD terhadap Belanja Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Perlindungan Sosial, 2023
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

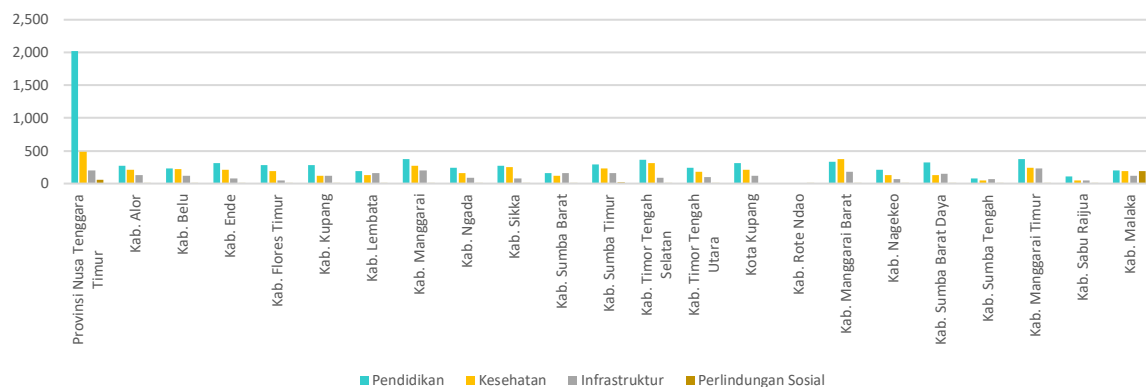
Belanja daerah di Nusa Tenggara Timur selama periode 2014–2023 (Gambar 4.28) memperlihatkan bahwa fungsi pendidikan mendapatkan alokasi terbesar dibandingkan fungsi lainnya hampir setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama dalam belanja daerah. Peningkatan alokasi terlihat cukup jelas terutama sejak 2016, yang kemudian terus dijaga pada tingkat yang tinggi hingga 2022, meskipun pada 2023 terjadi penurunan. Belanja untuk sektor kesehatan dan infrastruktur cenderung stabil dari tahun ke tahun, meskipun nilainya masih berada di bawah pendidikan. Peningkatan di dua sektor ini tampak lebih merata, tanpa lonjakan yang terlalu besar, mencerminkan alokasi yang lebih terjaga seiring bertambahnya kebutuhan pelayanan dasar. Sementara itu, belanja perlindungan sosial relatif kecil sepanjang periode ini, baik dari sisi nilai maupun tren perkembangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran lebih difokuskan pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan alokasi untuk perlindungan sosial belum menjadi prioritas utama dalam struktur belanja daerah.



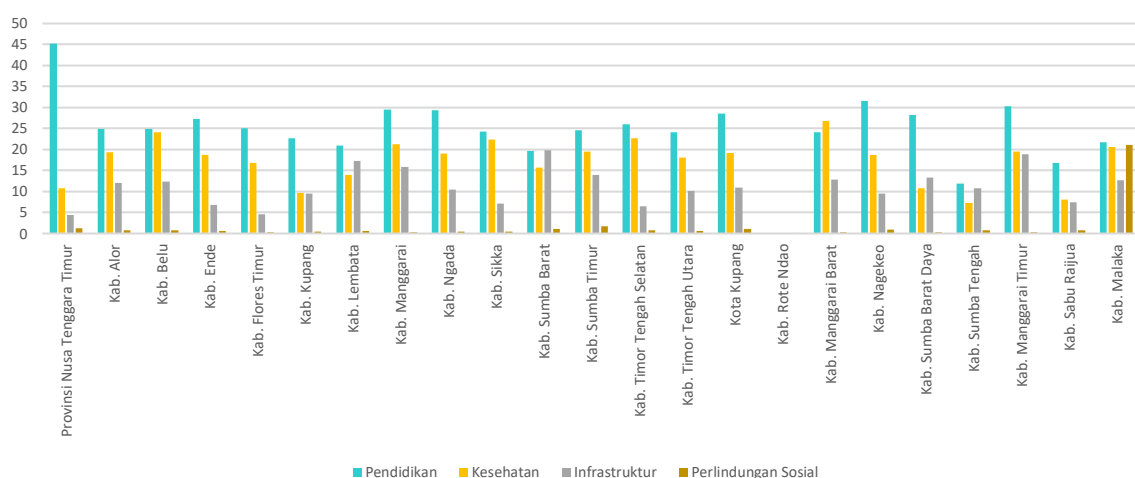
Gambar 4.28 Belanja Daerah (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Fungsi, 2014-2023 (Rp triliun)

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Alokasi belanja daerah di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 (Gambar 4.29 dan Gambar 4.30) memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan sektor dengan alokasi terbesar di hampir seluruh kabupaten dan kota. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran. Persentase belanja pendidikan terhadap total belanja juga terlihat mendominasi, meskipun besaran absolut belanjanya bervariasi antar wilayah. Infrastruktur menjadi sektor berikutnya yang banyak mendapat alokasi, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi dan kebutuhan pembangunan fisik yang lebih tinggi. Beberapa daerah juga mencatat alokasi yang cukup besar untuk sektor kesehatan, menandakan adanya kebutuhan pelayanan dasar yang mendesak. Sementara itu, perlindungan sosial memperoleh alokasi paling kecil di sebagian besar daerah. Rendahnya alokasi ini bisa disebabkan karena banyak program perlindungan sosial dilaksanakan oleh pemerintah pusat, bukan oleh daerah. Perbedaan pola alokasi ini mencerminkan variasi karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah dalam mengelola anggaran mereka.



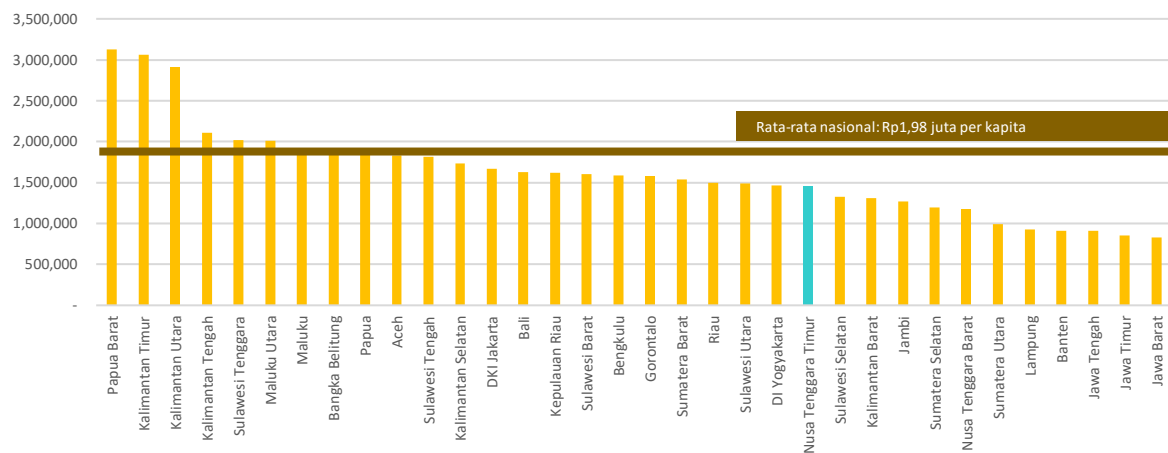
Gambar 4.29 Belanja Masing-masing Kota dan Kabupaten Berdasarkan Fungsi (Rp Miliar), 2023
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



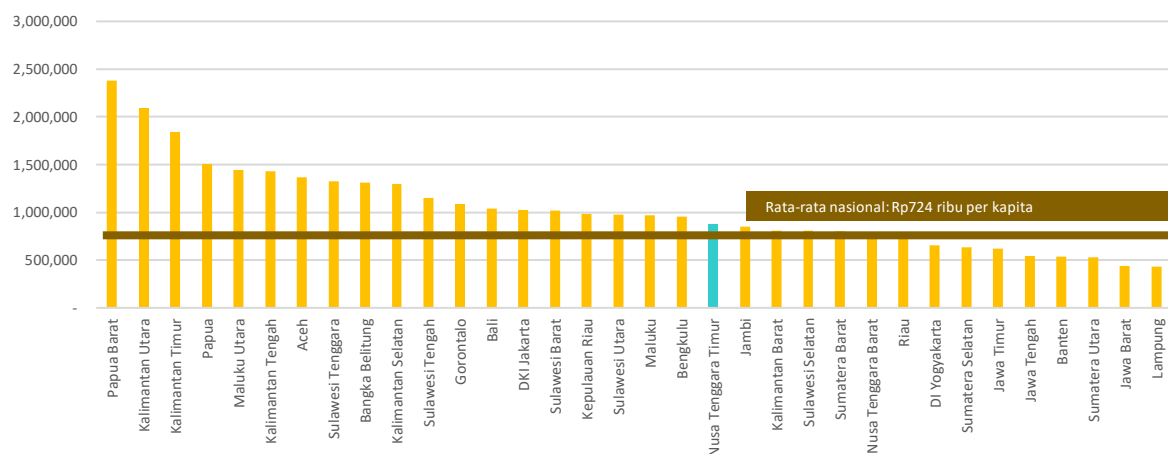
Gambar 4.30 Rasio Belanja per Fungsi terhadap Total Belanja masing-masing Kota dan Kabupaten (%), 2023
Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Belanja fungsi per kapita di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi pelayanan publik masih berada di bawah rata-rata nasional (Gambar 4.31). Untuk fungsi pendidikan, alokasi per kapita tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan fiskal daerah dalam mendukung sektor pendidikan, meskipun sektor ini merupakan salah satu prioritas utama dalam struktur belanja daerah. Sementara itu, belanja kesehatan di NTT tercatat berada sedikit di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap layanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini cukup kontras dengan belanja untuk fungsi perlindungan sosial dan infrastruktur yang berada di bawah rerata nasional. Terutama pada perlindungan sosial, nilai belanja per kapita NTT berada di antara provinsi dengan belanja paling rendah, yang menandakan perlunya peningkatan perhatian di sektor ini. Secara keseluruhan, belanja per kapita di NTT mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meskipun masih diperlukan penguatan alokasi di beberapa fungsi untuk mencapai standar nasional.

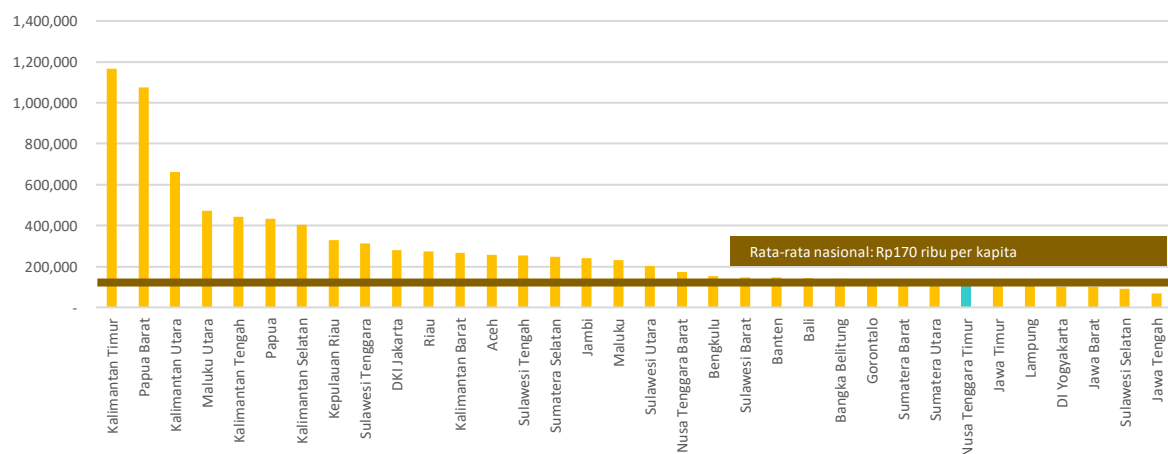
Belanja Fungsi Pendidikan (Rp per kapita)

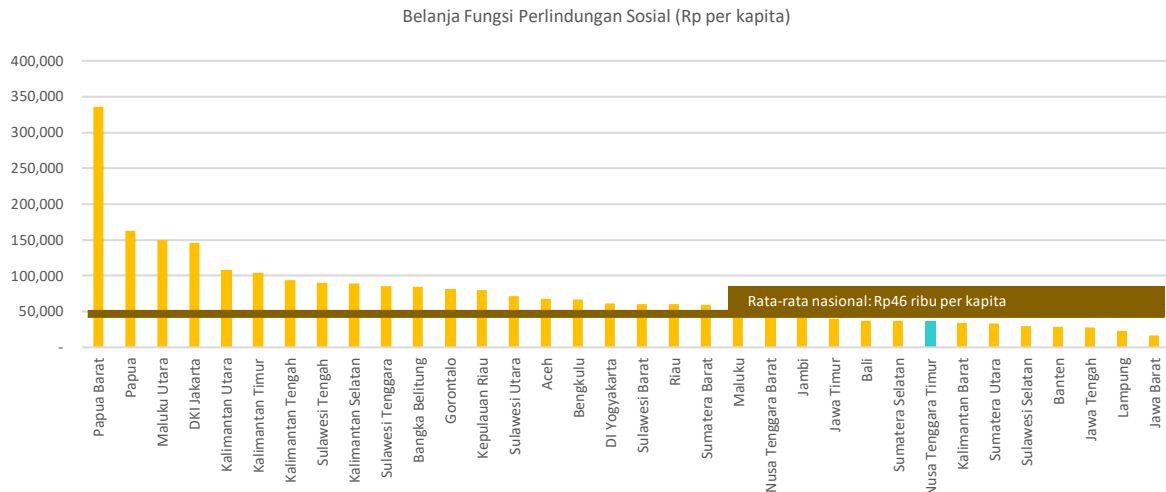


Belanja Fungsi Kesehatan (Rp per kapita)



Belanja Fungsi Infrastruktur (Rp per kapita)



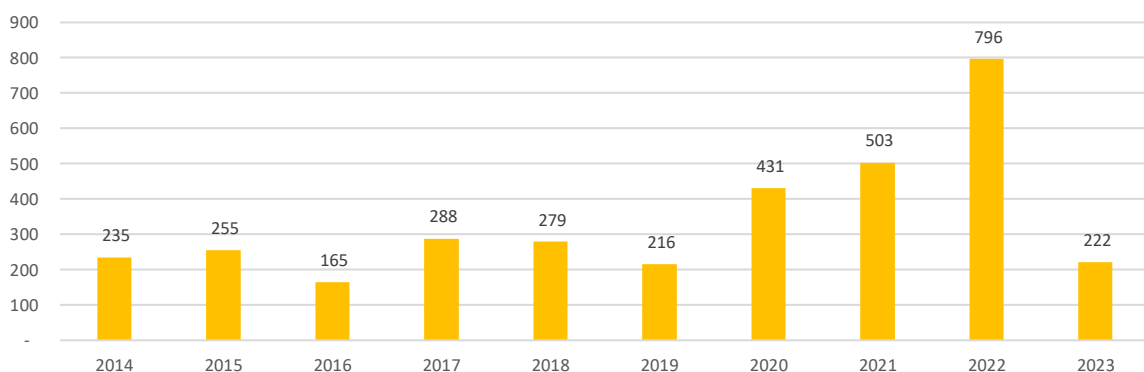


Gambar 4.31 Belanja per Kapita per Fungsi Provinsi di Indonesia, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

4.3. Analisis Pembiayaan Daerah

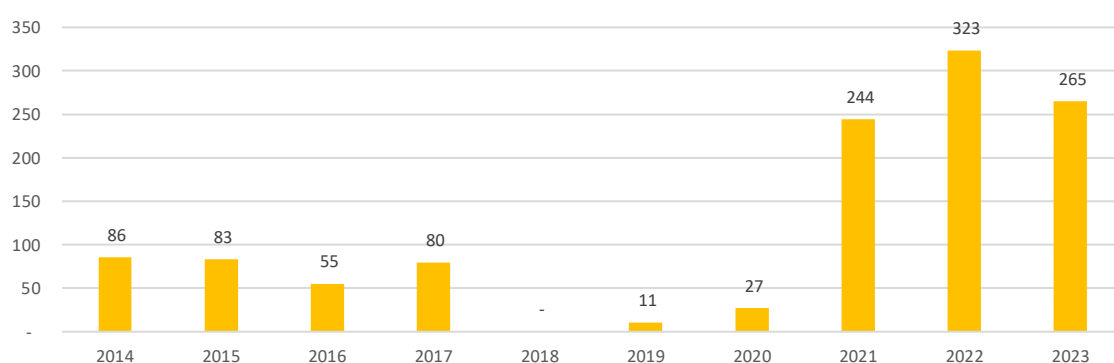
Penerimaan pembiayaan di Nusa Tenggara Timur selama periode 2014–2023 menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan nilai yang cukup tinggi pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Gambar 4.32). Kenaikan tersebut didorong oleh masuknya sumber pembiayaan dari pinjaman daerah, yang menambah besarnya penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut. Sementara pada sebagian besar tahun lainnya, pembiayaan lebih banyak bersumber dari penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya (SILPA), yang perannya relatif konsisten dari tahun ke tahun. Variasi dalam jumlah pembiayaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyesuaikan strategi pembiayaan dengan kebutuhan dan kondisi fiskal masing-masing tahun. Saat terjadi defisit anggaran, pembiayaan menjadi instrumen penting untuk menutup kekurangan, baik melalui pemanfaatan SILPA maupun sumber lain seperti pinjaman. Namun, ketergantungan pada pembiayaan dapat menimbulkan tantangan tersendiri jika tidak diiringi dengan pengelolaan kas yang efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, besarnya pembiayaan yang tidak seluruhnya terserap juga berkaitan dengan adanya *idle cash* yang cukup besar, yang mencerminkan potensi perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.



Gambar 4.32 Realisasi Penerimaan Pembiayaan (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar), 2014-2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Realisasi pengeluaran pembiayaan di Nusa Tenggara Timur selama periode 2014–2023 menunjukkan nilai yang relatif rendah hingga tahun 2020, kemudian meningkat cukup tinggi pada tiga tahun terakhir (Gambar 4.33). Peningkatan tersebut berkaitan dengan meningkatnya aktivitas pembiayaan, seperti penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran cicilan pokok utang. Selain itu, pembentukan dana cadangan juga mulai terlihat sebagai bagian dari strategi pengelolaan pembiayaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Variasi pengeluaran pembiayaan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menggunakan instrumen pembiayaan tidak hanya untuk mendukung investasi melalui penyertaan modal, tetapi juga untuk mengelola kewajiban keuangan jangka menengah. Meningkatnya proporsi pembiayaan pada akhir periode juga mencerminkan perubahan dalam perencanaan fiskal, termasuk persiapan menghadapi kebutuhan belanja di masa mendatang. Namun demikian, pengeluaran pembiayaan yang lebih tinggi perlu disertai dengan evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.



Gambar 4.33 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan (Konsolidasi) Nusa Tenggara Timur (Rp Miliar), 2014–2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Selama periode 2014–2023, struktur fiskal Nusa Tenggara Timur memperlihatkan dinamika yang mencerminkan keterbatasan kapasitas fiskal dan upaya peningkatan kemandirian daerah. Dari sisi pendapatan, rata-rata realisasi masih berada di bawah target, dengan PAD yang relatif kecil dan sangat bergantung pada pendapatan transfer, terutama di tingkat kabupaten/kota. Meskipun kontribusi PAD menunjukkan tren meningkat pada beberapa tahun, khususnya pada 2022 dan 2023, nilai tersebut belum cukup untuk secara substansial mengurangi ketergantungan terhadap pusat. Pertumbuhan pendapatan juga menurun setelah pandemi, menandakan tekanan pada sisi penerimaan daerah. Belanja daerah meningkat pada awal periode dan mencapai nilai tertinggi pada 2019–2020, didominasi oleh belanja operasional, sebelum menurun perlahan pada tiga tahun terakhir. Sektor pendidikan tetap menjadi fokus utama belanja, diikuti oleh infrastruktur dan kesehatan, sedangkan perlindungan sosial menerima porsi paling kecil. Secara riil, belanja daerah menunjukkan tren penurunan setelah 2020, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, yang dapat menandakan melemahnya daya beli anggaran akibat inflasi dan pertumbuhan fiskal yang tidak sebanding. Dalam konteks pembiayaan, sumber utama berasal dari pemanfaatan SILPA yang konsisten digunakan dari tahun ke tahun, sementara pinjaman menjadi lebih menonjol pada 2022. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meningkat pada akhir periode, terutama untuk penyertaan modal dan pembayaran kewajiban utang. Secara keseluruhan, kondisi fiskal Nusa Tenggara Timur masih dipengaruhi oleh keterbatasan penerimaan daerah, dominasi belanja rutin, serta pemanfaatan pembiayaan yang menyesuaikan kebutuhan fiskal dari tahun ke tahun.

5. Telaah Kualitas Belanja di Provinsi Nusa Tenggara Timur

5.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mendorong daya saing daerah. Dalam konteks pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sektor pendidikan terus ditempatkan sebagai prioritas utama, mengingat perannya yang strategis dalam memutus rantai kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. RPD NTT Tahun 2024–2026 menggarisbawahi bahwa peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan merupakan elemen penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dan memperkuat daya saing wilayah.

Tantangan lainnya dalam sektor pendidikan NTT adalah belum optimalnya mutu layanan pendidikan serta akses yang tidak merata. Masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Selain itu, distribusi tenaga pendidik yang belum merata menjadi tantangan serius, terutama di daerah terpencil yang mengalami kekurangan guru berkualitas (RPJMD NTT 2018-2023).

Selain itu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk berada pada angka 7,82 tahun yang berarti anak-anak di NTT rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan tingkat dasar dan tidak sampai ke pendidikan tingkat menengah dan tingkat atas. Salah satu alasan yang menyebabkan hal ini terjadi adalah sering kali masyarakat merasa bahwa pendidikan adalah hal yang mahal dan tidak sanggup untuk mereka biayai. Pemerintah berusaha hadir untuk mengatasi hal ini dengan adanya alokasi Dana BOS yang disalurkan langsung ke sekolah untuk menekan biaya pendidikan sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan akses pendidikan yang murah dan berkualitas (KFR, 2023).

Di sisi lain, rendahnya angka akreditasi sekolah di NTT juga menjadi perhatian. Sebagian besar sekolah masih belum memiliki akreditasi yang memadai, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data menunjukkan bahwa akreditasi A untuk sekolah di NTT masih sangat rendah dibandingkan dengan standar nasional. Selain itu, kompetensi tenaga pendidik masih menjadi perhatian, dengan hasil uji kompetensi guru yang cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (RPJMD NTT 2018-2023).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengembangkan berbagai kebijakan strategis, seperti:

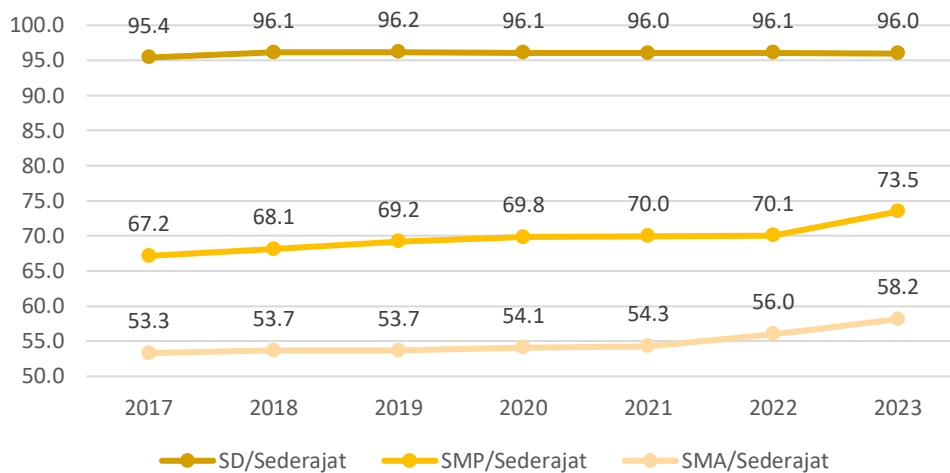
- Peningkatan akses pendidikan, termasuk penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta pembangunan sekolah di daerah terpencil.
- Pemerataan tenaga pendidik, dengan kebijakan distribusi guru ke daerah-daerah dengan kebutuhan mendesak.

- Peningkatan kualitas pembelajaran, melalui pelatihan bagi tenaga pendidik serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang lebih baik.

Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan sektor pendidikan di NTT dapat terus mengalami perbaikan, sejalan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan transformasi sosial-ekonomi di wilayah ini (RPJMD NTT 2018-2023).

5.1.1. Kondisi Indikator *Outcome* Utama Bidang Pendidikan

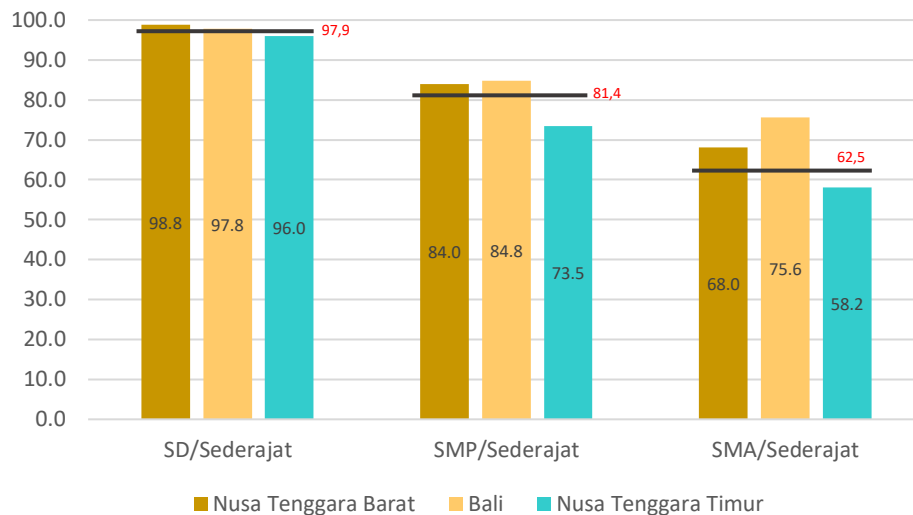
Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi berada pada tingkat SD/Sederajat dengan nilai 96% pada tahun 2023 dan terdapat gap nilai APM yang cukup signifikan dengan APM pada SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat (Gambar 5.1). APM SD/Sederajat menjadi APM yang terendah dengan nilai 58,2% pada tahun 2023, sedangkan APM SMP/Sederajat mencapai angka 73,5% pada tahun 2023. Meskipun demikian, tren peningkatan APM sudah mulai terlihat pada kedua tingkat pendidikan tersebut, menunjukkan adanya perbaikan partisipasi anak-anak yang sekolah sesuai dengan usianya. Perbaikan partisipasi dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap anak memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan sekolah, hingga mencegah terjadinya putus sekolah.



Gambar 5.1 APM Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017-2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

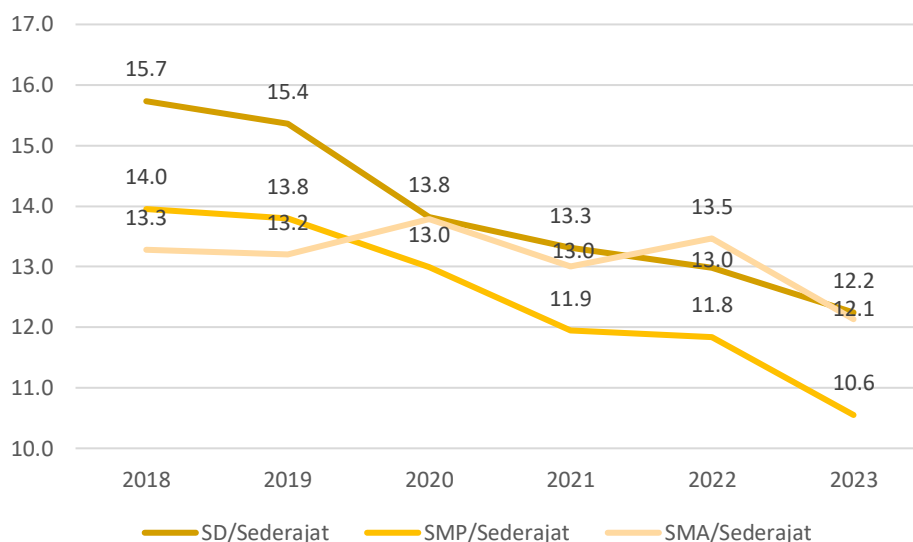
Dibandingkan dengan provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, APM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan APM yang terendah pada semua tingkat Pendidikan (Gambar 5.2). Gap terbesar dengan provinsi lain terjadi pada tingkat SMA/Sederajat, di mana APM Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 hanya mencapai 58,2%, sedangkan APM Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berurutan adalah 75,6% dan 68%. APM Provinsi Nusa Tenggara Timur juga berada di bawah nilai nasional. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu bersinergi untuk mengejar ketertinggalan APM yang terjadi.



Gambar 5.2 APM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan Provinsi Lain dan Nasional

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Melihat perbandingan jumlah murid dan jumlah guru, rasio murid-guru Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren penurunan kecuali pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat, dengan nilai rasio terendah berada pada tingkat SMP/Sederajat – 1 guru mengawasi 11 murid (Gambar 5.3). Tingkat penurunan rasio murid-guru yang paling besar juga berada pada tingkat SMP/Sederajat, sedangkan relative lambat pada tingkat SMA/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakmerataan ketersediaan guru antar tingkat pendidikan. Pemerintah perlu memastikan pemerataan penempatan guru untuk memastikan terciptanya pemerataan pendidikan yang berkualitas.

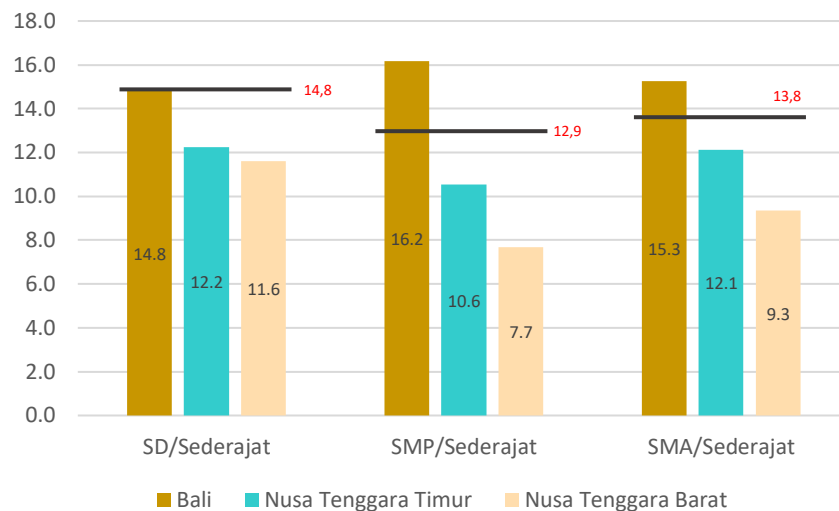


Gambar 5.3 Rasio Murid-Guru Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Dibandingkan dengan provinsi lain dan nilai nasional, rasio murid-guru Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah lebih rendah dibandingkan Provinsi Bali dan berada di bawah nilai nasional (Gambar

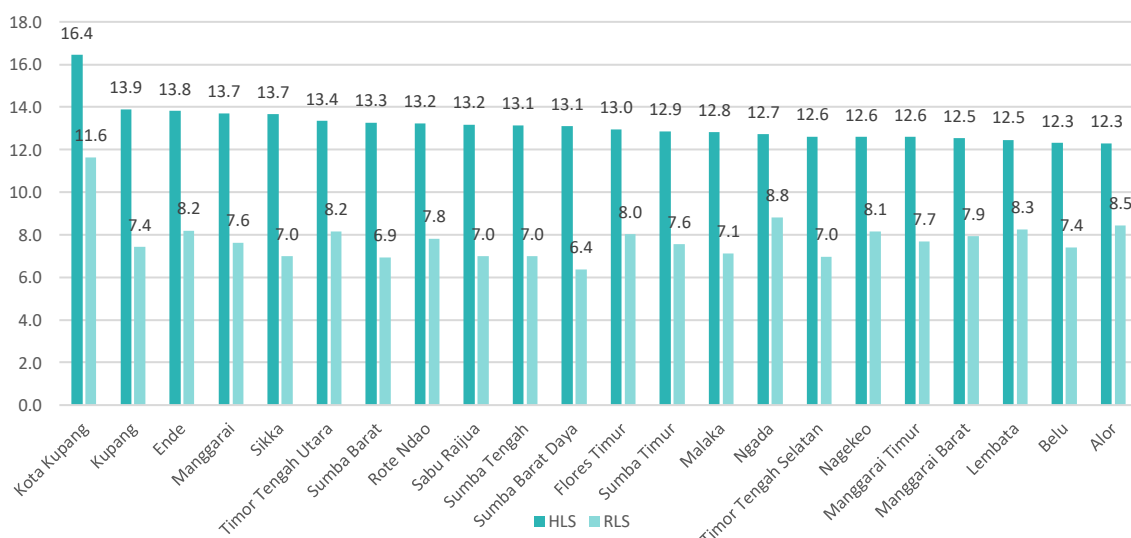
5.4). Pada Provinsi Bali, 1 guru SD/Sederajat mengawasi 15 murid, lalu 1 guru SMP/Sederajat mengawasi 16 murid, dan pada SMA/Sederajat, 1 guru mengawasi 15 murid. Sementara itu, pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1 guru pada masing-masing tingkat pendidikan mengawasi 11-12 murid. Meskipun rasio murid-guru sudah cukup rendah, tetapi hal tersebut belum cukup untuk menjadi jaminan bahwa kualitas pembelajaran yang terjadi sudah baik.



Gambar 5.4 Rasio Murid-Guru Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dengan Pembandingnya

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Membandingkan kinerja pelayanan pendidikan antar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, nilai RLS bervariasi, dengan nilai tertinggi diraih oleh Kota Kupang (11,6 tahun), sedangkan nilai terendah diperoleh Kabupaten Sumba Barat Daya (6,4 tahun) (Gambar 5.5). RLS yang bervariasi pada dasarnya menunjukkan ketidakmerataan kinerja pelayanan pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat gap RLS yang cukup signifikan antara Kota Kupang dengan kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dengan rata-rata RLS 7,8 tahun, artinya secara umum, penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya mengikuti pendidikan wajib belajar 9 atau bahkan 12 tahun.



Gambar 5.5 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2023

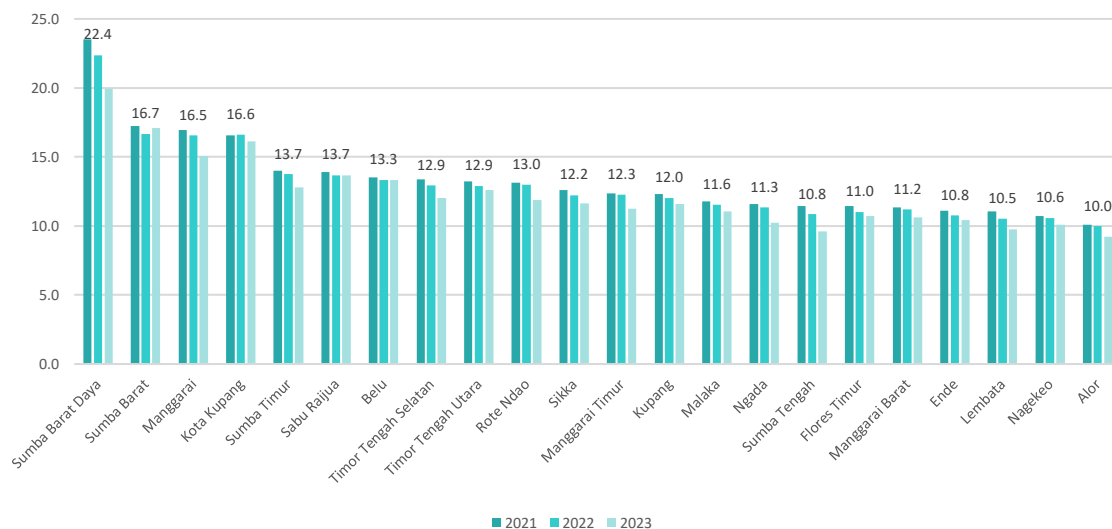
Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Data HLS yang mengukur rata-rata lama waktu seseorang diperkirakan akan mengenyam pendidikan formal menunjukkan bahwa HLS kabupaten/kota bervariasi dari 12-16 tahun, dengan nilai tertinggi diraih oleh Kota Kupang (16,4 tahun), sedangkan HLS terendah berada di Kabupaten Alor (12,3 tahun) (Gambar 5.5). Gap antara HLS dengan RLS yang paling signifikan berada di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk memperkecil gap tersebut, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu bersinergi untuk mengurangi angka putus sekolah dan menyediakan program pendidikan non-formal atau kejar paket pagi penduduk dewasa.

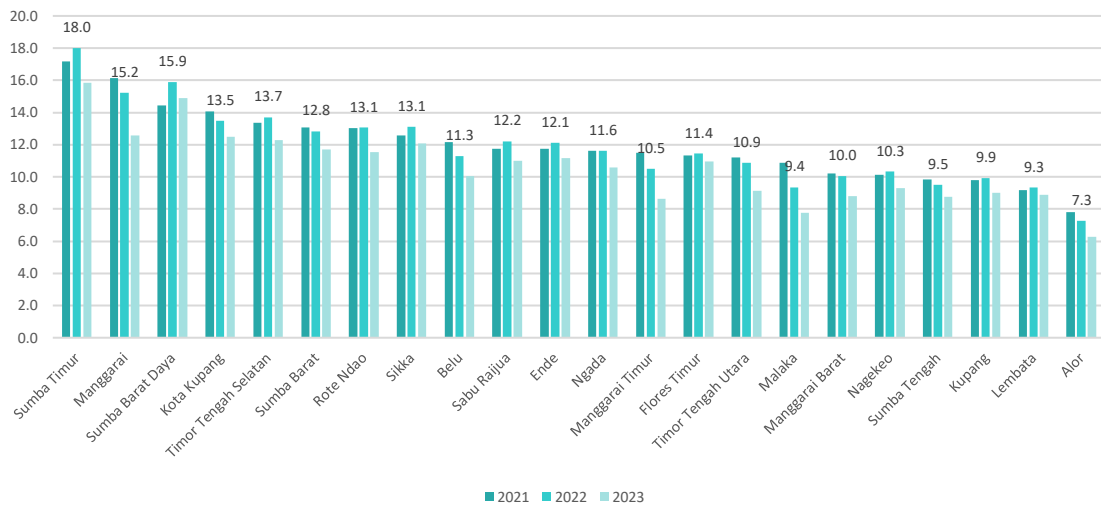
5.1.2. Analisis Disparitas dan Mapping Layanan Pendidikan Provinsi NTT

Data rasio murid-guru kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa rasio tertinggi diraih oleh Kabupaten Sumba Barat Daya pada tingkat SD/Sederajat dan Kabupaten Sumba Timur pada tingkat SMP/Sederajat, dengan indikasi tren penurunan rasio secara umum yang sudah mulai terlihat pada kedua tingkat pendidikan (Gambar 5.6). Pada tingkat SD/Sederajat, 1 guru di Kabupaten Sumba Barat Daya mengawasi 22 murid, sedangkan di Kabupaten Alor, 1 guru mengawasi 10 murid. Dengan rasio murid-guru bernilai 1:13 pada tingkat provinsi, kabupaten/kota yang nilai rasio murid guru nya masih tinggi adalah Kabupaten Sumba Barat Daya (1:22), Kabupaten Sumba Barat (1:17), Kota Kupang (1:17), Kabupaten Manggarai (1:16), Kabupaten Sumba Timur (1:14), Kabupaten Sabu Raijua (1:14), Kabupaten Belu (1:13), Kabupaten Rote Ndao (1:13). Adapun mayoritas rasio murid-guru kabupaten/kota pada tingkat SMP/Sederajat masih cukup tinggi melebihi nilai rasio murid-guru provinsi. Untuk SMA/Sederajat, rasio murid-guru sudah berada di bawah nilai nasional.

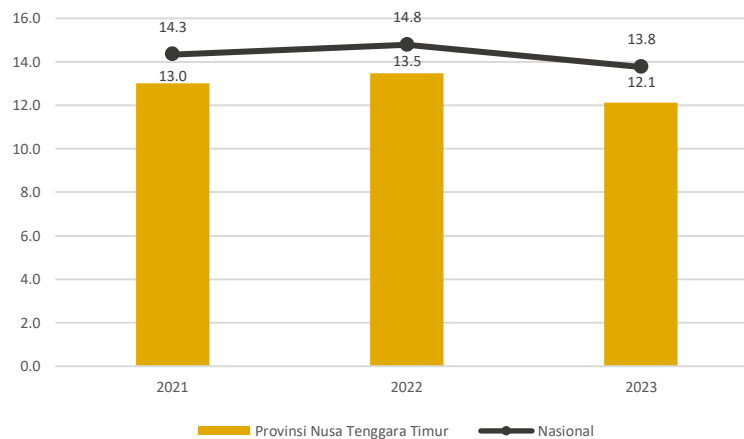
SD/Sederajat



SMP/Sederajat



SMA/Sederajat



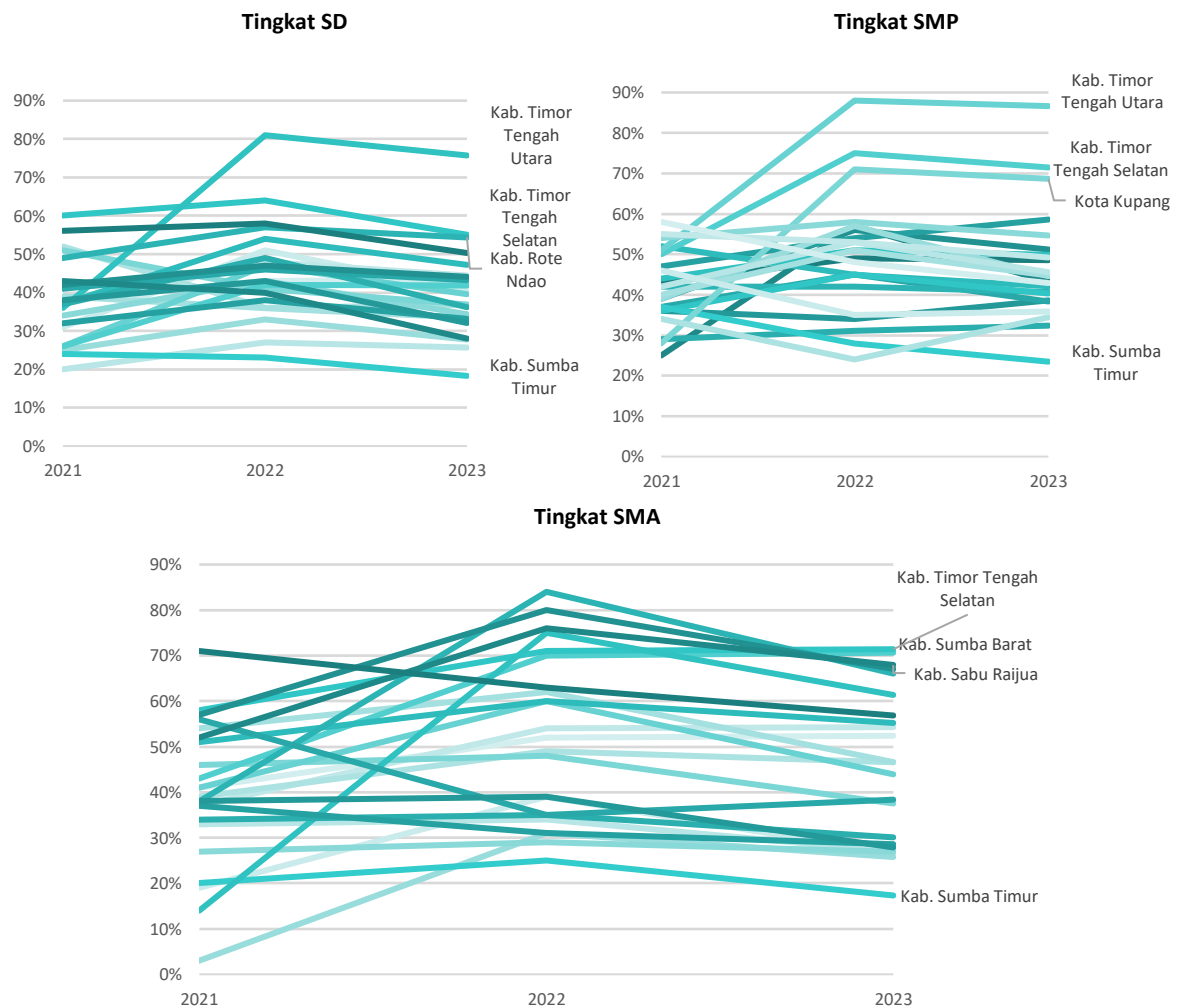
Gambar 5.6 Rasio Murid-Guru 2021-2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Ruang kelas dengan kondisi baik merupakan salah satu indikator utama yang mengukur kualitas infrastruktur di bidang pendidikan. Berdasarkan data Rapor Pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022-2024, terdapat perbedaan kualitas fasilitas pendidikan di tingkat SD, SMP, dan SMA antar Kabupaten/Kota di NTT (Gambar 5.7).

Berdasarkan grafik, kualitas ruang kelas di beberapa wilayah mengalami tren fluktuatif, dengan peningkatan di tahun 2022 namun kembali mengalami penurunan pada 2023, terutama untuk jenjang SMA. Secara keseluruhan, kualitas ruang kelas dalam kondisi baik bervariasi antar daerah serta berada di rentang 20%-90% pada periode 2021-2023 untuk ketiga jenjang pendidikan. Jika dibandingkan antar daerah, **Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Kupang memiliki kualitas ruang kelas yang lebih baik** dibandingkan wilayah lainnya. Sementara

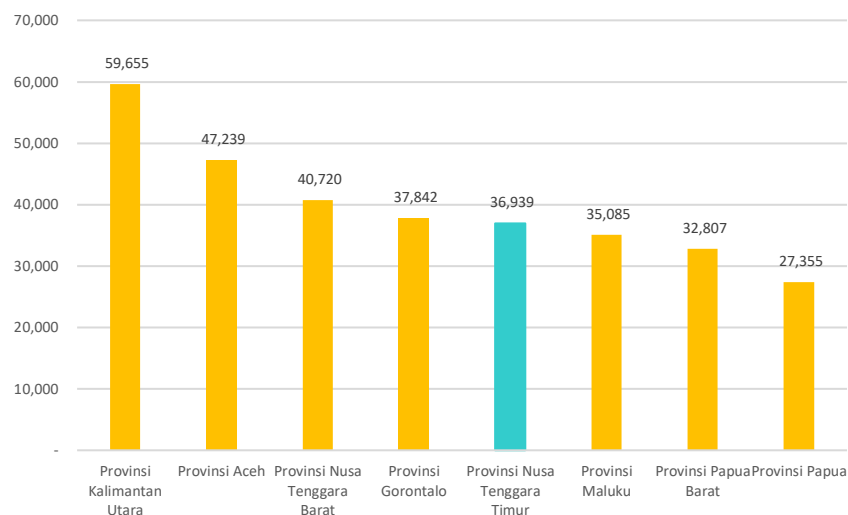
itu, **Kabupaten Sumba Timur** memiliki angka ruang kelas baik yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya untuk Tingkat SD, SMP, dan SMA.



Gambar 5.7 Ruang Kelas Kondisi Baik, 2021-2023

Sumber: Kemendikbud, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

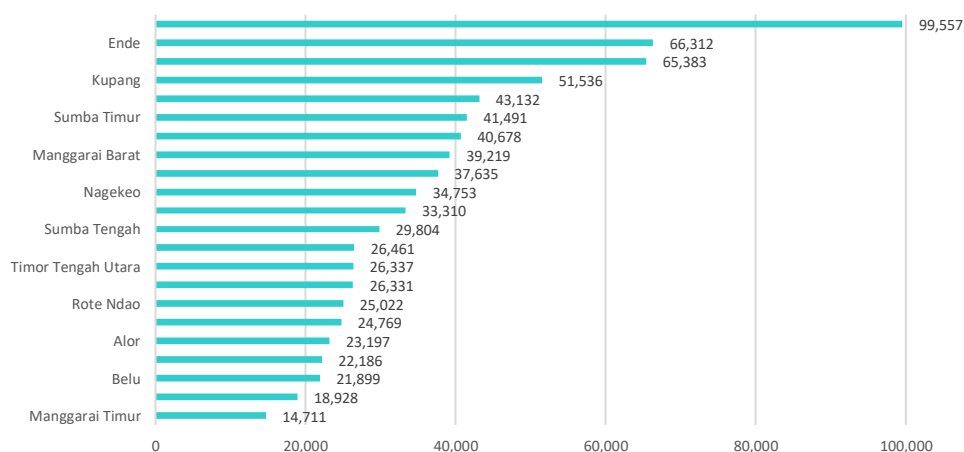
Pengeluaran pendidikan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di angka Rp36.939 per kapita per bulan, menjadi provinsi urutan keempat dari delapan provinsi SKALA dengan nilai pengeluaran pendidikan terendah (Gambar 5.8). Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata dari 8 provinsi SKALA, pengeluaran pendidikan per kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di bawah rata-rata. Dengan kata lain, rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak begitu banyak menanggung biaya pendidikan yang harus dikeluarkan secara pribadi.



Gambar 5.8 Pengeluaran Pendidikan *Out of Pocket* Per Kapita 8 Provinsi SKALA Tahun 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

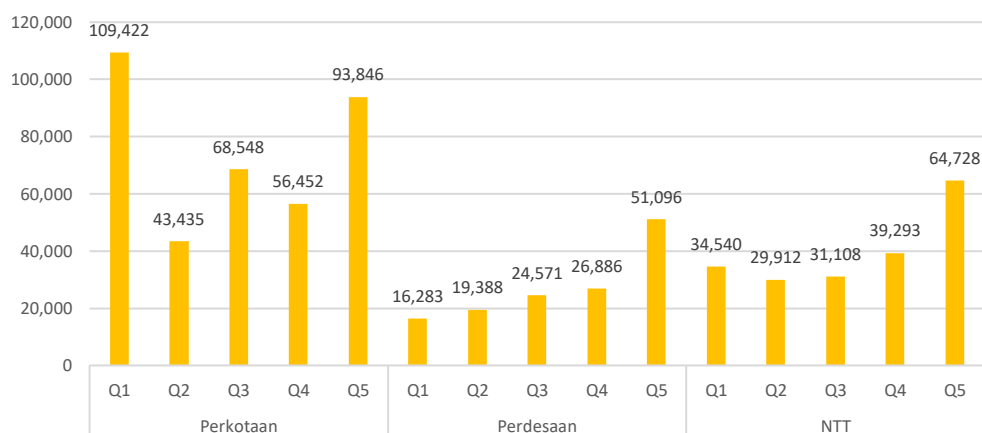
Melihat distribusi pengeluaran pendidikan per kabupaten/kota, data menunjukkan bahwa pengeluaran sangat bervariasi, dengan nilai tertinggi berada di Kota Kupang (Rp99.557 per kapita per bulan), sedangkan terendah berada pada Kabupaten Manggarai Timur (Rp14.711 per kapita per bulan) (Gambar 5.9). Sebanyak 9 kabupaten/kota, pengeluaran pendidikannya berada di atas nilai provinsi, yakni Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Kupang. Pengeluaran pendidikan di Kota Kupang hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kabupaten/kota. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan kemampuan ekonomi penduduk di Kota Kupang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya.



Gambar 5.9 Pengeluaran Pendidikan *Out of Pocket* Per Kapita Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

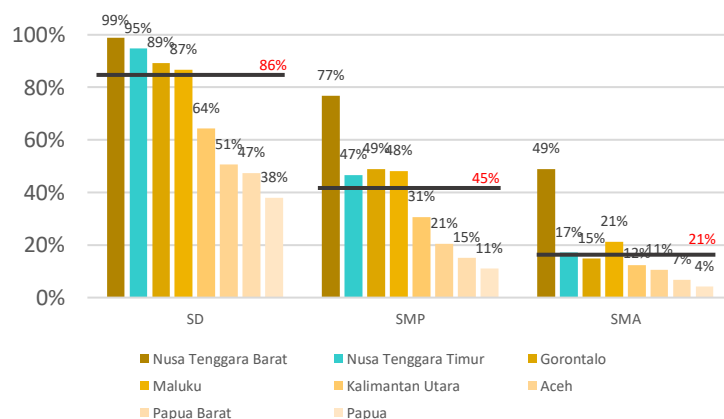
Disagregasi berdasarkan kelompok pendapatan, Gambar 5.10 menunjukkan beban finansial pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan beban terbesar ditanggung pada rumah tangga pada kuintil 5 (Gambar 5.10). Rumah tangga pada kuintil 1 menanggung biaya pendidikan Rp34.540 per kapita per bulan, sedangkan Rp64.728 pada kuintil 5. Tidak seperti pada umumnya, kuintil 1 pada wilayah perkotaan menanggung beban pendidikan yang paling tinggi – mencapai Rp109.422 per kapita per bulan.



Gambar 5.10 Disagregasi Pengeluaran Pendidikan *Out of Pocket* Per Kapita Berdasarkan Kuintil Pendapatan NTT Tahun 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

Pemetaan terhadap desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan telah dilakukan (Gambar 5.11) dan temuannya adalah proporsi desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nasional pada tingkat pendidikan SD dan SMP. Proporsi desa/kelurahan yang memiliki fasilitas pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di angka 95%, 47%, dan 17% untuk masing-masing tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan demikian, jumlah sekolah yang relatif memadai pada Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjadi justifikasi bahwa pemerintah dapat fokus meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada, dibandingkan dengan fokus peningkatan jumlah sekolah.



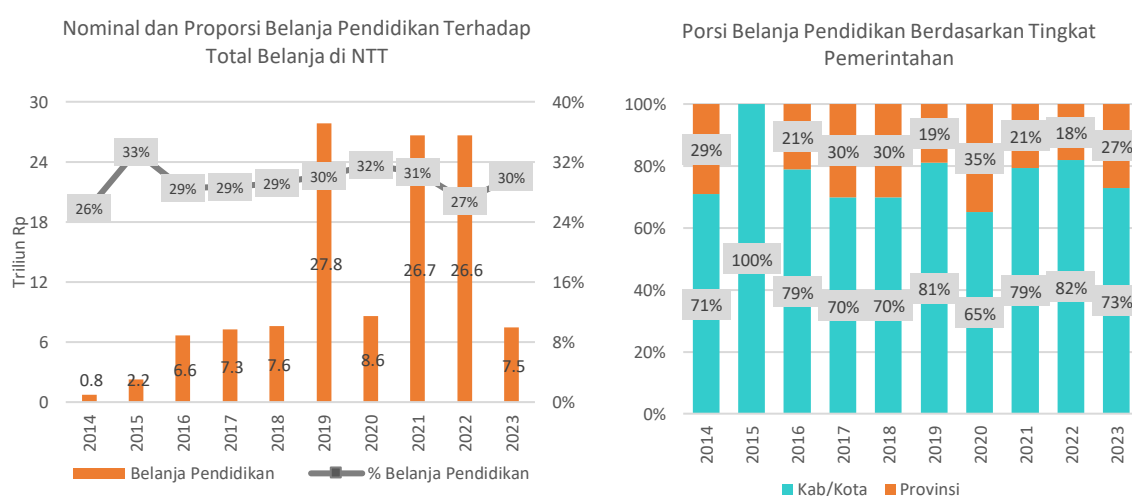
Gambar 5.11 Proporsi Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah pada Provinsi SKALA dan Nasional Tahun 2021

Sumber: BPS (2022), diolah oleh LPEM FEB UI

5.2.3. Belanja Pendidikan

Belanja pendidikan di NTT menunjukkan tren berfluktuasi dalam 10 tahun terakhir. Dari data yang tersedia, proporsi belanja pendidikan terhadap total anggaran daerah mengalami kenaikan signifikan pada periode 2019-2021, mencapai angka tertinggi 32% pada 2020. Namun, tren ini tidak bertahan lama, karena proporsi belanja kembali menurun ke 27% pada 2022 dan 30% pada 2023. Jika dibandingkan dengan ketentuan mandatory spending yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk sektor pendidikan sebesar 20%, realisasi belanja pendidikan di NTT menunjukkan inkonsistensi. Selama periode analisis, proporsi belanja pendidikan berkisar antara 10%-32%, menunjukkan adanya variasi dalam alokasi anggaran pendidikan setiap tahunnya (Gambar 5.12).

Selain itu, distribusi belanja pendidikan berdasarkan tingkat pemerintahan juga mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2014-2016, kabupaten/kota masih mendominasi belanja pendidikan dengan porsi lebih dari 70%, sementara provinsi hanya berkontribusi sekitar 20%-30%. Namun, sejak 2020, proporsi belanja pendidikan di tingkat provinsi mengalami kenaikan, mencapai 35% pada 2020 sebelum kembali turun ke 18%-27% pada 2021-2023. Perubahan tren belanja pendidikan ini mencerminkan dinamika dalam kebijakan alokasi anggaran daerah, di mana prioritas pembangunan yang bergeser turut mempengaruhi besaran anggaran pendidikan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa alokasi belanja pendidikan tidak hanya memenuhi aspek kuantitatif dalam *mandatory spending*, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaannya guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di NTT.



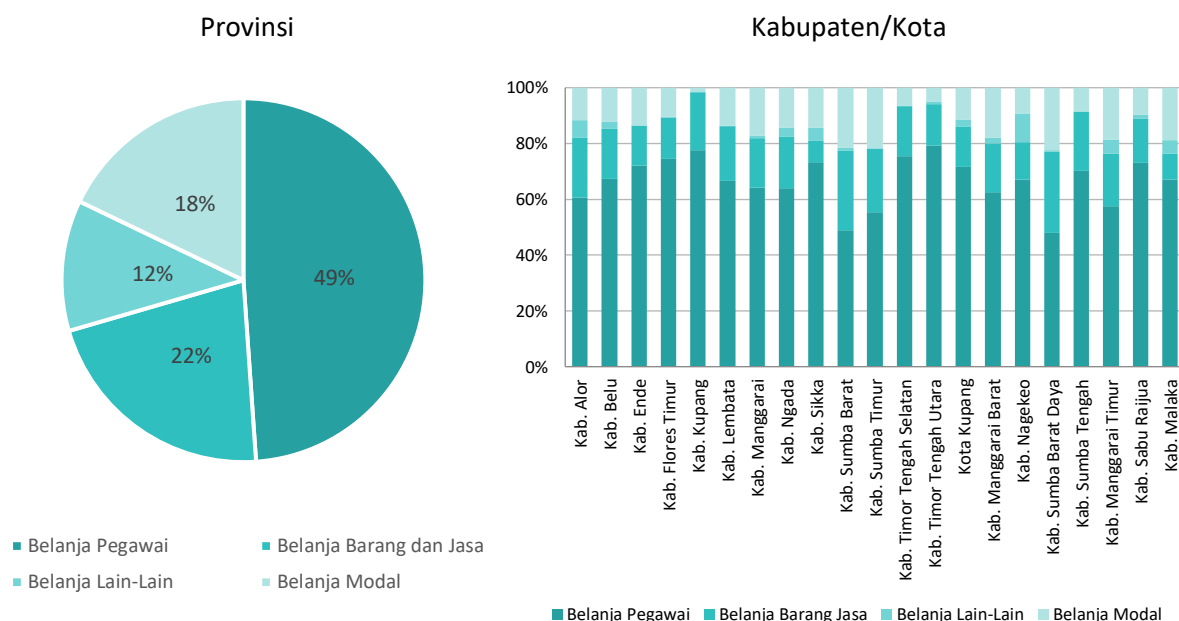
Gambar 5.12 Belanja Pendidikan NTT
Sumber: DJPK, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

Pada tahun 2023, **belanja pendidikan NTT masih didominasi oleh belanja pegawai**, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, alokasi belanja pegawai mencapai 49% dari total anggaran pendidikan, sementara belanja barang dan jasa sebesar 22%, belanja modal 12%, dan belanja lain-lain 18% (Gambar 5.13).

Di tingkat **kabupaten/kota**, pola belanja serupa terlihat, di mana belanja pegawai tetap menjadi komponen utama. Meskipun terdapat variasi antar daerah, sebagian besar kabupaten/kota mengalokasikan **lebih dari separuh anggaran pendidikan untuk belanja pegawai**, sementara sisanya tersebar pada belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya. Perbedaan proporsi ini

mencerminkan perbedaan prioritas kebijakan di tiap daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan.

Secara keseluruhan, meskipun belanja pendidikan di NTT telah memenuhi alokasi anggaran yang cukup besar, dominasi belanja pegawai menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan. **Belanja modal dan belanja barang/jasa masih perlu ditingkatkan**, terutama dalam aspek infrastruktur sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran, guna memastikan pendidikan di NTT dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.



Gambar 5.13 Jenis Belanja Pendidikan NTT⁴, 2023

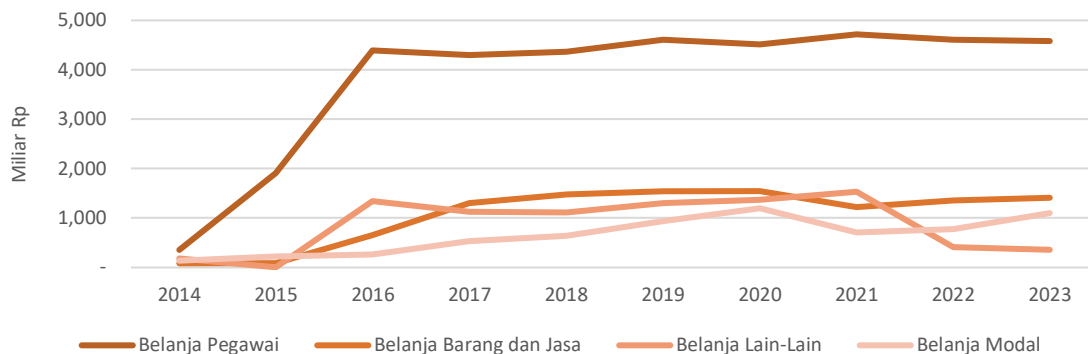
Sumber: DJPK, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

Secara keseluruhan, belanja pendidikan di NTT masih mengikuti pola yang konsisten dalam satu dekade terakhir. **Belanja pegawai tetap mendominasi pengeluaran di sektor pendidikan**, dengan peningkatan tajam pada periode 2014-2016, sebelum stabil pada kisaran 4.000-4.500 miliar rupiah sejak 2017. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam anggaran pendidikan, menunjukkan bahwa pengeluaran masih difokuskan pada aspek tenaga kerja dibandingkan dengan pengembangan infrastruktur atau peningkatan kualitas pendidikan (Gambar 5.14).

Sementara itu, belanja barang dan jasa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada 2015-2017, namun tetap cenderung stagnan setelahnya. Belanja modal, yang mencerminkan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, relatif lebih kecil dibandingkan komponen lainnya, dengan tren kenaikan yang cukup stabil hingga 2021 sebelum mengalami penurunan kembali pada 2022 dan 2023. Belanja lain-lain, yang mencakup pengeluaran administratif dan kebijakan pendukung lainnya, mengalami fluktuasi lebih besar. Lonjakan terjadi pada 2017, sebelum mengalami tren menurun pada tahun-tahun berikutnya, dengan penurunan tajam setelah 2021.

⁴ Pengelompokan jenis belanja tingkat Kabupaten/Kota:

- Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset lainnya.
- Belanja lain-lain terdiri dari belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja hibah

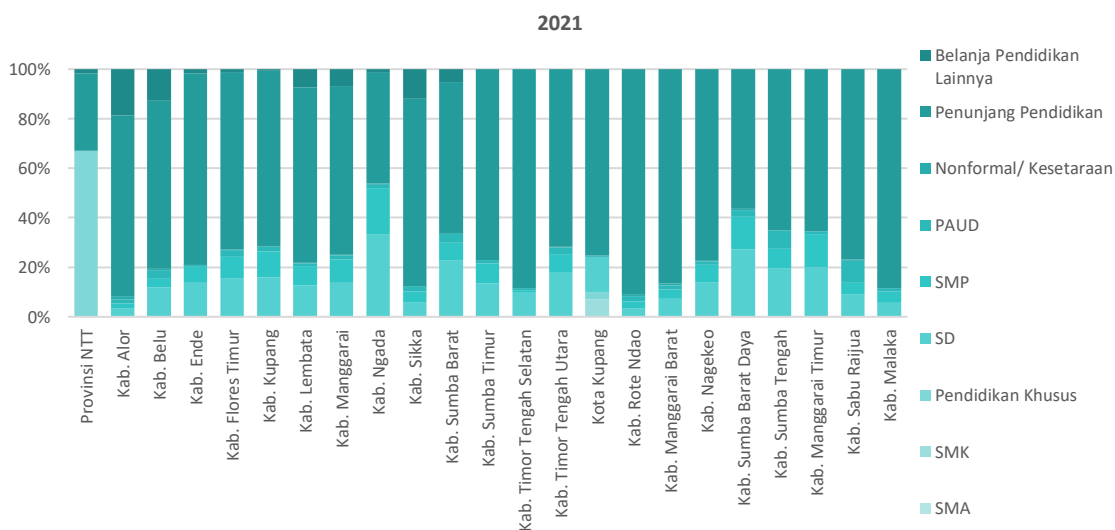


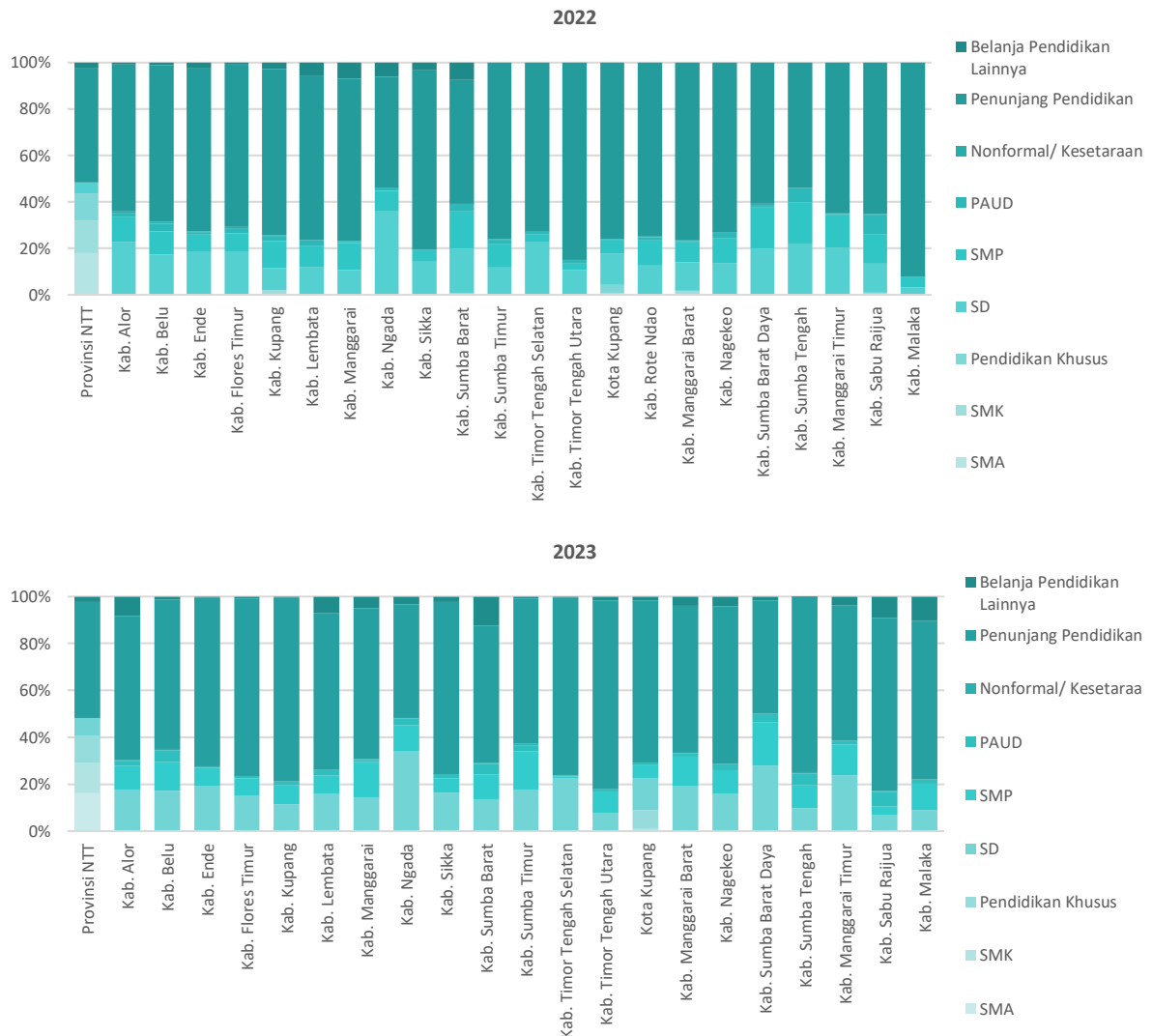
Gambar 5.14 Jenis Belanja Pendidikan NTT, 2023

Sumber: DJPK, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, **belanja program penunjang pendidikan** merupakan komponen belanja terbesar setiap tahunnya untuk semua tingkat pemerintahan, dimana anggaran ini digunakan untuk keperluan administrative. Tren belanja program pendidikan sesuai tingkat pendidikan menunjukkan pola yang relatif stabil di seluruh daerah, dengan alokasi anggaran yang mengikuti kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Jika ditinjau lebih lanjut, terdapat **peningkatan anggaran yang signifikan untuk program pendidikan SMA dan SMK**, terutama dari tahun **2022 ke 2023**, dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi NTT yang bertanggung jawab atas pendidikan menengah (Gambar 5.15).

Di sisi lain, **belanja untuk jenjang pendidikan dasar seperti SD, SMP, dan PAUD cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir**, dengan alokasi anggaran yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota. Pendidikan nonformal dan kesetaraan juga mendapatkan alokasi yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, pola belanja pendidikan di NTT masih menunjukkan dominasi pada program penunjang pendidikan, sementara alokasi untuk jenjang pendidikan menengah mengalami peningkatan signifikan.





Gambar 5.15 Belanja Program Tiap Jenjang Pendidikan di NTT, 2021-2023

Sumber: DJPK, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

5.2.4. Kualitas Belanja Pendidikan

a. Aspek Kecukupan

Nusa Tenggara Timur mencatatkan proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja daerah sebesar 30,71 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata delapan provinsi skala dan bahkan melampaui rata-rata nasional untuk belanja per kapita. Capaian ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Meskipun demikian, belanja pendidikan per kapita di NTT tercatat sebesar Rp1,3 juta, lebih rendah dari rata-rata delapan provinsi skala, tetapi tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa alokasi yang besar dalam persentase belum tentu sejalan dengan besaran nilai per individu, yang kemungkinan dipengaruhi oleh jumlah penduduk serta struktur belanja antar wilayah. Capaian ini mengindikasikan upaya daerah dalam menjaga perhatian terhadap sektor pendidikan.

Tabel 5.1 Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Pendidikan Tahun 2023

No.	Indikator	Capaian		
		Nusa Tenggara Timur	8 Provinsi Skala	Nasional
1.	Rasio Belanja Pendidikan terhadap Total Belanja (%)	30,71	26,85	-
2.	Belanja Pendidikan per Kapita (Rp)	1.373.658	1.583.184	1.182.421

Catatan: Belanja menggunakan belanja konsolidasi provinsi dan kota kabupaten

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

b. Aspek Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi, kajian ini menerapkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan orientasi input dan asumsi *variable returns to scale* (VRS). Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten/kota dapat mengurangi penggunaan input tanpa menurunkan tingkat output yang dihasilkan. Dengan kata lain, DEA digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah telah menggunakan sumber daya secara optimal dalam menyediakan layanan pendidikan.

Analisis dilakukan pada tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi dalam lingkup SKALA, mencakup data dari tahun 2021 hingga 2023. Evaluasi efisiensi dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing untuk setiap tahun observasi. Dalam analisis ini, input yang digunakan mencakup belanja pegawai per kapita, belanja nonpegawai per kapita, belanja modal per kapita, serta belanja barang dan jasa per kapita. Sementara itu, output yang diukur meliputi jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, serta rasio jumlah murid per guru untuk masing-masing jenjang tersebut.

Nilai efisiensi teknis dalam analisis ini merupakan *predicted technical efficiency*. Pada tahap awal, DEA diterapkan secara terpisah untuk setiap tahun guna memperoleh nilai efisiensi teknis tahunan. Selanjutnya, nilai tersebut diregresikan terhadap variabel jumlah populasi, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin. Hasil prediksi dari regresi tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran efisiensi dalam kajian ini.

Dalam analisis DEA, tingkat efisiensi dinyatakan dalam bentuk skor antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan efisiensi penuh (*fully efficient*), sementara nilai di bawah 1 mengindikasikan inefisiensi relatif. Jika suatu kabupaten/kota memperoleh skor efisiensi sebesar 1, maka daerah tersebut dianggap telah mengalokasikan sumber dayanya secara optimal dalam menghasilkan output pendidikan. Sebaliknya, jika suatu kabupaten/kota memiliki skor di bawah 1, misalnya 0,75, maka terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penggunaan input hingga 25% tanpa menurunkan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik atau rasio murid per guru.

Sebagai contoh, jika sebuah kabupaten dengan skor efisiensi 0,75 memiliki belanja pegawai per kapita sebesar Rp1.000.000, belanja nonpegawai per kapita sebesar Rp500.000, belanja modal per kapita sebesar Rp700.000, dan belanja barang dan jasa per kapita sebesar Rp800.000, maka secara teoritis, pengeluaran tersebut masih dapat dikurangi sekitar 25% tanpa menurunkan output pendidikan yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil analisis DEA tidak hanya mengidentifikasi kabupaten/kota yang

efisien dan tidak efisien, tetapi juga memberikan indikasi mengenai seberapa besar potensi efisiensi yang masih dapat dicapai oleh daerah yang belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis DEA yang ditampilkan dalam Tabel 5.2, efisiensi teknis dalam fungsi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan variasi antardaerah dalam tiga tahun terakhir. Secara umum, terjadi penurunan efisiensi teknis pada 2022 sebelum mengalami perbaikan pada 2023. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya pada 2022, yang kemudian diikuti oleh perbaikan di tahun berikutnya.

Beberapa daerah mencatatkan peningkatan efisiensi teknis yang cukup signifikan pada 2023 setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Kabupaten Kupang, misalnya, mencatatkan peningkatan dari 0,51 pada 2022 menjadi 0,86 pada 2023, sedangkan Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami lonjakan dari 0,45 menjadi 0,85. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Manggarai Timur, yang masing-masing mencatatkan kenaikan dari 0,44 dan 0,46 pada 2022 menjadi 0,85 dan 0,79 pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam efisiensi pengelolaan sumber daya pendidikan di daerah-daerah tersebut. Di sisi lain, beberapa daerah mempertahankan tingkat efisiensi yang relatif stabil dengan peningkatan bertahap, seperti Kabupaten Sikka yang naik dari 0,57 pada 2022 menjadi 0,76 pada 2023, serta Kabupaten Manggarai yang meningkat dari 0,51 menjadi 0,80 pada periode yang sama.

Namun, terdapat pula daerah dengan tingkat efisiensi teknis yang masih relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan. Kabupaten Sumba Tengah, misalnya, mencatatkan nilai 0,53 pada 2021, turun menjadi 0,48 pada 2022, dan kemudian meningkat menjadi 0,71 pada 2023. Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo juga mengalami pola serupa, dengan nilai yang tetap berada di bawah 0,75 pada 2023. Kota Kupang, yang tidak memiliki data pada 2021 dan 2022, mencatatkan nilai efisiensi teknis 0,79 pada 2023, menunjukkan bahwa kota ini memiliki tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya tren perbaikan efisiensi teknis di sebagian besar kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur pada 2023 setelah mengalami penurunan pada 2022. Namun, variasi antardaerah tetap besar, mengindikasikan adanya perbedaan dalam efektivitas kebijakan dan pengelolaan sumber daya pendidikan di masing-masing wilayah.

Tabel 5.2 Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Timur untuk Fungsi Pendidikan

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Alor	0,59	0,50	0,73
Kabupaten Belu	0,60	0,54	0,74
Kabupaten Ende	0,63	0,49	0,78
Kabupaten Flores Timur	0,62	0,58	0,74
Kabupaten Kupang	0,71	0,51	0,86
Kabupaten Lembata	0,56	0,48	0,74
Kabupaten Manggarai	0,66	0,51	0,80

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Ngada	0,56	0,53	0,71
Kabupaten Sikka	0,65	0,57	0,76
Kabupaten Sumba Barat	0,57	0,49	0,75
Kabupaten Sumba Timur	0,59	0,40	0,72
Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,74	0,45	0,85
Kabupaten Timor Tengah Utara	0,62	0,50	0,76
Kota Kupang	-	-	0,79
Kabupaten Rote Ndao	-	-	-
Kabupaten Manggarai Barat	0,61	0,50	0,74
Kabupaten Nagekeo	0,56	0,54	0,71
Kabupaten Sumba Barat Daya	0,67	0,44	0,85
Kabupaten Sumba Tengah	0,53	0,48	0,71
Kabupaten Manggarai Timur	0,64	0,46	0,79
Kabupaten Sabu Raijua	0,54	0,48	0,74
Kabupaten Malaka	-	-	-

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan belanja pegawai dan nonpegawai per kapita terhadap kualitas indikator infrastruktur pendidikan dan indikator layanan pendidikan berupa rasio murid per guru. Belanja pegawai per kapita menunjukkan korelasi positif dengan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik di semua jenjang pendidikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pegawai berkontribusi terhadap peningkatan penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai. Secara spesifik, nilai koefisien untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 0,035, sedangkan untuk pendidikan tinggi adalah 0,09. Namun demikian, seluruh koefisien ini tidak signifikan secara statistik.

Sebaliknya, rasio jumlah murid per guru menunjukkan korelasi negatif yang signifikan di semua jenjang pendidikan terhadap belanja pegawai per kapita, dengan koefisien -0,22 untuk pendidikan dasar (signifikan pada level 1%), -0,11 untuk pendidikan menengah (signifikan pada level 10%), dan -0,13 untuk pendidikan tinggi (signifikan pada level 1%). Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai yang lebih tinggi cenderung diikuti oleh jumlah murid per guru yang lebih rendah, yang menunjukkan peningkatan tenaga pendidik. Temuan ini menunjukkan perkembangan yang baik. Sementara itu, belanja nonpegawai per kapita, meskipun menunjukkan beberapa korelasi positif dengan rasio jumlah

murid per guru, secara keseluruhan memiliki pengaruh yang lebih kecil dan tidak konsisten di berbagai jenjang pendidikan (Tabel 5.3)

Tabel 5.3 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Non pegawai terhadap Output Pendidikan

Input	Output					
	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan dasar	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan menengah	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan tinggi	Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan dasar	Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan menengah	Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan tinggi
Belanja pegawai per kapita	0,035	0,035	0,09	-0,22***	-0,11*	-0,13***
Belanja nonpegawai per kapita	0,045	0,045	-0,00	0,16*	0,10	0,10**

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

c. Aspek Efektivitas

Mengenai pengaruh belanja pegawai dan nonpegawai terhadap lama sekolah dan hasil pembelajaran, hasilnya bervariasi. Belanja pegawai per kapita menunjukkan hubungan yang positif dengan *assessment score*, di mana koefisien 0,13 menunjukkan bahwa peningkatan dalam belanja pegawai dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Lebih lanjut, belanja pegawai memiliki korelasi yang sangat kuat dan signifikan terhadap jumlah individu di atas 15 tahun yang bisa membaca, dengan koefisien yang sangat tinggi sebesar 1,01, menandakan korelasi signifikan terhadap literasi.

Namun, belanja nonpegawai per kapita menunjukkan korelasi yang tidak signifikan terhadap lama sekolah dan *assessment score*, serta memiliki koefisien yang lebih rendah dalam kaitannya dengan literasi pada individu di atas 15 tahun. Koefisien 0,32 untuk literasi menunjukkan bahwa meskipun ada pengaruh positif, signifikansi dan kekuatan hubungannya lebih rendah dibandingkan dengan belanja pegawai. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja nonpegawai, yang mencakup komponen seperti pengadaan fasilitas atau bahan ajar, mungkin tidak seefektif belanja pegawai dalam memengaruhi indikator kualitas pendidikan. Transisi ini memperlihatkan bahwa perbedaan pengaruh antara jenis belanja tersebut dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kembali alokasi anggaran demi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan (Tabel 5.4).

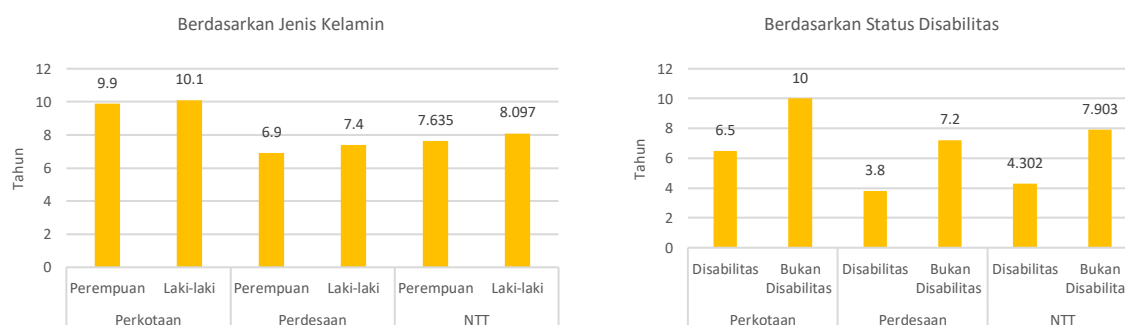
Tabel 5.4 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Outcome Pendidikan

Input	Outcome		
	Lama sekolah	<i>Assessment score</i>	Jumlah individu di atas 15 tahun yang bisa membaca
Belanja pegawai per kapita	0,019	0,13*	1,01***
Belanja nonpegawai per kapita	-0,00	-0,05	0,32***

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

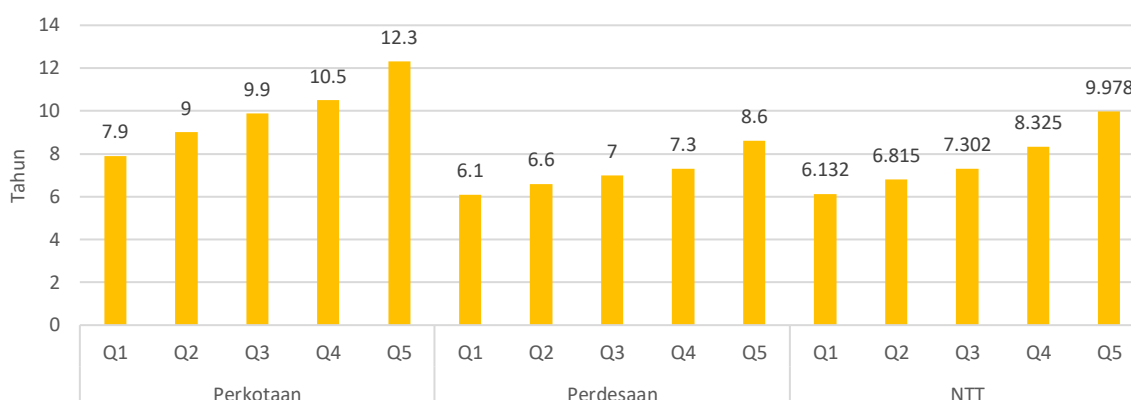
d. Aspek Keadilan

Disparitas rata-rata lama sekolah di Nusa Tenggara Timur terlihat cukup jelas ketika dilihat berdasarkan gender, kelompok pendapatan, dan status disabilitas. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tampak lebih mencolok di wilayah perdesaan, di mana laki-laki rata-rata bersekolah 7,4 tahun, sedangkan perempuan hanya 6,9 tahun. Di wilayah perkotaan, perbedaan ini lebih kecil, dengan laki-laki 10,1 tahun dan perempuan 9,9 tahun. Jika dilihat dari kelompok disabilitas, kesenjangan jauh lebih besar, terutama di wilayah perdesaan, di mana individu dengan disabilitas hanya menempuh pendidikan rata-rata 3,8 tahun, sedangkan yang bukan disabilitas mencapai 7,2 tahun. Hal serupa terlihat di wilayah perkotaan, meskipun selisihnya lebih kecil. Sementara itu, perbedaan berdasarkan kuintil pengeluaran memperlihatkan tren yang konsisten, di mana kelompok dengan tingkat pengeluaran tertinggi (Q5) memiliki rata-rata lama sekolah yang jauh lebih tinggi dibanding kelompok terendah (Q1). Di wilayah perkotaan, kelompok Q5 mencatat angka 12,3 tahun, sedangkan Q1 hanya 7,9 tahun. Di perdesaan, perbedaannya juga besar, dari 6,1 tahun (Q1) ke 8,6 tahun (Q5). Secara keseluruhan, kesenjangan berdasarkan pendapatan menunjukkan pengaruh yang paling kuat terhadap lama sekolah, diikuti oleh disabilitas, dan kemudian gender.



Gambar 5.16 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Disabilitas NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 5.17 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke atas Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

5.2. Kesehatan

Kesehatan memegang peranan strategis dalam pembangunan Provinsi NTT, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Regulasi ini menetapkan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kesehatan dasar yang berkualitas, termasuk kesehatan ibu dan anak, sebagai prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya sektor kesehatan ini juga tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2023-2026, yang menggarisbawahi perlunya penanganan terhadap angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan stunting, sebagai bagian dari indikator kinerja utama (IKU) di bidang kesehatan. Tantangan geografis, disparitas akses layanan kesehatan, dan keterbatasan SDM dan kapasitas fiskal menjadikan pemenuhan SPM di provinsi ini tidak hanya sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

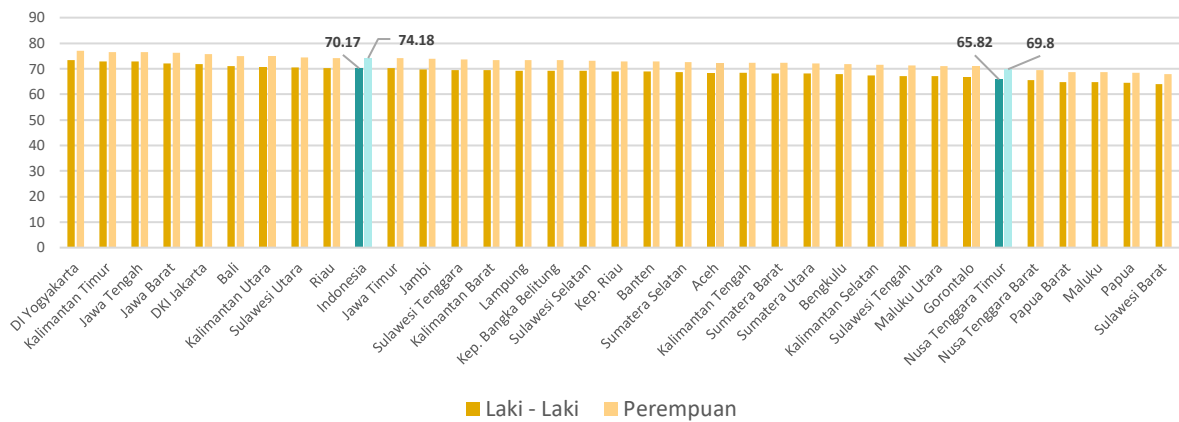
Secara umum, capaian Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi NTT masih berada jauh di bawah rata-rata nasional, 65,82 tahun untuk laki-laki dan 68,8 tahun untuk perempuan (lihat Gambar 5.20). angka ini menempatkan NTT sebagai provinsi dengan AHH terendah ke-5 berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Sedangkan indikator lainnya, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan prevalensi stunting di beberapa daerah, juga masih menjadi tantangan. Prevalensi stunting di sebagian besar wilayah Provinsi NTT hingga tahun 2023 masih mencapai angka lebih dari 30% bahkan hingga 50% di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal mencerminkan adanya urgensi penanganan stunting secara khusus dan permasalahan struktural dalam sistem kesehatan secara umum (lihat Gambar 5.21). Sementara angka kematian bayi dan angka kematian ibu juga masih lebih tinggi dari angka nasional. Permasalahan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk keterbatasan akses layanan kesehatan dan kemiskinan.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur kesehatan, termasuk ketersediaan rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis yang belum merata. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi NTT dan keberadaan daerah-daerah terpencil. Sebagai upaya menangani hal tersebut, Dinas Kesehatan NTT menyampaikan bahwa anggaran yang diterima dari DAK mayoritas digunakan untuk program Jaminan Kesehatan). Tantangan utama dihadapi dalam penurunan angka stunting dan kematian ibu dan bayi. Dengan demikian, harapannya dapat dikembangkan intervensi yang lebih strategis, seperti pengembangan sistem surveilans kesehatan yang terintegrasi dan penguatan kapasitas layanan kesehatan di tingkat lokal. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu dielaborasi dalam meningkatkan derajat kesehatan di Provinsi NTT secara berkelanjutan.

5.2.1. Kondisi Indikator Outcome Utama Bidang Kesehatan

Kondisi indikator utama kesehatan di NTT, seperti Angka Harapan Hidup (AHH), prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Morbiditas, menunjukkan tren bervariasi dalam beberapa tahun terakhir dan masih banyak mengalami tantangan dan beberapa di antaranya masih lebih rendah dibandingkan angka nasional. Sebagaimana terlihat pada Gambar 5.36, AHH Provinsi NTT pada tahun 2023 masih cukup jauh berada di bawah angka nasional. AHH NTT

tercatat sebesar 65,82 tahun untuk laki-laki dan 69,8 tahun untuk perempuan. Namun demikian, pola Perbedaan AHH antara laki-laki dan perempuan di NTT masih terlihat wajar dan konsisten dengan pola nasional, di mana perempuan memiliki AHH lebih tinggi dibanding laki-laki.



Gambar 5.18 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2023

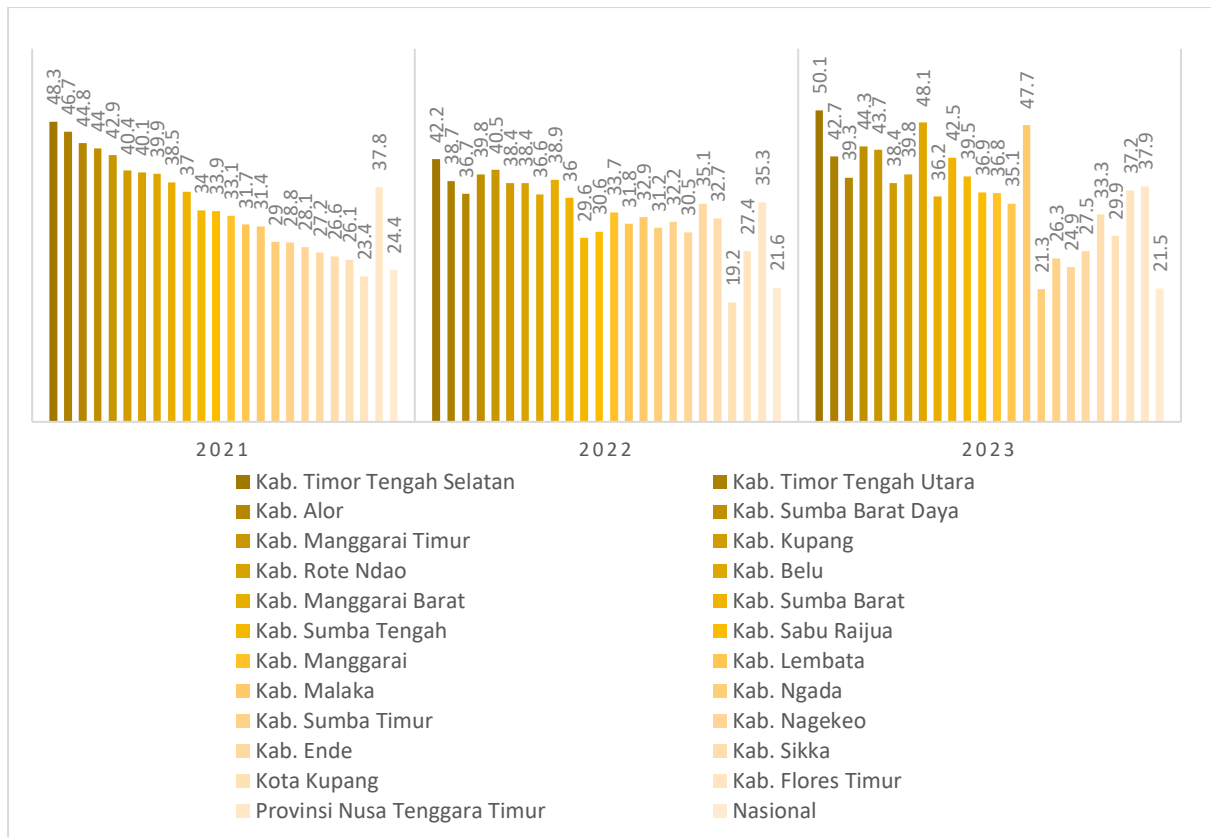
Sumber: BPS, 2024

Sementara itu, sebagaimana terlihat pada Gambar 5.21, angka prevalensi stunting Provinsi NTT secara umum mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2021-2023 dengan kondisi angka prevalensi stunting yang masih sangat tinggi. Pada tahun 2021, prevalensi stunting NTT berada pada angka 37,8% dan berhasil menurun pada tahun 2022 menjadi 35,3%. Namun demikian, angka tersebut kembali meningkat di tahun 2023 hingga mencapai angka 37,9%, lebih tinggi dibandingkan angka tahun 2021. Capaian tersebut cukup memberikan gambaran kondisi provinsi secara keseluruhan karena sebagian besar kabupaten/kotanya juga mengalami fluktuasi di tahun 2021-2023 dengan angka prevalensi stunting yang cukup tinggi di kisaran 20%-50%. Dari total 22 kabupaten/kota, hanya Kabupaten Kupang yang menunjukkan konsistensi penurunan angka prevalensi stunting sepanjang tahun 2021-2023 dengan angka prevalensi stunting secara berurutan dari tahun 2021-2023 adalah 40,4%, 38,4%, dan 38,4%. Sementara itu, terdapat 5 kabupaten/kota yang secara konsisten masih mengalami peningkatan prevalensi stunting selama periode 2021-2023, antara lain: (1) Kabupaten Manggarai (pada tahun 2021 berada pada angka 33,1% kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 33,7% dan meningkat lagi di tahun 2023 menjadi 36,8%); (2) Kabupaten Lembata (pada tahun 2021 berada pada angka 31,7%, kemudian meningkat menjadi 31,8%, dan meningkat lebih jauh ke angka 35,1% di tahun 2023); (3) Kabupaten Malaka (pada tahun 2021 berada pada angka 31,4%, meningkat di tahun 2022 menjadi 32,9%, dan semakin meningkat cukup signifikan hingga mencapai 47,7%); (4) Kabupaten Sikka (pada tahun 2021 berada pada angka 26,6%, kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 32,7%, dan masih terus meningkat menjadi 33,3%); (5) Kabupaten Flores Timur (pada tahun 2021 berada pada angka 23,4%, kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 27,4%, dan meningkat kembali hingga 37,2%). Sementara 16 kabupaten/kota lainnya di NTT menunjukkan angka yang fluktuatif.

Stunting di NTT telah menjadi salah satu fokus perhatian karena menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, NTT masih menempati posisi kedua tertinggi dalam prevalensi stunting di Indonesia dengan angka 37,9% yang berarti hampir 4 dari 10 anak balita di NTT mengalami stunting. Keterbatasan akses terhadap pangan bergizi menjadi salah satu penyebab kasus stunting masih banyak ditemui. Masyarakat NTT masih mengandalkan jagung dan ubi sebagai makanan pokok, yang

rendah kandungan protein dan mikronutrien penting. Kurangnya konsumsi terhadap protein hewani, seperti ikan, daging, dan telur, yang penting untuk pertumbuhan anak juga menambah penyebab stunting. Keterbatasan akses anak usia tumbuh kembang terhadap makanan bergizi beberapa diantaranya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, dimana NTT adalah salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang masih kurang, terutama di daerah pedesaan, menghambat distribusi pangan dan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan air bersih dan sanitasi yang belum merata.

Pemerintah NTT telah melakukan upaya penurunan stunting mengikuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan 42 indikator Kegiatan Prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) dengan mengesahkan Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2022 yang memuat Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam upaya penurunan stunting, AKI, dan AKB untuk periode 2022-2023 dan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi melalui SK Gubernur NTT No. 115A/KEP/HK/2022 pada tanggal 18 Maret 2022. TPPS bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di berbagai tingkatan, mulai dari provinsi hingga desa/kelurahan. Dinas kesehatan melakukan kunjungan rumah setiap 3 (tiga) bulan sekali, akan tetapi keterbatasan anggaran di daerah membuat kunjungan hanya menyasar kepada kabupaten/kota dengan angka prevalensi stunting tertinggi seperti Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya (hasil wawancara mendalam Dinas Kesehatan Prov. NTT, 2024). Mempertimbangkan hal tersebut, hasil yang optimal membutuhkan pendekatan multisektor dan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya dari sisi infrastruktur dan kesehatan, tetapi juga mengembangkan edukasi gizi anak sejak dalam kandungan kepada orang tua dan calon orang tua dan mengantisipasi adanya peningkatan angka pernikahan usia dini yang masih terjadi di NT yang dapat menyebabkan kehamilan pada usia remaja yang dapat berisiko meningkatkan angka stunting.



Gambar 5.19 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota, NTT, dan Nasional tahun 2021-2023

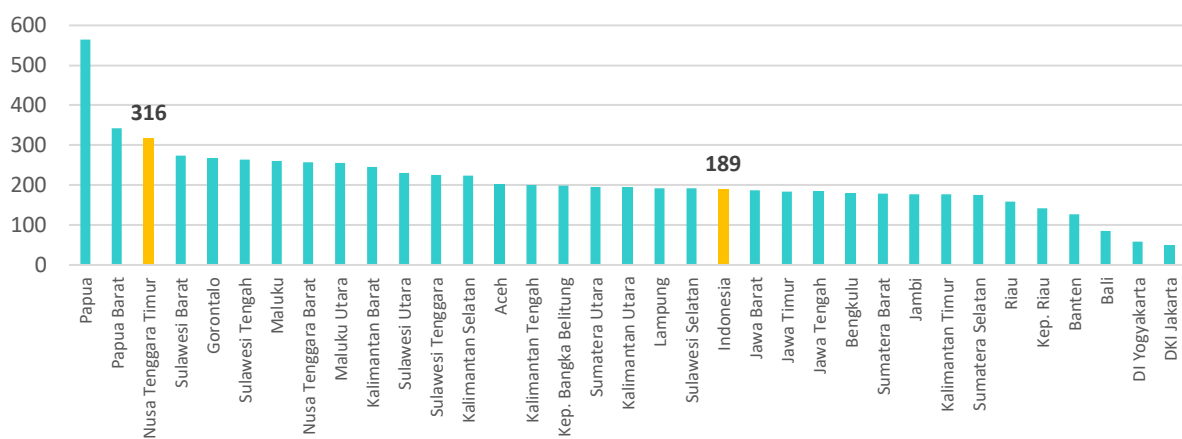
Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah LPEM FEB UI (2024)

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTT tercatat sebesar 316 jiwa per 100.000 kelahiran hidup, masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional Indonesia yang tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup dan menempatkan NTT sebagai provinsi dengan AKI tertinggi ke-2 di Indonesia (Gambar 5.20). Kondisi tersebut telah disadari oleh pemerintah provinsi NTT dan menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan penetapan Angka kematian ibu sebagai salah satu indikator utama dalam RPD 2023-2026. Tingginya angka kematian ibu di Provinsi NTT dapat diidentifikasi menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung dari tingginya AKI di NTT adalah kondisi saat kelahiran seperti perdarahan, eklamsi, infeksi, gangguan metabolisme (RPD Provinsi NTT 2024-2026). Sementara penyebab tidak langsung yang mempengaruhi adalah kombinasi masalah sosial, budaya, infrastruktur, dan ekonomi masyarakat, antara lain faktor akses kesehatan yang sulit, gizi buruk, rendahnya edukasi, pernikahan dini, dan infrastruktur yang terbatas.

Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan upaya baik secara mandiri di lingkup pemerintahan maupun berkolaborasi dengan pihak non-pemerintah untuk menurunkan AKI di NTT, misalnya melalui RAD penurunan AKI, AKB, dan Stunting. Pemerintah telah menerapkan kebijakan Kesehatan Keluarga (Kesga) yang bertujuan menurunkan AKI dan AKB. Program ini melibatkan berbagai intervensi, termasuk peningkatan kualitas pelayanan antenatal, persalinan, dan postnatal, serta penyuluhan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Pemerintah juga terus melakukan Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu program prioritas pemerintah provinsi NTT untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dan telah dilaksanakan sejak tahun 2009.

Sementara dalam hal kolaborasi, salah satunya adalah berkolaborasi dengan USAID untuk membentuk pokja percepatan angka penurunan AKI dengan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, serta memperkuat sistem rujukan dan kualitas data untuk pengambilan keputusan di 22 kabupaten/kota di NTT. Pemprov NTT bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat (IPAS) Indonesia melalui Proyek TAKENUSA (Tekad Bersama untuk Kesehatan Perempuan Nusa Tenggara Timur). Proyek ini diluncurkan pada September 2023 di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan bertujuan mendukung upaya penurunan AKI dengan meningkatkan akses perempuan dan remaja perempuan terhadap informasi, edukasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Proyek TAKENUSA juga dilaksanakan di Kabupaten Kupang dan Flores Timur, dengan fokus pada pendampingan puskesmas dan desa-desa tertentu.

Dari berbagai informasi yang didapatkan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk menurunkan angka kematian ibu, adalah peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana kesehatan ibu yang memadai, edukasi kesehatan, optimalisasi anggaran yang terbatas, serta kolaborasi dari berbagai pihak terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah.



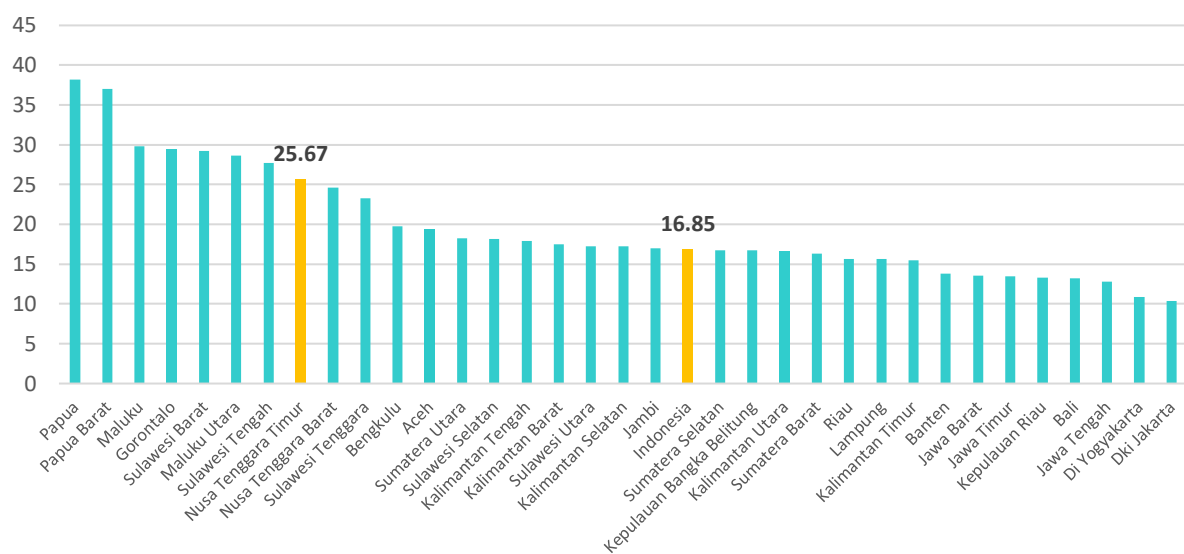
Gambar 5.20 Angka Kematian Ibu (LF SP2020)

Sumber: BPS, 2024

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi NTT tercatat mencapai angka 25,67 jiwa per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020, angka ini menunjukkan angka yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional Indonesia yang tercatat 16,85 per 1.000 kelahiran hidup dan menempatkan NTT sebagai provinsi dengan AKB tertinggi ke-8 se-Indonesia (Gambar 5.21). Sebagaimana yang terjadi pada kasus angka kematian ibu, sebagian besar kasus angka kematian bayi disebabkan oleh beberapa hal secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, data menunjukkan bahwa penyebab AKB adalah asfiksia, BBLR, kelainan bawaan, pneumonia, dan gangguan lainnya. Sementara secara tidak langsung, penyebab yang mempengaruhi tingginya AKB di NTT adalah kombinasi masalah ketersediaan infrastruktur kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (RPD Provinsi NTT 2024-2026), diantaranya adalah akses kesehatan yang sulit, gizi buruk, infeksi, persalinan tidak aman, dan minimnya edukasi ibu tentang kesehatan bayi. Tingginya angka pernikahan pada usia remaja dan belum optimalnya pemantauan ibu hamil dan bayi baru lahir juga turut menyebabkan masih tingginya AKB. Apabila dilihat dari data hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh BPS, diketahui bahwa masih terdapat 5 (lima) kabupaten/kota di NTT yang memiliki AKB lebih dari 30, yaitu: (1) Kabupaten Sabu Raijua (44,37), (2) Kabupaten Alor (41,27), (3) Kabupaten Rote Ndao (38,84), (4) Kabupaten Sumba Barat Daya (36,71), dan (4) Kabupaten Kupang (35,62). Dengan mempertimbangkan berbagai penyebab di atas, penurunan AKB memerlukan peningkatan akses

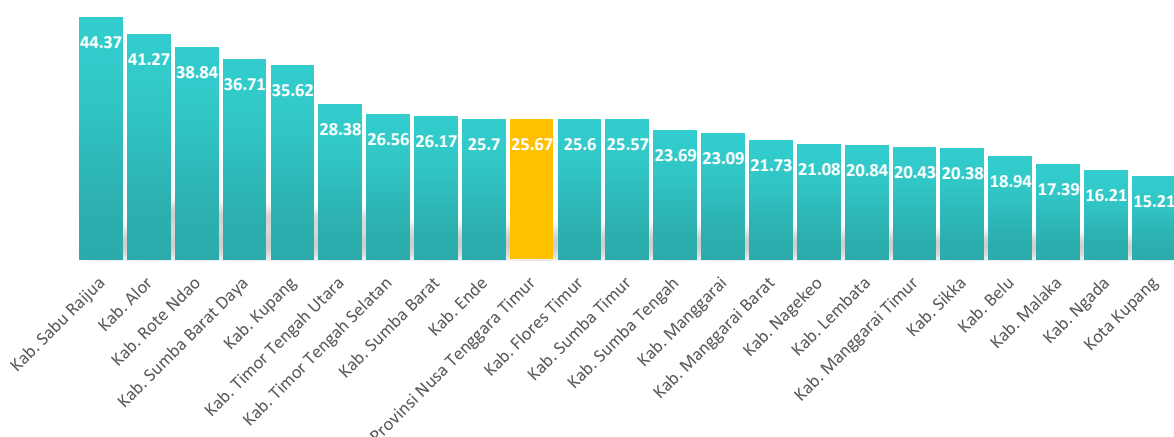
layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi gizi, intervensi dini terhadap penyakit neonatal, serta perbaikan sanitasi dan cakupan imunisasi bayi.

Bersama dengan upaya penurunan angka stunting dan AKI yang menjadi fokus pemerintah provinsi NTT, upaya penurunan AKB juga tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2022 yang memuat Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam upaya penurunan stunting, AKI, dan AKB untuk periode 2022-2023. Isu AKI, AKB, dan stunting juga telah menjadi bagian dari fokus utama dalam dokumen RPD Provinsi NTT 2024-2026. Pemprov NTT juga mengadopsi Pendekatan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) untuk menurunkan AKB. Perkesmas memadukan ilmu keperawatan dengan kesehatan masyarakat melalui peran aktif masyarakat, dengan fokus pada pelayanan promotif dan preventif. Pada tahun 2022, Kabupaten Rote Ndao dan Flores Timur melakukan inisiatif untuk menekan AKI dan AKB. Di Kabupaten Rote Ndao, diterapkan aplikasi "**Mama Boi**" untuk memantau ibu bersalin dan menekan angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, di Kabupaten Flores Timur, program "**2H2 Center**" mendorong ibu hamil untuk berada di fasilitas kesehatan dua hari sebelum perkiraan persalinan, guna memastikan akses cepat ke layanan medis saat melahirkan.



Gambar 5.21 Angka Kematian Bayi Berdasarkan Provinsi (AKB) (LF SP2020)

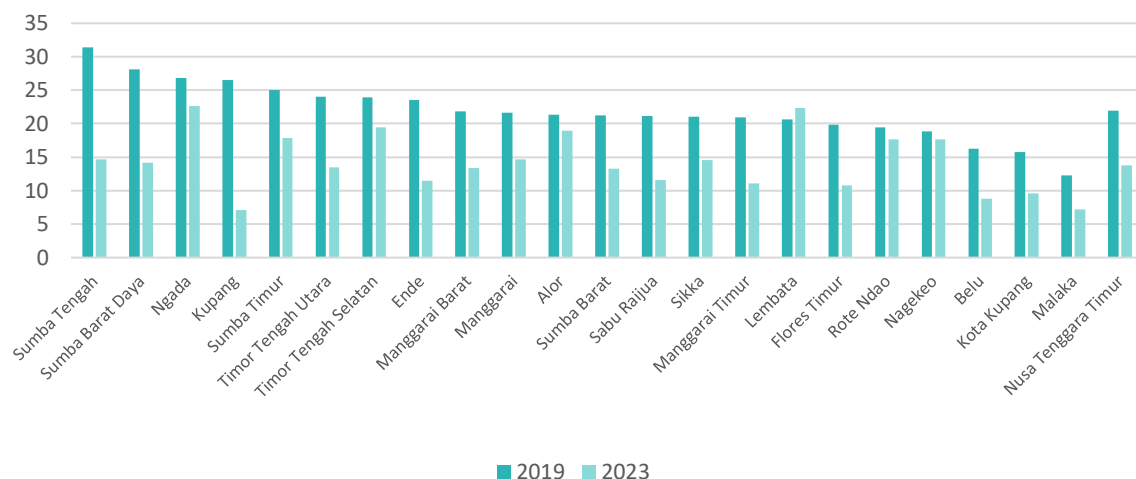
Sumber: BPS, 2024



Gambar 5.22 Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan Kabupaten/Kota (LF SP2020)

Sumber: BPS, 2024

Indikator *outcome* selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah capaian angka morbiditas NTT yang secara umum berhasil mengalami penurunan signifikan dari tahun 2019 ke 2023, dengan variasi capaian masing-masing daerah yang beragam. Dari Gambar 5.23, diketahui bahwa 21 dari total 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT telah mengalami penurunan angka morbiditas dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Terdapat setidaknya 5 (lima) daerah yang memiliki penurunan angka signifikan, diantaranya: (1) Kabupaten Kupang (pada tahun 2019 berada pada angka 26,48 sementara di 2023 menurun drastis hingga mencapai 7,13 atau menurun 19,35 poin), (2) Kabupaten Sumba Tengah (pada tahun 2019 masih berada di angka 31,38 dan menurun hingga lebih dari setengahnya di tahun 2023 menjadi 14,72), (3) Kabupaten Sumba Barat Daya (pada tahun 2019 masih berada pada angka 28,08 kemudian menurun hingga menjadi 14,04 di tahun 2023), (4) Kabupaten Ende (pada tahun 2019 memiliki angka morbiditas sebesar 23,51 kemudian menurun signifikan menjadi 11,49), dan Kabupaten Timur Tengah Utara (pada tahun 2019 memiliki angka morbiditas sebesar 24,02 kemudian menurun cukup signifikan menjadi 13,45 di tahun 2023. Daerah lain juga mengalami penurunan meskipun tidak sedrastis 5 daerah di atas. Hanya Kabupaten Lembata yang masih mengalami sedikit peningkatan dimana tahun 2019 daerah ini memiliki angka morbiditas mencapai 20,69 dan meningkat tipis di tahun 2023 menjadi 22,3. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan angka morbiditas secara signifikan di NTT adalah peningkatan secara perlahan layanan kesehatan dan edukasi lingkungan dan sanitasi. Sementara di Kabupaten Lembata masih terjadi peningkatan angka morbiditas karena Lembata memiliki *Annual Parasite Incidence* (API) tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menunjukkan tingginya penularan malaria di wilayah tersebut dan masih tingginya wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dimana NTT merupakan salah satu provinsi dengan kasus infeksi virus Dengue tertinggi di Indonesia. Sementara itu, penyakit yang juga menjadi perhatian di NTT adalah kasus rabies yang masih terus meningkat.



Gambar 5.23 Perbandingan Angka Morbiditas Kabupaten/Kota tahun 2019 dan 2023 (%)

Sumber: BPS, 2024

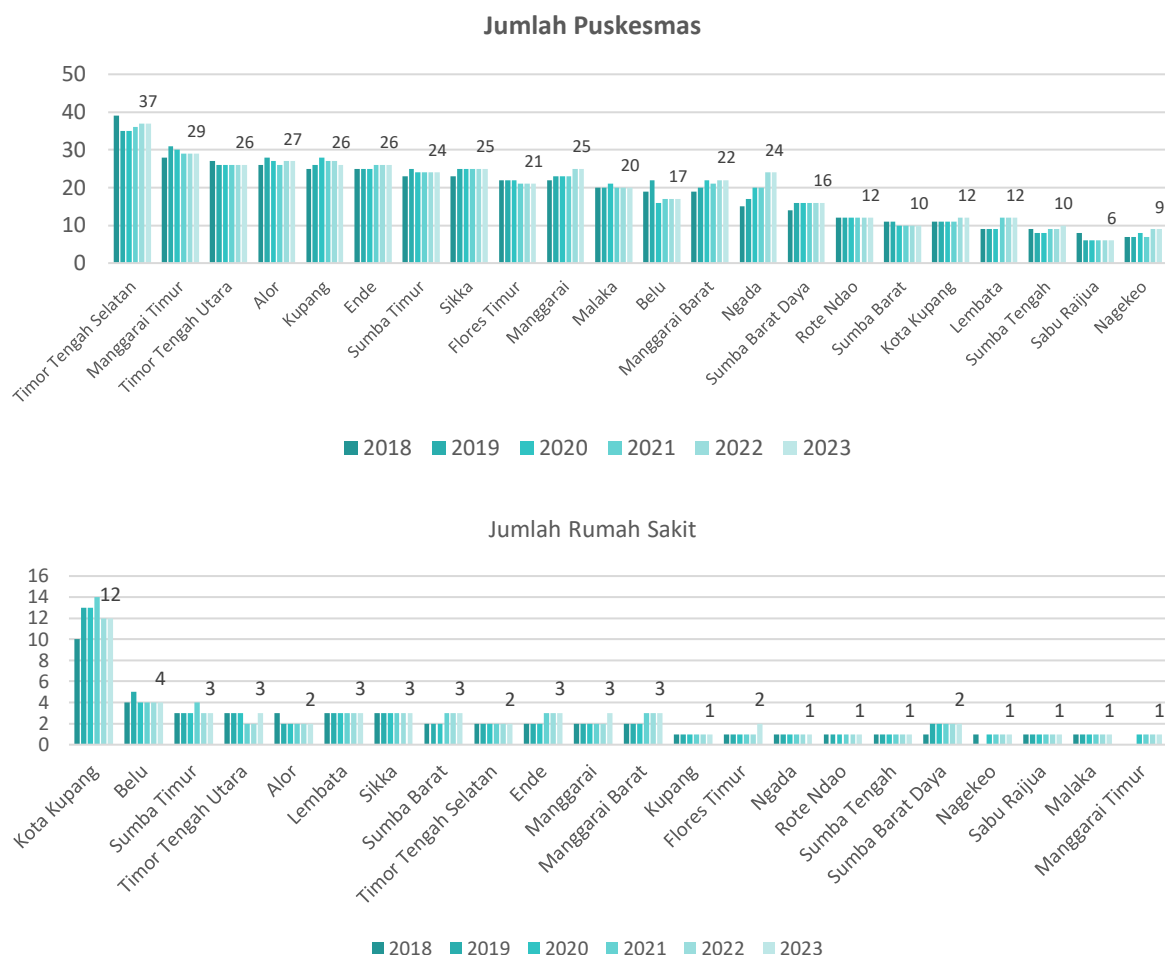
5.2.2. Analisis Disparitas dan Pemetaan Layanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi NTT menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayahnya. Disparitas ketersediaan layanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi geografis yang sulit dijangkau, populasi yang tersebar di wilayah pedesaan dan terpencil, serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan dan transportasi. Distribusi sumber daya kesehatan,

seperti tenaga medis dan fasilitas kesehatan, juga cenderung terpusat di kota-kota besar seperti Kota Kupang dan sekitarnya.

Selain itu, alokasi anggaran kesehatan juga menjadi isu, dimana masih terdapat alokasi anggaran yang belum sesuai dengan usulan yang diajukan, terutama untuk penanganan stunting, AKI, dan AKB. Sementara dana transfer sebagian besar digunakan untuk membayar premi BPJS di seluruh kabupaten/kota di NTT. Sementara DAK non-fisik dialokasikan untuk intervensi kesehatan di berbagai kabupaten/kota di NTT.

Jumlah puskesmas di NTT menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023 (Gambar 5.24). Pada tahun 2023, terdapat total 414 puskesmas, dengan fluktuasi jumlah puskesmas yang bervariasi di masing-masing kabupaten/kota. **Sementara dari sisi jumlah rumah sakit, jumlah RS di NTT pada tahun 2023 mencapai 56 unit, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.** Kota Kupang menjadi daerah dengan jumlah RS terbanyak di NTT dengan jarak yang cukup timpang dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, yaitu sebanyak 12 unit rumah sakit sedangkan kabupaten/kota lainnya berada pada kisaran 1-4 unit RS di setiap kabupaten/kota.

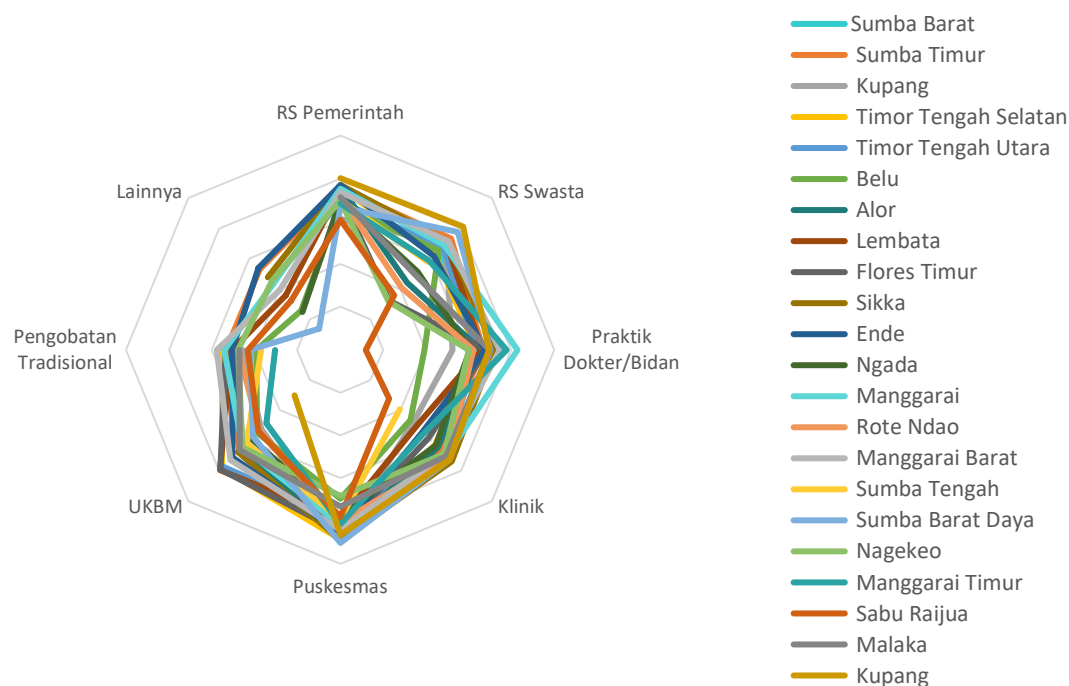


Gambar 5.24 Jumlah Puskesmas dan Jumlah Rumah Sakit (RS) di NTT 2018-2023

Sumber: NTT Dalam Angka tahun 2019 – 2024 dan BPS (2024)

Lebih jauh, pola pemanfaatan fasilitas kesehatan di enam kabupaten/kota di NTT menunjukkan bahwa Puskesmas, Praktik Dokter/Bidan, dan Rumah Sakit (RS) Pemerintah mendominasi sebagai pilihan utama masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan di seluruh wilayah (Gambar 5.25). Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah, yaitu Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas telah menjadi andalan masyarakat, dengan proporsi penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan fasilitas kesehatan lain, meskipun RS Swasta, Praktik Dokter/Bidan, dan UKBM juga masih menjadi pilihan tertinggi masyarakat di beberapa wilayah. Hal ini diantaranya dapat disebabkan oleh keterjangkauan Praktik Dokter/Bidan, dan UKBM yang lebih tinggi dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya dan memiliki prosedur yang lebih sederhana dibandingkan fasilitas kesehatan pemerintah.

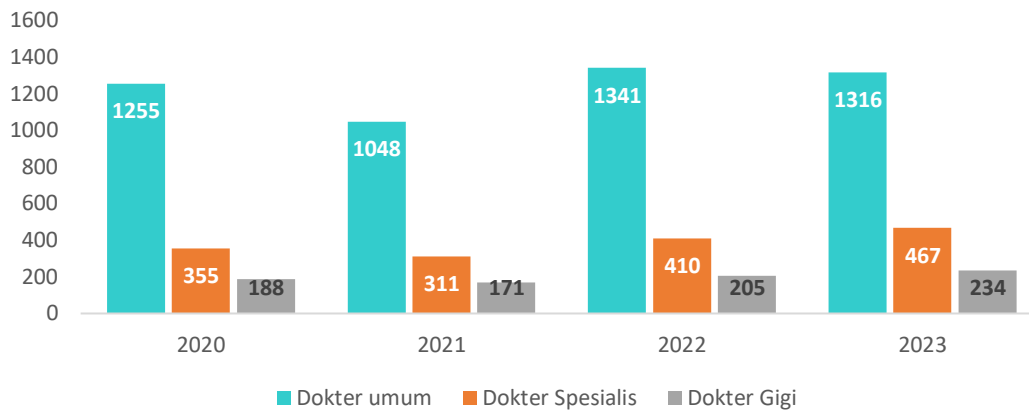
Secara keseluruhan, pola pemanfaatan ini mengindikasikan pentingnya peran fasilitas kesehatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di NTT. Namun, perhatian lebih diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan guna memastikan seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas dan modern.



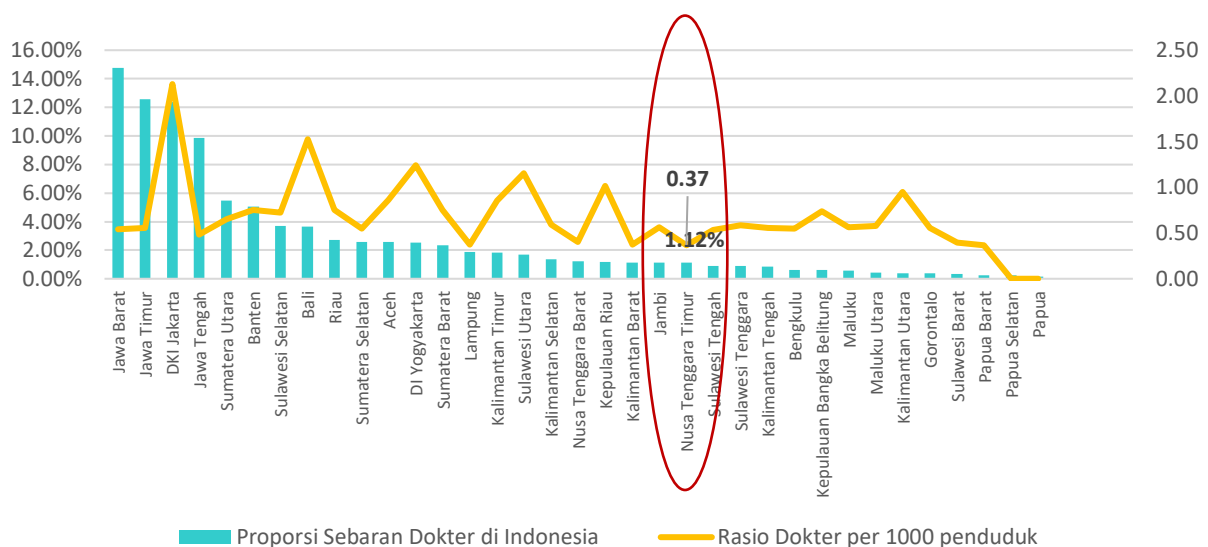
Gambar 5.25 Pola Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Provinsi NTT Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

Dalam hal ketersediaan tenaga medis, jumlah dokter secara total di NTT mengalami pertumbuhan yang konsisten antara tahun 2020 hingga 2023. Meskipun demikian, rasio dokter terhadap penduduk masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2023, tercatat terdapat 467 dokter spesialis, 1.316 dokter umum, dan 234 dokter gigi (Gambar 5.26). Meskipun jumlah tenaga medis terus bertambah, rasio dokter per 1.000 penduduk di NTT hanya mencapai 0,37, yang masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain (Gambar 5.27). Selain itu, distribusi dokter di NTT hanya mencakup 1,12% dari total jumlah dokter di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa NTT masih menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan kecukupan ketersediaan tenaga dokter dan pemerataan akses masyarakat terhadap tenaga dokter, terutama di wilayah yang lebih terpencil.



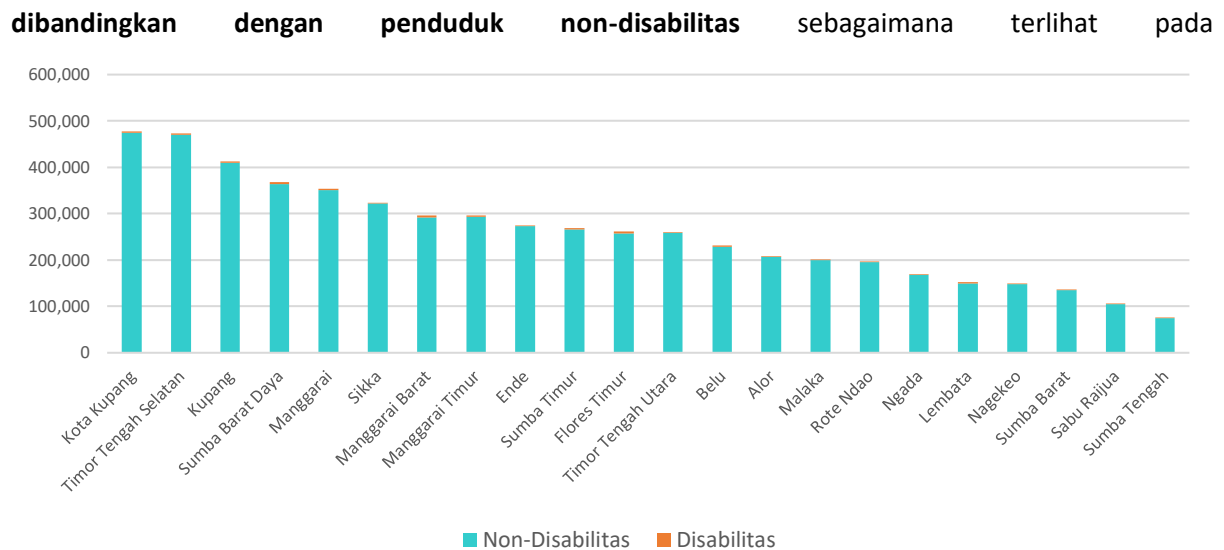
Gambar 5.26 Jumlah Dokter di Provinsi NTT tahun 2021-2023
Sumber: BPS dan Pemprov NTT (2024)



Gambar 5.27 Distribusi Proporsi Tenaga Dokter Berdasarkan Provinsi dan Capaian Rasio Tenaga Dokter Tahun 2023

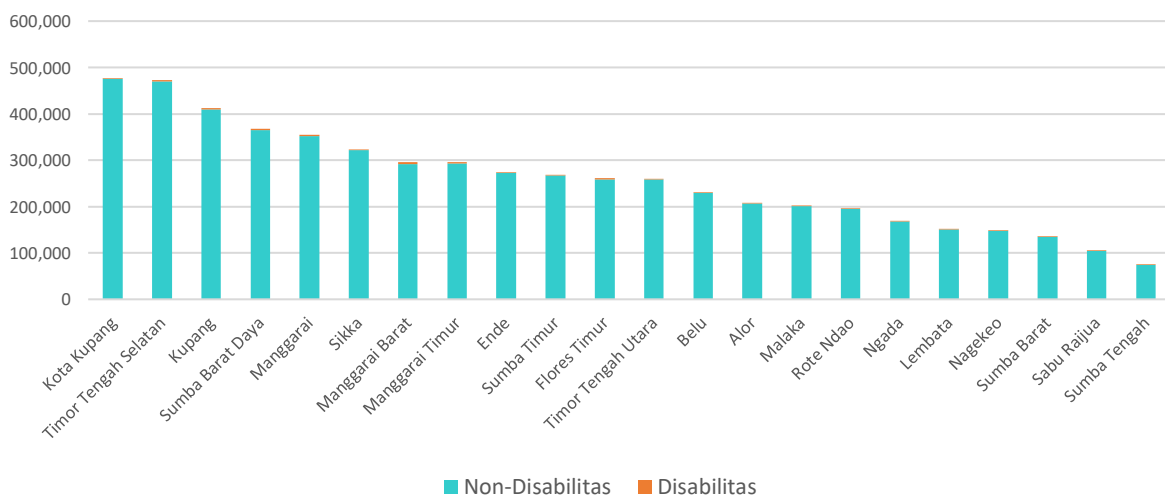
Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan, diolah LPEM FEB UI (2024)

Masih berkaitan dengan pentingnya pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan, di NTT, diketahui bahwa jumlah penduduk dengan disabilitas dari masing-masing Kabupaten/Kota sangat kecil jika



Gambar 5.28. Kabupaten Manggarai Barat memiliki jumlah penduduk disabilitas tertinggi, dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTT, yaitu 4.580 orang. Kabupaten Flores Timur berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk disabilitas sebanyak 3.688 orang, diikuti oleh Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 3.140 orang. Sementara total penduduk terbesar di NTT berada di Kota Kupang, di mana daerah ini menjadi populasi non-disabilitas terbesar, yakni 475.221 orang, yang mencerminkan statusnya sebagai pusat populasi di provinsi ini.

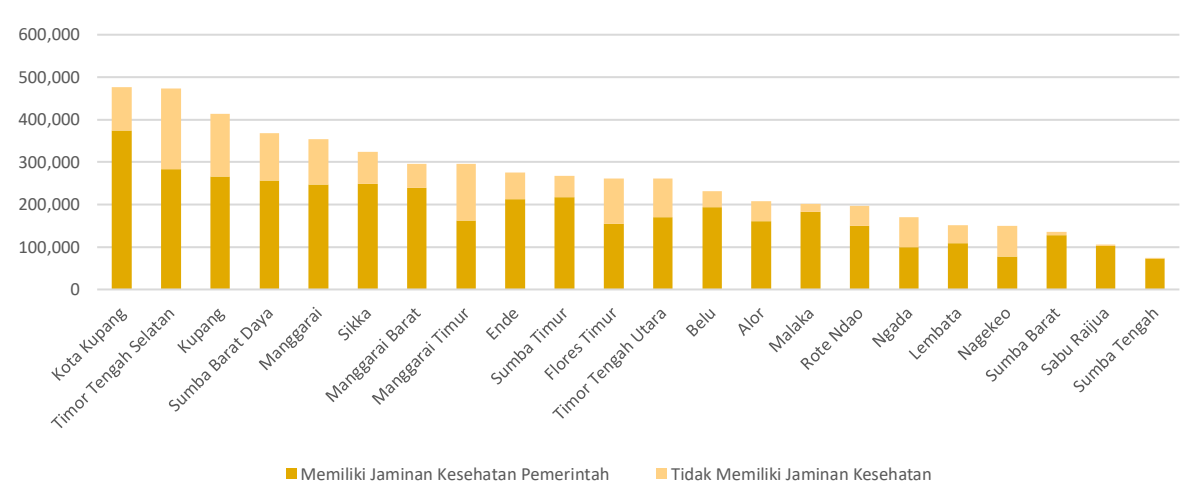
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk non-disabilitas, proporsi penduduk disabilitas di setiap wilayah relatif kecil, tetapi tetap membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan kebijakan inklusif. Jumlah penduduk disabilitas yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya menggarisbawahi perlunya penguatan layanan kesehatan yang inklusif dan aksesibel untuk semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat program kesehatan masyarakat dan meningkatkan fasilitas yang ramah disabilitas untuk mencapai pembangunan kesehatan yang lebih merata.



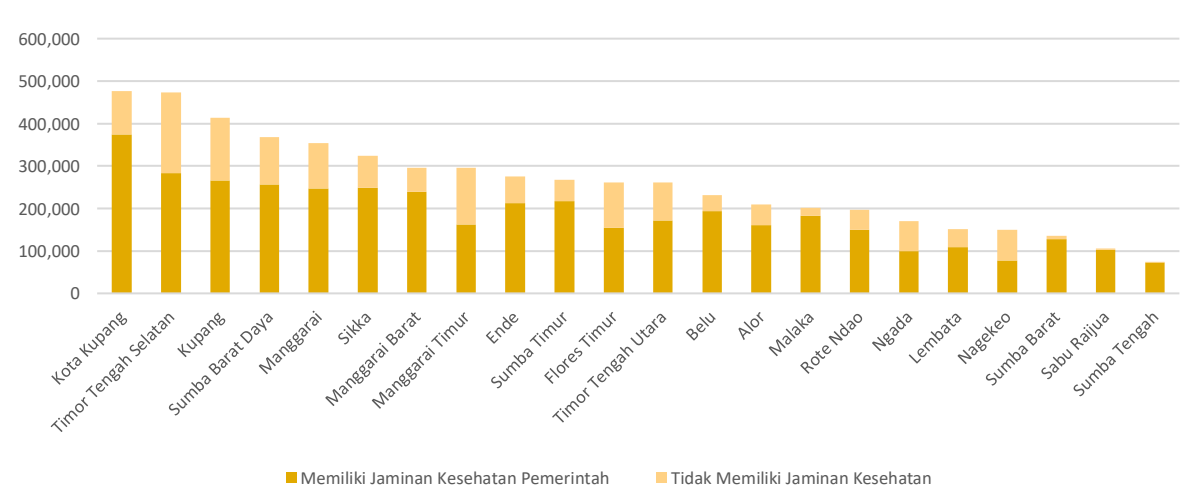
Gambar 5.28 Jumlah Penduduk Disabilitas dan Non Disabilitas Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

Hasil analisis pemanfaatan layanan kesehatan di NTT secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Provinsi NTT telah memiliki jaminan kesehatan pemerintah. Sementara dalam hal pemanfaatan layanan kesehatan rawat jalan maupun rawat inap, masing-masing daerah menunjukkan angka yang bervariasi. Sebagian besar penduduk di NTT telah memiliki jaminan kesehatan pemerintah, dengan Kota Kupang sebagai daerah dengan jumlah penduduk tertinggi di NTT, mencatat cakupan kepemilikan jaminan kesehatan dengan jumlah tertinggi, yaitu 375.089 jiwa (

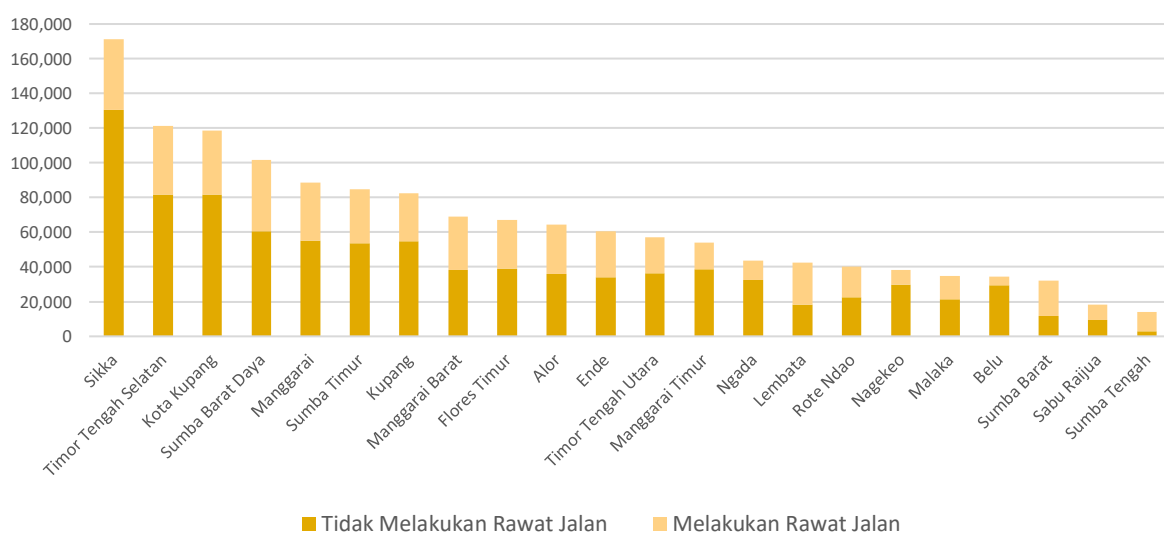


Gambar 5.29). Namun, masih terdapat sejumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk daerah dengan jumlah penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan terbanyak adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah 190.015 jiwa, disusul oleh Kabupaten Kupang (146.516 jiwa), dan Kabupaten Manggarai Timur (133.240 jiwa). Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun tingkat kepemilikan jaminan kesehatan relatif tinggi, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terlindungi. Upaya masih terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan dengan target 100% UHC guna mendorong akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk dengan mengalokasikan anggaran dari dana transfer untuk mendukung pembayaran premi jaminan kesehatan.



Gambar 5.29 Jumlah Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Pemerintah
Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

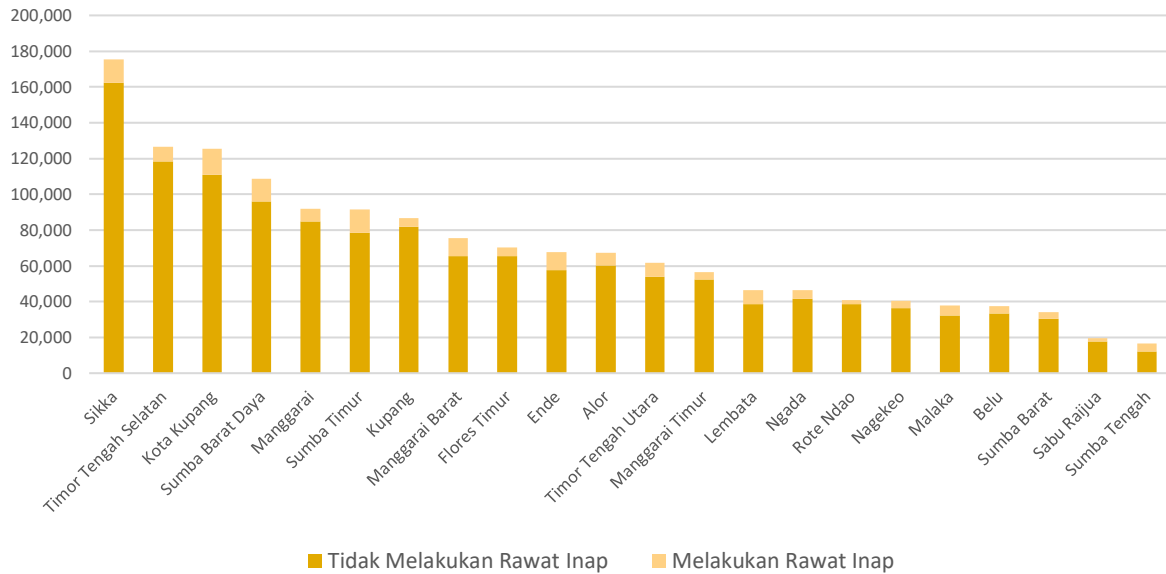
Pemanfaatan layanan rawat jalan di NTT menunjukkan bahwa perbandingan antara masyarakat yang memanfaatkan layanan ini dengan yang tidak melakukan rawat jalan cukup bervariasi. Kabupaten Sikka mencatat jumlah penduduk tertinggi yang tidak menggunakan layanan rawat jalan, yakni 130.449 jiwa, diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan (81.654 jiwa), dan Kota Kupang (81.708 jiwa) (lihat Gambar 5). Kondisi menarik dapat dilihat dari proporsi antara penduduk yang melakukan dan tidak melakukan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan di masing-masing daerah. Di Kabupaten Belu, sebagian besar penduduk (85,5%) tidak memanfaatkan layanan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan. Sementara di Kabupaten Sumba Tengah (80,6%) sebagian besar penduduknya memilih untuk melakukan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan. Masih relatif tingginya jumlah masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan mengindikasikan perlunya peningkatan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan dini.



Gambar 5.30 Pemanfaatan Layanan Rawat Jalan terhadap Total Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

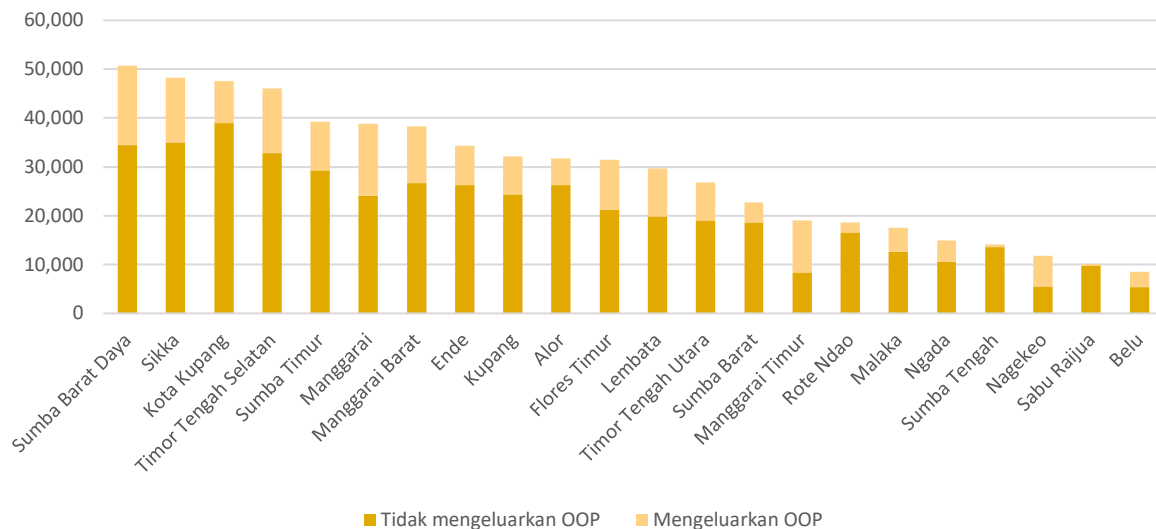
Sementara dari sisi pemanfaatan layanan rawat inap, NTT menunjukkan angka yang relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak memanfaatkan layanan tersebut. Kabupaten Sikka mencatat jumlah tertinggi penduduk yang tidak memanfaatkan layanan rawat inap, yaitu 162,166 jiwa, sementara Kabupaten Sumba Tengah memiliki angka terendah, yaitu 12.068 jiwa (Gambar 5.31). Pemanfaatan rawat inap tertinggi tercatat di Kota Kupang sebanyak 14.544 jiwa, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Sabu Raijua dengan 1.802 jiwa. Angka ini mengindikasikan bahwa layanan rawat inap belum sepenuhnya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil.



Gambar 5.31 Pemanfaatan Layanan Rawat Inap terhadap Total Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan di Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

Sebagian besar penduduk di NTT sudah tidak mengeluarkan OOP untuk perawatan kesehatan, tetapi terdapat kelompok signifikan di wilayah berpenduduk besar yang masih mengeluarkan OOP. Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Manggarai mencatat jumlah penduduk tertinggi yang masih mengeluarkan OOP, masing-masing 16.345 jiwa dan 14.695 jiwa, sementara Kabupaten Sabu Raijua memiliki jumlah terendah, yaitu 485 jiwa. Sebaliknya, Kota Kupang memiliki jumlah penduduk tertinggi yang tidak mengeluarkan OOP, sebanyak 38.914 jiwa, diikuti Kabupaten Sikka dengan 34.949 jiwa (Gambar 5.32). Sementara dari sisi proporsi, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Nagekeo justru masih memiliki proporsi lebih dari 50% penduduk yang memilih mengeluarkan OOP saat memanfaatkan layanan kesehatan. Variasi ini mencerminkan disparitas perbedaan keterjangkauan akses dan preferensi terhadap layanan kesehatan. Untuk mengurangi disparitas ini, diperlukan upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang terjangkau, terutama di daerah pedesaan.

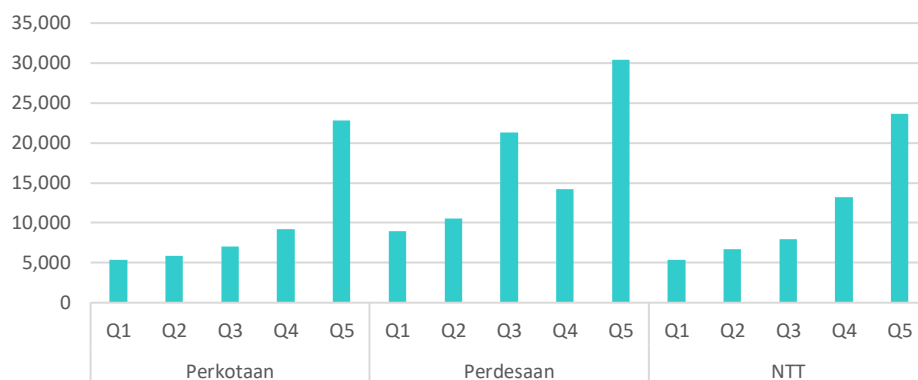


Gambar 5.32 Pengeluaran OOP untuk Perawatan Kesehatan di Provinsi NTT berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

Pada saat dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan pemanfaatan OOP di tingkat Q1-Q5, diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kuintil 5 (Q5) dan kuintil 1 (Q1), serta antara wilayah kota dan desa. Di wilayah kota, pengeluaran OOP tertinggi terjadi pada Q5 sebesar Rp22.807,44, sedangkan di Q1 berada jauh lebih rendah, hanya Rp5.394,59. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah desa, dan ternyata pengeluaran OOP kuintil Q5 di desa lebih tinggi dibandingkan di Kota, yaitu mencapai angka Rp30.374,1, jarak antara Q5 dan Q1 Juga terpaut cukup jauh, yaitu hanya mencapai Rp8.945,17 untuk OOP per kapita di Q1, angka ini lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (lihat Gambar 5.33). Perbedaan yang signifikan antara desa dan kota ini mengindikasikan bahwa penduduk di desa cenderung menghadapi biaya kesehatan lebih besar dan antara Q1 hingga Q5 memiliki perbedaan biaya kesehatan yang signifikan baik di desa maupun di kota.

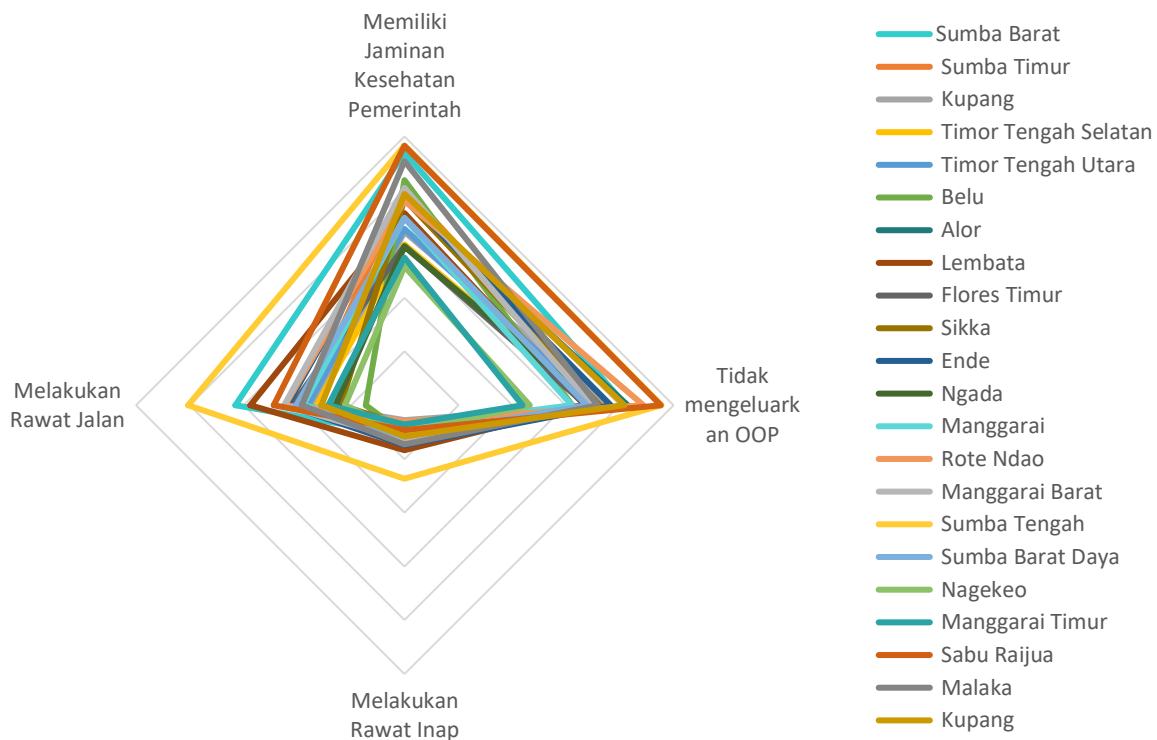
Secara umum di tingkat provinsi, Gambar 5.33 juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan antara Q1 dan Q5 Provinsi NTT, dimana pengeluaran OOP per kapita per bulan dari Q5 mencapai Rp23.618,34 sementara pengeluaran OOP per kapita per bulan dari Q1 terpaut jauh di angka Rp5.363,26.



Gambar 5.33 OOP untuk Perawatan Kesehatan Per Kapita Per Bulan di Provinsi NTT

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

Secara ringkas, Gambar 5.34 adalah pola yang menggambarkan pola bahwa sebagian besar penduduk Provinsi NTT telah memiliki jaminan kesehatan pemerintah, namun sebagian besar masyarakat memilih untuk tidak melakukan rawat inap maupun rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan dengan mengacu kepada data yang telah ditampilkan sebelumnya, kecuali untuk Kabupaten Sumba Tengah yang menunjukkan kecenderungan memanfaatkan layanan rawat jalan saat mengalami keluhan kesehatan



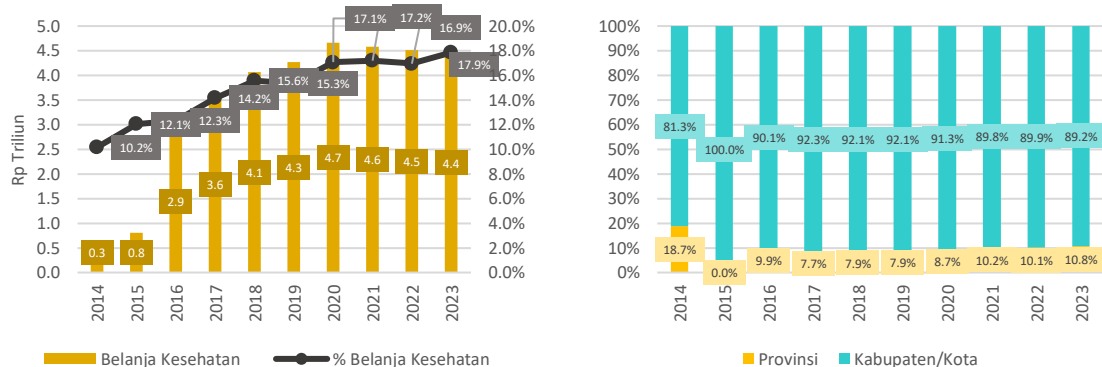
Gambar 5.34 Pola Pemanfaatan Layanan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota

Sumber: SUSENAS, diolah LPEM FEB UI (2024)

5.3.3. Belanja Kesehatan

Belanja kesehatan Nusa Tenggara Timur pada periode 2014-2023 mengalami tren peningkatan, dengan nilai realisasi mencapai Rp4,4 triliun pada tahun 2023 (Gambar 5.35). Sepanjang periode tersebut, belanja kesehatan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2020 dengan nilai Rp4,7 triliun, sedangkan terendah pada tahun 2014 dengan nilai Rp0,3 triliun. Dibandingkan dengan total belanja, proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja konsisten di atas 10% dan mencapai proporsi tertinggi pada tahun 2023, dengan proporsi 17,9% dari Rp24,9 triliun.

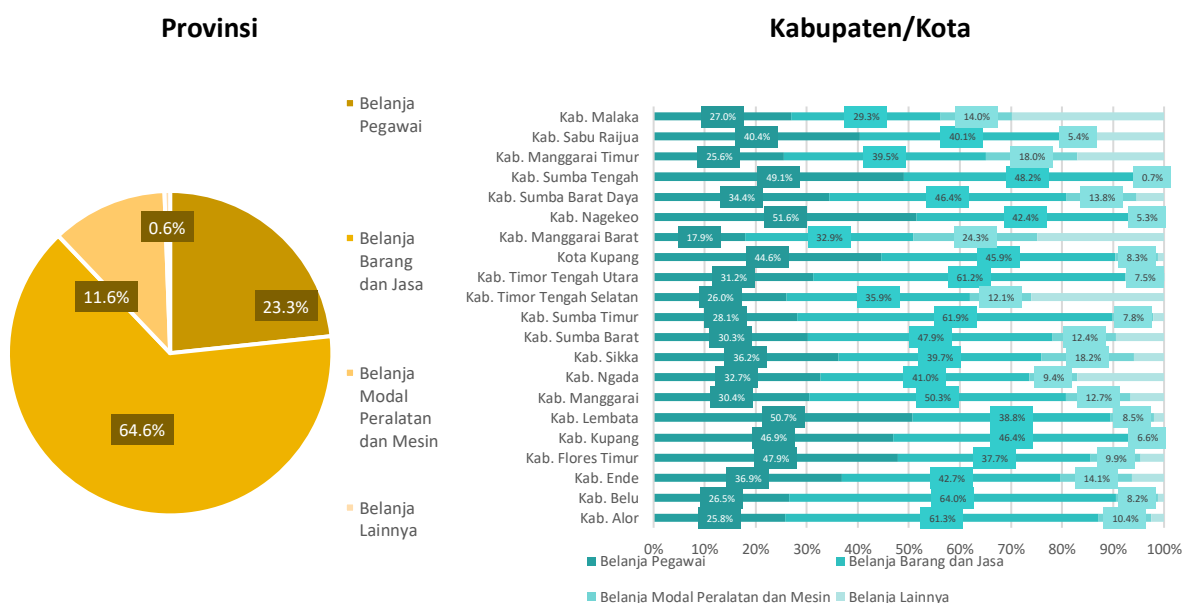
Apabila didekomposisi berdasarkan tingkat pemerintah, mayoritas belanja kesehatan dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota (Gambar 5.36). Secara rata-rata, pemerintah kabupaten/kota menyumbang 90,8% terhadap total belanja kesehatan Nusa Tenggara Timur. Proporsi tertinggi belanja pemerintah kabupaten/kota dalam total belanja kesehatan Nusa Tenggara Timur berada pada tahun 2015, sedangkan proporsi tertinggi untuk provinsi berada di tahun 2014.



Gambar 5.35 Belanja Kesehatan Nusa Tenggara Timur

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Berdasarkan jenisnya, mayoritas jenis belanja Kesehatan pada tingkat provinsi merupakan belanja barang dan jasa (64,6%), disusul dengan belanja pegawai, sedangkan dominasi jenis belanja pada tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi (Gambar 5.36). Belanja pegawai pada tingkat provinsi berkontribusi sebesar 23,3%, disusul dengan belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai 11,6%. Pada tingkat kabupaten/kota, wilayah yang memiliki dominasi belanja dengan jenis belanja pegawai adalah Kabupaten Lembata (50,7%), Kabupaten Sumba Tengah (49,1%), Kabupaten Flores Timur (47,9%), Kabupaten Kupang (46,9%), dan Kabupaten Sabu Raijua (40,4%).

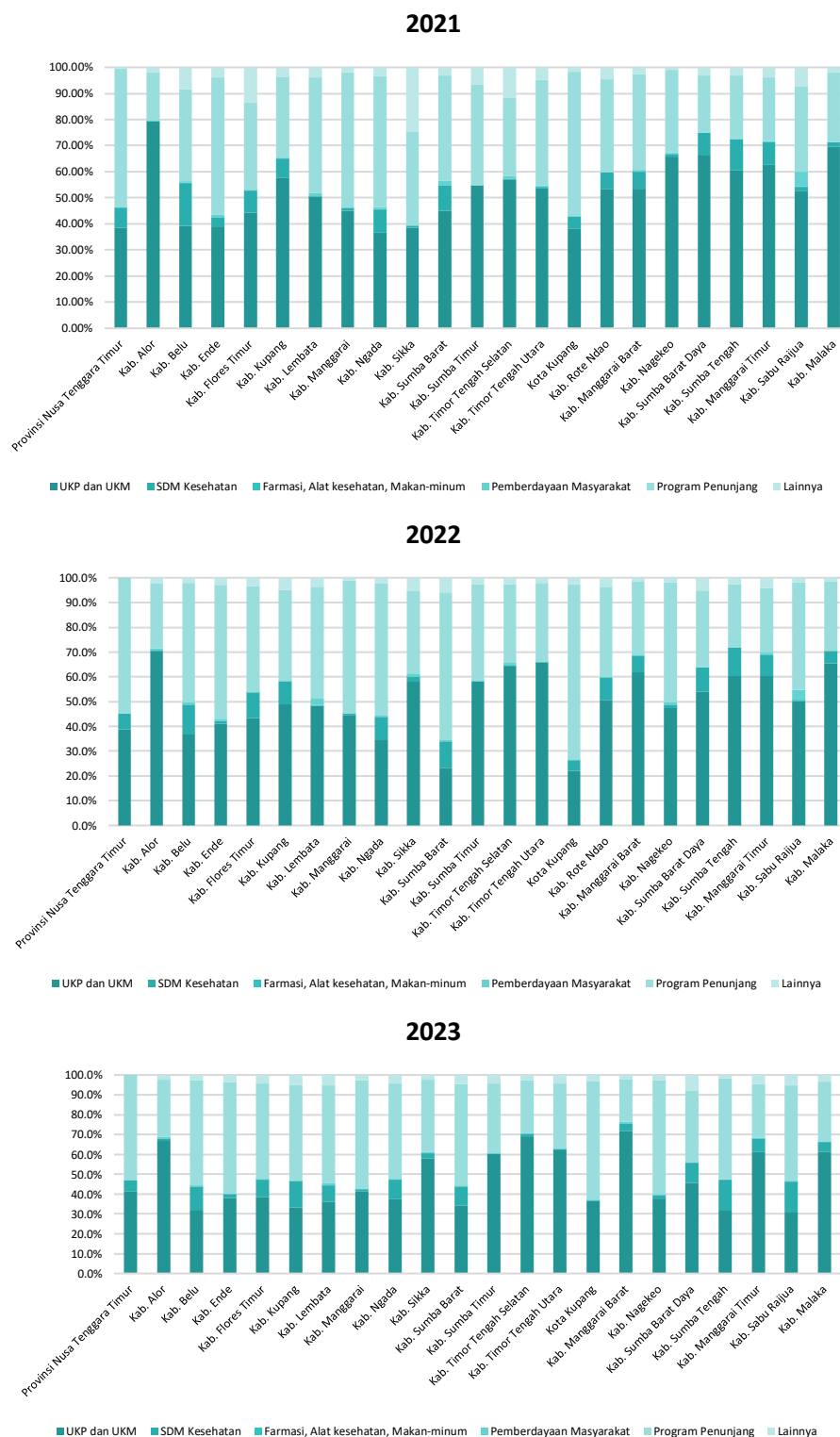


Gambar 5.36 Jenis Belanja Kesehatan Nusa Tenggara Timur, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Dekomposisi hingga ke level program, belanja kesehatan yang direalisasikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lebih banyak diarahkan untuk upaya kuratif, yakni Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dibandingkan yang sifatnya promotive seperti pemberdayaan masyarakat (Gambar 5.37). Temuan tersebut konsisten sepanjang tahun 2021.2023. Program dengan belanja tertinggi setelah UKP dan UKM adalah program penunjang yang pada dasarnya bertujuan mendukung dan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan daerah,

dimulai dari perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, pengelolaan asset, hingga peningkatan pelayanan publik. Adapun belanja program pemberdayaan masyarakat masih sangat kecil – nilai rata-rata proporsi belanja program masih kurang dari 1%.



Gambar 5.37 Belanja Kesehatan Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Program

Sumber: DPJK (2024), diolah LPEM FEB UI

5.3.4. Kualitas Belanja Kesehatan

a. Aspek Kecukupan

Dari sisi kecukupan belanja untuk sektor kesehatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat rasio belanja kesehatan terhadap total belanja sebesar 17,85%, sedikit lebih tinggi dibandingkan rerata delapan provinsi skala yang mencapai 17,02%. Angka ini menunjukkan bahwa secara proporsional, alokasi untuk kesehatan di NTT belum memenuhi *mandatory spending* pendidikan meskipun secara rata—rata lebih tinggi dari provinsi lain dengan karakteristik serupa. Namun, jika dilihat dari belanja per kapita, capaian NTT sebesar Rp798 ribu masih lebih rendah dibandingkan rata-rata delapan provinsi skala yang mencapai Rp1,02 juta. Meskipun demikian, capaian NTT masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar Rp724 ribu. Perbedaan belanja per kapita ini dapat mencerminkan tantangan geografis dan pemerataan layanan yang memengaruhi efektivitas alokasi belanja di daerah kepulauan seperti NTT. Meskipun persentase alokasi terhadap total belanja cukup baik, kapasitas fiskal dan kondisi wilayah masih menjadi faktor pembatas dalam peningkatan belanja layanan kesehatan per penduduk.

Tabel 5.4 Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator	Capaian		
		Nusa Tenggara Timur	8 Provinsi Skala	Nasional
1.	Rasio Belanja Kesehatan terhadap Total Belanja (%)	17,85	17,02	-
2.	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	798.370	1.027.656	724.280

Catatan: Belanja menggunakan belanja konsolidasi provinsi dan kota kabupaten

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

b. Aspek Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi, kajian ini menerapkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan orientasi input dan asumsi *variable returns to scale* (VRS). Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten/kota dapat mengurangi penggunaan input tanpa menurunkan tingkat output yang dihasilkan. Dengan kata lain, DEA digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah telah menggunakan sumber daya secara optimal dalam menyediakan layanan kesehatan.

Analisis dilakukan pada tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi dalam lingkup SKALA, mencakup data dari tahun 2021 hingga 2023. Evaluasi efisiensi dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing untuk setiap tahun observasi. Dalam analisis ini, input yang digunakan mencakup belanja pegawai per kapita, belanja nonpegawai per kapita, belanja modal per kapita, serta belanja barang dan jasa per kapita. Sementara itu, output yang diukur meliputi jumlah perawat, jumlah bidan, jumlah dokter, jumlah fasilitas kesehatan, dan rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk. Khusus untuk tahun 2021, output yang diukur hanya meliputi jumlah perawat, jumlah bidan, jumlah dokter, dan rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk karena data jumlah fasilitas kesehatan tidak tersedia.

Nilai efisiensi teknis dalam analisis ini merupakan *predicted technical efficiency*. Pada tahap awal, DEA diterapkan secara terpisah untuk setiap tahun guna memperoleh nilai efisiensi teknis tahunan. Selanjutnya, nilai tersebut diregresikan terhadap variabel jumlah populasi, luas wilayah, dan jumlah

penduduk miskin. Hasil prediksi dari regresi tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran efisiensi dalam kajian ini.

Dalam analisis DEA, tingkat efisiensi dinyatakan dalam bentuk skor antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan efisiensi penuh (fully efficient), sementara nilai di bawah 1 mengindikasikan inefisiensi relatif. Jika suatu kabupaten/kota memperoleh skor efisiensi sebesar 1, maka daerah tersebut dianggap telah mengalokasikan sumber dayanya secara optimal dalam menghasilkan output pendidikan. Sebaliknya, jika suatu kabupaten/kota memiliki skor di bawah 1, misalnya 0,75, maka terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penggunaan input hingga 25% tanpa menurunkan jumlah perawat, jumlah bidan, jumlah dokter, jumlah fasilitas kesehatan, dan rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk.

Sebagai contoh, jika sebuah kabupaten dengan skor efisiensi 0,75 memiliki belanja pegawai per kapita sebesar Rp1.000.000, belanja non pegawai per kapita sebesar Rp500.000, belanja modal per kapita sebesar Rp700.000, dan belanja barang dan jasa per kapita sebesar Rp800.000, maka secara teoritis, pengeluaran tersebut masih dapat dikurangi sekitar 25% tanpa menurunkan output kesehatan yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil analisis DEA tidak hanya mengidentifikasi kabupaten/kota yang efisien dan tidak efisien, tetapi juga memberikan indikasi mengenai seberapa besar potensi efisiensi yang masih dapat dicapai oleh daerah yang belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis DEA yang ditampilkan dalam Tabel 5.5, terdapat variasi dalam tingkat efisiensi teknis antar kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2021–2023. Kabupaten Kupang secara konsisten mencatatkan skor efisiensi teknis yang meningkat dari 0,47 pada tahun 2021 menjadi 0,57 pada tahun 2022 dan 0,64 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mengalokasikan sumber daya kesehatan secara lebih efisien guna meningkatkan output yang diukur. Kabupaten Timor Tengah Selatan juga mengalami tren positif dengan skor efisiensi teknis yang meningkat dari 0,49 pada tahun 2021 menjadi 0,57 pada tahun 2022 dan 0,67 pada tahun 2023. Peningkatan serupa juga terjadi di Kabupaten Sikka, yang mencatatkan skor 0,45 pada tahun 2021, naik menjadi 0,56 pada tahun 2022, dan mencapai 0,60 pada tahun 2023. Kabupaten Flores Timur mencatat kenaikan dari 0,42 pada tahun 2021 menjadi 0,54 pada tahun 2022 dan meningkat lagi ke 0,56 pada tahun 2023.

Sebaliknya, Kabupaten Sumba Tengah menunjukkan tingkat efisiensi yang masih rendah dengan skor 0,24 pada tahun 2021, meningkat menjadi 0,40 pada tahun 2022, namun stagnan pada angka yang sama di tahun 2023. Kabupaten Sabu Raijua juga memiliki skor yang relatif rendah, dengan peningkatan dari 0,25 pada tahun 2021 menjadi 0,41 pada tahun 2022, namun hanya sedikit meningkat ke 0,42 pada tahun 2023. Demikian pula, Kabupaten Lembata mencatat skor 0,28 pada tahun 2021 yang meningkat ke 0,43 pada tahun 2022, tetapi hanya sedikit bertambah menjadi 0,45 pada tahun 2023.

Kota Kupang mencatat skor efisiensi teknis sebesar 0,73 pada tahun 2023, menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lainnya. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Timur mengalami peningkatan efisiensi dari 0,37 pada tahun 2021 menjadi 0,49 pada tahun 2022 dan mencapai 0,55 pada tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya kesehatan.

Dengan adanya variasi skor efisiensi antar daerah, hasil analisis DEA ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi wilayah yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Kabupaten/kota dengan skor efisiensi yang lebih rendah dapat melakukan evaluasi terhadap strategi

alokasi anggaran dan kebijakan pelayanan kesehatan guna meningkatkan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengalami peningkatan efisiensi dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengoptimalkan efisiensinya. Sementara itu, daerah seperti Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sabu Raijua yang masih mencatat skor efisiensi rendah dapat menjadi prioritas dalam upaya peningkatan pengelolaan sumber daya kesehatan di masa mendatang.

Tabel 5.5 Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Kesehatan

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Alor	0,34	0,47	0,49
Kabupaten Belu	0,37	0,50	0,52
Kabupaten Ende	0,38	0,50	0,54
Kabupaten Flores Timur	0,42	0,54	0,56
Kabupaten Kupang	0,47	0,57	0,64
Kabupaten Lembata	0,28	0,43	0,45
Kabupaten Manggarai	0,42	0,53	0,59
Kabupaten Ngada	0,32	0,46	0,47
Kabupaten Sikka	0,45	0,56	0,60
Kabupaten Sumba Barat	0,30	0,44	0,46
Kabupaten Sumba Timur	0,31	0,42	0,46
Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,49	0,57	0,67
Kabupaten Timor Tengah Utara	0,37	0,49	0,53
Kota Kupang	-	-	0,73
Kabupaten Rote Ndao	-	-	-
Kabupaten Manggarai Barat	0,37	0,49	0,53
Kabupaten Nagekeo	0,32	0,47	0,47
Kabupaten Sumba Barat Daya	0,39	0,50	0,58
Kabupaten Sumba Tengah	0,24	0,40	0,40
Kabupaten Manggarai Timur	0,37	0,49	0,55
Kabupaten Sabu Raijua	0,25	0,41	0,42

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Malaka	-	-	-

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

Kajian ini juga mengevaluasi pengaruh belanja pegawai per kapita terhadap peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, dengan hasil yang signifikan dan positif di berbagai variabel. Belanja pegawai per kapita memiliki pengaruh kuat pada peningkatan jumlah perawat, bidan, dan dokter dengan koefisien masing-masing 0,58, 0,80, dan 0,71, semua menunjukkan signifikansi statistik yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa peningkatan belanja pegawai secara langsung berkontribusi pada penambahan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Sementara itu, belanja pegawai juga berpengaruh positif terhadap jumlah puskesmas dan tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk dengan koefisien 0,28 dan 0,70, menunjukkan bahwa peningkatan belanja pegawai mendukung perluasan dan peningkatan infrastruktur kesehatan.

Sebaliknya, belanja nonpegawai per kapita menunjukkan hasil yang lebih variatif. Belanja nonpegawai mempengaruhi secara signifikan peningkatan jumlah puskesmas dengan koefisien 0,53, menunjukkan bahwa belanja nonpegawai juga penting dalam mengembangkan infrastruktur kesehatan di tingkat lokal. Namun, efek ini tidak konsisten di semua variabel; untuk tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk, koefisien sebesar 0,66 menunjukkan pengaruh yang masih signifikan, walaupun lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai. Pengaruh belanja nonpegawai terhadap jumlah perawat, bidan, dan dokter menunjukkan koefisien yang lebih rendah (0,21, 0,06, dan 0,16), mengindikasikan bahwa belanja nonpegawai memiliki kontribusi yang lebih terbatas dalam peningkatan jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan belanja pegawai (Tabel 5.6).

Tabel 5.6 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Output Kesehatan

Input	Output				
	Jumlah perawat	Jumlah bidan	Jumlah dokter	Jumlah puskesmas	Tempat Tidur Rumah Sakit per 1000 penduduk
Belanja pegawai per kapita	0,58***	0,80***	0,71***	0,28*	0,70***
Belanja nonpegawai per kapita	0,21	0,06	0,16	0,53***	0,66***

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

c. Aspek Efektivitas

Pada analisis hubungan antara belanja pegawai dan belanja nonpegawai dengan outcome kesehatan, belanja pegawai per kapita menunjukkan pengaruh negatif pada tingkat *infant mortality rate* dengan koefisien -0,23, sedangkan pada tingkat morbiditas tidak terlihat pengaruh signifikan. Namun, belanja pegawai sangat berpengaruh pada peningkatan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan profesional dengan koefisien yang sangat tinggi sebesar 1,07, menegaskan peran penting investasi dalam sumber daya manusia kesehatan terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan. Belanja nonpegawai per kapita menunjukkan hubungan yang kurang konsisten, dengan hanya persalinan yang dibantu tenaga kesehatan menunjukkan hubungan positif signifikan (Tabel 5.7).

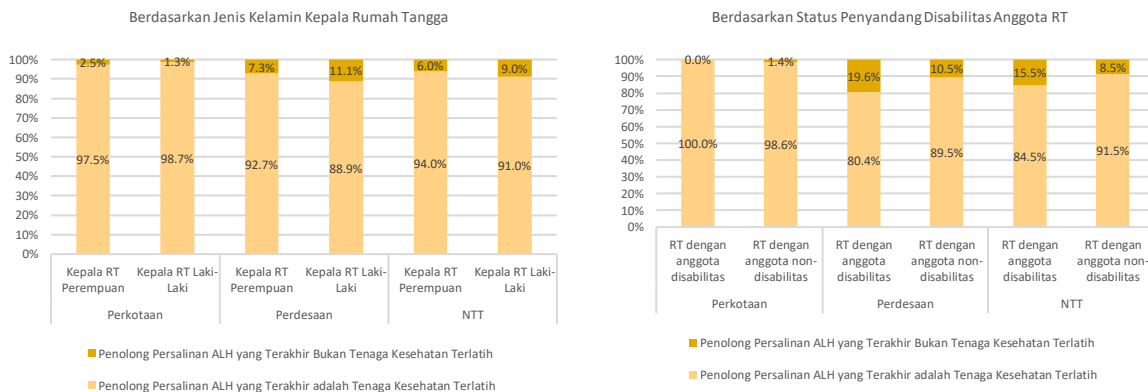
Tabel 5.7 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Outcome Kesehatan

Input	Outcome		
	Infant mortality rate	Morbidity rate	Persalinan dibantu tenaga kesehatan
Belanja pegawai per kapita	-0,23	0,32	1,07***
Belanja nonpegawai per kapita	0,05	-0,02	0,39***

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

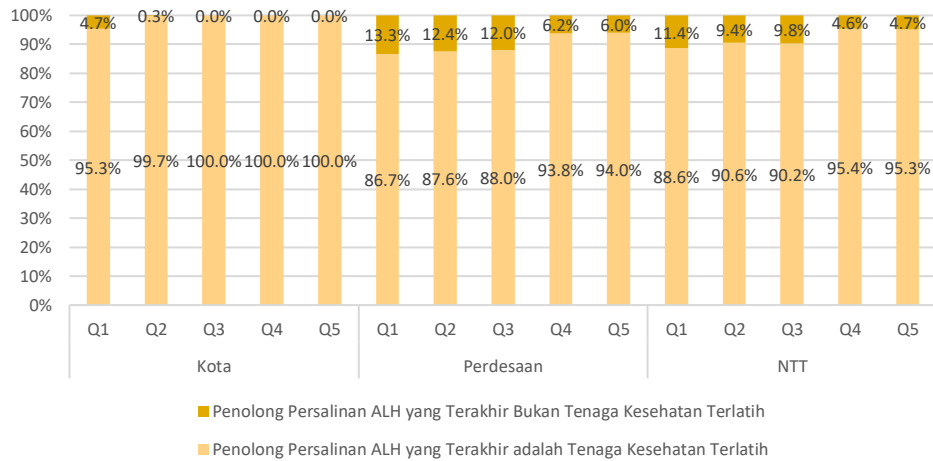
d. Aspek Keadilan

Akses terhadap tenaga kesehatan terlatih dalam persalinan di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 sudah relatif tinggi, namun masih terdapat perbedaan menurut karakteristik sosial ekonomi dan demografis. Jika dilihat dari jenis kelamin kepala rumah tangga, rumah tangga dengan kepala laki-laki sedikit lebih tinggi dalam hal persalinan yang ditangani tenaga kesehatan terlatih dibanding rumah tangga dengan kepala perempuan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Hal yang sama terlihat pada rumah tangga tanpa anggota disabilitas, yang memiliki proporsi lebih besar dalam memperoleh layanan persalinan dari tenaga kesehatan terlatih dibanding rumah tangga dengan anggota disabilitas. Ketimpangan yang paling jelas muncul ketika dilihat berdasarkan kuintil pengeluaran, terutama di wilayah pedesaan. Persentase perempuan yang melahirkan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih meningkat seiring dengan kenaikan kuintil pengeluaran, dengan kelompok termiskin di pedesaan menunjukkan angka paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kendala ekonomi masih menjadi salah satu faktor pembatas utama dalam mengakses layanan kesehatan maternal, terutama bagi kelompok miskin di wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.



Gambar 5.38 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan ALH yang Terakhir adalah Tenaga Kesehatan Terlatih Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Penyandang Disabilitas NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 5.39 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan ALH yang Terakhir adalah Tenaga Kesehatan Terlatih Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

5.3. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas, kualitas layanan dasar, dan konektivitas wilayah. Infrastruktur yang andal dan merata sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat keterhubungan antara daerah terisolasi, kepulauan, dan perbatasan. Dalam RPJMD 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan misi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana guna mempercepat pembangunan. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, termasuk keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, serta belum optimalnya sinergi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Konektivitas antarwilayah di NTT masih menjadi isu utama dalam pembangunan infrastruktur. Kondisi jalan yang belum merata serta minimnya akses transportasi ke daerah kepulauan dan terisolasi menjadi hambatan bagi mobilitas penduduk dan distribusi barang serta jasa. Upaya untuk mempercepat pembangunan jaringan jalan dan jembatan telah dilakukan, namun banyak ruas jalan di daerah perbatasan dan kawasan strategis masih dalam kondisi rusak atau belum terhubung dengan baik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan bandara di beberapa wilayah juga menghambat aktivitas perdagangan dan pariwisata, yang merupakan sektor unggulan dalam perekonomian NTT.

Selain aspek konektivitas, ketersediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan, dan listrik masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Akses terhadap air minum layak dan sanitasi yang memadai masih rendah, terutama di daerah perdesaan dan kepulauan. Di sisi lain, rasio elektrifikasi rumah tangga terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih terdapat ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya kelistrikan yang murah dan andal, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penyediaan rumah layak huni juga masih perlu diperkuat untuk mengurangi angka *backlog* perumahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

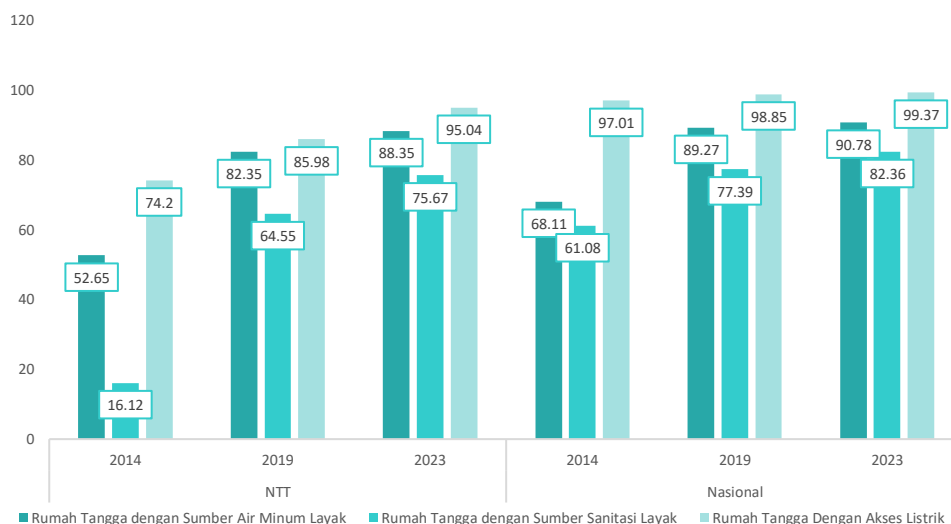
Tantangan lainnya adalah pengelolaan infrastruktur pengairan untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Masih banyak daerah pertanian yang belum memiliki sistem irigasi yang memadai, sehingga ketergantungan pada curah hujan cukup tinggi. Hal ini berdampak pada produktivitas pertanian yang fluktuatif serta berisiko terhadap ketahanan pangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur irigasi yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan peternakan yang mendominasi perekonomian NTT.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur di NTT membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, baik dalam hal perencanaan, pembiayaan, maupun koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, diperlukan strategi yang lebih inovatif dan kolaboratif agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur akan berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan sosial masyarakat NTT secara keseluruhan.

5.3.1. Kondisi Indikator *Outcome* Utama Bidang Infrastruktur

Akses rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap layanan dasar seperti air minum layak, sanitasi layak, dan listrik mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, meskipun masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional pada tahun 2023. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak di NTT meningkat dari 52,65% pada tahun 2014 menjadi 82,35% pada 2019, dan mencapai 88,35% pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 90,78% pada tahun yang sama. Akses sanitasi layak juga menunjukkan tren positif, dari hanya 16,12% pada tahun 2014 menjadi 54,55% pada 2019, dan mencapai 75,67% pada 2023. Namun, angka ini masih di bawah capaian nasional yang sudah mencapai 82,36%. Sementara itu, akses listrik di NTT mengalami peningkatan signifikan dari 74,2% pada tahun 2014 menjadi 85,98% pada 2019, dan akhirnya mencapai 95,04% pada 2023. Angka ini juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang hampir merata di angka 99,37% (lihat Gambar 5.40).

Meskipun terdapat peningkatan dalam akses layanan dasar, kesenjangan antara NTT dan rata-rata nasional menunjukkan bahwa tantangan dalam pembangunan infrastruktur masih nyata. Capaian yang lebih rendah dibandingkan nasional mengindikasikan bahwa pemerataan layanan dasar, terutama di daerah perdesaan dan kepulauan, masih menjadi isu krusial. Keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menantang, serta kapasitas infrastruktur yang belum optimal menjadi faktor utama yang memengaruhi lambatnya peningkatan akses layanan dasar di NTT. Dalam RPJMD 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT telah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama, termasuk peningkatan akses air minum dan sanitasi serta elektrifikasi desa. Namun, untuk mencapai target yang lebih ambisius, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan infrastruktur dasar. Selain itu, inovasi dalam penyediaan layanan berbasis komunitas serta pemanfaatan teknologi tepat guna juga menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian akses layanan dasar yang lebih inklusif dan berkelanjutan di NTT.



Gambar 5.40 Kondisi RT dengan Sumber Air Minum Layak, Sanitasi Layak, dan Akses Listrik NTT, 2014 - 2023

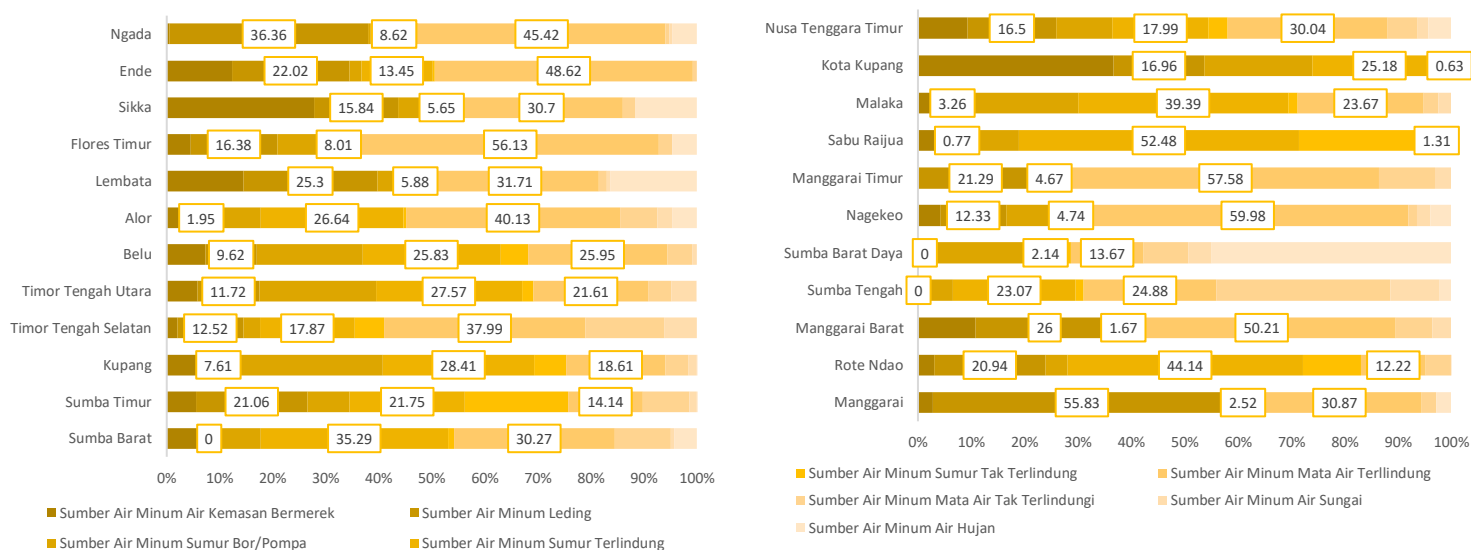
Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Distribusi sumber air minum di NTT menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah bergantung pada sumber air yang kurang aman. Kota Kupang menonjol dengan proporsi penggunaan air kemasan bermerek tertinggi di provinsi ini, yaitu sebesar 36,71%, yang mencerminkan preferensi masyarakat terhadap sumber air yang dianggap lebih higienis dan berkualitas. Sementara itu, Kabupaten Ngada memiliki cakupan sumber air leding tertinggi di NTT, mencapai 36,36%, menunjukkan infrastruktur perpipaan yang lebih berkembang dibandingkan daerah lain.

Di sisi lain, beberapa kabupaten masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air layak. Kabupaten Sabu Raijua memiliki proporsi penggunaan sumur tak terlindungi tertinggi, yaitu 52,48%, yang berisiko terhadap kualitas air dan kesehatan masyarakat. Kabupaten Flores Timur menunjukkan ketergantungan terbesar terhadap mata air terlindungi, mencapai 25,21%, yang menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini masih sangat mengandalkan sumber alami untuk kebutuhan air minum.

Selain itu, pola konsumsi air hujan juga terlihat di beberapa daerah. Kabupaten Sumba Barat Daya memiliki tingkat penggunaan air hujan tertinggi di NTT, yaitu sebesar 44,99%, yang menandakan kurangnya alternatif sumber air bersih lainnya. Sementara itu, Kabupaten Manggarai Barat memiliki proporsi tertinggi dalam penggunaan mata air terlindungi, mencapai 50,21%, yang menunjukkan ketergantungan besar terhadap sumber air alami di daerah tersebut.

Perbedaan pola penggunaan ini mencerminkan kebutuhan intervensi kebijakan yang berbeda di setiap wilayah, terutama dalam penyediaan akses air minum layak yang lebih merata. Investasi dalam infrastruktur perpipaan serta perlindungan sumber air alami perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sumber air yang rentan terhadap pencemaran.



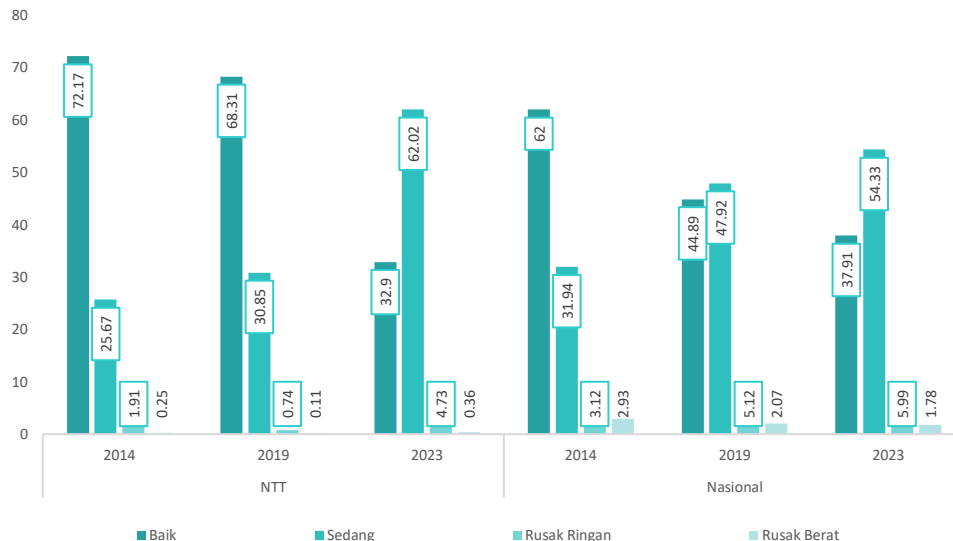
Gambar 5.41 Sumber Air Minum Rumah Tangga NTT, 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Kondisi jalan di NTT dalam satu dekade terakhir mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan, terutama pada periode 2019–2023. Pada tahun 2014, jalan dalam kondisi baik masih mendominasi dengan proporsi 72,17%, meskipun sebagian jalan sudah mulai mengalami degradasi ke kategori sedang (25,67%). Pada 2019, proporsi jalan baik turun menjadi 63,31%, menunjukkan adanya penurunan kualitas jalan akibat faktor usia infrastruktur dan keterbatasan pemeliharaan. Namun, kondisi memburuk lebih tajam pada 2023, di mana hanya 32,92% jalan yang masih dalam kondisi baik. Penurunan drastis ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih besar terhadap strategi pemeliharaan jalan guna mencegah semakin banyaknya ruas jalan yang mengalami degradasi.

Sementara itu, jalan dalam kondisi sedang terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, proporsinya hanya 25,67%, tetapi meningkat menjadi 35,86% pada 2019 dan melonjak drastis menjadi 62,02% pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa banyak jalan yang sebelumnya masuk dalam kategori baik kini mengalami penurunan kualitas, meskipun belum masuk ke dalam kategori rusak. Di sisi lain, proporsi jalan rusak ringan dan rusak berat di NTT masih relatif kecil dibandingkan kategori lain, meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan. Pada 2023, proporsi jalan rusak ringan mencapai 4,78%, sedangkan jalan rusak berat tercatat sebesar 0,36%.

Jika dibandingkan dengan kondisi jalan secara nasional, penurunan kualitas jalan di NTT terjadi lebih tajam dalam periode 2019–2023. Secara nasional, proporsi jalan dalam kondisi baik pada 2023 sebesar 37,91%, sedikit lebih tinggi dibandingkan NTT yang hanya 32,92%. Sementara itu, jalan dalam kondisi sedang di tingkat nasional juga cukup tinggi, mencapai 54,33%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan NTT. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan infrastruktur jalan terjadi di berbagai daerah di Indonesia, NTT menghadapi degradasi yang lebih cepat dan memerlukan intervensi yang lebih strategis. Oleh karena itu, perlu adanya alokasi anggaran yang lebih besar untuk pemeliharaan jalan serta kebijakan yang memastikan pembangunan infrastruktur lebih berkelanjutan agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga.



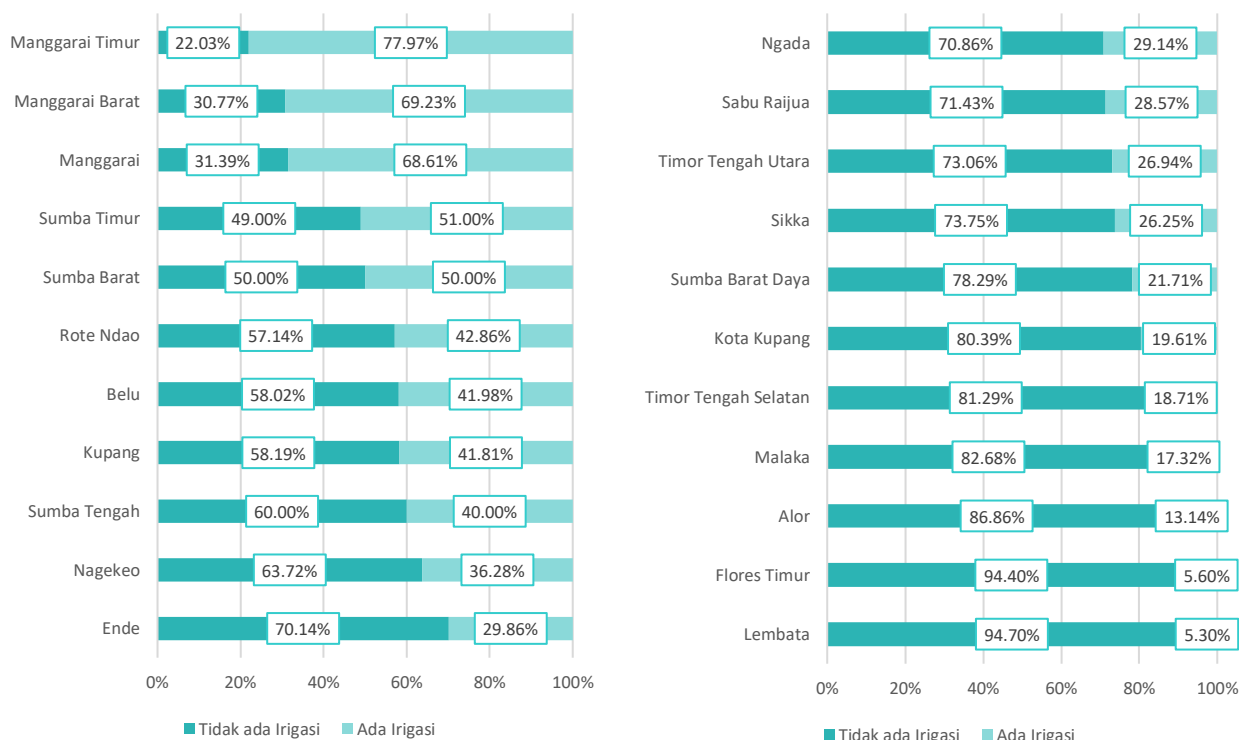
Gambar 5.42 Kondisi Jalan NTT, 2014 - 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Sebagian besar desa di NTT masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sistem irigasi, yang berpotensi menghambat produktivitas pertanian di wilayah ini. Data tahun 2021 menunjukkan bahwa kabupaten dengan cakupan irigasi terendah adalah Flores Timur dan Lembata, di mana masing-masing 94,06% dan 94,70% desa belum memiliki sistem irigasi. Demikian pula, Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat mencatat angka yang cukup tinggi dalam ketidaktersediaan irigasi, dengan masing-masing 60% dan 50% desa belum memiliki jaringan irigasi, yang mencerminkan tantangan besar dalam penyediaan infrastruktur pengairan. Kota Kupang juga menghadapi keterbatasan signifikan, dengan 80,39% desa belum memiliki akses terhadap irigasi, menandakan masih terbatasnya infrastruktur pendukung sektor pertanian di wilayah perkotaan tersebut.

Di sisi lain, beberapa kabupaten telah menunjukkan tingkat akses irigasi yang lebih baik. Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Barat memiliki cakupan irigasi yang relatif tinggi, dengan masing-masing 77,97% dan 69,23% desa telah memiliki sistem irigasi. Capaian ini menunjukkan adanya upaya yang lebih intensif dalam pembangunan infrastruktur pengairan, terutama di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian.

Ketimpangan dalam akses irigasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah NTT masih sangat bergantung pada curah hujan untuk pengairan lahan pertanian, yang meningkatkan risiko gagal panen terutama di musim kemarau. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, pengembangan alternatif seperti embung dan teknologi pemanenan air hujan dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan akses air, guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan sektor pertanian di NTT.



Gambar 5.43 Persentase Desa yang Memiliki Irigasi NTT, 2021

Sumber: PODES (2021), diolah oleh LPEM FEB UI

5.3.2. Analisis Disparitas dan Mapping Layanan Infrastruktur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis disparitas antar kabupaten kota (Tabel 5.8) menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan akses infrastruktur antar daerah. Beberapa daerah menunjukkan kondisi infrastruktur yang baik dan mencukupi, namun daerah lain memiliki kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Beberapa kabupaten di Provinsi NTT memiliki kondisi jalan yang baik di atas 80% seperti Rote Ndao, Sikka, lembata, Nagekeo. Sementara itu daerah seperti Timor Tengah Utara, Sumba Timur, Manggarai Timur, bahkan Kota Kupang memiliki kondisi jalan baik di bawah 50%.

Selanjutnya, pada indikator rumah tangga dengan akses sanitasi dan air minum layak, masih terdapat daerah yang memiliki presentase di bawah 60%. Sumba Tengah merupakan daerah dengan akses air minum dan sanitasi yang rendah, yaitu masing-masing 56% dan 48%. Di sisi lain, Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi NTT memiliki akses air minum dan sanitasi layak diatas 80%.

Berdasarkan indikator persentase desa dengan irigasi, 34% desa di NTT memiliki irigasi. Namun Apabila dilihat berdasarkan sebaran daerahnya, Kabupaten Lembata memiliki presentase terendah (5,3%) dan daerah tertinggi adalah Manggarai Timur (78%). Perbedaan ketersediaan irigasi ini dapat didasari oleh kondisi sektor utama masing-masing daerah. Daerah yang fokus pada sektor pertanian cenderung memiliki desa dengan irigasi.

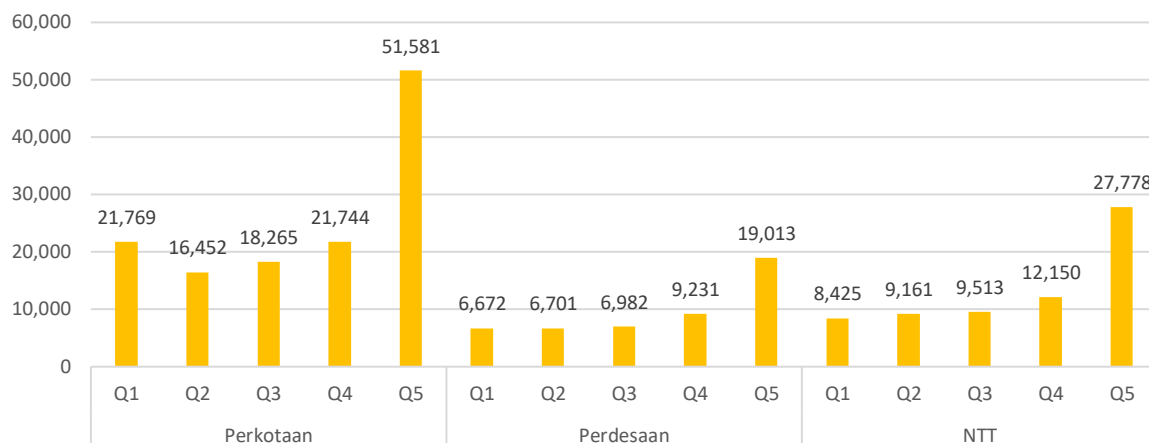
Tabel 5.8 Analisis Disparitas Infrastruktur NTT, 2023

Kabupaten/ Kota	% Kondisi Jalan Baik	% RT dengan Akses Air Minum Layak	% RT dengan Akses Sanitasi Layak	% Desa dengan Irigasi
Provinsi NTT	64,1%	88,4%	75,7%	34,17%
Sumba Barat	74,5%	86,8%	58,8%	50,0%

Kabupaten/ Kota	% Kondisi Jalan Baik	% RT dengan Akses Air Minum Layak	% RT dengan Akses Sanitasi Layak	% Desa dengan Irigasi
Sumba Timur	43,6%	70,4%	61,8%	51,0%
Kupang	52,5%	87,6%	76,4%	41,8%
Timor Tengah Selatan	60,7%	73,5%	68,0%	18,7%
Timor Tengah Utara	23,3%	88,7%	80,6%	26,9%
Belu	57,7%	88,0%	84,0%	42,0%
Alor	57,4%	89,1%	81,6%	13,1%
Lembata	88,7%	97,6%	87,4%	5,3%
Flores Timur	81,8%	97,0%	93,0%	5,6%
Sikka	92,7%	95,3%	80,7%	26,3%
Ende	84,2%	98,5%	88,5%	29,9%
Ngada	79,9%	95,4%	87,1%	29,1%
Manggarai	80,5%	95,9%	62,7%	68,6%
Rote Ndao	100,0%	84,3%	84,9%	42,9%
Manggarai Barat	55,4%	88,1%	80,8%	69,2%
Sumba Tengah	85,6%	56,7%	48,3%	40,0%
Sumba Barat Daya	90,5%	83,7%	49,9%	21,7%
Nagekeo	90,2%	94,4%	80,1%	36,3%
Manggarai Timur	44,2%	84,4%	54,8%	78,0%
Sabu Raijua	76,4%	72,2%	75,2%	28,6%
Malaka	77,4%	92,6%	71,3%	17,3%
Kota Kupang	21,9%	99,3%	89,5%	19,6%

Sumber: BPS, PODES, dan SUSENAS (2023-2024), diolah oleh LPEM FEB UI

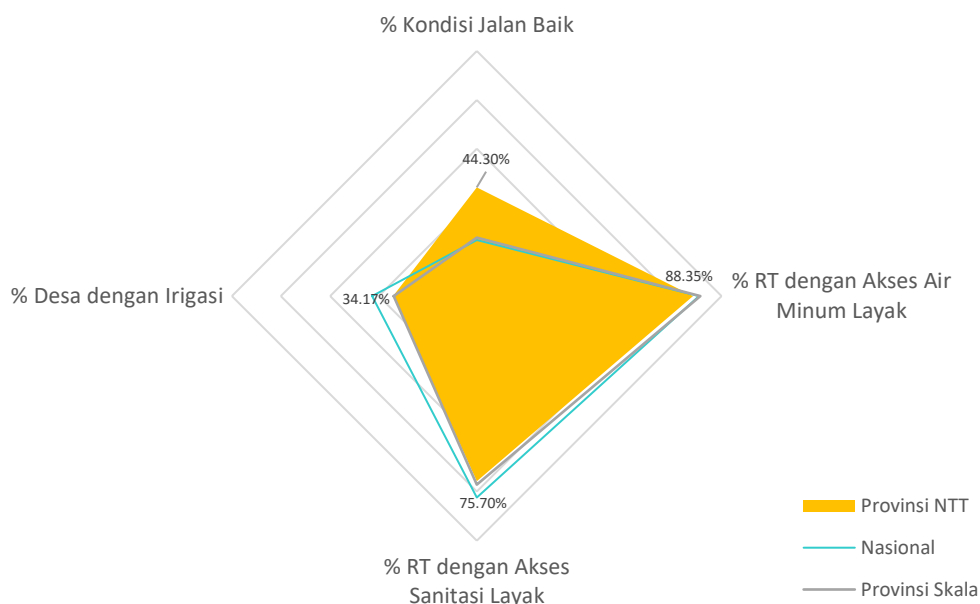
Berdasarkan perbandingan biaya transportasi antar rumah tangga, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara desa dan kota. Dalam mengukur disparitas akses infrastruktur antar kelompok rumah tangga berdasarkan kuantil pengeluaran dan desa-kota, dilakukan perbandingan pengeluaran biaya transportasi. Pengeluaran biaya transportasi pada kuantil tertinggi (Q5) menunjukkan angka yang sangat tinggi pada perkotaan dan perdesaan. Namun pengeluaran transportasi Q5 di perkotaan dua kali lebih tinggi dari Q5 pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan akses infrastruktur, terutama dalam hal transportasi antara perkotaan dan pedesaan (Gambar 5.44). Pilihan transportasi di perkotaan dapat dikatakan lebih luas dibandingkan desa sehingga masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat mengeluarkan biaya transportasi yang lebih besar.



Gambar 5.44 Pengeluaran Biaya Transportasi NTT, 2023 (Rp Kapita Per Bulan)

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

Berdasarkan analisis mapping layanan infrastruktur menunjukkan bahwa akses air minum dan sanitasi layak di NTT menunjukkan angka di bawah nasional dan provinsi skala lainnya. Analisis mapping layanan infrastruktur membandingkan 4 (empat) variabel yang dibandingkan pada analisis disparitas pada tingkat Provinsi NTT, Provinsi Skala, dan Nasional. Berdasarkan analisis tersebut terlihat bahwa variabel kondisi jalan baik memiliki level jauh lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi skala. Akan tetapi jika membandingkan akses air minum dan sanitasi layak, Provinsi NTT masih tertinggal dari Provinsi Skala dan Nasional (Gambar 5.45). Akses air minum layak NTT hanya 88,35%, sementara akses sanitasi layak hanya 75,70%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi NTT masih harus meningkatkan kualitas infrastruktur dasar untuk rumah tangga, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses minim.



Gambar 5.45 Analisis Mapping Layanan Infrastruktur NTT, 2023

Sumber: BPS, PODES, dan SUSENAS (2023-2024), diolah oleh LPEM FEB UI

5.3.3. Belanja Infrastruktur

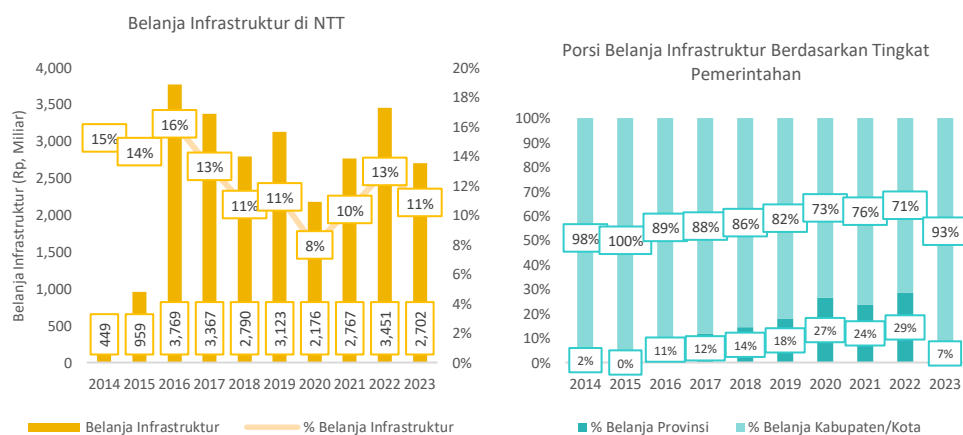
Tren belanja infrastruktur di Provinsi NTT mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika kebijakan fiskal daerah selama periode 2014–2023. Pada awal periode, belanja infrastruktur masih

rendah, dengan alokasi Rp449 miliar pada 2014, sebelum meningkat drastis menjadi Rp3.769 miliar pada 2016, atau sekitar 16% dari total belanja daerah. Namun, setelah mencapai puncaknya, tren belanja mengalami penurunan pada 2018 hingga 2020, dengan alokasi yang merosot ke Rp2.176 miliar pada 2020. Tren ini kembali mengalami kenaikan pada 2021, mencapai Rp3.451 miliar, meskipun kembali turun ke Rp2.702 miliar pada 2023. Secara persentase terhadap total belanja daerah, proporsi belanja infrastruktur sempat mencapai 16% pada 2016, tetapi turun ke level 8% pada 2020 dan kembali meningkat menjadi 11% pada 2023.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran infrastruktur di NTT sangat dipengaruhi oleh prioritas kebijakan pembangunan dan faktor eksternal seperti tekanan fiskal serta pandemi COVID-19. Peningkatan signifikan pada 2016 dan 2017 kemungkinan terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur strategis sesuai dengan RPJMD NTT saat itu. Namun, penurunan pada 2018–2020 dapat dikaitkan dengan keterbatasan anggaran dan penyesuaian prioritas ke sektor lain, terutama pada masa pandemi. Pemulihan belanja infrastruktur pada 2021 hingga 2023 mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk kembali memperkuat pembangunan fisik guna mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.

Sebagian besar belanja infrastruktur di NTT dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana terlihat dari porsi belanja yang secara konsisten lebih besar dibandingkan belanja infrastruktur provinsi. Sepanjang periode 2014–2023, porsi belanja kabupaten/kota selalu mendominasi, dengan angka tertinggi pada 2015 dan 2023, di mana belanja provinsi hanya berkontribusi sekitar 2% dan 7%. Pada tahun-tahun lainnya, peran provinsi sedikit lebih besar, seperti pada 2019, ketika proporsi belanja provinsi mencapai 18%, atau pada 2022 dengan kontribusi 29%.

Dominasi belanja kabupaten/kota ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT lebih berorientasi pada proyek-proyek skala lokal yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti jalan desa, fasilitas air bersih, dan infrastruktur dasar lainnya. Sementara itu, peran provinsi cenderung lebih terbatas dan kemungkinan besar difokuskan pada proyek-proyek lintas wilayah atau strategis. Penurunan belanja infrastruktur provinsi dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan adanya pergeseran prioritas atau keterbatasan anggaran yang lebih mengutamakan sektor lain. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan infrastruktur agar pembangunan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah NTT.



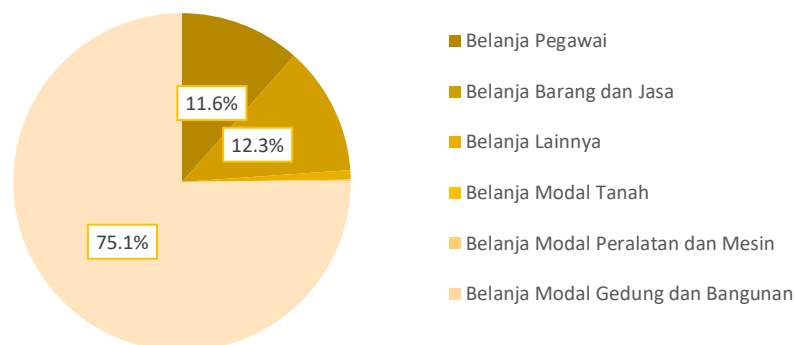
Gambar 5.46 Belanja Infrastruktur NTT, 2014 - 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Belanja infrastruktur di tingkat Provinsi NTT pada tahun 2023 didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang mencapai 75,1% dari total anggaran, mencerminkan fokus utama pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Alokasi ini menunjukkan bahwa investasi terbesar diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi serta sistem irigasi guna mendukung mobilitas masyarakat dan sektor ekonomi, terutama di daerah dengan akses terbatas.

Selain itu, **Belanja Barang dan Jasa mendapatkan porsi sebesar 12,3%, yang mencerminkan kebutuhan operasional dalam mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur.** Anggaran ini umumnya digunakan untuk pengadaan material konstruksi, jasa konsultasi, serta kebutuhan teknis lainnya yang mendukung pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Belanja Pegawai hanya mencakup 11,6% dari total anggaran, menandakan bahwa porsi yang dialokasikan untuk kebutuhan administratif dan tenaga kerja relatif lebih kecil dibandingkan belanja pembangunan fisik.

Tingginya proporsi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi menunjukkan prioritas pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan daya saing ekonomi. Namun, keseimbangan antara belanja modal dan operasional tetap perlu diperhatikan agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Alokasi yang lebih rendah untuk belanja pegawai juga dapat mengindikasikan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor infrastruktur, meskipun tetap penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di NTT.



Gambar 5.47 Proporsi Belanja Infrastruktur Tingkat Provinsi NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

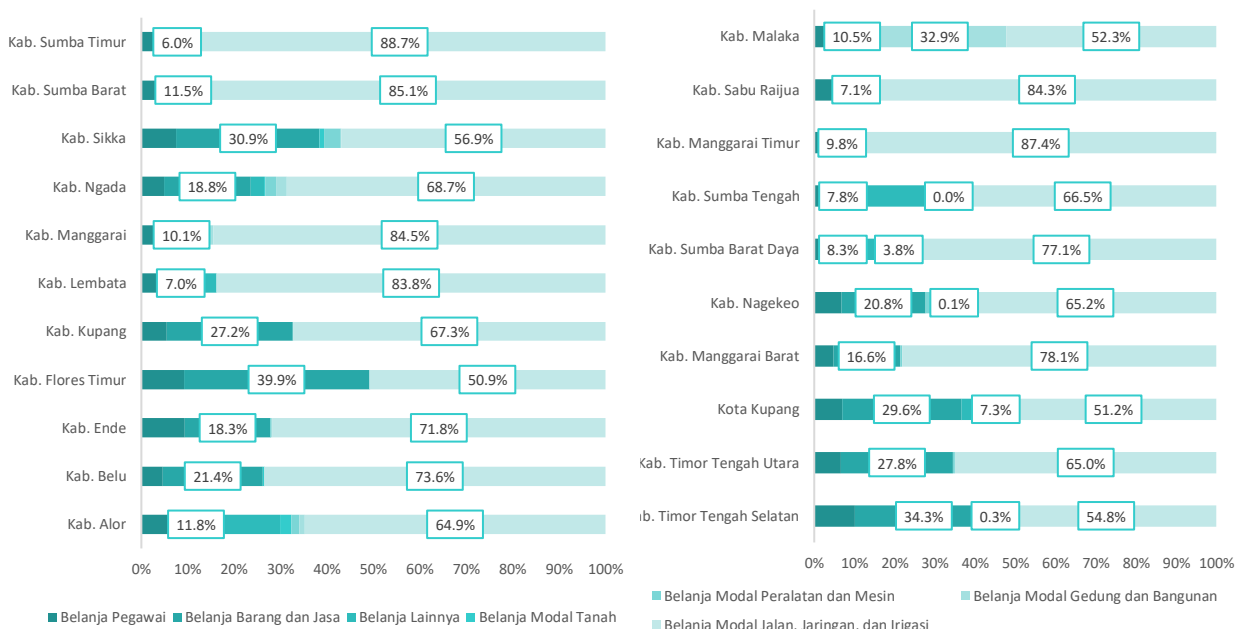
Belanja infrastruktur di tingkat kabupaten/kota NTT secara umum didominasi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, mencerminkan prioritas utama pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Kabupaten Sumba Barat mencatat alokasi tertinggi dalam kategori ini dengan 85,1%, diikuti oleh Kabupaten Manggarai (84,5%) dan Kabupaten Sabu Raijua (84,3%). Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Flores Timur (50,9%) dan Kota Kupang (51,2%) memiliki porsi yang lebih rendah, menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah.

Selain itu, **Belanja Barang dan Jasa menjadi komponen terbesar kedua dalam struktur belanja infrastruktur kabupaten/kota, dengan proporsi yang cukup bervariasi.** Kabupaten Flores Timur mencatat angka tertinggi dalam kategori ini dengan 39,9%, diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Selatan (34,3%) dan Kabupaten Sikka (30,9%). Besarnya alokasi ini menunjukkan bahwa beberapa

daerah lebih banyak mengarahkan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, seperti material konstruksi, konsultasi teknis, serta operasional proyek infrastruktur.

Sementara itu, Belanja Pegawai menjadi komponen terkecil dibandingkan dua kategori utama lainnya, dengan proporsi yang umumnya berada di bawah 10%. Kabupaten dengan belanja pegawai tertinggi antara lain Kabupaten Timor Tengah Selatan (10,1%) dan Kabupaten Ende (9,4%). Rendahnya alokasi ini mengindikasikan bahwa belanja infrastruktur lebih banyak diarahkan pada investasi fisik dibandingkan belanja operasional pegawai.

Dominasi belanja modal untuk pembangunan jalan dan jaringan di hampir seluruh kabupaten/kota mencerminkan tantangan geografis NTT yang memerlukan infrastruktur transportasi lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses layanan publik. Namun, perbedaan pola alokasi anggaran antar daerah menunjukkan adanya strategi pembangunan yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Untuk memastikan efektivitas pembangunan infrastruktur, diperlukan perencanaan yang lebih terpadu antara pemerintah daerah dan pusat agar anggaran dapat diarahkan secara optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTT.

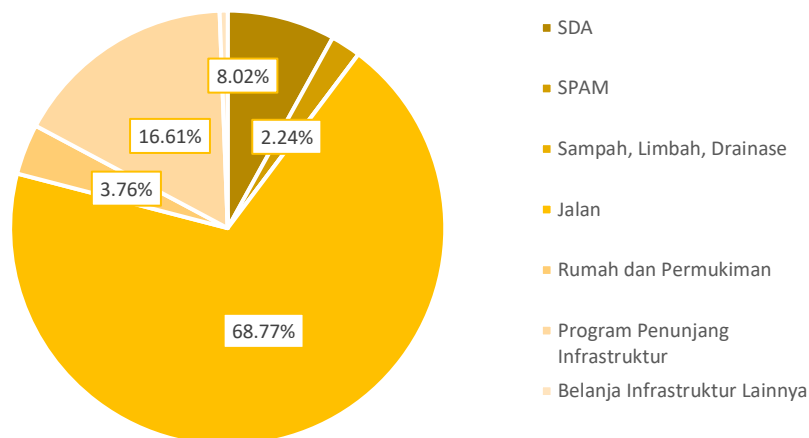


Gambar 5.48 Proporsi Belanja Infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Belanja infrastruktur di Provinsi NTT tahun 2023 didominasi oleh program jalan, yang menyerap 68,77% dari total belanja infrastruktur provinsi (Gambar 5.49). Hal ini mencerminkan prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah guna mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Selain itu, program penunjang infrastruktur mendapatkan alokasi sebesar 16,61%, mencakup berbagai kegiatan pendukung pembangunan infrastruktur secara umum. Sementara itu, program sumber daya air (SDA) memperoleh porsi 8,02%, menandakan perhatian terhadap pengelolaan dan pemanfaatan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan lingkungan. Program rumah dan permukiman serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) masing-masing mendapat alokasi 3,76% dan 2,24%, yang mencerminkan investasi dalam peningkatan kualitas hunian serta akses air bersih bagi masyarakat.

Komposisi belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi NTT lebih menitikberatkan pembangunan infrastruktur transportasi sebagai faktor utama dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan konektivitas antarwilayah. Namun, alokasi yang lebih kecil untuk program rumah dan permukiman serta SPAM mengindikasikan bahwa tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Ke depan, optimalisasi belanja infrastruktur perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan transportasi dengan peningkatan kualitas hunian dan akses layanan dasar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.



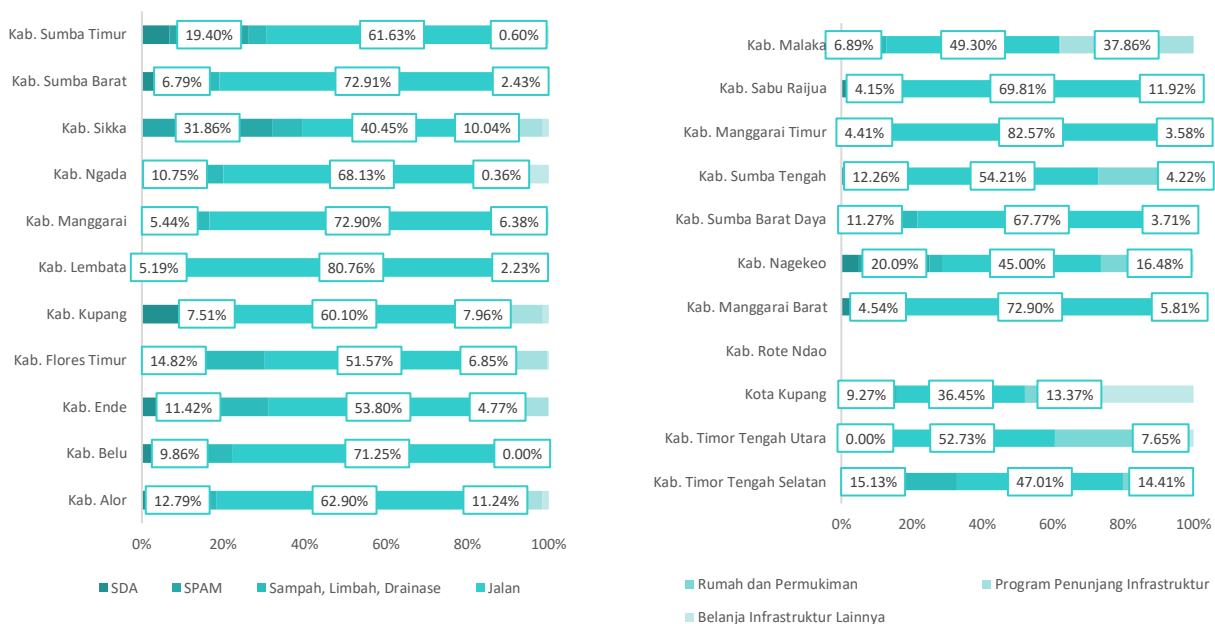
Gambar 5.49 Proporsi Belanja Infrastruktur Berdasarkan Program Tingkat Provinsi NTT, 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Belanja infrastruktur di tingkat kabupaten/kota Provinsi NTT tahun 2023 didominasi oleh program jalan, dengan mayoritas daerah mengalokasikan porsi terbesar anggarannya untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi (lihat Gambar 5.50). Beberapa kabupaten seperti Kabupaten Lembata (80,76%), Kabupaten Manggarai Timur (82,57%), dan Kabupaten Belu (71,25%) menempatkan program jalan sebagai prioritas utama. Dominasi belanja pada sektor ini menunjukkan pentingnya peningkatan konektivitas antarwilayah dalam mendukung mobilitas penduduk serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Selain jalan, program penunjang infrastruktur juga menjadi fokus belanja di beberapa daerah, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil. Kabupaten Timor Tengah Selatan, misalnya, mengalokasikan 14,41% anggarannya untuk program ini, yang mencerminkan dukungan terhadap aspek-aspek infrastruktur pendukung seperti perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Program rumah dan permukiman pun mendapatkan perhatian, terutama di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang mengalokasikan hingga 26,18% dari total belanja infrastrukturnya untuk sektor ini.

Sementara itu, program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) mendapatkan alokasi yang lebih kecil dibandingkan program jalan, meskipun masih menjadi prioritas di beberapa daerah. Kabupaten Sikka mencatat proporsi belanja SPAM tertinggi sebesar 31,86%, menunjukkan perhatian terhadap peningkatan akses air bersih bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pola belanja infrastruktur di tingkat kabupaten/kota serupa dengan tingkat provinsi, dengan prioritas utama pada pengembangan jalan, diikuti oleh belanja program penunjang infrastruktur, serta program SPAM yang mendapat alokasi lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.



Gambar 5.50 Proporsi Belanja Infrastruktur Berdasarkan Program Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi NTT, 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Secara keseluruhan, pola belanja infrastruktur di tingkat kabupaten/kota di Provinsi NTT menunjukkan fokus utama pada pembangunan jalan, yang mencerminkan kebutuhan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam prioritas belanja antar daerah, dengan beberapa kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor rumah dan permukiman serta program penyediaan air minum. Keberagaman ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan spesifik masing-masing daerah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ke depan, optimalisasi belanja infrastruktur perlu mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai sektor agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

5.3.4. Kualitas Belanja Infrastruktur

a. Aspek Kecukupan

Capaian belanja infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa meskipun nilai belanja per kapita mencapai Rp485 ribu—jauh di atas rata-rata nasional sebesar Rp170 ribu—proporsi belanja terhadap target minimum belanja infrastruktur baru mencapai 63,60 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata 8 provinsi skala yang mencapai 68,06 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi absolut per kapita tergolong tinggi, pencapaiannya terhadap kebutuhan minimal belum optimal. Salah satu penyebabnya kemungkinan berasal dari tantangan geografis dan kebutuhan infrastruktur dasar yang lebih luas di wilayah kepulauan seperti NTT, sehingga kebutuhan belanja infrastrukturnya pun lebih tinggi dibanding wilayah daratan yang lebih terkonsentrasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa untuk memenuhi standar minimum, dibutuhkan pendekatan pembiayaan dan perencanaan yang lebih strategis agar belanja infrastruktur dapat menjawab ketimpangan layanan antarwilayah.

Tabel 5.9 Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Infrastruktur Tahun 2023

No.	Indikator	Capaian		
		Nusa Tenggara Timur	8 Provinsi Skala	Nasional
1.	Capaian Belanja Infrastruktur Daerah terhadap Target Minimum Belanja Infrastruktur (%)	63,60	68,06	-
2.	Belanja Infrastruktur per Kapita (Rp)	485.453	754.910	170.961

Catatan: Belanja menggunakan belanja konsolidasi provinsi dan kota kabupaten

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

b. Aspek Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi, kajian ini menerapkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan orientasi input dan asumsi *variable returns to scale* (VRS). Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten/kota dapat mengurangi penggunaan input tanpa menurunkan tingkat output yang dihasilkan. Dengan kata lain, DEA digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah telah menggunakan sumber daya secara optimal dalam menyediakan layanan infrastruktur.

Analisis dilakukan pada tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi dalam lingkup SKALA, mencakup data dari tahun 2021 hingga 2023. Evaluasi efisiensi dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing untuk setiap tahun observasi. Dalam analisis ini, input yang digunakan mencakup belanja pegawai per kapita, belanja nonpegawai per kapita, belanja modal per kapita, serta belanja barang dan jasa per kapita. Sementara itu, output yang diukur meliputi jumlah rumah tangga dengan akses air bersih dan jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi.

Nilai efisiensi teknis dalam analisis ini merupakan *predicted technical efficiency*. Pada tahap awal, DEA diterapkan secara terpisah untuk setiap tahun guna memperoleh nilai efisiensi teknis tahunan. Selanjutnya, nilai tersebut diregresikan terhadap variabel jumlah populasi, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin. Hasil prediksi dari regresi tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran efisiensi dalam kajian ini.

Dalam analisis DEA, tingkat efisiensi dinyatakan dalam bentuk skor antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan efisiensi penuh (*fully efficient*), sementara nilai di bawah 1 mengindikasikan inefisiensi relatif. Jika suatu kabupaten/kota memperoleh skor efisiensi sebesar 1, maka daerah tersebut dianggap telah mengalokasikan sumber dayanya secara optimal dalam menghasilkan output infrastrukturnya. Sebaliknya, jika suatu kabupaten/kota memiliki skor di bawah 1, misalnya 0,75, maka terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penggunaan input hingga 25% tanpa menurunkan jumlah rumah tangga dengan akses air bersih dan jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi.

Sebagai contoh, jika sebuah kabupaten dengan skor efisiensi 0,75 memiliki belanja pegawai per kapita sebesar Rp1.000.000, belanja nonpegawai per kapita sebesar Rp500.000, belanja modal per kapita sebesar Rp700.000, dan belanja barang dan jasa per kapita sebesar Rp800.000, maka secara teoritis, pengeluaran tersebut masih dapat dikurangi sekitar 25% tanpa menurunkan output infrastruktur yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil analisis DEA tidak hanya mengidentifikasi kabupaten/kota yang efisien dan tidak efisien, tetapi juga memberikan indikasi mengenai seberapa besar potensi efisiensi yang masih dapat dicapai oleh daerah yang belum optimal.

Hasil analisis efisiensi teknis di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup beragam antar kabupaten dan kota (Tabel 5.10). Beberapa daerah mengalami peningkatan efisiensi, sementara yang lain mencatat fluktuasi yang mengindikasikan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya untuk penyediaan layanan infrastruktur.

Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat skor efisiensi teknis tertinggi selama periode observasi, dengan peningkatan dari 0,48 pada tahun 2021 menjadi 0,72 pada tahun 2023. Kabupaten Kupang juga menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif tinggi, dengan peningkatan dari 0,44 pada tahun 2021 menjadi 0,63 pada tahun 2023. Kabupaten Sumba Barat Daya mencatat tren positif dengan kenaikan dari 0,37 pada tahun 2021 menjadi 0,64 pada tahun 2023. Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih rendah dan mengalami fluktuasi selama periode analisis. Kabupaten Sumba Tengah, misalnya, mencatat skor efisiensi negatif sebesar -0,04 pada tahun 2022 sebelum meningkat menjadi 0,32 pada tahun 2023, yang menandakan adanya perbaikan dalam penggunaan sumber daya. Kabupaten Sabu Raijua juga mengalami nilai negatif sebesar -0,04 pada tahun 2022, tetapi kemudian meningkat menjadi 0,35 pada tahun 2023. Kabupaten Lembata yang mencatat skor -0,01 pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 0,38 pada tahun 2023.

Nilai negatif dalam hasil ini tidak menunjukkan bahwa suatu daerah memiliki efisiensi teknis yang benar-benar di bawah nol, melainkan mencerminkan prediksi model yang mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki efisiensi lebih rendah dibandingkan pola yang diperkirakan berdasarkan karakteristiknya. Dengan kata lain, daerah dengan nilai efisiensi negatif dalam hasil regresi ini mengalami tingkat inefisiensi yang lebih besar dibandingkan tren yang terlihat pada daerah lain dengan karakteristik serupa.

Kabupaten Ende mengalami peningkatan efisiensi teknis dari 0,36 pada tahun 2021 menjadi 0,50 pada tahun 2023. Kabupaten Manggarai menunjukkan tren kenaikan dari 0,40 pada tahun 2021 menjadi 0,54 pada tahun 2023. Kabupaten Manggarai Timur juga mencatat peningkatan dari 0,35 pada tahun 2021 menjadi 0,53 pada tahun 2023. Sementara itu, Kota Kupang mencatat skor efisiensi 0,50 pada tahun 2023, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik dibandingkan daerah lain.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa kabupaten/kota di NTT telah mencapai tingkat efisiensi yang cukup tinggi, masih terdapat potensi peningkatan di daerah dengan skor lebih rendah. Optimalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi teknis dan memperluas akses rumah tangga terhadap layanan infrastruktur dasar.

Tabel 5.10 Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Infrastruktur

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Alor	0,31	0,03	0,41
Kabupaten Belu	0,34	0,03	0,39
Kabupaten Ende	0,36	0,07	0,50
Kabupaten Flores Timur	0,39	0,06	0,40
Kabupaten Kupang	0,44	0,14	0,63

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Lembata	0,26	-0,01	0,38
Kabupaten Manggarai	0,40	0,10	0,54
Kabupaten Ngada	0,29	0,00	0,33
Kabupaten Sikka	0,42	0,09	0,45
Kabupaten Sumba Barat	0,27	0,00	0,39
Kabupaten Sumba Timur	0,30	0,06	0,49
Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,48	0,19	0,72
Kabupaten Timor Tengah Utara	0,35	0,06	0,47
Kota Kupang			0,50
Kabupaten Rote Ndao	0,26	0,00	0,43
Kabupaten Manggarai Barat	0,35	0,06	0,45
Kabupaten Nagekeo	0,29	0,00	0,33
Kabupaten Sumba Barat Daya	0,37	0,10	0,64
Kabupaten Sumba Tengah	0,22	-0,04	0,32
Kabupaten Manggarai Timur	0,35	0,08	0,53
Kabupaten Sabu Raijua	0,22	-0,04	0,35
Kabupaten Malaka	-	-	-

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

Melalui analisis regresi, kajian ini mengeksplorasi hubungan antara belanja pegawai dan nonpegawai per kapita dengan output infrastruktur seperti akses air bersih dan akses sanitasi di tahun yang sama. Ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara kedua jenis belanja terhadap akses air bersih, dengan koefisien -0,59 untuk belanja pegawai dan -0,55 untuk belanja nonpegawai, menunjukkan bahwa peningkatan belanja tidak berhubungan dengan peningkatan akses air bersih. Dalam hal akses sanitasi, belanja nonpegawai menunjukkan hubungan negatif yang lebih kuat (koefisien -0,61) dibandingkan dengan belanja pegawai (koefisien -0,39), mengindikasikan bahwa belanja tersebut tidak efektif dalam meningkatkan akses sanitasi (Tabel 5.11).

Tabel 5.11 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Output Infrastruktur

No.	Input	Output	
		Akses Air Bersih	Akses Sanitasi
1.	Belanja Pegawai Per kapita	-0,59***	-0,39
2.	Belanja Non-Pegawai Per kapita	-0,55***	-0,61

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

c. Aspek Efektivitas

Melalui analisis regresi, kajian ini mengeksplorasi hubungan antara belanja pegawai dan nonpegawai per kapita dengan outcome infrastruktur, yaitu prevalensi stunting. Analisis pada prevalensi stunting menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara belanja pegawai dan penurunan stunting (koefisien -0,09), sedangkan belanja nonpegawai menunjukkan korelasi positif sebesar 0,06, yang mengindikasikan potensi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ditujukan untuk mengurangi stunting (Tabel 5.12).

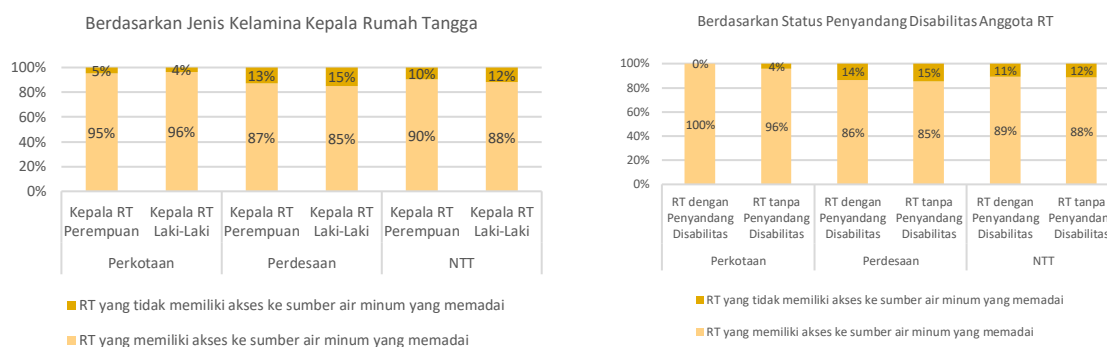
Tabel 5.12 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Outcome Infrastruktur

No.	Input	Outcome
		Prevalensi Stunting
1.	Belanja Pegawai Per kapita	-0,09
2.	Belanja Non-Pegawai Per kapita	0,06

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

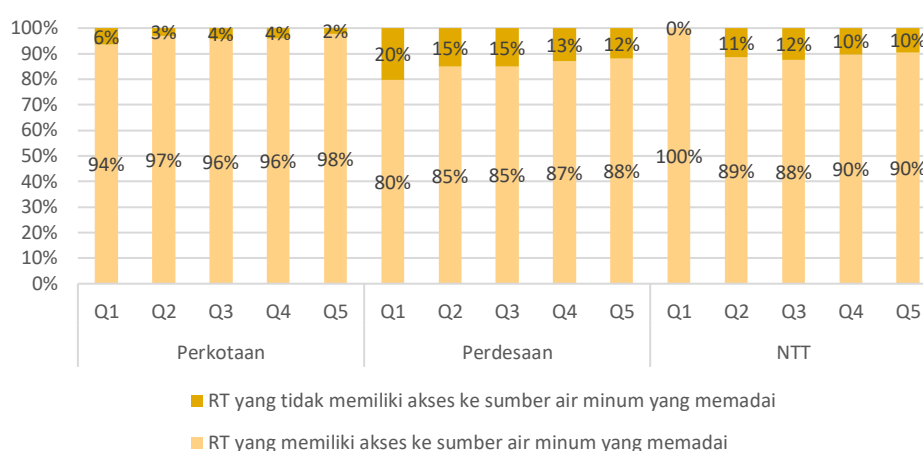
d. Aspek Keadilan

Akses terhadap sumber air minum yang memadai di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan kesenjangan antar kelompok rumah tangga. Rumah tangga dengan kepala laki-laki memiliki akses sedikit lebih baik dibandingkan rumah tangga dengan kepala perempuan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, meskipun selisihnya tidak terlalu besar. Sementara itu, rumah tangga yang tidak memiliki anggota penyandang disabilitas cenderung memiliki akses lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang memiliki anggota penyandang disabilitas, khususnya di wilayah perdesaan. Hal ini bisa mengindikasikan adanya hambatan tambahan yang dihadapi kelompok rentan dalam memperoleh layanan dasar. Disparitas yang cukup jelas terlihat berdasarkan tingkat pengeluaran: rumah tangga di kuintil bawah, khususnya di perdesaan, memiliki tingkat akses yang jauh lebih rendah dibandingkan kelompok dengan pengeluaran lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi masih menjadi faktor penentu utama dalam akses terhadap layanan air bersih, di mana rumah tangga dengan daya beli yang lebih rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam memperoleh infrastruktur air minum yang layak. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya intervensi kebijakan yang menargetkan kelompok rentan dan wilayah tertinggal untuk memperluas akses layanan dasar secara merata.



Gambar 5.51 Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sumber Air Memadai Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Disabilitas NTT, 2023

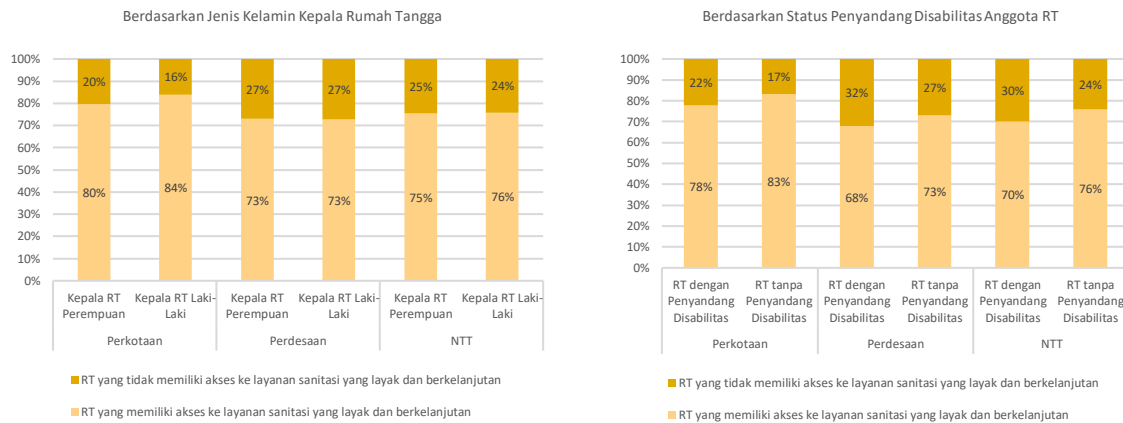
Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI



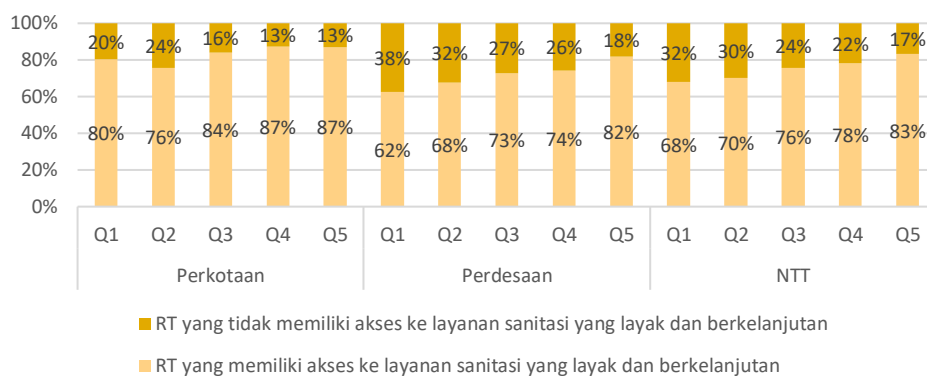
Gambar 5.52 Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sumber Air Memadai Berdasarkan Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

Akses terhadap layanan sanitasi layak di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi kelompok rumah tangga dengan kondisi sosial dan ekonomi tertentu. Rumah tangga dengan kepala laki-laki memiliki akses sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di sisi lain, rumah tangga yang memiliki anggota penyandang disabilitas cenderung memiliki akses yang lebih rendah dibandingkan rumah tangga tanpa disabilitas, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur sanitasi yang inklusif. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada tingkat pengeluaran rumah tangga, terutama di wilayah perdesaan. Semakin tinggi kuintil pengeluaran, semakin besar proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kemampuan finansial menjadi penentu utama dalam kepemilikan sarana sanitasi yang memadai. Meskipun secara umum akses di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi, masih terdapat kelompok yang belum sepenuhnya menikmati layanan sanitasi yang layak, sehingga memperkuat pentingnya intervensi yang menargetkan kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.



Gambar 5.53 Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga dan Status Disabilitas NTT, 2023
Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 5.54 Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Layanan Sanitasi Layak Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023
Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

5.4. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTT 2018–2023, upaya perlindungan sosial diarahkan pada penguatan skema bantuan sosial, jaminan sosial, serta penyediaan layanan dasar yang mencakup akses terhadap perumahan, sanitasi, air bersih, listrik, dan pangan bergizi. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya sistem rujukan dan layanan terpadu berbasis desa (One Stop Service) untuk memastikan masyarakat miskin mendapatkan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Namun, meskipun berbagai program perlindungan sosial telah diterapkan, tingkat kemiskinan di NTT masih menjadi tantangan besar dengan angka yang tetap tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menunjukkan bahwa selain jumlah penduduk miskin yang besar, kesenjangan dalam akses terhadap layanan sosial juga masih menjadi persoalan utama. Pemerintah telah berupaya mengurangi ketimpangan antar kelompok masyarakat dan wilayah melalui subsidi, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, serta pengembangan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi

berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar sektor, serta kurangnya pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

Selain tantangan dalam pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak di NTT juga masih perlu diperkuat guna memastikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta maraknya kasus perdagangan manusia menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah daerah telah mencanangkan berbagai kebijakan, termasuk penguatan kelembagaan perlindungan, advokasi hukum, serta perluasan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Namun, tanpa dukungan yang lebih kuat dari berbagai pemangku kepentingan, tantangan dalam perlindungan sosial di NTT masih akan terus berlanjut.

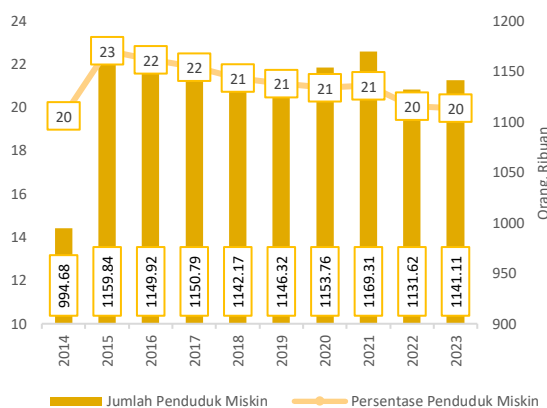
5.4.1. Kondisi Indikator *Outcome* Utama Bidang Perlindungan Sosial

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami fluktuasi dalam satu dekade terakhir, dengan tren penurunan yang relatif lambat. Berdasarkan data BPS), jumlah penduduk miskin di NTT pada 2014 tercatat sekitar 994,68 ribu orang (20%), meningkat drastis pada 2015 menjadi 1,15 juta orang (23%), sebelum kembali menurun secara bertahap hingga 2023. Meskipun persentase kemiskinan sempat bertahan pada level 21% antara 2018 hingga 2021, angka ini mulai menunjukkan perbaikan dengan turun menjadi 20% pada 2022 dan 2023. Namun, meskipun terjadi penurunan persentase, jumlah absolut penduduk miskin masih cukup besar, yaitu sekitar 1,14 juta orang pada 2023, menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di NTT masih signifikan.

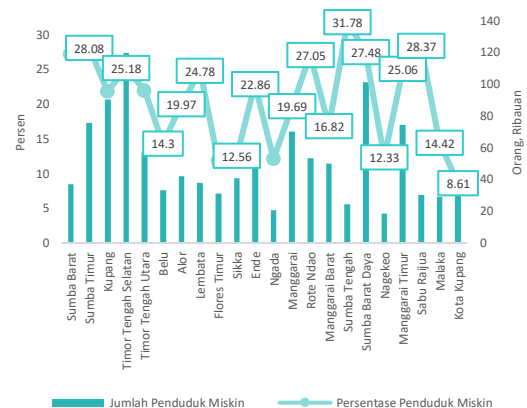
Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan berbagai strategi dalam RPJMD 2018–2023 untuk menurunkan kemiskinan, namun dampaknya belum sepenuhnya optimal. Program bantuan sosial, subsidi, serta penguatan ekonomi lokal telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dibanding perkotaan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketimpangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur yang masih terbatas di beberapa wilayah terpencil. Selain itu, faktor struktural seperti ketergantungan pada sektor pertanian subsisten serta keterbatasan lapangan kerja produktif turut memperlambat laju penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah dan berbasis data untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di NTT, termasuk integrasi antara bantuan sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota, dengan beberapa daerah memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kabupaten Sumba Tengah mencatat persentase kemiskinan tertinggi sebesar 31,78%, diikuti oleh Sabu Raijua (28,37%), Sumba Timur (28,08%), dan Sumba Barat Daya (27,48%). Sebaliknya, Kota Kupang memiliki tingkat kemiskinan terendah, yaitu hanya 8,61%, diikuti oleh Flores Timur (11,77%), Sikka (12,56%), dan Ngada (12,06%). Jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Timor Tengah Selatan dengan 119,51 ribu jiwa, sementara daerah dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Nagekeo dengan 18,57 ribu jiwa. Perbedaan ini mencerminkan kesenjangan kesejahteraan yang cukup signifikan antar wilayah di NTT, yang disebabkan oleh akses infrastruktur, sumber daya ekonomi, dan kualitas layanan publik yang bervariasi.

Upaya pengentasan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota perlu mempertimbangkan faktor geografis dan struktural yang memengaruhi distribusi kesejahteraan di NTT. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang berdampak pada rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat. Di sisi lain, daerah perkotaan seperti Kota Kupang memiliki akses ekonomi yang lebih baik, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa, sehingga tingkat kemiskinan relatif lebih rendah. Dalam konteks RPJMD NTT, strategi pembangunan yang lebih fokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu diperkuat, termasuk pengembangan infrastruktur konektivitas, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta integrasi program perlindungan sosial yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.



Gambar 5.55 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tingkat Provinsi NTT, 2014 – 2023
Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI



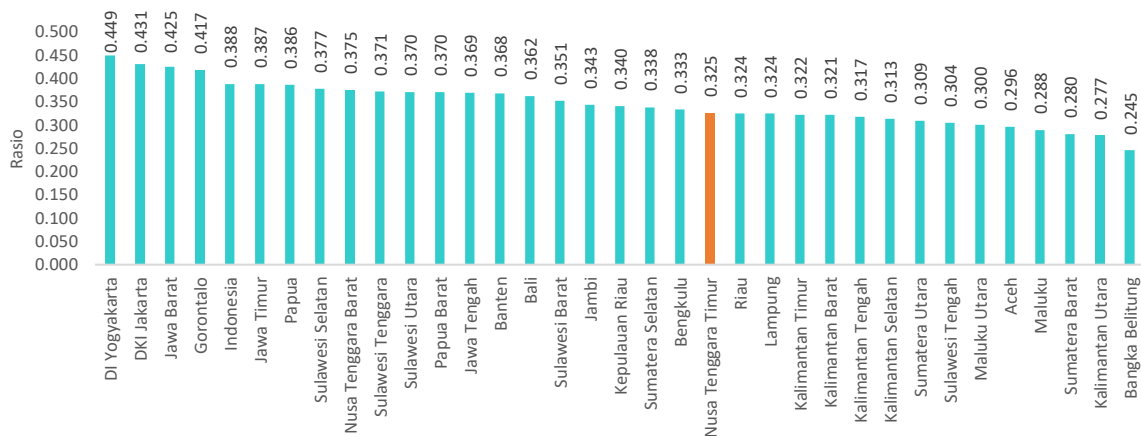
Gambar 5.56 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota NTT, 2023
Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan dalam pembangunan yang inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 2023, rasio Gini NTT tercatat sebesar 0,325, menempatkannya di kelompok provinsi dengan ketimpangan pendapatan yang relatif moderat dibandingkan daerah lain di Indonesia (Gambar 5.57). Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional serta beberapa provinsi dengan tingkat ketimpangan tinggi seperti DI Yogyakarta (0,449) dan DKI Jakarta (0,432), tetapi masih lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Utara (0,277) dan Bangka Belitung (0,245). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun distribusi pendapatan di NTT relatif lebih merata dibandingkan beberapa provinsi lain, kesenjangan ekonomi tetap menjadi perhatian utama dalam upaya pembangunan yang berkeadilan.

Meskipun angka ketimpangan di NTT tidak tergolong tinggi, kondisi ini tetap mencerminkan adanya kesenjangan dalam akses ekonomi dan pendapatan antarwilayah. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini adalah perbedaan tingkat produktivitas dan struktur ekonomi antarwilayah. Sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung perekonomian NTT cenderung memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa di wilayah lain. Selain itu, akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, serta layanan keuangan di beberapa kabupaten menyebabkan kesenjangan dalam peluang ekonomi bagi masyarakat.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pemerataan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, penguatan infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi, serta pengembangan sektor-

sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah-daerah tertinggal. Program perlindungan sosial yang lebih terarah juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa kelompok rentan di NTT dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.



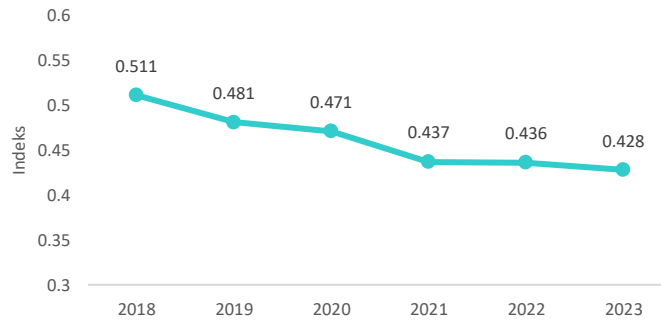
Gambar 5.57 Rasio Gini seluruh Provinsi di Indonesia, 2023

Sumber: BPS (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Ketimpangan gender masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Berdasarkan data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2018–2023, terlihat adanya tren penurunan dari 0,511 pada 2018 menjadi 0,428 pada 2023, yang menunjukkan peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai aspek pembangunan (Gambar 5.58). Meskipun tren ini positif, angka tersebut masih mencerminkan adanya kesenjangan yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, serta partisipasi ekonomi dan politik.

Penurunan IKG di NTT menunjukkan adanya perbaikan dalam keterlibatan perempuan di sektor pendidikan dan ekonomi, tetapi tantangan masih tetap ada. Salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan gender adalah masih kuatnya norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan. Selain itu, akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi dan kepemimpinan masih belum setara dengan laki-laki, terutama di sektor formal dan usaha skala besar. Faktor lain yang berkontribusi adalah keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan dan permodalan bagi perempuan, yang menghambat mereka dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

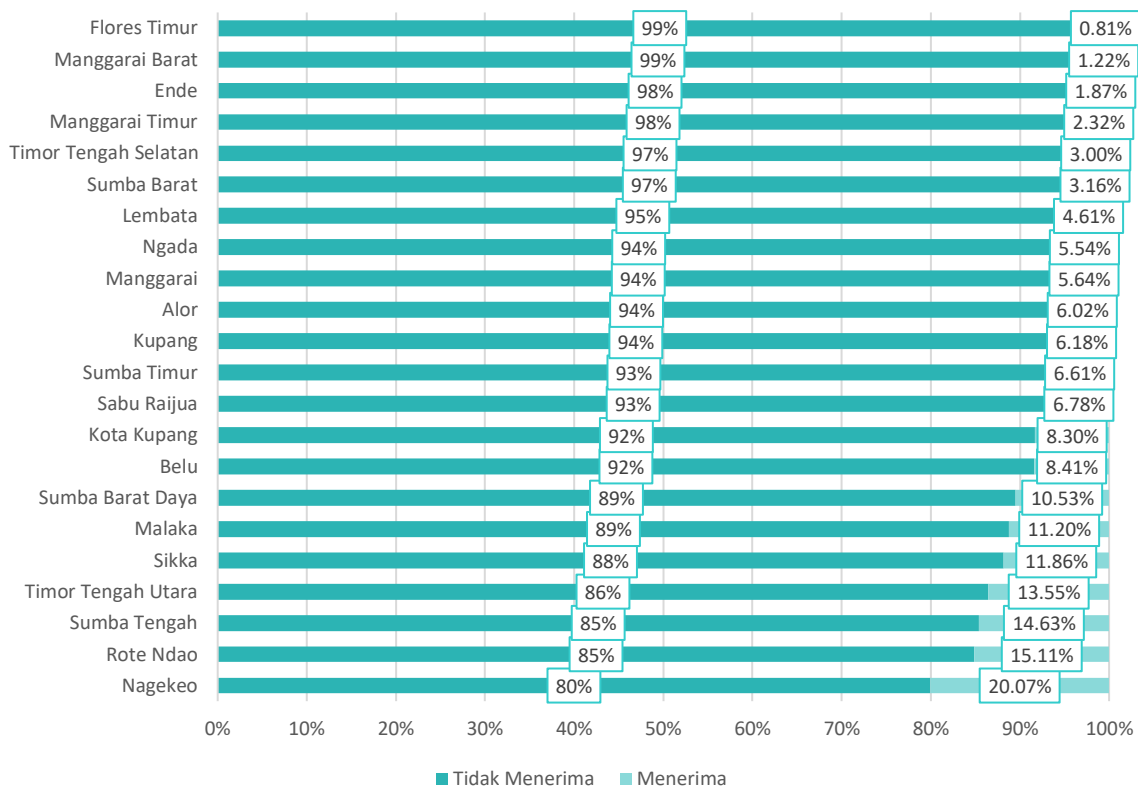
Untuk mempercepat pengurangan ketimpangan gender, diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih kuat, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pemberdayaan ekonomi berbasis gender, serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif. Selain itu, perubahan sosial dan budaya juga perlu terus didorong melalui edukasi dan kampanye kesetaraan gender agar perempuan dapat berperan lebih aktif dalam berbagai sektor pembangunan. Upaya ini tidak hanya penting bagi peningkatan kesejahteraan perempuan, tetapi juga bagi percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah NTT dan sekitarnya.



Gambar 5.58 Indeks Ketimpangan Gender NTT, 2018 - 2023

Sumber: BPS, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

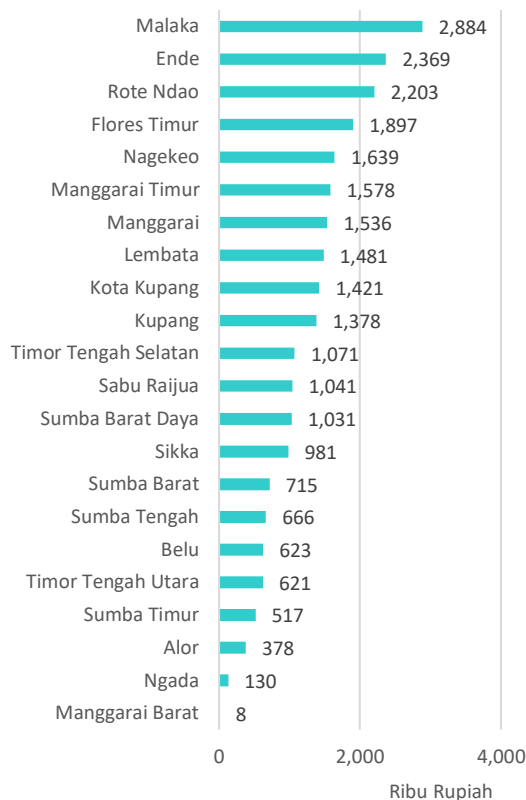
Pada tahun 2023, Kabupaten Nagekeo mencatat presentase rumah tangga penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah tertinggi, yaitu 20%. Di susul oleh Rote Ndao dan Sumba Tengah dengan masing-masing 15% dan 14%. Sumba tengah dan Rote Ndao termasuk kedalam daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, yaitu di atas 20%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah fokus pada daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Akan tetapi, Kabupaten Nagekeo dengan penerima bantuan sosial tertinggi memiliki persentase penduduk miskin relatif rendah dibandingkan daerah lainnya (12%). Variasi dalam distribusi bantuan sosial antarwilayah juga menunjukkan perlunya peningkatan akurasi dalam penargetan bantuan agar lebih proporsional dengan jumlah penduduk miskin di masing-masing kabupaten. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kelompok rentan benar-benar mendapatkan manfaat dari program perlindungan sosial (**Gambar 5.59**).



Gambar 5.59 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah NTT, 2023

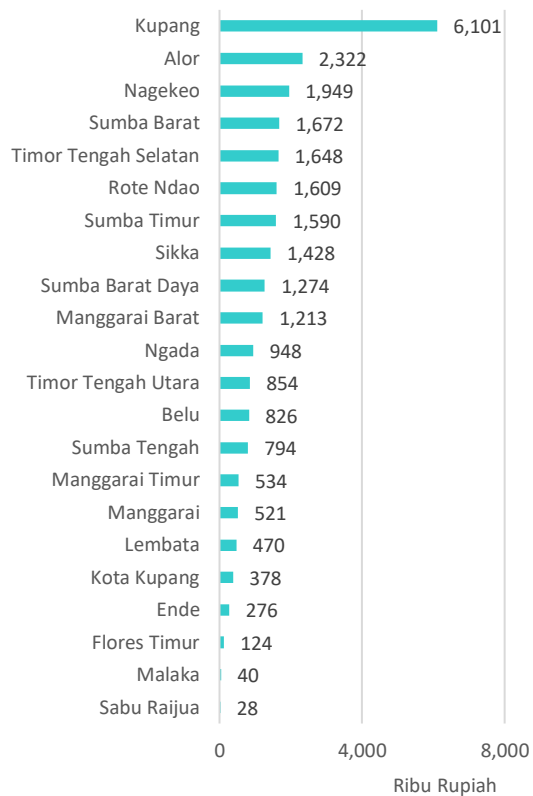
Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

Berdasarkan rata-rata nominal bantuan sosial pemerintah daerah tahun 2023, Kabupaten Malaka memiliki nominal tertinggi untuk bantuan sosial tunai reguler (Rp2,8 juta) dan Kota Kupang tertinggi untuk non-reguler (Rp11,5 juta). Meskipun Pemerintah Daerah secara rata-rata menyalurkan bantuan sosial tunai reguler yang tinggi untuk Malaka, Bantuan sosial non-reguler di Malaka secara rata-rata hanya Rp40 ribu. Angka ini termasuk nominal terendah dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, Kabupaten Nagekeo dengan prosentase penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah tertinggi memiliki nominal bantuan sosial reguler dan non reguler yang tergolong tinggi, yaitu Rp 1,6 juta dan Rp 1,9 juta (**Gambar 5.60** dan **Gambar 5.61**)



Gambar 5.60 Rata-rata Nominal Bantuan Sosial Tunai Reguler NTT, 2023 (dalam Ribuan Rupiah)

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 5.61 Rata-rata Nominal Bantuan Sosial Tunai Non-Reguler NTT, 2023 (dalam Ribuan Rupiah)

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

5.4.2. Analisis Disparitas dan Mapping Layanan Perlindungan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis disparitas antar kabupaten kota menunjukkan rata-rata pengeluaran makanan per kapita di NTT berkisar pada Rp 400 ribu hingga Rp 700 ribu. Lebih detil, Sumba Timur dan Kota Kupang memiliki rata-rata pengeluaran makanan per kapita tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Provinsi NTT, yaitu sekitar Rp 600 ribu per kapita per bulan. Angka ini tidak terlalu jauh apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki pengeluaran makanan paling rendah di NTT yaitu Kabupaten Rote Ndao yang hanya Rp 440 ribu per kapita per bulan. Secara nominal, angka pengeluaran makanan dapat menunjukkan bahwa kebutuhan makanan di suatu daerah relatif lebih mahal dibandingkan daerah lainnya.

Kota Kupang memiliki persentase penerima perlindungan sosial paling rendah dibandingkan daerah lain (30,7%). Angka ini cukup terpaut jauh dengan Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua dengan rumah tangga penerima perlindungan sosial sebesar 79%. Hal ini sesuai dengan kondisi kemiskinan di Kota Kupang yang memiliki angka terendah dibandingkan daerah lainnya.

Tabel 5.13 Analisis Disparitas Perlindungan Sosial NTT, 2023

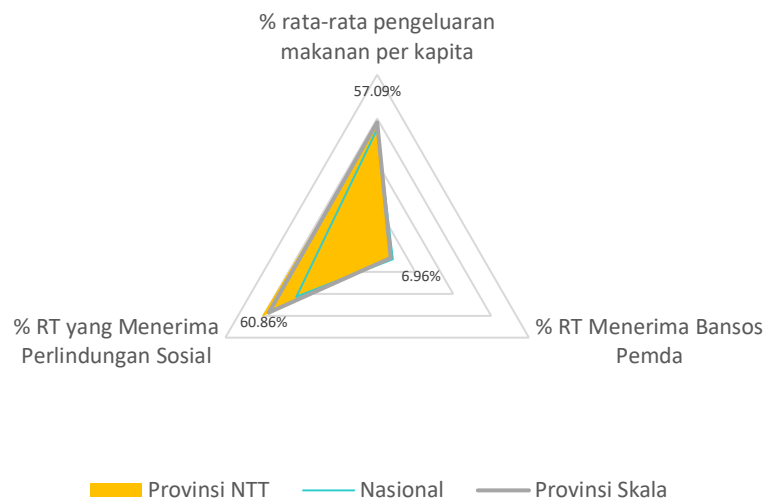
Kabupaten/Kota	Rata-rata pengeluaran makanan per kapita (Rupiah)	Rata-rata nominal bansos dari Pemda (Rupiah)	% Rumah Tangga yang Menerima Perlindungan Sosial (Diluar JKN)
Provinsi NTT	570.434	2.398.496	60,9%
Sumba Barat	574.392	2.386.669	70,3%
Sumba Timur	698.276	2.106.989	59,2%
Kupang	497.120	7.479.344	62,2%
Timor Tengah Selatan	581.309	2.718.433	62,0%
Timor Tengah Utara	520.904	1.475.270	61,6%
Belu	552.119	1.448.841	50,6%
Alor	563.126	2.699.764	61,7%
Lembata	542.845	1.950.631	73,2%
Flores Timur	534.275	2.021.498	57,4%
Sikka	491.836	2.409.645	66,4%
Ende	662.462	2.644.329	59,4%
Ngada	646.159	1.077.774	51,7%
Manggarai	571.108	2.057.589	61,3%
Rote Ndao	440.492	3.811.172	66,7%
Manggarai Barat	577.910	1.220.541	74,8%
Sumba Tengah	662.413	1.460.206	67,4%
Sumba Barat Daya	562.924	2.304.899	79,9%
Nagekeo	509.298	3.588.201	60,0%
Manggarai Timur	525.488	2.112.969	72,2%
Sabu Raijua	635.356	1.068.524	79,5%
Malaka	527.289	2.923.981	54,5%
Kota Kupang	672.449	1.799.643	30,7%

Sumber: BPS, dan SUSENAS, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

Provinsi NTT jika dibandingkan dengan Provinsi Skala dan Nasional memiliki prosentase penerima bantuan sosial dari pemerintah daerah yang setara. Sementara itu, prosentase rumah tangga yang menerima perlindungan sosial (di luar JKN) lebih tinggi dibandingkan Provinsi Skala dan Nasional (Gambar 5.62). Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap program perlindungan sosial di NTT sudah baik. Akan tetapi hal ini juga dapat didasari oleh tingkat kemiskinan NTT yang relatif tinggi secara nasional dan dibandingkan Provinsi Skala lainnya.

Berdasarkan persentase rata-rata pengeluaran makanan per kapita, NTT menunjukkan persentase yang lebih besar dibandingkan nasional. Besaran persentase pengeluaran makanan dalam rumah

tangga menunjukkan fokus rumah tangga pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara pengeluaran non makanan menunjukkan peningkatan kualitas hidup melalui pengeluaran pada layanan dan kebutuhan lainnya. Tingginya rata-rata persentase pengeluaran makanan di NTT sejalan dengan tingkat kemiskinan di NTT yang tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa rumah tangga belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berupa makanan sehingga sisa pendapatannya tidak dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya.



Gambar 5.62 Analisis Mapping Layanan Perlindungan Sosial NTT, 2023

Sumber: BPS, PODES, dan SUSENAS, diolah oleh LPEM FEB UI (2024)

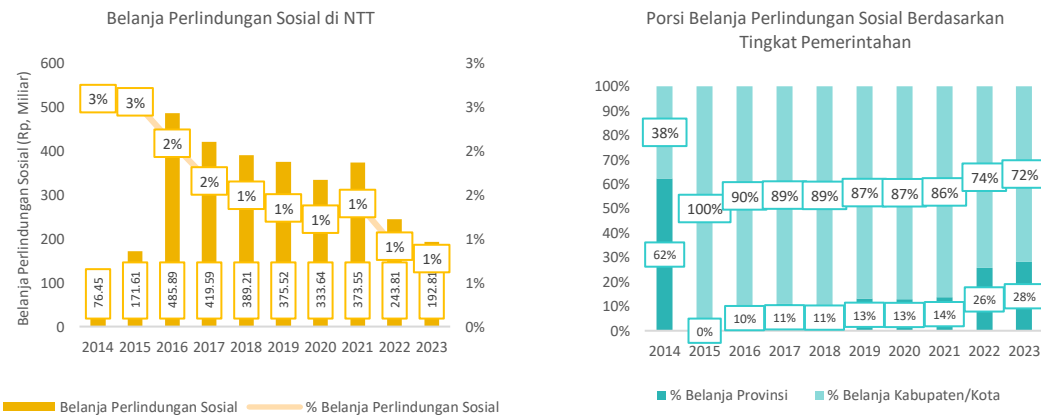
5.5.3. Belanja Perlindungan Sosial

Belanja perlindungan sosial di NTT mengalami peningkatan signifikan hingga 2017 sebelum memasuki tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, belanja perlindungan sosial hanya sebesar Rp76,45 miliar dan terus meningkat tajam hingga mencapai puncaknya sebesar Rp485,89 miliar pada tahun 2016. Namun, sejak 2017, tren belanja mulai mengalami penurunan, dengan realisasi belanja yang relatif fluktuatif di kisaran Rp300–400 miliar sebelum akhirnya turun drastis menjadi Rp192,81 miliar pada 2023.

Secara proporsi terhadap total belanja daerah, belanja perlindungan sosial di NTT berada di kisaran 1%–3% sepanjang periode 2014–2023. Pada 2014 dan 2015, belanja ini masih mencapai 3% dari total anggaran, sebelum menurun menjadi 2% pada 2016–2017 dan terus mengecil menjadi hanya 1% sejak 2018 hingga 2023. Penurunan proporsi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam kebijakan penganggaran daerah, yang kemungkinan lebih memprioritaskan sektor lain, seperti infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Dari sisi tingkat pemerintahan, belanja perlindungan sosial di NTT sepanjang 2014–2023 didominasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pada 2014, proporsi belanja perlindungan sosial oleh kabupaten/kota sebesar 62%, sementara provinsi hanya 38%. Sejak 2015, dominasi kabupaten/kota semakin menguat, dengan porsi mencapai 90% pada 2016 dan relatif stabil di kisaran 86%–89% hingga 2021. Meskipun terjadi sedikit penurunan porsi belanja kabupaten/kota menjadi 74% pada 2022 dan 72% pada 2023, tingkat ini masih menunjukkan bahwa kabupaten/kota tetap menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.

Dominasi belanja oleh kabupaten/kota menunjukkan bahwa implementasi program perlindungan sosial di NTT lebih banyak dilakukan di tingkat daerah yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini mencerminkan fleksibilitas kabupaten/kota dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi dan efektivitas anggaran. Ke depan, penting untuk memastikan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar program perlindungan sosial dapat berjalan optimal dan menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.



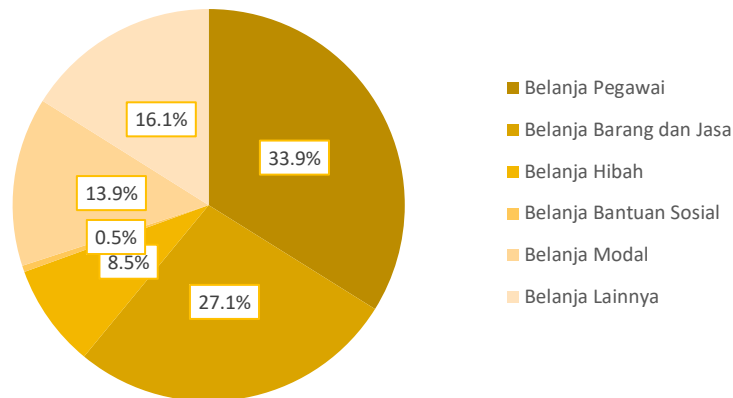
Gambar 5.63 Belanja Perlindungan Sosial NTT, 2014 - 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Proporsi belanja perlindungan sosial di tingkat Provinsi NTT pada tahun 2023 menunjukkan dominasi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan kategori belanja lainnya, sementara alokasi untuk bantuan sosial justru sangat kecil (Gambar 5.64). Belanja pegawai menempati porsi terbesar, yaitu 33,9% dari total anggaran, menunjukkan bahwa alokasi utama anggaran perlindungan sosial digunakan untuk membiayai aparatur dan tenaga pelaksana dalam program-program sosial. Belanja barang dan jasa berada di posisi kedua dengan proporsi 27,1%, mencerminkan pengeluaran operasional untuk mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial.

Sementara itu, belanja lainnya mencakup 16,1%, yang dapat mencerminkan berbagai pengeluaran tambahan dalam implementasi program sosial yang tidak termasuk dalam kategori utama. Belanja modal tercatat sebesar 13,9%, menandakan adanya investasi dalam aset atau infrastruktur pendukung perlindungan sosial, meskipun porsinya masih lebih kecil dibandingkan dengan belanja operasional. Belanja hibah hanya mencapai 8,5%, yang umumnya diberikan kepada organisasi atau kelompok masyarakat dalam mendukung program sosial.

Di sisi lain, belanja bantuan sosial hanya mendapatkan alokasi sebesar 0,5% dari total belanja perlindungan sosial, menunjukkan bahwa anggaran yang langsung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai atau natura sangat terbatas. Dominasi belanja pegawai serta barang dan jasa mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan sosial di NTT lebih berorientasi pada aspek administratif dan operasional dibandingkan dengan pemberian bantuan langsung kepada kelompok rentan. Ke depan, optimalisasi anggaran diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan sosial dapat memberikan dampak yang lebih langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.



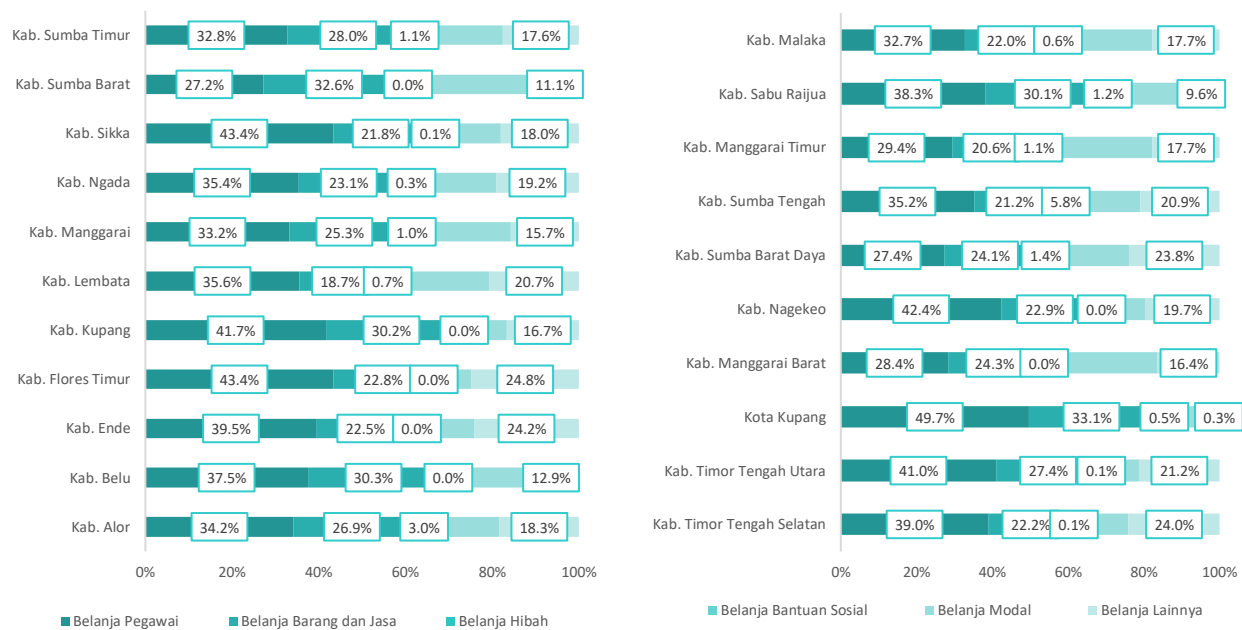
Gambar 5.64 Proporsi Belanja Perlindungan Sosial Tingkat Provinsi NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Proporsi belanja perlindungan sosial di tingkat kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas anggaran masih difokuskan pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran perlindungan sosial, dengan proporsi berkisar antara 27,2% hingga 49,7%. Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur mencatat proporsi belanja pegawai tertinggi, masing-masing sebesar 43,4%, sementara Kabupaten Sumba Barat memiliki proporsi terendah, yakni 27,2%. Besarnya belanja pegawai ini menandakan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur yang bertanggung jawab atas implementasi program perlindungan sosial.

Belanja barang dan jasa menjadi kategori pengeluaran terbesar kedua, dengan porsi bervariasi antar daerah. Kabupaten Sumba Barat mencatat alokasi tertinggi untuk belanja ini, mencapai 32,6%, sedangkan Kabupaten Lembata memiliki proporsi terendah sebesar 18,7%. Besarnya belanja barang dan jasa mencerminkan kebutuhan operasional dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial di tingkat daerah. Sementara itu, belanja lainnya dan belanja modal juga mencatat proporsi yang cukup besar dalam struktur anggaran perlindungan sosial. Belanja modal menunjukkan adanya investasi dalam infrastruktur atau aset pendukung program sosial, dengan Kabupaten Sumba Barat memiliki alokasi tertinggi sebesar 28,3%. Di sisi lain, belanja lainnya di beberapa daerah cukup tinggi, seperti di Kabupaten Flores Timur yang mencapai 24,8%, yang dapat mencerminkan pengeluaran lain di luar kategori utama.

Di sisi lain, belanja bantuan sosial memiliki alokasi yang sangat kecil dibandingkan dengan komponen belanja lainnya. Secara keseluruhan, belanja bantuan sosial hanya mencakup sekitar 0,5% dari total belanja perlindungan sosial di tingkat kabupaten/kota. Sebagian besar daerah mencatat proporsi belanja bantuan sosial kurang dari 1%, dengan angka yang bahkan bisa mencapai 0,01%. Kabupaten Sumba Tengah mencatat proporsi tertinggi untuk belanja ini, yakni sebesar 5,8%, sementara beberapa daerah seperti Kabupaten Belu, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Kupang memiliki alokasi yang sangat kecil. Rendahnya belanja bantuan sosial ini mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan sosial di tingkat daerah masih lebih berorientasi pada aspek administratif dan operasional dibandingkan dengan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat rentan.



Gambar 5.65 Proporsi Belanja Infrastruktur Tingkat Kabupaten/Kota NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Struktur belanja perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan kabupaten/kotanya pada tahun 2023 menunjukkan pola yang serupa. Belanja terbesar didominasi oleh Program Penunjang Perlindungan Sosial, yang mencakup rata-rata lebih dari 60% dari total belanja perlindungan sosial di hampir semua daerah. Kabupaten Ende mencatat porsi tertinggi untuk program ini, mencapai 92,3%, sementara Kabupaten Sumba Timur memiliki porsi terendah sebesar 30,3%. Dominasi belanja untuk program penunjang mencerminkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk aspek administratif, operasional, serta dukungan teknis dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial.

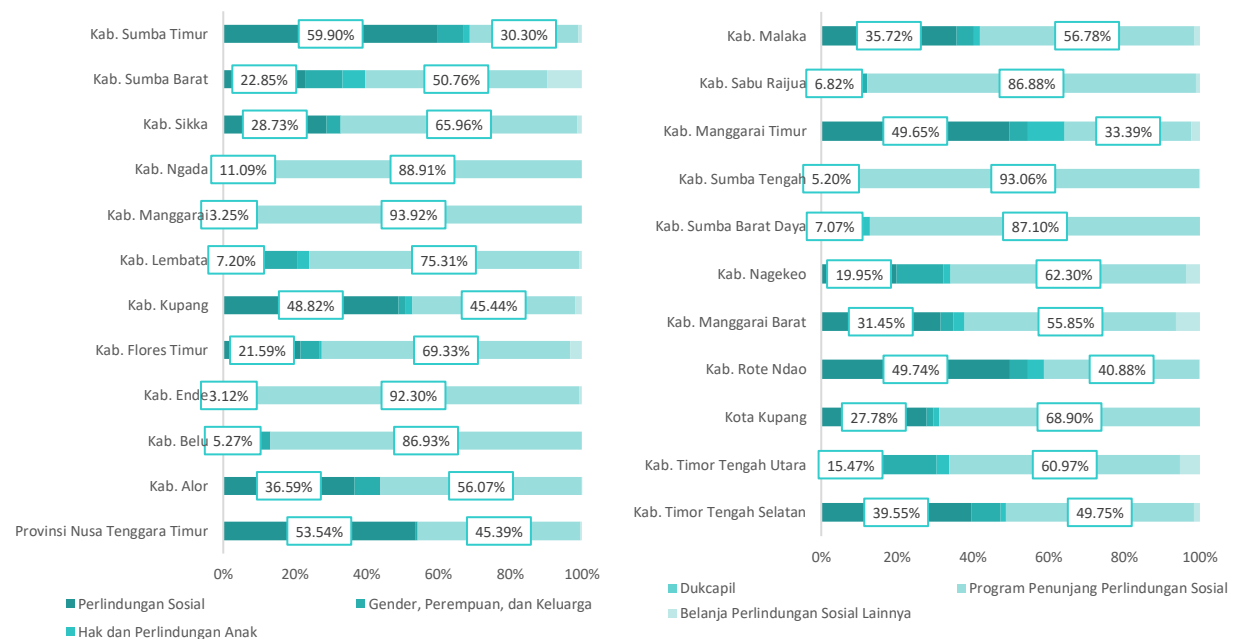
Belanja Perlindungan Sosial menjadi kategori terbesar kedua dalam struktur pengeluaran. Secara keseluruhan, Provinsi NTT mencatat belanja perlindungan sosial sebesar 53,54%, dengan variasi signifikan di tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Sumba Timur mencatat porsi tertinggi sebesar 59,9%, sedangkan Kabupaten Ende memiliki alokasi terendah hanya 3,12%. Besarnya proporsi belanja ini menunjukkan adanya fokus pada program langsung yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih kalah dibandingkan dengan belanja untuk program penunjang.

Sementara itu, belanja untuk Program Gender, Perempuan, dan Keluarga menempati urutan ketiga, dengan rata-rata alokasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dua kategori sebelumnya. Kabupaten Lembata mencatat alokasi tertinggi untuk program ini, yakni sebesar 13,58%, diikuti oleh Kabupaten Timor Tengah Utara dengan 14,9%. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Ngada tidak mengalokasikan anggaran sama sekali untuk program ini.

Kategori belanja lainnya, termasuk Hak dan Perlindungan Anak, Dukcapil, serta Belanja Perlindungan Sosial Lainnya, memiliki porsi yang relatif kecil dan bervariasi antar daerah. Beberapa daerah seperti Kabupaten Ngada dan Kabupaten Belu tidak mencatatkan anggaran sama sekali untuk

Hak dan Perlindungan Anak atau Dukcapil, sedangkan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Lembata mencatat proporsi lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Secara keseluruhan, pola belanja di tingkat kabupaten/kota menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih terserap untuk kegiatan penunjang, sementara alokasi langsung untuk perlindungan sosial dan program khusus lainnya masih relatif terbatas. Hal ini menandakan bahwa meskipun perlindungan sosial menjadi prioritas, implementasi kebijakan masih lebih berorientasi pada aspek administratif dibandingkan dengan intervensi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.



Gambar 5.66 Proporsi Belanja Perlindungan Sosial Berdasarkan Program Provinsi NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Secara keseluruhan, meskipun alokasi anggaran untuk perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kabupaten/kotanya cukup besar, proporsi belanja yang benar-benar dialokasikan untuk program perlindungan sosial masih tergolong rendah. Sebagian besar anggaran justru terserap untuk Program Penunjang Perlindungan Sosial, yang mencakup belanja pegawai dan operasional, sementara belanja langsung untuk bantuan sosial dan perlindungan masyarakat masih terbatas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perlindungan sosial masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa anggaran benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

5.5.4. Kualitas Belanja Perlindungan Sosial

a. Aspek Kecukupan

Belanja untuk fungsi perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan delapan provinsi skala maupun rerata nasional. Rasio belanja perlindungan sosial terhadap total belanja hanya sebesar 0,25%, jauh di bawah capaian rata-rata delapan provinsi skala sebesar 0,86%. Begitu pula dari sisi belanja per kapita, alokasi di NTT hanya

mencapai sekitar Rp11 ribu, sedangkan pada tingkat nasional dan provinsi pembanding angkanya lebih dari Rp46 ribu. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum menjadi prioritas dalam struktur anggaran daerah, yang kemungkinan berkaitan dengan ketergantungan daerah terhadap program-program bantuan sosial dari pemerintah pusat. Selain itu, tekanan fiskal daerah dan dominasi belanja operasional juga dapat menjadi faktor yang menghambat perluasan anggaran untuk fungsi ini. Padahal, memperkuat perlindungan sosial sangat penting bagi NTT mengingat tingginya kerentanan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil dan miskin.

Tabel 5.14 Aspek Kecukupan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Perlindungan Sosial Tahun 2023

No.	Indikator	Capaian		
		Nusa Tenggara Timur	8 Provinsi Skala	Nasional
1.	Rasio Belanja Perlindungan Sosial terhadap Total Belanja (%)	0,25	0,86	-
2.	Belanja Perlindungan Sosial per Kapita (Rp)	11.361	46.809	46.643

Catatan: Belanja menggunakan belanja konsolidasi provinsi dan kota kabupaten

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

b. Aspek Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi, kajian ini menerapkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan pendekatan orientasi input dan asumsi *variable returns to scale* (VRS). Pendekatan ini memungkinkan analisis untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten/kota dapat mengurangi penggunaan input tanpa menurunkan tingkat output yang dihasilkan. Dengan kata lain, DEA digunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah telah menggunakan sumber daya secara optimal dalam menyediakan layanan perlindungan sosial.

Analisis dilakukan pada tingkat kabupaten/kota di seluruh provinsi dalam lingkup SKALA, mencakup data dari tahun 2021 hingga 2023. Evaluasi efisiensi dilakukan sebanyak tiga kali, masing-masing untuk setiap tahun observasi. Dalam analisis ini, input yang digunakan mencakup belanja pegawai per kapita, belanja nonpegawai per kapita, belanja modal per kapita, serta belanja barang dan jasa per kapita. Sementara itu, output yang diukur adalah pengeluaran makanan perkapita.

Nilai efisiensi teknis dalam analisis ini merupakan predicted technical efficiency. Pada tahap awal, DEA diterapkan secara terpisah untuk setiap tahun guna memperoleh nilai efisiensi teknis tahunan. Selanjutnya, nilai tersebut diregresikan terhadap variabel jumlah populasi, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin. Hasil prediksi dari regresi tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran efisiensi dalam kajian ini.

Dalam analisis DEA, tingkat efisiensi dinyatakan dalam bentuk skor antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan efisiensi penuh (*fully efficient*), sementara nilai di bawah 1 mengindikasikan inefisiensi relatif. Jika suatu kabupaten/kota memperoleh skor efisiensi sebesar 1, maka daerah tersebut dianggap telah mengalokasikan sumber dayanya secara optimal dalam menghasilkan output perlindungan sosialnya. Sebaliknya, jika suatu kabupaten/kota memiliki skor di bawah 1, misalnya

0,75, maka terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penggunaan input hingga 25% tanpa menurunkan pengeluaran makanan perkapita.

Sebagai contoh, jika sebuah kabupaten dengan skor efisiensi 0,75 memiliki belanja pegawai per kapita sebesar Rp1.000.000, belanja nonpegawai per kapita sebesar Rp500.000, belanja modal per kapita sebesar Rp700.000, dan belanja barang dan jasa per kapita sebesar Rp800.000, maka secara teoritis, pengeluaran tersebut masih dapat dikurangi sekitar 25% tanpa menurunkan output perlindungan sosial yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil analisis DEA tidak hanya mengidentifikasi kabupaten/kota yang efisien dan tidak efisien, tetapi juga memberikan indikasi mengenai seberapa besar potensi efisiensi yang masih dapat dicapai oleh daerah yang belum optimal.

Analisis efisiensi teknis di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup beragam (Tabel 5.15). Beberapa daerah mengalami peningkatan efisiensi yang konsisten, sementara yang lain menunjukkan tren yang lebih fluktuatif.

Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat efisiensi teknis tertinggi pada tahun 2023 dengan skor 0,76, setelah meningkat dari 0,45 pada tahun 2021 dan 0,58 pada tahun 2022. Kabupaten Kupang juga menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dengan efisiensi teknis naik dari 0,42 pada tahun 2021 menjadi 0,53 pada tahun 2022, dan mencapai 0,68 pada tahun 2023. Kota Kupang mencatat efisiensi teknis sebesar 0,68 pada tahun 2023, yang termasuk dalam kategori daerah dengan kinerja yang relatif baik dibandingkan daerah lainnya.

Beberapa kabupaten lainnya juga mengalami tren peningkatan yang cukup baik. Kabupaten Sikka mempertahankan tingkat efisiensi yang cukup tinggi, dari 0,46 pada tahun 2021 menjadi 0,58 pada tahun 2022 dan bertahan di angka yang sama pada tahun 2023. Kabupaten Manggarai mencatat pertumbuhan yang stabil, dari 0,41 pada tahun 2021 menjadi 0,52 pada tahun 2022 dan 0,61 pada tahun 2023. Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Flores Timur juga mengalami tren peningkatan, masing-masing dengan skor 0,58 dan 0,54 pada tahun 2023.

Di sisi lain, terdapat beberapa daerah dengan tingkat efisiensi yang lebih rendah atau menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Kabupaten Ngada mengalami sedikit penurunan dari 0,47 pada tahun 2022 menjadi 0,44 pada tahun 2023, sementara Kabupaten Nagekeo mengalami tren serupa dengan penurunan dari 0,47 menjadi 0,44 dalam periode yang sama. Kabupaten Sumba Tengah mencatat skor efisiensi yang relatif stagnan, yaitu 0,30 pada tahun 2021, naik sedikit ke 0,38 pada tahun 2022, dan hanya mencapai 0,39 pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa daerah telah mencapai efisiensi teknis yang lebih tinggi, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama di daerah dengan tingkat efisiensi yang lebih rendah. Optimalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat penyediaan layanan perlindungan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 5.15 Nilai Efisiensi Teknis Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Fungsi Perlindungan Sosial

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Alor	0,38	0,48	0,49

Daerah	Efisiensi Teknis 2021	Efisiensi Teknis 2022	Efisiensi Teknis 2023
Kabupaten Belu	0,39	0,49	0,50
Kabupaten Ende	0,39	0,49	0,56
Kabupaten Flores Timur	0,45	0,57	0,54
Kabupaten Kupang	0,42	0,53	0,68
Kabupaten Lembata	0,32	0,40	0,44
Kabupaten Manggarai	0,41	0,52	0,61
Kabupaten Ngada	0,37	0,47	0,44
Kabupaten Sikka	0,46	0,58	0,58
Kabupaten Sumba Barat	0,32	0,41	0,45
Kabupaten Sumba Timur	0,38	0,48	0,53
Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,45	0,58	0,76
Kabupaten Timor Tengah Utara	0,39	0,50	0,55
Kota Kupang	-	-	0,68
Kabupaten Rote Ndao	0,31	0,38	0,47
Kabupaten Manggarai Barat	0,41	0,51	0,54
Kabupaten Nagekeo	0,37	0,47	0,44
Kabupaten Sumba Barat Daya	0,36	0,45	0,64
Kabupaten Sumba Tengah	0,30	0,38	0,39
Kabupaten Manggarai Timur	0,38	0,48	0,58
Kabupaten Sabu Raijua	0,29	0,37	0,40
Kabupaten Malaka	-	-	-

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

Analisis regresi mengungkap dampak belanja pegawai dan nonpegawai per kapita terhadap pengeluaran makanan. Belanja pegawai per kapita menunjukkan korelasi positif yang kecil dengan pengeluaran makanan (koefisien 0,12), menandakan bahwa peningkatan belanja pegawai sedikit meningkatkan pengeluaran makanan. Namun, belanja nonpegawai per kapita terbukti memiliki dampak negatif (koefisien -0,24), menunjukkan bahwa peningkatan dalam belanja ini justru berkaitan dengan penurunan pengeluaran makanan. Temuan ini menyoroti bahwa tidak semua jenis belanja

memiliki efek yang sama terhadap pengeluaran makanan, menegaskan pentingnya membedakan antara jenis belanja dalam perencanaan anggaran (Tabel 5.16).

Tabel 5.16 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Output Perlindungan Sosial

No.	Input	Output
		Pengeluaran Makanan
1.	Belanja Pegawai Per kapita	0,12
2.	Belanja Non-Pegawai Per kapita	-0,24

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

c. Aspek Efektivitas

Sedangkan dalam konteks prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, analisis regresi menunjukkan bahwa belanja pegawai dan nonpegawai per kapita memiliki pengaruh yang sangat minim (keduanya dengan koefisien 0,02). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan dalam belanja perlindungan sosial pada tahun 2023 tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Konsistensi rendah ini menggarisbawahi bahwa belanja perlindungan sosial mungkin perlu direvisi atau direstrukturisasi untuk lebih efektif mengatasi masalah nutrisi dan keamanan pangan (Tabel 5.17).

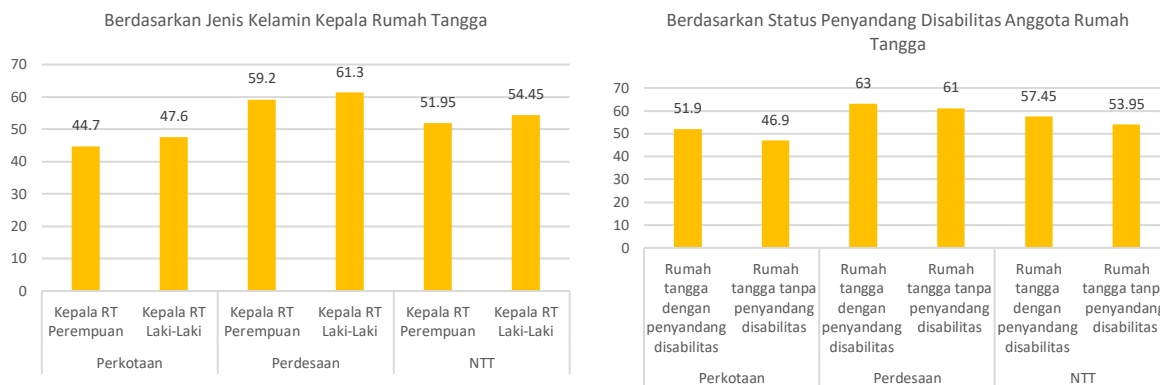
Tabel 5.17 Korelasi Belanja Pegawai dan Belanja Nonpegawai terhadap Outcome Perlindungan Sosial

No.	Input	Outcome
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
1.	Belanja Pegawai Per kapita	0,02
2.	Belanja Non-Pegawai Per kapita	0,02

Sumber: LPEM FEB UI (2024)

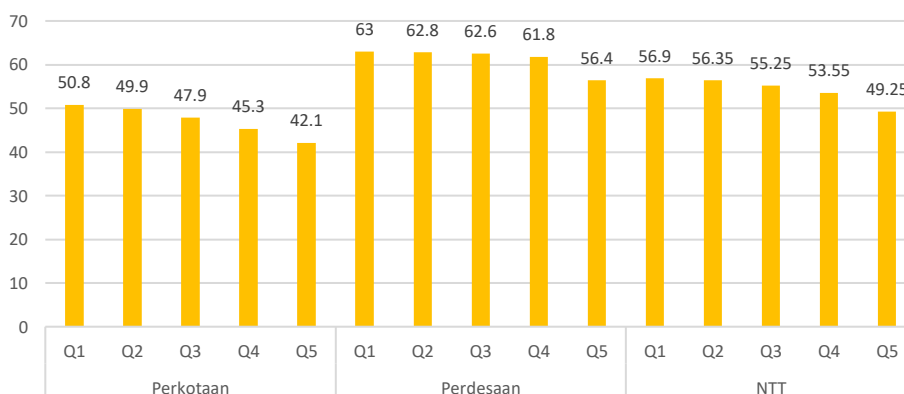
d. Aspek Keadilan

Data rata-rata persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga di Nusa Tenggara Timur tahun 2023 menunjukkan bahwa beban konsumsi makanan masih mendominasi struktur pengeluaran rumah tangga, terutama di daerah perdesaan dan pada kelompok rentan. Di perdesaan, rumah tangga yang dikepalai perempuan dan rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas mencatat persentase pengeluaran makanan yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya, yaitu masing-masing sebesar 59,2% dan 63%. Hal serupa terlihat dari sisi kelompok pengeluaran, di mana rumah tangga dengan pengeluaran terendah mengalokasikan hingga 63% dari total pengeluarannya untuk makanan, sementara proporsi ini menurun secara bertahap hingga hanya 49,3% pada kuintil tertinggi. Pola ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat kesejahteraan rumah tangga, semakin besar porsi pengeluaran yang harus mereka alokasikan untuk kebutuhan dasar seperti makanan. Situasi ini mencerminkan ketidakmerataan kemampuan ekonomi rumah tangga di NTT dan menunjukkan pentingnya intervensi yang mendukung akses terhadap kebutuhan dasar dengan harga terjangkau bagi kelompok rentan.



Gambar 5.67 Rata-rata Persentase Pengeluaran Makanan Terhadap Total Pengeluaran Per Rumah Tangga NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI



Gambar 5.68 Rata-rata Persentase Pengeluaran Makanan Terhadap Total Pengeluaran Per Rumah Tangga Berdasarkan Kuintil Pengeluaran NTT, 2023

Sumber: SUSENAS (2023), diolah oleh LPEM FEB UI

5.5 Pariwisata

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki obyek pariwisata yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendongkrak perekonomian daerah, seperti misalnya Pulau Komodo dan Pulau Padar di Kabupaten Manggarai Barat, Air Terjun Tanggedu dan Bukit Wairinding di Kabupaten Sumba Timur, serta Danau Weekuri dan Pantai Bawana di Kabupaten Sumba Barat Daya. Masing-masing tempat wisata tersebut mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dapat ditemui di objek wisata serupa di tempat lain. Meskipun saat ini sektor pertanian memiliki kontribusi yang terbesar, namun sektor pariwisata memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan berbagai potensi wisata yang tersimpan di dalamnya, sangat mungkin menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sector* perekonomian di NTT.

Pada tahun 2024, sebanyak satu juta lebih wisatawan mengunjungi NTT, dengan pergerakan wisatawan yang kuat di wilayah Labuan Bajo, Kota Kupang, dan Ngada. Namun, jika dibandingkan dengan total jumlah wisatawan nusantara yang mencapai 825 juta pada tahun 2023, kontribusi wisatawan yang berkunjung ke NTT masih tergolong rendah, yaitu hanya 0,58 persen. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi pariwisata terhadap sektor perhotelan di NTT masih relatif rendah. Hunian hotel bintang saat ini hanya mencapai 39,83 persen, sementara

hotel non-bintang hanya 15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wisatawan yang berkunjung cukup signifikan, kontribusi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masih terbatas.

Dengan pengelolaan yang tepat, seperti pembuatan rute wisata yang baik dan promosi yang lebih intensif, sektor pariwisata di NTT bisa berkembang pesat. Potensi pariwisata yang besar dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, serta penyerapan tenaga kerja. Selain itu, investasi dalam infrastruktur yang mendukung pariwisata juga akan memberi dampak positif bagi perekonomian NTT.

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, berbagai pihak harus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, dan promosi. Dengan kebijakan yang tepat, pengelolaan yang efektif, dan investasi yang memadai, sektor pariwisata di NTT dapat menjadi pendorong utama bagi perekonomian daerah.

5.5.1 Kondisi Indikator *Outcome* Utama Bidang Pariwisata

Berdasarkan Statistik Pariwisata 2023 yang diterbitkan oleh BPS Nusa Tenggara Timur (2024), jumlah perjalanan wisatawan nusantara (Wisnus) ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 5.064.324 perjalanan. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 31,56% dibandingkan tahun 2022, yang mencatatkan 3.849.353 perjalanan. Lonjakan signifikan ini mencerminkan tren positif dalam pertumbuhan wisatawan domestik ke NTT. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan Wisnus ke NTT berlangsung secara konsisten sepanjang tahun 2023, kecuali pada bulan Maret yang mengalami penurunan sebesar 38,92%. Sebaliknya, puncak kenaikan terjadi pada bulan Desember dengan peningkatan sebesar 54,85%. Rata-rata jumlah perjalanan Wisnus ke NTT per bulan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 422.027 perjalanan. Fluktuasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 769.609 perjalanan, sementara jumlah kunjungan terendah tercatat pada bulan Maret, yaitu 269.024 perjalanan.

Selama tahun 2015-2023, jumlah daya tarik wisata di NTT mengalami peningkatan yang signifikan dari 458 destinasi menjadi 1.637 destinasi. Tabel 5.18 menunjukkan pertumbuhan jumlah daya tarik wisata di setiap kabupaten/kota di Provinsi NTT. Sumba Barat, Belu, dan Flores Timur memiliki peningkatan daya Tarik wisata yang paling signifikan. Sementara Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi hanya mengalami peningkatan dari 19 destinasi menjadi 76 destinasi.

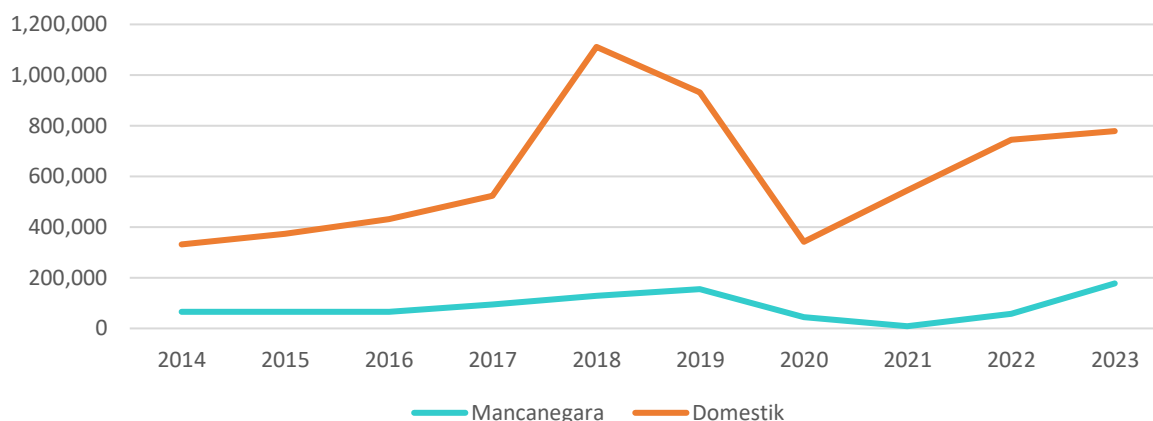
Meskipun daya tarik wisata lebih rendah dibandingkan daerah lain, Kota Kupang secara konsisten menjadi destinasi wisata paling populer, dengan total kunjungan mencapai 770.105 wisatawan. Di posisi kedua dan ketiga, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan menyusul dengan jumlah kunjungan masing-masing 596.683 dan 447.106. Ketiga daerah ini berhasil menarik banyak wisatawan berkat keindahan alam, kekayaan budaya, serta aksesibilitas yang memadai. Sebaliknya, beberapa kabupaten masih mencatat jumlah kunjungan yang relatif rendah. Kabupaten Sabu Raijua, Sumba Tengah, dan Sumba Barat menjadi tiga daerah dengan jumlah wisatawan paling sedikit, masing-masing kurang dari 100.000 kunjungan. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk pengembangan sektor pariwisata di wilayah-wilayah tersebut.

Tabel 5.18 Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota di NTT, 2023

Kabupaten/Kota	2015	2023
Sumba Barat	29	296
Sumba Timur	28	37
Kupang	33	42
Timor Tengah Selatan	16	44
Timor Tengah Utara	9	61
Belu	22	134
Alor	18	39
Lembata	18	73
Flores Timur	28	140
Sikka	30	73
Ende	34	47
Ngada	24	57
Manggarai	16	39
Rote Ndao	18	78
Manggarai Barat	17	73
Sumba Tengah	8	37
Sumba Barat Daya	31	48
Nagekeo	9	43
Manggarai Timur	30	115
Sabu Raijua	17	54
Malaka	4	31
Kota Kupang	19	76
Nusa Tenggara Timur	458	1637

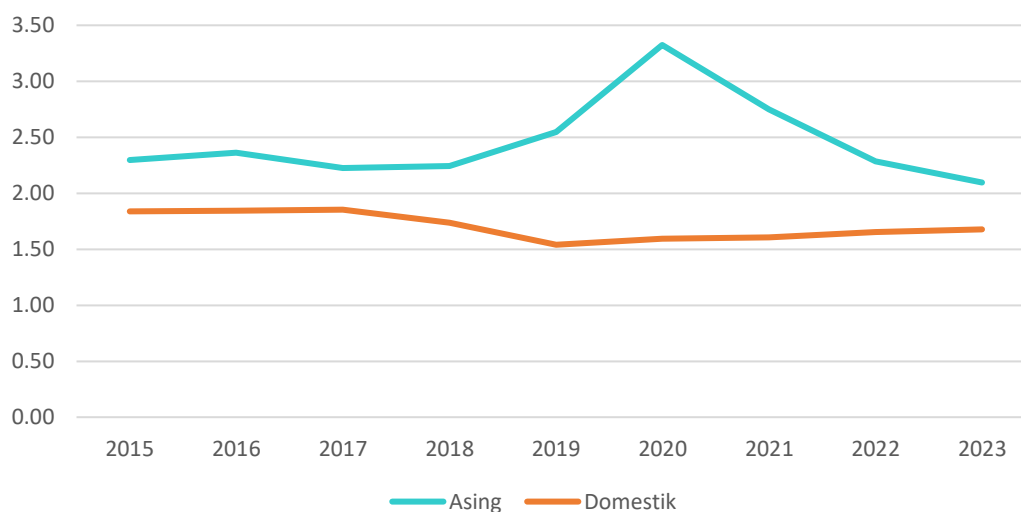
Sumber: BPS (2023)

Jumlah Tamu Hotel domestik dan mancanegara mengalami peningkatan secara perlahan setelah turun drastis di tahun 2020 akibat pandemi. Pariwisata di Provinsi NTT saat ini menunjukkan tren positif, akan tetapi jumlah tamu hotel domestik di tahun 2023 masih belum melampaui puncaknya di tahun 2018. Secara rinci Gambar 5.69 menunjukkan perkembangan jumlah tamu hotel domestik dan mancanegara pada tahun 2014 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa NTT memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai jumlah tamu hotel seperti pada tahun 2018. Potensi ini dapat tercapai kembali dengan strategi kebijakan pariwisata yang dapat mendorong wisatawan mancanegara dan domestik.



Gambar 5.69 Jumlah Tamu Hotel Mancanegara dan Domestik di NTT, 2023 (Jiwa)
Sumber: BPS (2023)

Sementara itu, rata-rata lama menginap wisatawan asing di Provinsi NTT mengalami penurunan yang signifikan sejak pandemi. Rata-rata lama menginap tamu domestik di Provinsi NTT terlihat stagnan pada angka 1,5 – 2 hari. Sementara untuk tamu asing yang awalnya dapat mencapai 3 hari, kini memiliki tren menurun hingga 2 hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan wisatawan untuk tinggal lama masih perlu ditingkatkan. Meningkatnya rata-rata lama menginap merupakan indikator yang penting karena dapat memberi sinyal wisatawan merasa nyaman untuk tinggal di daerah wisata sehingga menghabiskan uang lebih banyak untuk akomodasi, transportasi, dan kegiatan wisata.



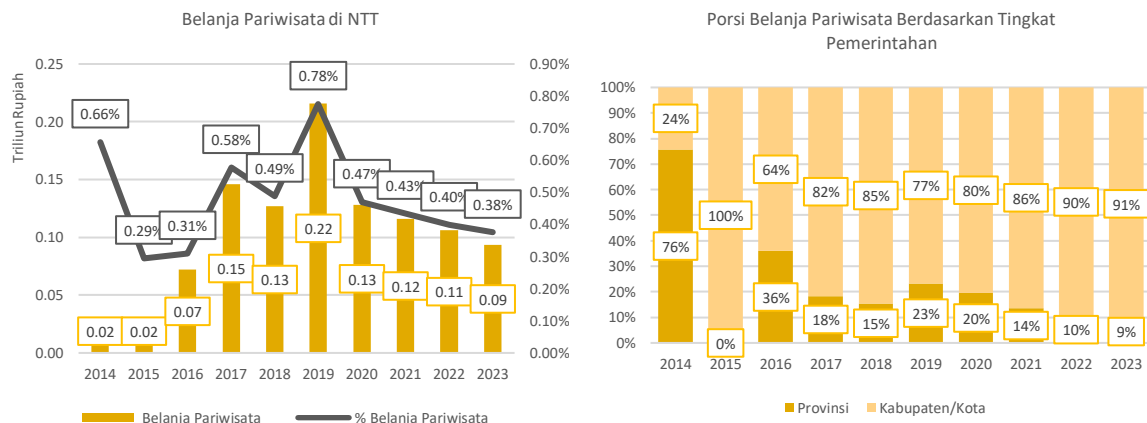
Gambar 5.70 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Hotel Bintang NTT, 2023 (Hari)
Sumber: BPS (2023)

5.5.2 Belanja Pariwisata

Fokus NTT terhadap sektor pariwisata belum dapat tercerminkan dari belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan untuk sektor tersebut (Gambar 5.71). Secara umum, persentase belanja fungsi pariwisata terhadap total belanja pemerintah daerah NTT masih dibawah 1 persen. Karena pandemi covid, proporsinya menurun di tahun 2020 (0,47%) dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,38%. Meningkatkan proporsi belanja fungsi pariwisata secara perlahan menjadi penting mengingat

potensinya yang besar pada sektor pariwisata ketika Provinsi NTT akan bertransisi dari yang awalnya bergantung pada tambang menjadi sektor pertanian.

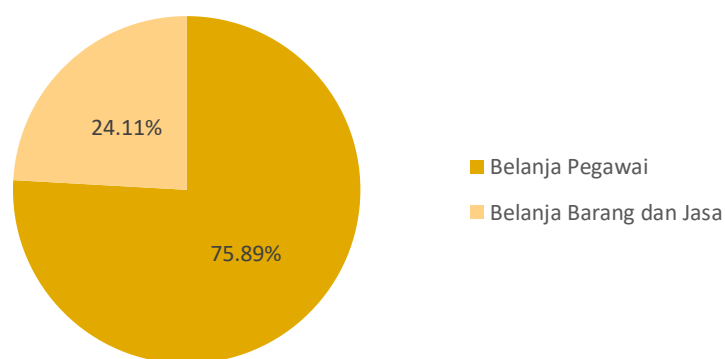
Sementara itu berdasarkan level pemerintahan, belanja pariwisata di NTT masih didominasi oleh belanja pemerintah Kabupaten/Kota. Kontribusi dari pemerintah provinsi masih sangat minim, yaitu 9% di tahun 2023 dari yang awalnya 76% di tahun 2014. Dalam hal ini, kontribusi pemerintah provinsi masih dapat dioptimalkan untuk mendorong produktivitas sektor pariwisata di NTT.



Gambar 5.71 Belanja Program Pariwisata NTT, 2014 - 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Belanja fungsi pariwisata di Provinsi NTT didominasi oleh belanja pegawai (75,89%), sementara sisanya (24,11%) untuk belanja barang dan jasa. Gambar 5.72 menunjukkan proporsi belanja fungsi pariwisata tingkat pemerintah provinsi di NTT. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk sektor pariwisata di NTT masih belum didominasi oleh belanja yang produktif. Belanja pegawai terdiri dari gaji, tunjangan, dan honor ASN. Belanja barang dan jasa dalam konteks fungsi pariwisata dapat berupa pelatihan untuk tenaga kerja pariwisata, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas umum di tempat wisata, promosi dan pemasaran, serta peralatan operasional lainnya.

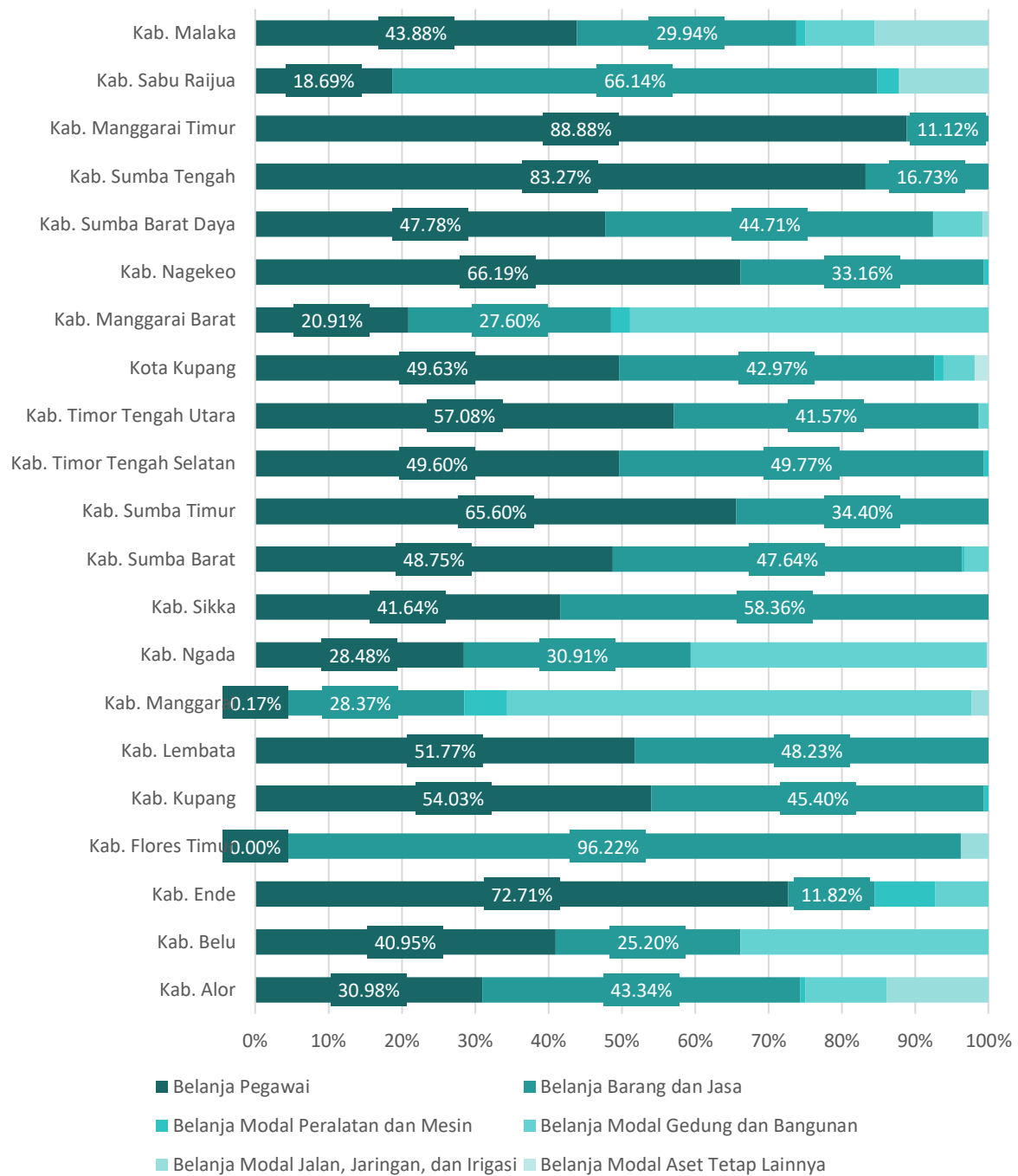


Gambar 5.72 Proporsi Belanja Program Pariwisata Tingkat Provinsi NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

Sama halnya dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan belanja pegawai serta barang dan jasa yang cukup besar untuk fungsi pariwisata (Gambar 5.73). Daerah dengan belanja pegawai yang di atas 70% antara lain Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Ende. Akan tetapi, di beberapa daerah seperti Kabupaten Manggarai,

Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Ngada memiliki persentase belanja modal gedung dan bangunan yang sangat tinggi, yaitu diatas 40% dari total belanja pariwisata.



Gambar 5.73 Proporsi Belanja Program Pariwisata Tingkat Kabupaten/Kota NTT, 2023

Sumber: DJPK (2024), diolah oleh LPEM FEB UI

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1. Kesimpulan

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi berbagai tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Beberapa **tantangan utama** yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan terhadap Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer masih menjadi sumber utama penerimaan daerah, meskipun proporsinya terus mengalami penurunan. Tren ini menunjukkan adanya langkah positif dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Namun, upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perlu terus diperkuat guna memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan operasional daerah serta tetap menjamin daya saing dan iklim investasi daerah.

2. Struktur Ekonomi yang Masih Didominasi Sektor Primer

Perekonomian NTT masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang 27,7% terhadap PDRB pada tahun 2023. Meskipun sektor pertanian terus menjadi kontributor terbesar, namun sektor pengadaan listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi pada tahun yang sama. Upaya diversifikasi ekonomi merupakan salah satu tantangan utama, agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata dan tidak hanya bergantung pada sektor primer.

3. Tantangan dalam Pengembangan Pariwisata

NTT memiliki potensi besar di sektor pariwisata dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang khas. Namun, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurang optimalnya pengelolaan destinasi wisata, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jembatan, serta minimnya petunjuk arah menuju dan di dalam area wisata. Upaya peningkatan fasilitas dan promosi wisata yang lebih terpadu diperlukan agar sektor ini dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.

4. Tantangan di Bidang Kependudukan dan Sosial

Pada aspek tata kelola data kependudukan, NTT menghadapi beberapa tantangan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, antara lain: Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan. Selain itu, permasalahan gizi dan kesehatan, seperti tingginya angka malnutrisi pada anak serta permasalahan kesehatan ibu. Tantangan lainnya adalah dalam bidang pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah yang masih lebih rendah dibandingkan angka nasional, sehingga perlu adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

5. Pengaruh Geografis dan Perubahan Iklim

Secara geografis, NTT berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Benua Australia, yang menyebabkan provinsi ini rentan terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi seperti kekeringan. Dampak perubahan iklim ini berpengaruh pada pola musim tanam, kualitas hasil pertanian, potensi gagal panen, serta stabilitas harga pasar. Oleh karena itu,

diperlukan langkah strategis dalam mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah peluang dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa **potensi utama NTT** meliputi:

1. Sumber Daya Hutan dan Ekosistem Mangrove

NTT memiliki kawasan hutan produksi yang berperan penting dalam menyediakan bahan baku industri berbasis hasil hutan. Selain itu, ekosistem mangrove yang tersebar di berbagai kabupaten berkontribusi terhadap keseimbangan ekologi, perlindungan pesisir, serta mendukung sektor perikanan dan pariwisata.

2. Potensi Besar di Sektor Perikanan dan Kelautan

Dengan garis pantai yang panjang dan sumber daya laut yang melimpah, NTT memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Namun, optimalisasi sektor ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti teknologi pengolahan hasil tangkapan serta infrastruktur logistik. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong pertumbuhan industri perikanan, serta memperkuat ekspor hasil laut.

3. Keunggulan di Sektor Pariwisata

NTT dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, dengan keindahan alam dan budaya yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemulihan sektor pariwisata di NTT terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pengelolaan dan promosi yang lebih baik, sektor ini berpotensi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah

Kualitas perencanaan dan penganggaran di NTT:

1. Secara umum, kualitas perencanaan dan penganggaran di NTT sudah menunjukkan perkembangan positif. Konsistensi antara perencanaan daerah dan strategi kebijakan nasional telah berjalan dengan baik, dilihat dari penerjemahan arah dan strategi kebijakan di nasional dan provinsi. Selain itu, pencapaian indikator makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sesuai dengan target RPJMD 2018–2023. Namun, masih terdapat tantangan struktural yang perlu diselesaikan, seperti optimalisasi kebijakan fiskal, percepatan diversifikasi ekonomi, dan peningkatan tata kelola pembangunan agar manfaatnya lebih merata bagi masyarakat.
2. Kesenjangan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Pemerintah Provinsi NTT telah menunjukkan komitmen dalam mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam perencanaan dan penganggaran. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi, terutama terkait alokasi sumber daya dan faktor sosial budaya yang masih menjadi tantangan, seperti praktik kawin tangkap. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan GEDSI guna memastikan kesetaraan dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat.
3. Kebijakan Berbasis Bukti dan Tata Kelola Data. NTT masih menghadapi kendala dalam penerapan kebijakan berbasis bukti. Meskipun provinsi ini menjadi objek berbagai penelitian dari pemerintah pusat dan lembaga donor, pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan

kebijakan masih terbatas. Selain itu, tata kelola satu data masih dalam tahap perencanaan dan belum diimplementasikan secara optimal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengolahan dan analisis data menjadi langkah penting untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti.

4. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. Sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih menghadapi kendala, terutama dalam keterlambatan penyusunan pedoman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal ini berdampak pada proses perencanaan berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap tahapan perencanaan agar seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Tren pendapatan daerah di Nusa Tenggara Timur:

1. Pendapatan daerah NTT mengalami tren realisasi di bawah target sepanjang 2018–2023, dengan rata-rata hanya mencapai 94,6%. Level terendah terjadi pada 2020, yaitu 89,2%, akibat dampak pandemi Covid-19. Pendapatan daerah NTT didominasi oleh Pendapatan Transfer, dengan proporsi berkisar antara 44,1% hingga 77,0% sepanjang 2014–2023. Ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat menunjukkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam menggali sumber pendapatan asli.
2. PAD di NTT sebagian besar berasal dari Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah (LLPADYS). Pada 2023, Pajak Daerah menyumbang 58,6% dari total PAD, sedangkan LLPADYS berkontribusi sebesar 24,7%. Di tingkat provinsi, Pajak Daerah menjadi sumber utama dengan rata-rata kontribusi 76,8% dalam 2014–2023. Sebaliknya, di tingkat kabupaten/kota, Lain-Lain PAD yang Sah lebih dominan dengan rata-rata kontribusi 46,6%.
3. Rasio PAD terhadap PDRB NTT pada 2023 tercatat sebesar 1,66%, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,98% dan menempati peringkat ketiga tertinggi di Indonesia. Kota Manggarai Barat memiliki rasio PAD terhadap PDRB tertinggi di NTT sebesar 5,85%, sedangkan Kabupaten Sumba Barat Daya mencatatkan rasio terendah sebesar 0,56%.
4. Tingkat kemandirian fiskal NTT yang diukur melalui rasio PAD terhadap total pendapatan masih relatif rendah, dengan rata-rata sekitar 10% sepanjang 2014–2023. Namun, terjadi peningkatan pada 2017 dan 2023, dengan rasio mencapai 12,0% pada 2023. Model estimasi menunjukkan bahwa realisasi PAD NTT sebesar Rp1.427 miliar masih di bawah potensi yang diprediksi sebesar Rp1.476 miliar, mengindikasikan adanya ruang untuk optimalisasi pendapatan daerah.

Berdasarkan **kualitas belanja** dari Nusa Tenggara Timur, dapat dilihat bahwa:

1. Belanja pendidikan di NTT menunjukkan alokasi yang cukup tinggi secara proporsional terhadap total belanja daerah (30,71%), lebih tinggi dari rerata nasional dan delapan provinsi skala. Namun, belanja per kapitanya masih di bawah rerata provinsi skala, menandakan adanya keterbatasan fiskal yang belum sepenuhnya mampu mendukung perluasan layanan pendidikan. Dari sisi efisiensi, analisis DEA mengindikasikan peningkatan efisiensi di banyak kabupaten pada 2023 setelah sempat menurun pada 2022, dengan daerah seperti Kab. Kupang dan Timor Tengah Selatan mencatat perbaikan yang mencolok. Efektivitas belanja juga terlihat dari korelasi positif belanja pegawai dengan rasio murid per guru dan tingkat literasi. Di sisi lain, kesenjangan pendidikan masih cukup besar, terutama antar kelompok pengeluaran dan disabilitas, menunjukkan tantangan pada aspek keadilan.

2. Belanja kesehatan di NTT secara proporsional cukup seimbang (17,85%) dan melampaui rerata nasional dalam hal belanja per kapita, meskipun masih di bawah delapan provinsi skala. Efisiensi teknis menunjukkan tren peningkatan di beberapa kabupaten seperti Kupang dan Timor Tengah Selatan, namun daerah seperti Sumba Tengah dan Sabu Raijua masih mencatat skor efisiensi yang rendah. Belanja pegawai terbukti memiliki kontribusi kuat terhadap peningkatan tenaga kesehatan dan infrastruktur layanan dasar seperti puskesmas dan tempat tidur RS. Belanja ini juga berkontribusi pada peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional. Namun, aspek keadilan masih menjadi catatan penting, dengan ketimpangan yang cukup jelas berdasarkan pendapatan, disabilitas, dan lokasi geografis.
3. Belanja infrastruktur mencerminkan komitmen anggaran yang cukup tinggi dalam nilai per kapita, namun belum memenuhi target minimum belanja infrastruktur secara proporsional (63,60%). Hasil analisis efisiensi DEA menunjukkan adanya perbaikan di beberapa wilayah seperti Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya, meskipun beberapa kabupaten lain masih berada di bawah efisiensi optimal. Sayangnya, efektivitas belanja terhadap akses air bersih dan sanitasi belum terlihat, dengan korelasi negatif dari belanja terhadap output dan outcome infrastruktur. Ketimpangan dalam akses air dan sanitasi antar kelompok pendapatan dan rumah tangga dengan disabilitas memperkuat urgensi perbaikan alokasi dan penyediaan layanan dasar secara merata.
4. Belanja perlindungan sosial merupakan fungsi dengan capaian paling rendah, baik dari sisi persentase terhadap total belanja (0,25%) maupun nilai per kapita (Rp11 ribu), jauh di bawah rerata nasional. Analisis efisiensi teknis menunjukkan adanya peningkatan di beberapa kabupaten seperti Timor Tengah Selatan dan Kupang, tetapi sebagian besar daerah masih belum efisien secara optimal. Korelasi belanja terhadap output perlindungan sosial (pengeluaran makanan) menunjukkan hasil yang beragam, dan belanja ini hampir tidak berpengaruh terhadap outcome berupa prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Dari sisi keadilan, proporsi pengeluaran makanan masih mendominasi struktur konsumsi rumah tangga miskin dan rentan, mengindikasikan bahwa fungsi perlindungan sosial masih belum cukup untuk menopang kebutuhan dasar di kelompok tersebut.

6.2. Rekomendasi

Sektor	Rekomendasi Umum	Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas
Pendidikan	a. Meskipun belanja pendidikan di NTT telah mencapai 30,71% dari total belanja daerah, alokasi per kapita masih lebih rendah dibandingkan rata-rata delapan provinsi skala. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi dalam distribusi anggaran untuk memastikan bahwa belanja pendidikan tidak hanya tinggi dalam persentase, tetapi juga cukup dalam nilai absolut per individu. Pemanfaatan anggaran yang lebih efisien, dengan mempertimbangkan	a. Untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan, perlu ada upaya untuk memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan, dengan fokus pada penyediaan fasilitas yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di wilayah tersebut. b. Peningkatan kompetensi guru perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi tenaga pendidik, serta penerapan standar akreditasi sekolah yang lebih ketat.

Sektor	Rekomendasi Umum	Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas
	kebutuhan spesifik tiap daerah, dapat meningkatkan daya guna belanja pendidikan. b. Hasil analisis Data Envelopment Analysis (DEA) menunjukkan variasi efisiensi teknis antar daerah, dengan beberapa kabupaten/kota mengalami penurunan efisiensi pada 2022 sebelum meningkat kembali pada 2023. Untuk meningkatkan efisiensi, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Pemerintah daerah perlu menerapkan strategi berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya pendidikan guna memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan hasil maksimal. c. Peningkatan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik dan rasio guru-murid yang lebih seimbang menjadi prioritas utama dalam penguatan infrastruktur pendidikan di NTT. Alokasi belanja modal perlu lebih difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga pengajar melalui pelatihan dan insentif yang lebih kompetitif dapat memperbaiki kualitas pendidikan di daerah. d. Terdapat ketimpangan efisiensi teknis antar kabupaten/kota, dengan beberapa daerah menunjukkan nilai efisiensi yang masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, perlu dikembangkan skema insentif berbasis kinerja bagi daerah yang berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan. Skema ini dapat berupa tambahan dana alokasi khusus atau program dukungan teknis bagi daerah dengan capaian efisiensi yang lebih rendah.	c. Memperkuat program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi rumah tangga dengan pengeluaran rendah, serta memastikan bahwa akses pendidikan yang lebih baik dapat dijangkau oleh kelompok-kelompok dengan status sosial ekonomi lebih rendah. d. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan inklusivitas pendidikan bagi rumah tangga dengan penyandang disabilitas, terutama di perkotaan, dengan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas dan program pendidikan yang lebih adaptif. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah pedesaan tentang pentingnya pendidikan juga merupakan langkah strategis untuk memperbaiki rata-rata lama sekolah, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan di NTT.

Sektor	Rekomendasi Umum	Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas
Kesehatan	a. NTT perlu menyesuaikan belanja kesehatan agar tetap sejalan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Meskipun proporsi belanja kesehatan terhadap total belanja daerah relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata delapan provinsi skala, belanja per kapita masih rendah. Peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan program kesehatan yang efektif. b. Efisiensi belanja kesehatan antar kabupaten/kota masih menunjukkan variasi yang besar, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil analisis DEA. Oleh karena itu, kebijakan berbasis bukti yang lebih adaptif diperlukan untuk meningkatkan efektivitas belanja kesehatan di daerah yang kurang efisien. c. Kabupaten/kota dengan efisiensi tinggi dapat menjadi contoh dalam praktik manajemen anggaran kesehatan yang lebih efektif. Pemerintah daerah dapat mendorong berbagi praktik terbaik serta memperkuat kapasitas teknis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja kesehatan secara keseluruhan.	a. Penyediaan infrastruktur dan peralatan kesehatan bagi daerah kepulauan dan terpencil perlu diperhatikan agar efektivitas layanan kesehatan dapat meningkat. b. Sektor swasta dan LSM dapat berperan dalam penyediaan layanan kesehatan melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) guna memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. c. Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan preventif serta pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia perlu diperluas. d. Penguatan program pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal perlu dilakukan guna meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Infrastruktur	a. Untuk meningkatkan kecukupan belanja infrastruktur di Provinsi NTT, diperlukan strategi perencanaan dan pembiayaan yang lebih terarah guna memastikan pencapaian terhadap target minimum belanja infrastruktur. b. Dalam aspek efisiensi, hasil analisis menunjukkan adanya variasi tingkat efisiensi teknis antar kabupaten/kota di NTT. Beberapa daerah telah mencapai peningkatan efisiensi, sementara daerah lain masih	a. Untuk meningkatkan akses infrastruktur di wilayah kepulauan, perlu ada penguatan skema pendanaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan geografis NTT, termasuk mekanisme insentif bagi daerah yang mampu mengelola anggaran infrastrukturnya dengan lebih efisien. b. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis bukti perlu diterapkan secara konsisten untuk memastikan efektivitas belanja serta

Sektor	Rekomendasi Umum	Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas
	menghadapi tantangan dalam pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan anggaran yang lebih efektif, terutama dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, guna meningkatkan efisiensi teknis. c. Penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di tingkat pemerintah daerah juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak yang optimal terhadap peningkatan layanan infrastruktur. d. Dalam hal kecukupan, meskipun telah terjadi peningkatan belanja infrastruktur, alokasinya masih belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar di seluruh wilayah NTT. Standar pelayanan minimal di beberapa sektor infrastruktur, seperti akses jalan, listrik, dan air bersih, masih belum terpenuhi secara merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada pemerataan investasi infrastruktur guna mengatasi kesenjangan yang masih ada.	distribusi sumber daya yang lebih adil antar wilayah di NTT. c. Mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, terutama di daerah yang sulit dijangkau. d. Peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan proyek infrastruktur sangat diperlukan, baik melalui pelatihan teknis maupun adopsi teknologi dalam pemantauan proyek guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. e. Kajian lebih lanjut mengenai strategi peningkatan efisiensi belanja infrastruktur, dengan mempertimbangkan karakteristik demografi dan geografis daerah, dapat mendukung penyusunan kebijakan berbasis data yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Perlindungan Sosial	a. Pemerintah Provinsi NTT perlu meningkatkan alokasi belanja untuk fungsi perlindungan sosial agar lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat rentan di daerah tersebut. Saat ini, rasio belanja perlindungan sosial terhadap total belanja daerah masih jauh di bawah rata-rata nasional dan provinsi pembanding, sehingga perbaikan dalam perencanaan anggaran diperlukan untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. b. Optimalisasi efisiensi belanja perlindungan sosial harus menjadi prioritas, terutama bagi daerah	a. Untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas program perlindungan sosial, perlu ada penguatan infrastruktur layanan sosial, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, dengan memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai serta peningkatan kapasitas tenaga pendamping sosial di wilayah tersebut. b. Peningkatan kompetensi tenaga pendamping dan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola program perlindungan sosial perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi profesi, serta penerapan

Sektor	Rekomendasi Umum	Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan yang Lebih Luas
	dengan skor efisiensi rendah. Kabupaten/kota yang memiliki tingkat efisiensi di bawah rata-rata masih memiliki ruang untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran tanpa harus meningkatkan belanja secara drastis. Strategi seperti perbaikan dalam tata kelola anggaran dan pemanfaatan teknologi dalam distribusi bantuan sosial dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. c. Kabupaten/kota dengan efisiensi perlindungan sosial yang lebih baik, seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang, dapat dijadikan contoh dalam praktik pengelolaan anggaran yang lebih optimal. Pemerintah daerah dapat mendorong pertukaran praktik terbaik antar-kabupaten/kota serta memperkuat kapasitas teknis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan perlindungan sosial untuk meningkatkan efisiensi di seluruh wilayah.	standar akreditasi layanan sosial yang lebih ketat. c. Memperkuat program bantuan sosial berbasis kebutuhan dengan mekanisme penargetan yang lebih akurat, sehingga masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah mendapatkan akses yang lebih baik terhadap bantuan yang tersedia. d. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan inklusivitas program perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia, dengan menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas serta skema bantuan yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. e. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat program perlindungan sosial juga merupakan langkah strategis untuk memastikan partisipasi yang lebih luas, terutama di daerah pedesaan, sehingga penerima manfaat dapat memanfaatkan program dengan lebih optimal. f. Memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis ketenagakerjaan, termasuk program vokasi dan kolaborasi dengan sektor swasta dan industri, agar dapat menciptakan peluang kerja bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap risiko sosial-ekonomi.

6.3. Rekomendasi bagi Mitra Pembangunan

1. Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan dan Penganggaran

Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, mitra pembangunan dapat mendukung peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berbasis data serta responsif terhadap isu gender dan inklusi sosial. Mengingat masih lemahnya integrasi data dalam perencanaan lintas sektor, dukungan juga dibutuhkan dalam pengembangan perangkat analisis kebutuhan kelompok rentan dan pembaruan standar biaya daerah berdasarkan studi biaya riil penyelenggaraan layanan di wilayah kepulauan. Pendampingan teknis dalam pemanfaatan data spasial untuk perencanaan wilayah dan penguatan praktik Musrenbang inklusif juga dapat memperkuat kualitas dokumen perencanaan.

2. Penguatan Basis Pendapatan Asli Daerah

Pada aspek pengelolaan pendapatan, rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan pada transfer pusat menunjukkan perlunya intervensi strategis. Mitra pembangunan dapat membantu melalui penyusunan kajian potensi ekonomi lokal dan identifikasi sektor unggulan berbasis data mikro dan spasial yang dapat memperluas basis pajak dan retribusi. Pendampingan dalam digitalisasi sistem pemungutan, pembentukan basis data wajib pajak yang terintegrasi, serta penguatan tata kelola BUMD lokal juga relevan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran

Dalam pengelolaan belanja, rendahnya efisiensi dan efektivitas anggaran di berbagai sektor menunjukkan pentingnya dukungan dalam pelaksanaan kajian evaluasi belanja berbasis outcome, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Mitra pembangunan dapat mendorong penggunaan hasil analisis belanja responsif gender dan peningkatan kapasitas pengawasan Inspektorat Daerah, termasuk pengembangan audit berbasis risiko. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM perencana dan pengelola anggaran dalam menganalisis efisiensi program serta pemanfaatan sistem pemantauan kinerja berbasis data sangat dibutuhkan untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Statistik Pariwisata 2023*. BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Davies, H. T., Nutley, S. M., & Smith, P. C. (2000). *What Works? Evidence-based Policy and Practice in Public Services*. Policy Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 (KEM & PPKF 2025)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian fiskal regional Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- OECD. (2020). *Building Trust in Public Institutions: Evidence-based Policy-making*. Retrieved from [oecd.org](https://www.oecd.org)
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). *Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2024-2026*. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lampiran

Metode Perhitungan Kualitas Belanja

Analisis kualitas belanja bertujuan untuk menilai empat aspek utama: *adequacy*, *effectivity*, *efficiency*, dan *equity* dalam alokasi dan penggunaan anggaran di empat fungsi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pendekatan ini disusun untuk memastikan bahwa setiap fungsi dapat memberikan manfaat optimal sesuai tujuan kebijakan publik.

- *Adequacy* (Kecukupan)

Adequacy mengacu pada sejauh mana alokasi belanja memenuhi kebutuhan yang ada. Matriks ini menilai apakah anggaran yang dialokasikan sudah cukup untuk mencapai tujuan kebijakan atau memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, seperti kecukupan layanan kesehatan atau pendidikan dasar.

- *Effectivity* (Efektivitas)

Effectivity berfokus pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Matriks ini mengevaluasi sejauh mana belanja menghasilkan dampak yang nyata dan positif, misalnya peningkatan kualitas pendidikan atau pembangunan infrastruktur yang meningkatkan aksesibilitas.

- *Efficiency* (Efisiensi)

Efficiency menggambarkan seberapa optimal sumber daya digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Matriks ini memastikan bahwa belanja dilakukan dengan meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan hasil, seperti memaksimalkan pembangunan fasilitas dengan dana yang tersedia tanpa mengorbankan kualitas.

- *Equity* (Keadilan)

Equity menilai distribusi belanja untuk memastikan kesetaraan akses dan manfaat di berbagai kelompok masyarakat atau wilayah. Matriks ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan, sehingga manfaat belanja dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

Untuk mengevaluasi keempat aspek tersebut, digunakan berbagai metode kuantitatif yang saling melengkapi, yaitu:

- *Data Envelopment Analysis* (DEA)

Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) merupakan pendekatan non-parametrik yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif suatu unit pengambilan keputusan (Decision-Making Unit/DMU) dalam mengubah input menjadi output. Dalam laporan ini, DEA digunakan dengan orientasi output, yang bertujuan untuk memaksimalkan output yang dihasilkan dengan input yang tersedia. Selain itu, asumsi yang digunakan adalah *constant return to scale* (CRS), di mana perubahan proporsional dalam input diasumsikan menghasilkan perubahan proporsional yang sama dalam output.

Input yang dianalisis terdiri dari dua komponen utama, yaitu belanja pegawai dan belanja nonpegawai. Kedua jenis belanja ini merepresentasikan sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial. Data yang digunakan mencakup periode tahun 2021 hingga 2023. Input yang digunakan untuk setiap fungsi ada pada tabel di bawah ini:

No.	Fungsi	Variabel Output (Data Tahun 2023)
1.	Pendidikan	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan dasar Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan menengah Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan tinggi Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan dasar Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan menengah Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan tinggi
2.	Kesehatan	Jumlah perawat Jumlah bidan Jumlah dokter Jumlah puskesmas Tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk
3.	Infrastruktur	Akses air bersih Akses sanitasi
4	Perlindungan Sosial	Pengeluaran Makanan

Dalam penerapan orientasi output, DEA mengevaluasi seberapa besar hasil (output) yang dapat dimaksimalkan dari anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan pendekatan ini, DEA memberikan informasi mengenai fungsi mana yang telah mencapai tingkat efisiensi tertinggi dan mana yang masih memiliki ruang untuk perbaikan. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengoptimalkan alokasi belanja, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memperbaiki ketimpangan efisiensi antar fungsi.

Dalam analisis Data Envelopment Analysis (DEA), skor efisiensi berkisar antara 0 hingga 1, di mana:

- Skor 1 menunjukkan bahwa sebuah *Decision-Making Unit* (DMU) berada pada frontier efisiensi. Ini berarti DMU tersebut dianggap sepenuhnya efisien dalam mengkonversi input menjadi output, sesuai dengan asumsi model yang digunakan (dalam hal ini orientasi output dengan constant return to scale).
- Skor di bawah 1 menunjukkan bahwa DMU tidak efisien, dengan tingkat efisiensi relatif yang lebih rendah dibandingkan DMU lain yang berada di frontier. DMU dengan skor ini memiliki potensi untuk meningkatkan outputnya tanpa perlu menambah input, berdasarkan performa DMU yang efisien.

Sebagai ilustrasi, jika sebuah DMU memiliki skor DEA sebesar 0,8, hal ini menunjukkan bahwa DMU tersebut menghasilkan hanya 80% dari output yang seharusnya dapat dicapai dengan tingkat input yang sama, dibandingkan dengan DMU yang efisien. Skor ini memberikan panduan konkret tentang sejauh mana peningkatan yang dibutuhkan untuk mencapai efisiensi penuh.

- Analisis Regresi

Regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara belanja pegawai dan belanja nonpegawai, sebagai variabel independen, dengan variabel yang mencerminkan aspek efisiensi dan efektivitas, sebagai variabel dependen. Data yang digunakan untuk variabel independen adalah belanja pegawai dan belanja nonpegawai berdasarkan fungsi pemerintahan untuk tahun 2023.

Untuk mengukur efisiensi, variabel dependen adalah output, yang mencerminkan hasil langsung dari pengeluaran pemerintah. Sementara itu, untuk mengukur efektivitas, variabel dependen adalah outcome, yang mencerminkan dampak atau hasil akhir yang dicapai. Rincian lengkap variabel dependen untuk mengukur efisiensi dan efektivitas adalah sebagai berikut:

No.	Fungsi	Variabel Output (Data Tahun 2023)	Variabel Outcome (Data Tahun 2023)
1.	Pendidikan	Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan dasar Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan menengah Jumlah ruang kelas dalam kondisi baik untuk pendidikan tinggi Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan dasar Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan menengah Rasio jumlah murid per guru untuk pendidikan tinggi	Lama sekolah Assessment score Jumlah individu di atas 15 tahun yang bisa membaca
2.	Kesehatan	Jumlah perawat Jumlah bidan Jumlah dokter Jumlah puskesmas Tempat tidur rumah sakit per 1000 penduduk	<i>Infant mortality rate</i> <i>Morbidity rate</i> Persalinan dibantu tenaga kesehatan
3.	Infrastruktur	Akses air bersih Akses sanitasi	Prevalensi stunting
4	Perlindungan Sosial	Pengeluaran Makanan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Model regresi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana belanja pegawai dan belanja nonpegawai memengaruhi pencapaian output dan outcome di setiap fungsi. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Untuk aspek efisiensi:

$$\text{Output} = \beta_0 + \beta_1(\text{Belanja Pegawai}) + \beta_2(\text{Belanja Nonpegawai}) + \epsilon$$

Untuk aspek efektivitas:

$$\text{Outcome} = \alpha_0 + \alpha_1(\text{Belanja Pegawai}) + \alpha_2(\text{Belanja Nonpegawai}) + \mu$$

β_1 dan α_1 merepresentasikan hubungan antara belanja pegawai dengan variabel dependen, sedangkan β_2 dan α_2 merepresentasikan hubungan antara belanja nonpegawai dengan variabel dependen. ϵ dan μ adalah error term yang mencerminkan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Analisis keadilan dilakukan menggunakan basis data SUSENAS tahun 2023 (Maret) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis keadilan dilihat untuk variabel-variabel terkait dengan outcome dari masing-masing fungsi, yaitu:

Fungsi	Indikator	Keterangan
Pendidikan	Penduduk 15 tahun ke atas bisa membaca	Penduduk yang tercatat berusia 15 tahun ke atas dan dilengkapi dengan kemampuan membaca
Pendidikan	Lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (tahun)	Jumlah tahun yang digunakan penduduk untuk mengikuti pendidikan formal
Kesehatan	Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dengan Penolong Persalinan ALH yang Terakhir adalah Tenaga Kesehatan Terlatih	Perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang persalinannya ditangani oleh tenaga kesehatan terampil menurut WHO (tidak termasuk dukun beranak)
Infrastruktur	Rumah Tangga (RT) Memiliki Akses Air Minum yang Layak	RT yang memiliki akses ke sumber air minum yang layak berdasarkan klasifikasi WHO (Leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan. Penggunaan Air kemasan bermerk dan Air isi ulang dapat dikatakan layak jika air yang digunakan untuk MCK sudah layak)
Infrastruktur	Rumah Tangga (RT) Memiliki Akses Sanitasi yang Layak	RT dengan akses sanitasi layak berdasarkan SDG (rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL)
Perlindungan Sosial	Persentase Pengeluaran Makanan Terhadap Total Pengeluaran	Pengeluaran makanan per kapita per bulan dibandingkan dengan pengeluaran total per kapita per bulan

**Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI)**

Alamat : Jl. Salemba Raya 4 Jakarta 10430
Telp: (021) 3143177
Fax: (021) 31934310

Email : lpem@lpem-feui.org; info@lpem-feui.org

Website : <https://www.lpem.org>

Informasi EKI/EFI : Telp: (021) 3143177 Ext. 507, 511
Email: efi@lpem-feui.org

Informasi Diklat : Telp: (021) 3143177 Ext. 620, 621, 622, 623, WA : 0811-9610-3130
Email: diklat@lpem-feui.org

Facebook : LPEM FEB UI

Twitter : @LPEM FEB UI

Instagram : @lpemfebui